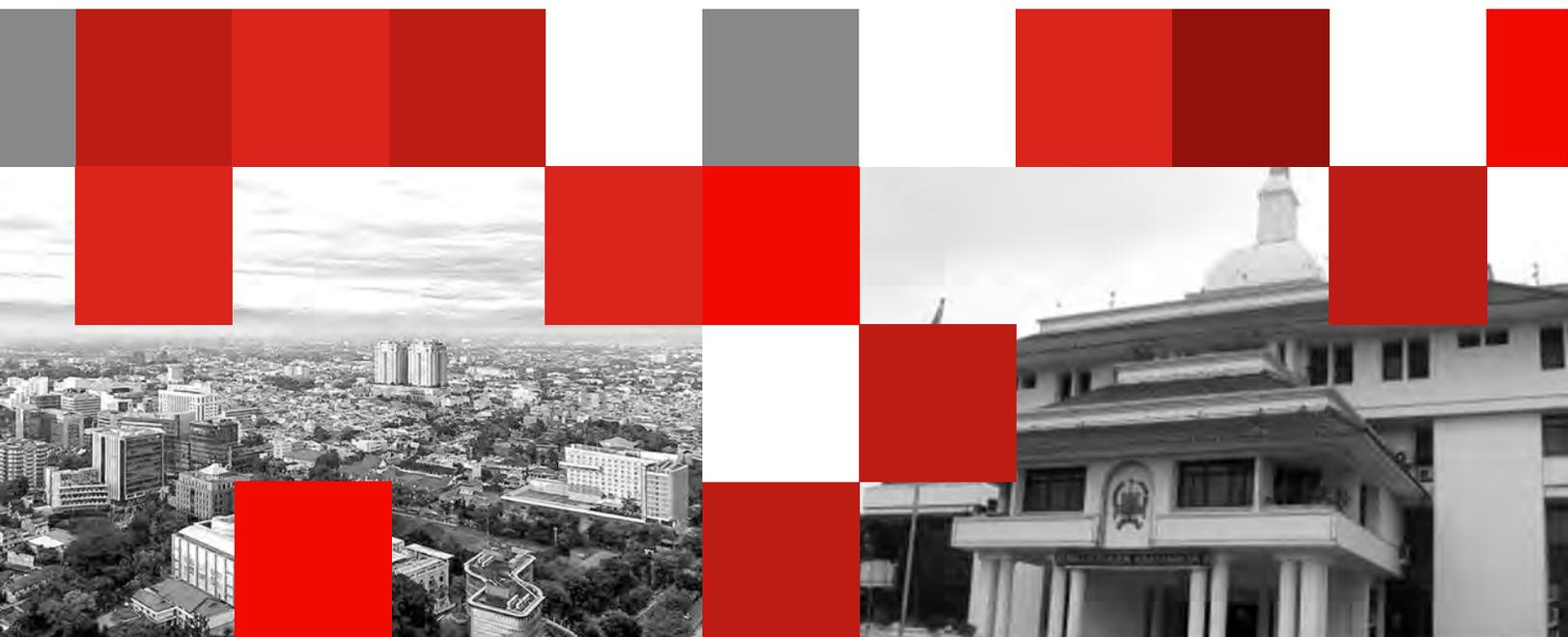




PEMERINTAH KOTA MEDAN

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA MEDAN
TAHUN 2021-2026**





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik,rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penyusunan RPJMD diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021–2026 telah melalui beberapa tahapan sebelum ditetapkan antara lain, Konsultasi Publik, Musrenbang RPJMD, pembahasan bersama Badan Musyawarah DPRD Kota Medan serta konsultasi dan evaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, kami ucapkan terima kasih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota, sekaligus menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif” sangat tergantung kepada peran seluruh pemangku kepentingan, untuk itu mari kita kawal bersama pencapaian target pembangunan RPJMD dengan mengedepankan semangat untuk bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi antar seluruh perangkat daerah dan juga seluruh stake holder pembangunan dan mendorong peran aktif partisipasi masyarakat.

Sistematika RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026, terdiri atas: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Umum Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Strategi, Kebijakan, dan Program Pembangunan; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Rerangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Penutup. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Medan untuk lima tahun ke depan.

Medan, 26 Agustus 2021

WALI KOTA MEDAN
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar hukum.....	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-15
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-16
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografis dan Demografis.....	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-18
2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-50
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-65
2.5 Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2016-2020.....	II-119
2.6 Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).....	II-132
2.7 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-138
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-25
3.3 Kerangka Pendanaan.....	III-32
3.4 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.....	III-40
3.5 Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021-2026.....	III-43
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1 Permasalahan.....	IV-1
4.2 Isu Strategis.....	IV-28
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1 Visi.....	V-1
5.2 Misi.....	V-2
5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	V-5
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	VI-1
6.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	VI-1



6.2	Program Pembangunan Daerah	VI-4
6.3	Arah Kebijakan Kewilayahan	VI-20
6.4	Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Startegis Kota..	VI-20
BAB VII KERANGKA PENDANAAN		VII-1
7.1	Program Perangkat Daerah...	VII-2
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		VIII-1
8.1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan	VIII-1
BAB IX PENUTUP		IX-1



DAFTAR GAMBAR

NOMOR	NAMA GAMBAR	Halaman
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-7
Gambar 1.2	Visi, Misi, Arahkan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan	I-8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kota Medan	II-1
Gambar 2.2	Peta Penggunaan Lahan Kota Medan 2011	II-4
Gambar 2.3	Peta Geologi Kota Medan	II-5
Gambar 2.4	Peta hidrogeologi Kota Medan.....	II-7
Gambar 2.5	Peta DAS Belawan, Deli dan Percut	II-8
Gambar 2.6	Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-11
Gambar 2.7	Peta Distribusi Kepadatan Penduduk Kota Medan	II-13
Gambar 2.8	Komposisi Penduduk Kota Medan Tahun 2020	II-15
Gambar 2.9	Piramida Penduduk Kota Medan Tahun 2020	II-17
Gambar 2.10	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara Dan Kota Medan	II-19
Gambar 2.11	Inflasi Kota Medan, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020	II-21
Gambar 2.12	PDRB Perkapita Kota Medan Menurut Harga Berlaku dan Kostan Tahun 2016-2020	II-23
Gambar 2.13	Indeks Gini Kota Medan, Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2016 2020.....	II-24
Gambar 2.14	Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan	II-25
Gambar 2.15	Angka Kemiskinan Kota Medan Provinsi dan Nasional.....	II-26
Gambar 2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan, Sumatera Utara Dan Nasional.....	II-36
Gambar 2.17	TPT Kota Medan dan Propinsi Sumatera Utara.....	II-40
Gambar 2.18	TPT Kota Medan dan Kota Besar Lainnya... ..	II-41
Gambar 2.19	Nilai Ekspor Melalui Wilayah Kota Medan Menurut Kelompok Barang Ekonomi Tahun 2016-2020.....	II-46
Gambar 2.20	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Kota Medan Tahun 2016-2020...	II-52
Gambar 2.21	Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-63
Gambar 2.22	Grafik Proporsi Ketersediaan dan Pemanfaatn Lahan Permukiman Tahun 2019.....	II-78
Gambar 2.23	Grafik Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kota Medan Tahun 2016 2020.....	II-81
Gambar 3.1	Rata-rata Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Medan	



	Tahun Anggaran 2016-2020	III-11
Gambar 3.2	Rata-rata Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-12
Gambar 3.3	Rata-rata Kontribusi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-13
Gambar 3.4	Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-14
Gambar 3.5	Belanja Operasi Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-15
Gambar 3.6	Belanja Modal Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-16
Gambar 3.7	Belanja Tak Terduga Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-16
Gambar 3.8	Belanja Transfer Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-17
Gambar 3.9	Pembiayaan Tahun Anggaran 2016-2020	III-18
Gambar 4.1	Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2016-2020	IV-26
Gambar 4.2	Perbandingan ICOR Kota Medan dan Kota Besar Lainnya di Indonesia	IV-27
Gambar 4.3	Sustainable Development Goals (SDG's)	IV-28
Gambar 8.1	Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN++ Tahun 2020-2026	VIII-4
Gambar 8.2	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020-2026.....	VIII-5



DAFTAR TABEL

NOMOR	NAMA TABEL	Halaman
Tabel 1.1	Keselarasn RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024 ..	I-9
Tabel 1.2	Keselarasn RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024.....	I-10
Tabel 1.3	Keselarasn RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.....	I-12
Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan.	II-2
Tabel 2.2	Pembagian Zona Menurut Kandungan Air Tanahnya	II-7
Tabel 2.3	Persentase Kota Medan dalam DAS	II-8
Tabel 2.4	Kejadian Banjir Kota Medan	II-9
Tabel 2.5	Jumlah,Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-11
Tabel 2.6	Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2020.....	II-12
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umumr Kota Medan Tahun 2020	II-15
Tabel 2.8	PDRB Seri Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	II-16
Tabel 2.9	PDRB Seri Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha.....	II-17
Tabel 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tahun 2016-2020	II-18
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara Dan Kota Medan.....	II-19
Tabel 2.12	Inflasi kota Medan Menurut Komoditi Tahun 2016-2020.....	II-20
Tabel 2.13	PDRB Perkapita Kota Medan Menurut Harga Berlaku dan konstan Tahun 2016-2020.....	II-22
Tabel 2.14	Indeks Gini Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-24
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2016-2020	II-25
Tabel 2.16	Program JKN Kota Medan Tahun 2015-2019	II-27
Tabel 2.17	Program Raskin Tahun 2015-2019.....	II-28
Tabel 2.18	Program Peningkatan Keterampilan Untuk UMKM dan Realisasi Pembiayaan di Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-28
Tabel 2.19	Program Pendidikan Bagi Panti Asuhan di PAUD di Kota Medan Tahun 2015-2019	II-30
Tabel 2.20	Realisasi Jumlah RTSM dan Jumlah Dana Bantuan PKH di Kota Medan Tahun 2015-2019	II-32
Tabel 2.21	Program Pembangunan MCK, Penyediaan Air Bersih dan Sistem	



	Sambungan Air Limbah di Kota Medan Tahun 2015-2018.....	II-32
Tabel 2.22	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan Tahun 2016-2020 .	II-35
Tabel 2.23	Indeks Pembangunan Manusia, indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Medan Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2.24	Angka Melek Huruf Kota Medan Tahun 2015-2020 (persen).....	II-37
Tabel 2.25	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Medan Tahun 2016 – 2020.....	II-37
Tabel 2.26	Angka Harapan Hidup Kota Medan Tahun 2015 – 2020... ..	II-38
Tabel 2.27	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Pelayanan di Kota Medan Tahun 2015-2020... ..	II-39
Tabel 2.28	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Medan Tahun 2016-2020... ..	II-39
Tabel 2.29	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Medan Tahun 2016-2020....	II-40
Tabel 2.30	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kota Medan Tahun 2016-2020... ..	II-41
Tabel 2.31	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Medan Tahun 2016-2020... ..	II-42
Tabel 2.32	Ketersediaan Pangan Utama di Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-42
Tabel 2.33	Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2016-2020... ..	II-43
Tabel 2.34	Nilai Ekspor Melalui Wilayah Kota Medan Menurut Kelompok Barang Ekonomi Tahun 2016-2020... ..	II-44
Tabel 2.35	Angka Partisipasi Kasar di Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-47
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Murni di Kota Medan tahun 2016-2020... ..	II-47
Tabel 2.37	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Medan Tahun 2016 2020.....	II-48
Tabel 2.38	Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	II-48
Tabel 2.39	Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Medan Tahun 2016-2020 (Jiwa)..	II-49
Tabel 2.40	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Kota Medan Tahun 2016-2020... ..	II-52
Tabel 2.41	Jumlah Jenis Tindakan Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2016-2020... ..	II-53
Tabel 2.42	Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik Kota Medan Tahun 2016-2020... ..	II-54
Tabel II.43	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kota Medan Tahun 2016 2020	II-54
Tabel II.44	Jumlah Rumah Layak Huni di Kota Medan Tahun 2016-2020... ..	II-55
Tabel II.45	Kawasan Kumuh Di Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-55
Tabel II.46	Nilai Investasi di Kota Medan Tahun 2016-2020... ..	II-59
Tabel II.47	Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Medan Tahun 2016-2020... ..	II-62



Tabel II.48	Rasio Ketergantungan di Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-64
Tabel II.49	Rasio Ketergantungan Muda dan Tua Kota Medan Tahun 2016-2020...	II-65
Tabel II.50	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-67
Tabel II.51	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020...	II-68
Tabel II.52	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020... ..	II-69
Tabel 2.53	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020... ..	II-70
Tabel 2.54	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah.....	II-70
Tabel 2.55	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020... ..	II-71
Tabel 2.56	Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Medan Pada Tahun 2016 -2020...	II-74
Tabel 2.57	Jumlah Kematian Bayi di Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-75
Tabel 2.58	Jumlah Kematian Ibu di Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-75
Tabel 2.59	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020... ..	II-76
Tabel 2.60	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.61	Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2020.....	II-79
Tabel 2.62	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.63	Jumlah Pelanggaran Perda/Perwal Kota Medan Tahun 2016-2020....	II-80
Tabel 2.64	Jumlah Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kota Medan Tahun 2016 2020.....	II-81
Tabel 2.65	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020... ..	II-82
Tabel 2.66	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020... ..	II-84
Tabel 2.67	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020....	II-85
Tabel 2.68	Analisis Ketersediaan Beras di Sumatera Utara Terhadap Kebutuhan Beras Kota Medan Tahun 2020.....	II-87



Tabel 2.69	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-88
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.....	II-89
Tabel 2.71	Jumlah Izin lingkungan yang Diterbitkan oleh DLH Kota Medan	II-89
Tabel 2.72	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan oleh DLH Kota Medan (2016-2020).....	II-90
Tabel 2.73	Kegiatan Pemulihan Pencemaran Lingkungan oleh DLH Medan (2016-2020).....	II-90
Tabel 2.74	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-91
Tabel 2.75	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-97
Tabel 2.76	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020...	II-98
Tabel 2.77	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020.....	II-99
Tabel 2.78	Perlengkapan Prasarana Jalan Kota Medan Tahun 2020.....	II-100
Tabel 2.79	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-100
Tabel 2.80	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-102
Tabel 2.81	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.82	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan Olahraga Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.83	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-105
Tabel 2.84	Realisasi Capaian Indikator kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-106
Tabel 2.85	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-107
Tabel 2.86	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-108
Tabel 2.87	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-109



Tabel 2.88	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-110
Tabel 2.89	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-112
Tabel 2.90	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-113
Tabel 2.91	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 2020.....	II-114
Tabel 2.92	Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2016-2020.....	II-114
Tabel 2.93	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2016-2020	II-115
Tabel 2.94	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2016-2020	II-116
Tabel 2.95	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020	II-117
Tabel 2.96	Cakupan Penelitian Badan Pengembangan dan Penelitian Kota Medan Tahun 2017-2019	II-118
Tabel 2.97	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sekretaris DPRD Kota Medan Tahun 2016-2020	II-119
Tabel 2.98	Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2019... ..	II-122
Tabel 2.99	Pencapaian Program SDGs 2 Penghapusan Kemiskinan Dan Kelaparan Januari-Desember Tahun 2016-2019	II-134
Tabel 2.100	Target dan Realisasi Capaian SPM Kota Medan Tahun 2020.....	II-138
Tabel 2.101	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan Sosial Kota Medan Tahun 2010-2025	II-141
Tabel 2.102	Capain Indikator Dalam RPJMD sampai Periode RPJMD Ke-3 (2016-2020)	II-148
Tabel 2.103	Indikator Kinerja Daerah RPJMDTahun 2016-2020	II-150
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah	III-5
Tabel 3.2	Target Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 Kota Medan	III-8
Tabel 3.3	Perkembangan Neraca Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020.....	III-20
Tabel 3.4	Analisis Rasio Keuangan Tahun 2015-2019 Kota Medan.....	III-23
Tabel 3.5	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Medan Tahun 2016-2019	III-27



Tabel 3.6	Defisit Riil Anggaran Kota Medan Tahun 2016-2020.....	III-29
Tabel 3.7	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Kota Medan Tahun 2016-2020.....	III-31
Tabel 3.8	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Medan 2021-2026.....	III-34
Tabel 3.9	Proyeksi Kapasitas Riil Kota Medan Tahun 2021-2026.....	III-38
Tabel 3.10	Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak	III-39
Tabel 4.1	Perkembangan ICOR Kota Medan Tahun 2015-2019	IV-26
Tabel 4.2	Capaian Indikator TPB di Kota Medan.....	IV-30
Tabel 4.3	Persentase Capaian TPB Kota Medan.....	IV-31
Tabel 4.4	Matriks Hubungan Isu-isu Strategis Nasional, Provinsi, Kota dan KLHS	IV-36
Tabel 4.5	Kebijakan Terkait RPJMD Propinsi dan Deli Serdang.....	IV-38
Tabel 5.1	Keselarasn Misi Pada RPJPD Kota Medan dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026	V-3
Tabel 5.2	Keselarasn Misi Pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 Dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026	V-4
Tabel 7.1	Keselarasn Program Pembangunan kota Medan dalam Mendukung Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara	VII-4
Tabel 8.1	Proyeksi Indikator makro Pembangunan Kota Medan 2021-2026.....	VIII-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses perencanaan pembangunan dilakukan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang. Tahapan proses akan melalui berbagai rangkaian pilihan kebijakan, yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki daerah selama jangka waktu tertentu. Dalam rangka upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, maka proses perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial. Pelaksanaan pembangunan Kota Medan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2020 secara umum menunjukkan berbagai capaian yang baik pada berbagai bidang. Capaian tersebut merupakan modal yang sangat bermanfaat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan periode selanjutnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan suatu daerah.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini mencakup Tahapan IV Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2006-2025, dengan fokus pembangunan yaitu mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan asri serta mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius yang didukung oleh terpeliharanya kerja sama yang baik dan harmonis antar lembaga dan antar wilayah, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan iptek, meningkatnya kondisi infrastruktur, meningkatnya sumber penerimaan daerah, dan pendapatan masyarakat, secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.



Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka arahan dari dokumen RPJPD sangat penting untuk menjaga kesinambungan antar periode. RPJPD Tahun 2006-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah memuat rumusan indikatif arah prioritas kebijakan.

Merujuk kepada RPJPD tahun 2006-2025 dapat dijelaskan bahwa dokumen RPJMD periode 2021-2026 ini merupakan tahapan ke-4 dimana arah kebijakan pembangunan pada tahap ini adalah “Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius”. Pembangunan pada periode ini diarahkan untuk melanjutkan pembangunan pada periode sebelumnya serta diharapkan akan tumbuh dan berkembangnya pemahaman dan kehidupan beragama di masyarakat yang saling menghargai di antara para penganutnya. Dengan demikian akan tercipta suasana terjaminnya keamanan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial serta terpenuhinya kondisi lingkungan hidup bagi masyarakat.

Untuk menciptakan suasana Kota Medan yang aman, nyaman dan religius, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mampu memenuhi dan menumbuhkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti lapangan kerja, daya beli barang/jasa termasuk jaminan pasar atas produk-produk tersebut. Terjadinya peningkatan kriminalisme dan berbagai gangguan sosial lainnya yang begitu meresahkan masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari faktor tingkat pengangguran, yang tidak hanya menghilangkan pendapatan kelompok masyarakat yang menganggur, tetapi juga berpotensi meruntuhkan sistem nilai sosial dan nilai individu orang-orang yang mengalaminya. Dengan demikian pembangunan ekonomi dan berbagai infrastruktur pendukungnya tidak dapat diabaikan, karena pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pertumbuhan investasi merupakan strategi yang efektif dalam penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dengan terpilihnya Walikota Medan dan Wakil Walikota Medan masa bakti Tahun 2021-2026, yaitu Muhammad Bobby Afif Nasution SE, MM sebagai Walikota Medan dan Aulia Rachman SE sebagai Wakil Walikota Medan yang telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Edy Rahmayadi di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.



Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Medan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD untuk periode dari tahun 2021 hingga tahun 2024 sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, mencakup agenda Pembangunan periode 2021-2026 dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan pada RPJPD Pemko Medan Tahun 2006-2025, hasil evaluasi RPJMD periode 2016-2020 dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat umum. Perumusan dan arah kebijakan serta strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan tahap ke IV RPJPD Kota Medan Tahun 2005-2025 serta mempedomani RPJMN tahun 2019-2024, RPJMD Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 serta hasil evaluasi terhadap RPJMD Periode sebelumnya dan disusun berdasarkan pendekatan :

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah Terpilih. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD;
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut;
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) RPJMD.



1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini, didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199;
25. Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10;
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

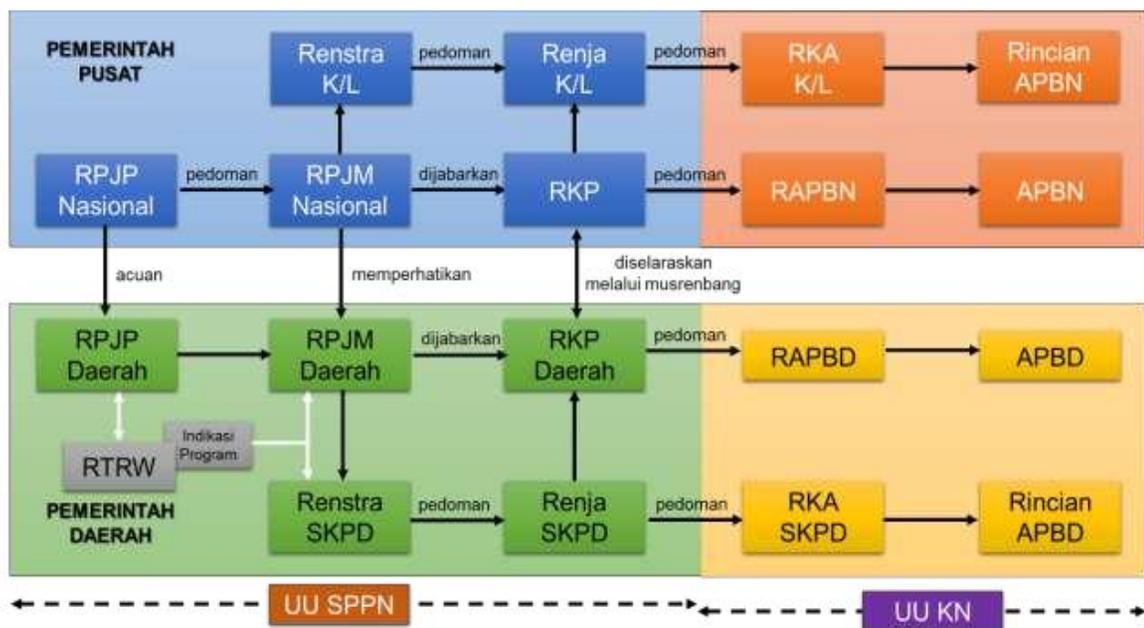


29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
33. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
38. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
39. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;
41. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031;
42. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
43. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus saling terintegrasi dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJMD Kota Medan 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan dimana penyusunannya harus berpedoman pada RPJPD Kota Medan 2006-2025 sekaligus memperhatikan RPJM Nasional. Selanjutnya RPJMD dijabarkan menjadi RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan dan mengacu pada RKP serta sebagai pedoman Renstra OPD. Hubungan antar dokumen perencanaan sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023. Selain itu, sebagaimana pasal 12 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RPJMD juga berpedoman pada RTRW sehingga RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2025 berpedoman pada RTRW Kota Medan 2011-2031, RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037, RTRW Nasional 2008-2028.

1.3.1 Hubungan RPJMD Dengan RPJMN

Hubungan Antara RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 Terdapat 4 (empat) lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi Isu Strategis yang terkait dengan kota Medan, sebagai berikut; 1. Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

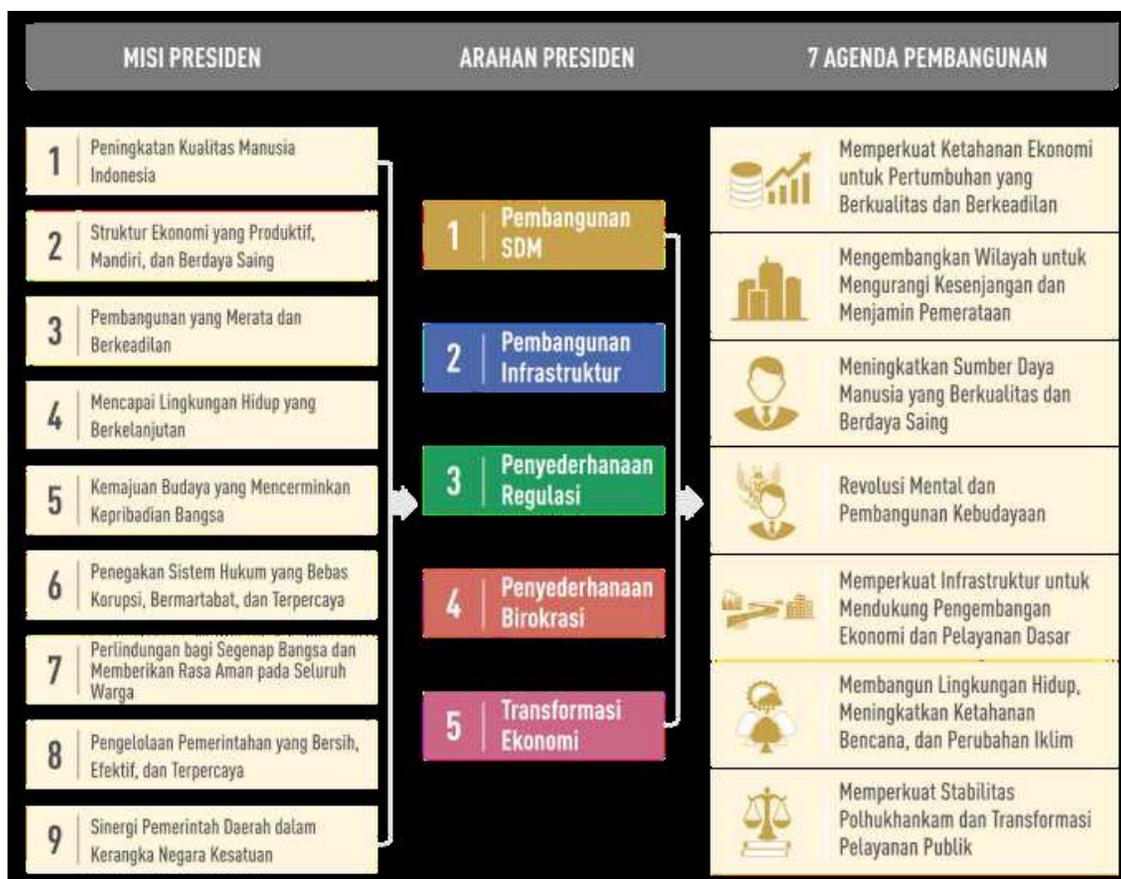


Tahun 2020- 2024; 2. Proyek Prioritas Strategis (Major Project) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 3. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan 4. Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pada lampiran 1 Perpres No. 18 tahun 2020 tentang Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 perlu ditelaah Visi, Misi, Arah Presiden dan 7 Agenda Pembangunan sebagai acuan dalam merumuskan isu strategis Kota Medan tahun 2021-2026.

VISI RPJMN TAHUN 2020-2024

Sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dijabarkan dalam beberapa misi dan ditindaklanjuti dengan Arah Presiden serta 7 Agendan pembangunan sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1.2
Visi, Misi, Arah Presiden dan 7 Agenda Pembangunan



Mengacu pada gambar di atas, maka dapat ditarik benang merah Arah Pembangunan Nasional yang dapat dijadikan sebagai *guidance* bagi perumusan arah Pembangunan Kota Medan yang sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun hubungan antara



RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel 1.1 dibawah ini ;

Tabel 1.1
KESELARASAN RPJMD KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026 DAN
RPJMN TAHUN 2020-2024

NO	MISI RPJMD KOTA MEDAN 2021-2026	MISI RPJMN 2020-2024
1	Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
2	Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
3	Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
		Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
4	Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
5	Mewujudkan kenyamanan dan iklim Kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
6	Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
7	Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
		Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

1.3.2 Hubungan RPJMD Kota Medan dengan RPJMD Propinsi Sumatera Utara

Dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 diintegrasikan, disinkronisasikan, dan disinergikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Tahun 2019-2023. Keterkaitan kedua dokumen tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselarasan dari tujuan pembangunan Kota Medan untuk turut serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Keterkaitan tersebut dalam diagram sebagai berikut:



Tabel 1.2
KESELARASAN RPJMD KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026 DAN
RPJMD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020-2024

No	MISI RPJMD Propinsi Sumatera Utara 2019-2023	No	MISI RPJMD Kota Medan 2021-2026
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga - harga yang terjangkau.	1	Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
		4	Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai	3	Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
		7	Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri	2	Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.	5	Mewujudkan kenyamanan dan iklim Kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.	6	Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

Disamping mempedomani RPJMD Propinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024, dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037. Hal ini dimaksudkan untuk menjadga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang



serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama dan diharapkan akan lebih optimal dalam merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Adapun substansi dari RTRW Provinsi Sumatera Utara, meliputi antara lain:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi.
2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem perkotaan, rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, serta rencana sistem jaringan prasarana lingkungan.
3. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya.
4. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi.
5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
6. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahanperaturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

1.3.3 RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota sekitarnya

Dokumen RPJMD Kota Medan juga telah diintegrasikan, disinkronisasikan, dan disinergikan dengan RPJMD kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kota Medan yaitu Kabupaten Deli Serdang. Keterkaitan dengan RPJMD daerah sekitar menjadi penting utamanya untuk menjamin keselarasan pembangunan daerah dalam rangka mendukung ketercapaian arah pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara. Disamping itu dapat membuka peluang untuk menciptakan kerja sama antar daerah. Penjelasan hubungan tersebut tampak dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3
KESELARASAN RPJMD KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026 DAN
RPJMD KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2019-2024

No	MISI RPJMD KOTA MEDAN 2021-2026	No	MISI RPJMD KAB DELI SERDANG 2019-2024
1	Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.	4	Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.



2	Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua	1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3	Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata	5	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih, berwibawa dan bertanggung jawab
4	Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM	3	Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan.
5	Mewujudkan kenyamanan dan iklim Kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat	4	Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
	Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya	2	Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
7	Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air	4	Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Medan dan RTRW Kota Medan

Penyusunan RPJMD Kota Medan berpedoman pada RTRW Kota Medan yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi:



1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah di Kota Medan
2. Rencana struktur ruang wilayah Kota Medan yang meliputi sistem pusat kegiatan sistem jaringan prasarana kawasan
3. Rencana pola ruang wilayah Kota Medan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya
4. Penetapan kawasan strategis kota
5. Arahan pemanfaatan dan dan penegndalian ruang wilayah Kota Medan

1.3.5 Hubungan RPJMD Kota Medan dengan RPJPD Kota Medan

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Kepala Daerah. Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Medan Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kota Medan dengan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, sedangkan visi dan misi Perangkat Daerah mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

1.3.7 Hubungan RPJMD Kota Medan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Medan yang memuat prioritas program dan kegiatan



dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Medan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Medan, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, serta RPJM Nasional. Harus berpedoman pada RPJMD mengandung makna bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD. Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

1.3.8 RPJMD Kota Medan dengan KLHS RPJMD

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD, bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis harus menjadi muatan dalam penyusunan RPJMD. Hal ini merupakan salah satu instrumen yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program dalam RPJMD.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah dan melibatkan seluruh stakeholder mewujudkan visi dan misi serta program pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga dapat bersinergi dan berkolaborasi oleh seluruh pelaku pembangunan secara holistik, tematik, integratif, dan spasial.

1.4.2. Tujuan

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan tujuan :

- a. RPJMD sebagai implementasi janji politik walikota yang telah disampaikan kepada masyarakat Kota Medan pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan serentak Tahun 2020.
- b. RPJMD Kota Medan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran kebijakan dan strategi pembangunan 5 (lima) tahun sesuai visi dan misi Kepala Daerah dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.



- c. RPJMD kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Medan, Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap perangkat Daerah. Renstra perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Kota Medan harus konsisten dan sinergis dengan Dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
- d. RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan Pemerintah kota Medan yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan, selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- e. RPJMD Kota Medan sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja kepala Daerah selama periode 2021-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini memuat gambaran umum Kota Medan meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini memuat capaian kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan keuangan daerah

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis dalam proses pembangunan di Kota Medan

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Medan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Medan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kota Medan dalam jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

BAB X PENUTUP



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pemberian otonomi yang nyata dan luas kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak terlepas dari pengaruh kondisi daerah.

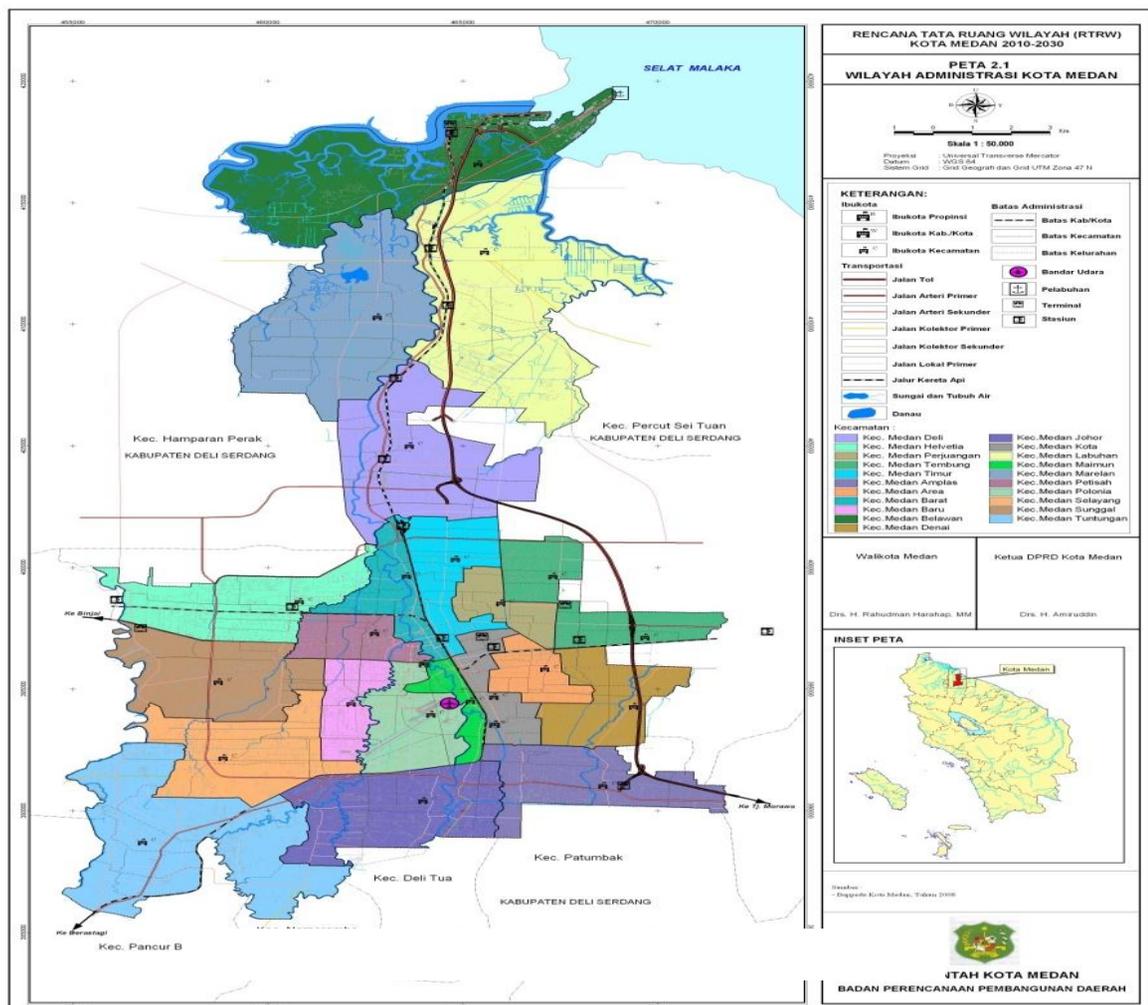
2.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Wilayah Administrasi

Kota Medan merupakan salah satu dari Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara yang terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Luas wilayah Kota Medan adalah sebesar 26.510 Ha. Luas wilayah Kota Medan ini relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Bentuk wilayah administratif Kota Medan yang sangat ramping di tengah menyebabkan terhambatnya pengembangan perkotaan dan penyediaan sarana prasarana kota.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Medan





Kota Medan yang terletak pada posisi 3°30' - 3°43' Lintang Utara dan 98°35'-98°44' Bujur Timur secara administratif, berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang pada bagian selatan, timur dan barat. Sementara bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka. Posisi ini dapat dikatakan strategis mengingat Selat Malaka merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia dan Kota Medan dapat menjadi gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri. Keberadaan Kota Medan juga cukup strategis karena berdekatan dan mempunyai aksesibilitas transportasi yang baik dengan kota – kota besar dalam di luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Selain itu, Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA). Potensi ini menjadikan Kota Medan dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai pusat distribusi ekonomi baik dalam skala regional maupun nasional.

Dari Tabel 2.1 dapat terlihat bahwasanya untuk kecamatan – kecamatan yang berada di bagian utara wilayah Kota Medan seperti Kecamatan Medan Labuhan, Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Deli merupakan wilayah kecamatan terluas. Hal ini tentunya perlu menjadi pertimbangan bagi potensi pengembangan wilayah Kota Medan pada masa yang akan datang untuk mewujudkan pembangunan kawasan perkotaan yang merata secara berimbang. Hal ini mengingat pada wilayah - wilayah tersebut masih punya alokasi lahan yang cukup memadai, namun harus disertai dengan penyediaan infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman yang memadai.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase	Kelurahan	Lingkungan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Medan Tuntungan	2.068	7,80	9	75
2.	Medan Johor	1.458	5,50	6	81
3.	Medan Amplas	1.119	4,22	7	77
4.	Medan Denai	905	3,41	6	82
5.	Medan Area	552	2,08	12	172
6.	Medan Kota	584	2,20	12	146
7.	Medan Maimun	298	1,12	6	66
8.	Medan Polonia	901	3,40	5	46
9.	Medan Baru	584	2,20	6	64
10.	Medan Selayang	1.281	4,83	6	63
11.	Medan Sunggal	1.544	5,82	6	88
12.	Medan Helvetia	1.316	4,96	7	88
13.	Medan Petisah	533	2,01	7	69
14.	Medan Barat	682	2,57	6	98
15.	Medan Timur	776	2,93	11	128
16.	Medan Perjuangan	409	1,54	9	128
17.	Medan Tembung	799	3,01	7	95
18.	Medan Deli	2.084	7,86	6	105
19.	Medan Labuhan	3.667	13,83	6	99
20.	Medan Marelan	2.382	8,99	5	88
21.	Medan Belawan	2.625	9,90	6	143
Jumlah		26.510	100.00	151	2.001



2.1.1.2. Kondisi Topografi dan Guna Lahan

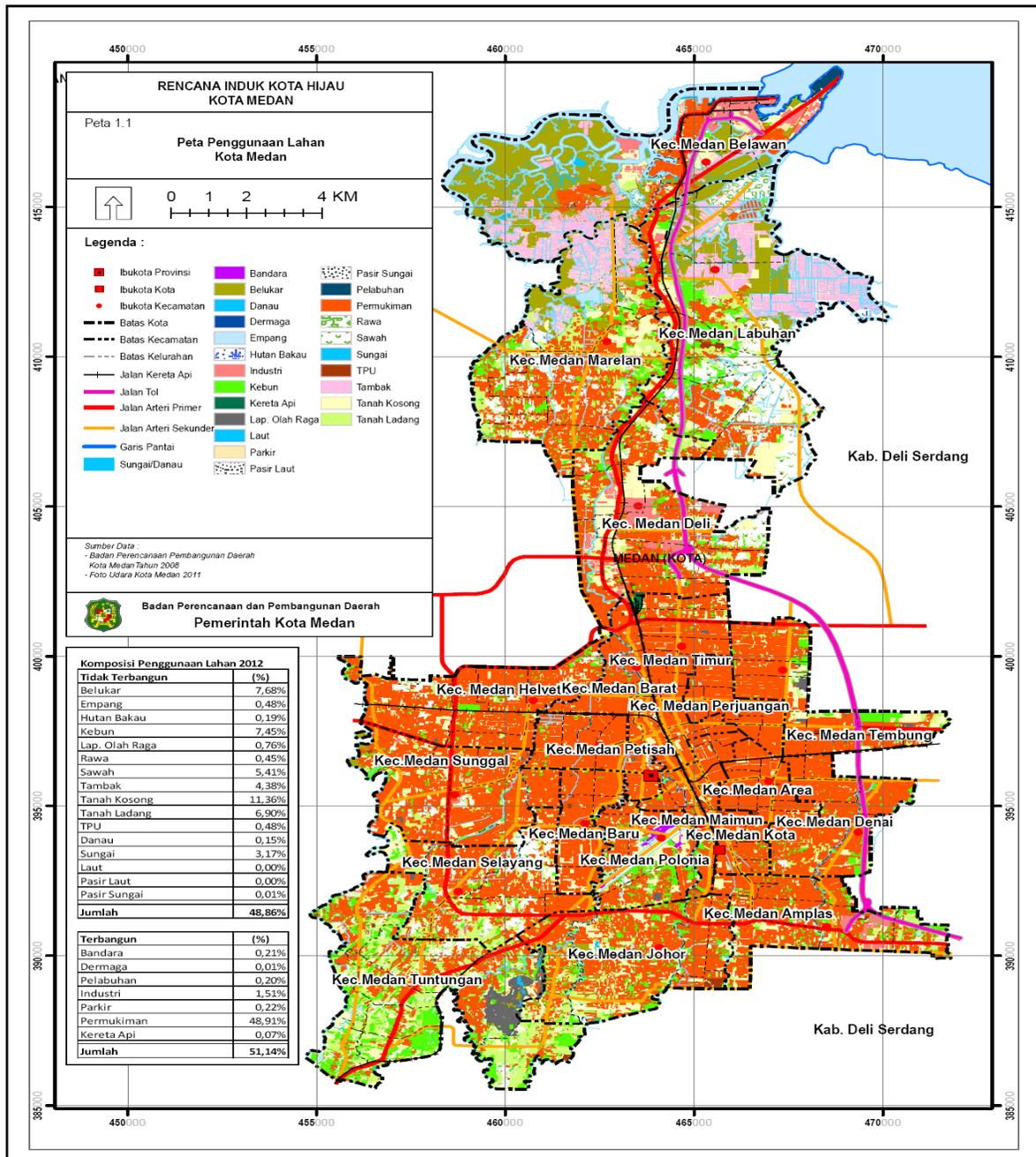
Kondisi topografi wilayah studi secara umum adalah landai dari arah Selatan ke Utara dengan kemiringan sekitar 2%, kecuali di beberapa wilayah bagian selatan wilayah Kota Medan yang mempunyai kemiringan lahan 5 – 7 % . Elevasi Kota Medan adalah bervariasi dari 0 m di Utara sampai +50 m di Selatan. Kondisi ini sebetulnya memudahkan bagi pengembangan kawasan perkotaan karena mempunyai kontur yang relatif baik untuk peningkatan dan perluasan penyediaan infrastruktur kawasan perkotaan dan kawasan permukiman.

Beberapa dekade terakhir perkembangan fisik wilayah Kota Medan ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Kota Medan. Pembangunan fisik di Kota Medan terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan perumahan, gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian di Kota Medan.

Untuk penggunaan lahan di wilayah Kota Medan berdasarkan hasil foto udara tahun 2011 didominasi oleh permukiman (48,91%) yang tersebar di sebagian besar di bagian tengah dan selatan wilayah Kota Medan. Total lahan terbangun di wilayah Kota Medan sebesar 51,14% dan yang belum terbangun sebesar 48,86% yang terdiri sebagian besar berupa tanah kosong (11,36%), belukar (7,68%), dan kebun (7,45%). Kondisi ini diyakini juga sudah berubah pada saat ini dengan perkembangan kota yang cenderung mengarah ke bagian utara wilayah Kota Medan. Untuk kawasan selatan wilayah Kota Medan juga harus dapat mengendalikan perkembangan kota, mengingat di wilayah tersebut merupakan daerah yang diharapkan menjadi daerah resapan wilayah Kota Medan. Hal ini juga sedianya disertai dengan mendorong pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan dengan konsep bangunan vertikal.



Gambar 2.2 Peta Penggunaan Lahan Kota Medan Tahun 2011



2.1.1.3. Kondisi Geologi

Secara umum kondisi geologi kawasan Medan dan sekitarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa grup antara lain: 1) grup Aluvial, 2) grup Marin, 3) grup Vulkan, 4) grup Tufa Masam beserta satuan lahan/unit lahan sesuai dengan proses geomorfologinya susunan geologi dan keadaan iklim dominan, seperti penjelasan di bawah ini :

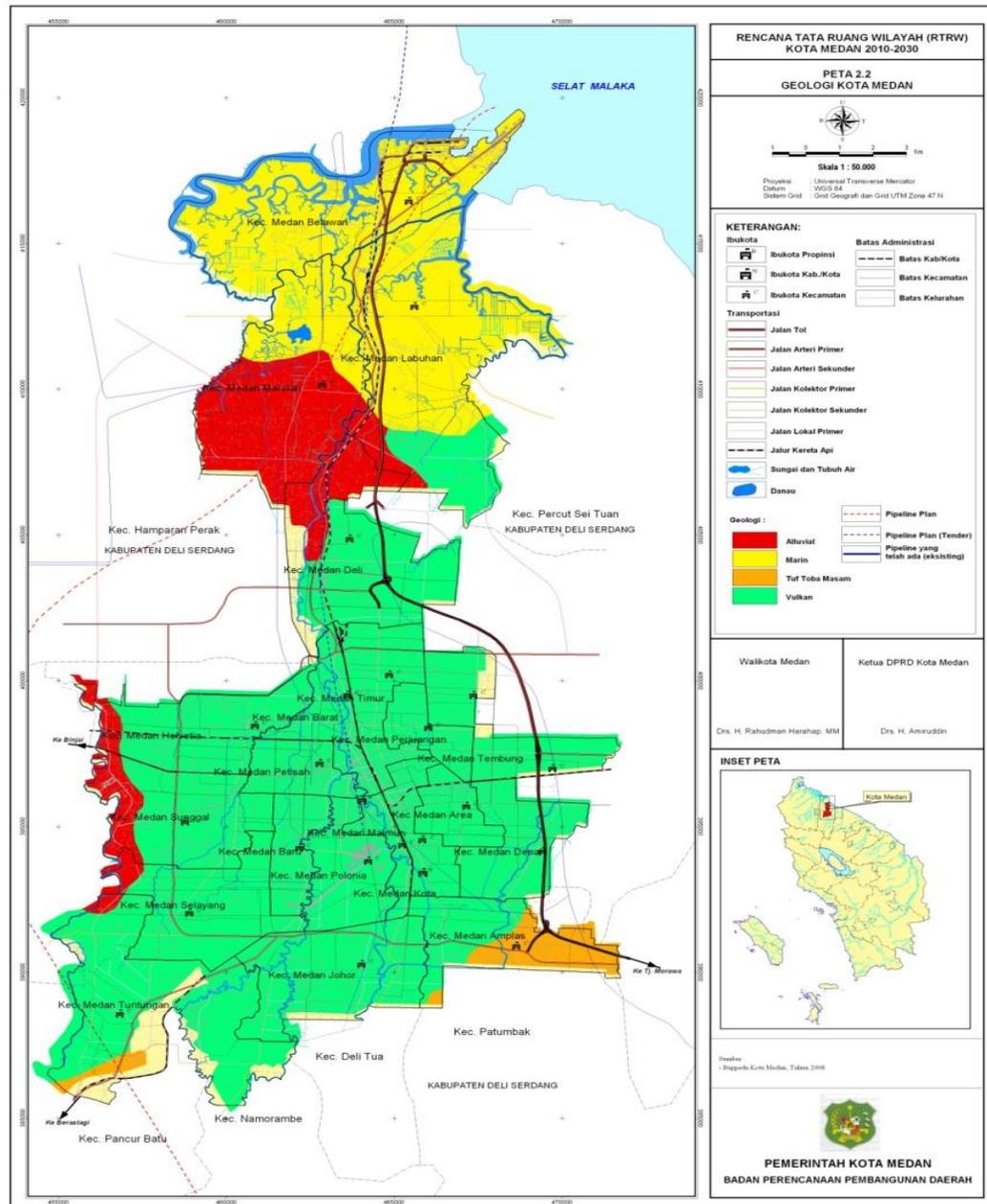
1. Grup Aluvial

Grup Aluvial umumnya terbentuk dari endapan kasar dan halus yang berumur Quarter (Qal dan Qh), yang umumnya berasal dari endapan sungai, Grup Aluvial ini meliputi dataran banjir disekitar jalur aliran (sungai Ular, sungai Belawan dan sungai Deli), dan dataran Aluvial. Dataran banjir umumnya berpenyebaran disekitar aliran sungai besar di dekat muara berbatasan dengan pantai. Dataran Aluvial merupakan peralihan dari grup



Marin, relatif datar airnya bersifat tawar sampai payau dan bagian besar telah dimanfaatkan sebagai areal persawahan dan perkebunan negara.

Gambar 2.3 Peta Geologi Kota Medan



2. Grup Marin

Grup Marin ini menempati daerah di sepanjang pantai dengan lebar bervariasi antara 1 sampai 20 km, yang memanjang arah Barat Daya Timur Laut dalam wilayah Medan dan sekitarnya. Dataran ini terbentuk sebagai akibat proses sedimentasi marin dan primer (delta dan muara). Seluruh proses sedimentasi terjadi pada lingkungan beragam (asin) dan payau, sehingga tanah banyak mengandung garam terutama natrium, terutama pada areal endapan baru (muda).

Areal ini umumnya mempunyai drainase terhambat dan sebagian besar tanahnya belum matang (unripe) dan setengah matang (halfripe). Areal yang berdekatan dengan pantai



setempat ditemukan tanah silfat masam potensial yang menjadi pembatas untuk usaha pertanian perikanan.

Jenis vegetasi di daerah dekat pantai dan muara sungai yang terkena pasang surut air laut umumnya ditumbuhi hutan bakau atau rumput rawa, dengan jenis vegetasi Bakau (*Rhizophora*, sp), Api-api (*Avicennia*, sp), Lenggede (*Bruguiera parviflora*). Areal ini sebagian besar telah digunakan untuk pertambakan udang dengan pola semi intensif dan intensif. Daerah yang jauh dari laut membentuk rawa yang umumnya ditumbuhi vegetasi rumput setempat untuk pesawahan. Daerah pinggir pantai yang berada sepanjang pantai Percut ke arah Timur umumnya dimanfaatkan untuk pemukiman dan objek wisata pantai.

3. Grup Vulkan

Grup Vulkan ini umumnya berasal dari vulkan muda berumur kuartar dari gunung Sibayak dan gunung Sinabung di sebelah Utara Berastagi, dengan bahan utama berupa tuf masam dan intermedier. Hasil erupsi kedua gunung tersebut mengisi bagian dataran sebelah Utara di sekitar Medan dan Binjai, sedangkan bagian yang berlereng terisi bahan Tufa Toba masam. Ketebalan abu vulkan Sibayak dan Sinabung makin tebal kearah pusat erupsi (Brastagi) serta menipis ke daerah berbukit dan jauh dari pusat erupsi (Medan/Binjai). Penyebaran grup Vulkan ini mendominasi kawasan Medan dan sekitarnya, meliputi kawasan Medan dan Binjai memanjang kearah Kabanjahe.

4. Grup Tufa Masam

Grup ini terbentuk dari aliran abu vulkan hasil erupsi vulkan Toba pada masa tersier. Aliran abu masam (dasit dan liparit) ini membentuk endapan sangat tebal dan kadang-kadang melebur (*welded*) terutama di dekat Danau Toba. Di dataran rendah membentuk endapan vulkan masam yang sangat luas sebelum pada masa kuartar. Fisiografi ini mempunyai penyebaran luas di sebelah Selatan Medan sampai Danau Toba.

5. Air Tanah

Data tentang air tanah yang ada sangat terbatas, dalam studi yang dilaksanakan oleh C. Lotti & Association Consulting Engineer, kawasan Medan dan sekitarnya dapat dibagi dalam tiga klasifikasi mengenai existing kandungan air tanahnya yang disebut zona. Secara detail dapat dilihat dalam peta *Ground Water Recharge*, yaitu terdiri dari Zona 1, Zona 2, dan Zona 3. Zona 1 meliputi daerah kawasan pantai, dengan koefisien rechargenya 0,15, zona 2 Medan formasi dengan lapisan *permealk sand over day* dengan koefisien rechargenya 0,25, kawasan vulkan dengan koefisien recharge 0,2. *Ground Water Recharge* tersebut menurut zona tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut

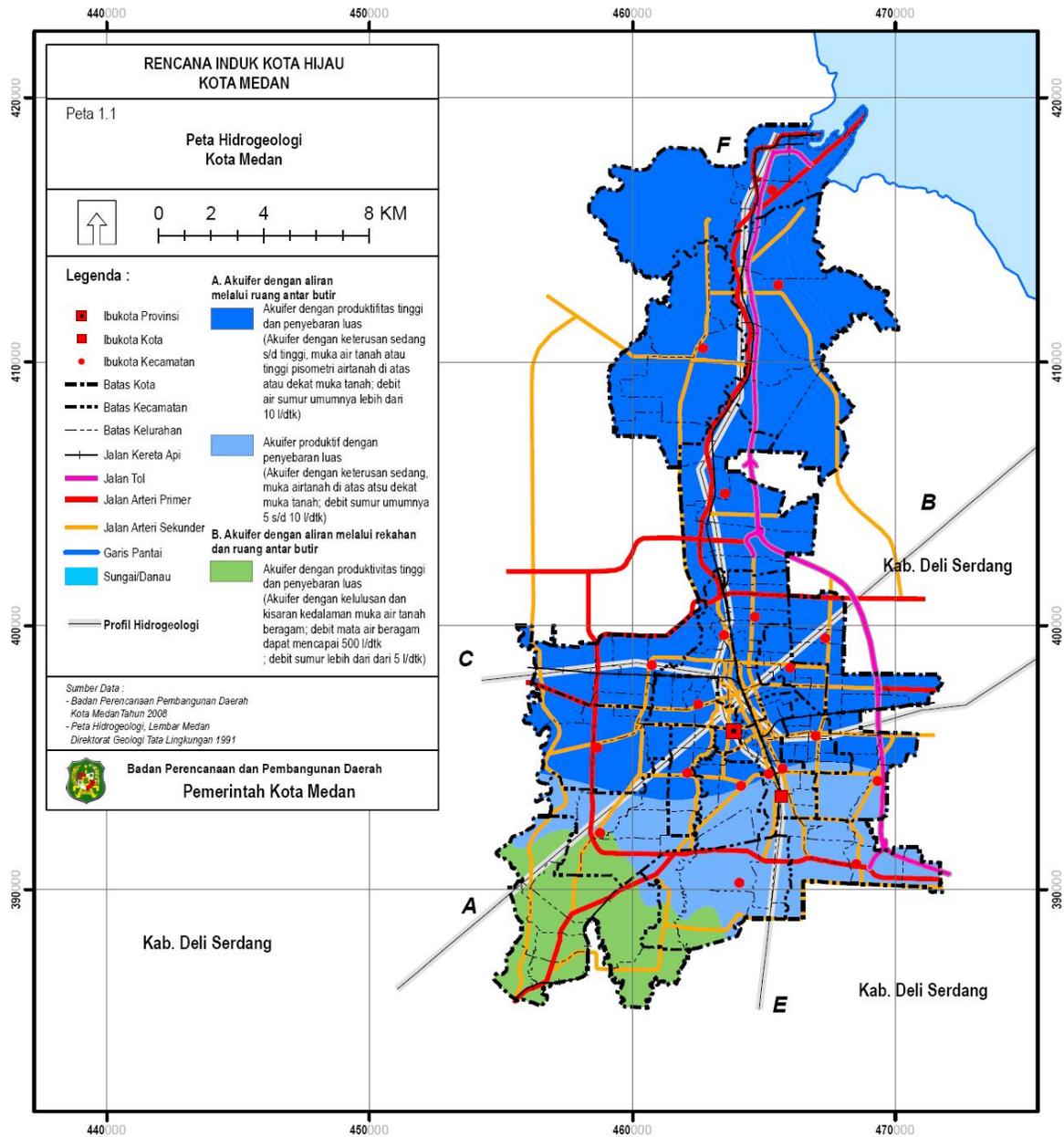


Tabel -2.2
Pembagian Zona Menurut Kandungan Air Tanahnya

Zona	A(km ²)	Mar (m/y)	C	Ground Water In / l/s/km ²
Zona I	761	1,50	0,15	7,1
Zona 2	616	1,75	0,25	13,8
Zona 3	464	2,50	0,20	15,9

Sumber : Laporan Mebidang Metropolitan Area

Gambar –2.4. Peta Hidrogeologi Kota Medan



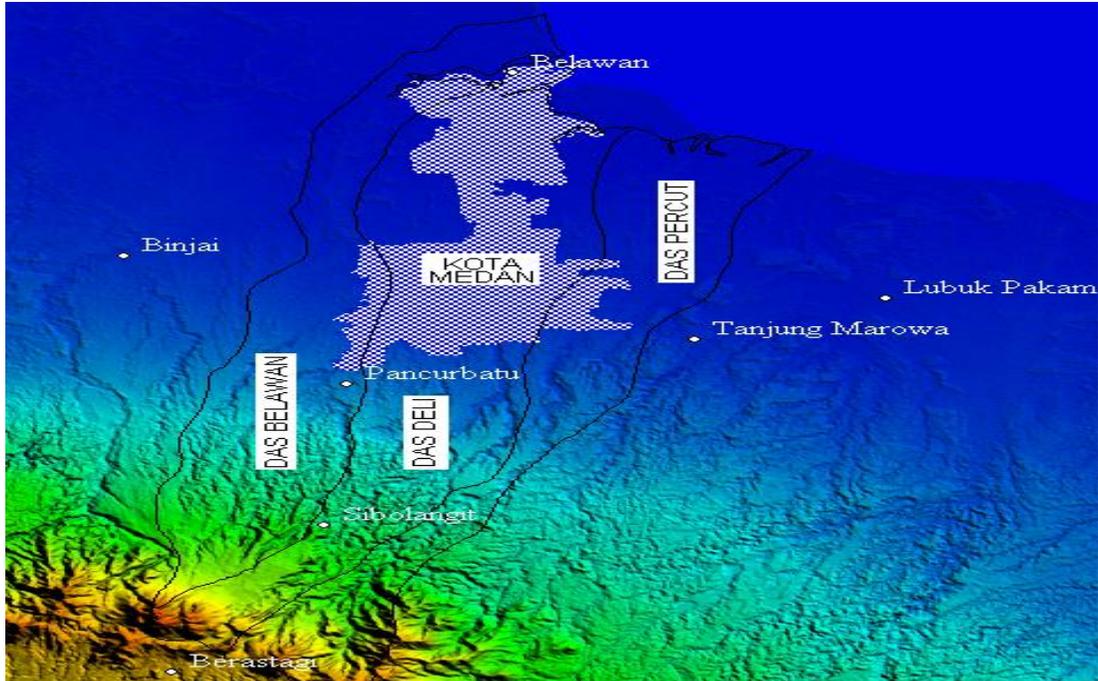
2.1.1.4. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Kota Medan secara hidrologi dipengaruhi dan dikelilingi oleh beberapa sungai besar dan anak sungai seperti Sungai Percut, Sungai Deli, Sungai Babura, Sei Belawan dan sungai-sungai lainnya yang secara sistem berada pada Keberadaan sungai – sungai tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan Kota Medan. Sungai-sungai ini



digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat yang menduduki daerah sekitar sungai, untuk mengatasi banjir serta tempat pembuangan air hujan bagi sistem drainase perkotaan. Wilayah Kota Medan sendiri berada dalam sistem Wilayah Sungai (WS) Strategis Belawan – Ular – Padang dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar yang ada di Kota Medan yaitu DAS Deli sebesar 35,45% dan DAS Percut sebesar 22,53%.

Gambar 2-5 Peta DAS Belawan, Deli, dan Percut



Tabel – 2.3
Persentase Kota Medan dalam DAS (%)

No.	DAS	Luas Total DAS (Ha)	Luas Administrasi Kota Medan dalam DAS (Ha)	Persentase Kota Medan dalam DAS (%)
1.	Belawan	40,789.98	2,760.43	6.77
2.	Deli	47,298.01	16,768.89	35.45
3.	Percut	41,252.20	9,293.14	22.53

Sumber : BPDAS Wampu – Sei Ular

Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun Sampali suhu minimumnya yaitu 21°C dan suhu maksimum yaitu 36°C. Untuk tahun 2020 kondisi suhu rata-rata udara Kota Medan cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (*global warming*). Kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 82%, dan kecepatan angin rata-rata sebesar 1.16 m/sec, sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 117.5 mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2020 per bulan 17 hari dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun Sampali per bulannya 228,5 mm. Tingkat curah hujan yang relatif tinggi saat ini ditambah seringnya terjadi cuaca ekstrem menyebabkan cukup potensial berdampak besar terhadap kondisi Kota Medan disebabkan



sungai-sungai yang ada di Kota Medan belum sepenuhnya ditingkatkan fungsinya melalui normalisasi sungai. Hal inilah yang secara alamiah memunculkan banjir/genangan air, termasuk banjir rob akibat pasang surut air laut antara lain di kecamatan – kecamatan yang berada di wilayah pesisir. Sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap hal ini adalah dengan melakukan pembangunan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan.

2.1.1.5. Wilayah Rawan Bencana

Secara geologis Kota Medan kecil potensinya dalam bencana gempa tektonik dan vulkanik. Beberapa wilayah rawan bencana alam di Kota Medan yang teridentifikasi, sebagai berikut:

1. Daerah Rawan Kebakaran

Dari data luasan kebakaran yang terjadi di Kota Medan pada 2020, kecamatan yang rawan kebakaran adalah Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Helvetia, Medan Baru dan Medan Tembung. Adapun yang menjadi penyebab kebakaran diantaranya adalah listrik, kompor/gas, rokok, lilin, dan lain-lain. Menurut catatan, kerugian akibat kebakaran terbesar pada tahun 2020 mencapai Rp 101,556 milyar.

2. Daerah Rawan Banjir

Daerah rawan banjir di Kota Medan berdasarkan atas kejadiannya berturut-turut adalah Kecamatan Medan Maimun, Medan Labuhan, Medan Selayang, Medan Johor dan Medan Baru. Selanjutnya, yang paling rentan terhadap banjir rob adalah Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan sebahagian Kecamatan Medan Marelan. Permasalahan banjir utama disebabkan meluapnya sungai utama yakni Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Sei Sikambing, Sungai Selayang dan Sungai Sei Putih.

Tabel 2.4
Kejadian Banjir Kota Medan

No	Nama Sungai	Waktu Kejadian Banjir	Catatan
1	Sungai Belawan dan Sungai Deli/Babura	14 Januari 2002	Beberapa rumah dibantaran sungai hanyut, dan penduduk diungsikan. Bandara Udara Polonia tidak beroperasi selama 12 jam.
2	Sungai Belawan, Sungai Deli/Babura	6 Januari 2011	Atap rumah dibantaran Sungai Babura terendam
3	Sungai Deli/Babura	28 Oktober 2013	Ribuan rumah terendam, perkuliahan di kampus USU terganggu.
4	Sungai Deli/Babura	25 November 2015	Lima Kecamatan tergenang, ratusan warga mengungsi
5	Sungai Deli/Babura	16 September 2018 dan 18-19 Oktober 2018.	Banjir sungai disertai banjir permukiman, banjir dimana-mana.



6	Sungai Belawan	25 Desember 2020	Banjir sungai disertai banjir permukiman di daerah perbatasan Deli Serdang dan Medan tuntungan
---	----------------	------------------	--

Sumber : Dinas PU

Lokasi – lokasi rawan banjir pada umumnya berada pada lokasi sepanjang sungai yang belum dinormalisasi dan daerah tersebut pada kenyataan berada pada dataran banjir (flood plain). Hal ini juga diperburuk dengan sistem drainase perkotaan yang belum memadai. Sesungguhnya, kondisi topografi wilayah Kota Medan yakni dari arah Selatan ke arah Utara (mengikuti arah aliran sungai) memiliki kemiringan lahan yang cukup memadai untuk mengakomodasi sistim aliran gravitasi.

3. Rawan kejadian luar biasa bidang kesehatan (pada penyakit menular)

Daerah rawan kejadian luar biasa penyakit menular di kota Medan berdasarkan atas kejadian seperti kasus penyakit menular Covid-19 sampai dengan 22 Agustus 2021, Kota Medan masih merupakan zona merah dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 40.065 orang dengan rincian 29160 orang sembuh, meninggal 793 orang dan selebihnya sedang dalam perawatan. Jumlah pasien positif covid mengalami peningkatan di Kota Medan, disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan dan belum optimalnya upaya tracing atau penemuan kasus covid-19 dimana seharusnya target adalah 1 : 15. Satu orang terkonfirmasi positif Covid-19 maka 15 orang terdekat yang kontak langsung harus di tracing.

2.1.2. Kondisi Demografis

Komponen utama dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam terbentuknya suatu wilayah adalah Penduduk, Tempat/Lokasi, dan Pemerintahan. Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran suatu wilayah permasalahan yang terjadi, karena penduduk adalah sebagai objek pokok suatu wilayah yang merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari waktu ke waktu. Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal. Mobilitas dan persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan pada adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang kurang didukung oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya.



Lebih lanjut, kondisi dan dinamika demografis Kota Medan dideskripsikan berdasarkan jumlah penduduk, pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kota Medan Tahun 2016-2020 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.5
Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = ([2]/[4])
2016	2.477.061	0.33	265.10	9.344
2017	2.478.145	0.04	265,10	9.348
2018	2.502.092	0.09	265.10	9.353
2019	2.507.124	0.20	265,10	9.457
2020	2.524.341	0.69	265,10	9.522

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Gambar 2.6.
Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2016-2020



Berdasarkan tabel 2.5 di atas bahwa jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan sebesar 0.268 persen untuk tahun 2016-2020, peningkatan ini berdampak pada kepadatan penduduk disebabkan luas wilayah Kota Medan tidak mengalami perubahan yakni sebesar 265.1 Km² sampai tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk kota disebabkan adanya peningkatan fertilitas (pertumbuhan penduduk alami), mengakibatkan Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Medan juga mengalami peningkatan. Walaupun demikian, dengan jumlah penduduk yang masih relatif besar yang mencapai 2.524.341 jiwa pada tahun 2020, maka secara demografis Kota Medan masih memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar sehingga menjadi daya tarik (*full factors*) untuk mencari pekerjaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dasar



yang efektif bagi pembangunan kota. Apalagi penduduk yang pindah tempat tinggal, sebahagian besar masih bekerja di Kota Medan.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Medan terus bertambah sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dengan luas lahan secara administrasi wilayah tidak bertambah. Tingkat kepadatan tertinggi pada tahun 2020 berada di Kecamatan Medan Perjuangan sebesar 27.015 jiwa/ha, diikuti oleh Kecamatan Medan Area sebesar 21.919 jiwa/ha dan Kecamatan Medan Denai sebesar 19.520 jiwa/ha. Selain itu dari gambaran pada tabel 2.6, terlihat tingkat kepadatan penduduk di Kota Medan tidak merata seperti yang sudah diuraikan di atas. Untuk itu Kota Medan sebaiknya sudah harus mendorong perkembangan kawasan perkotaan ke arah utara, karena selain masih punya banyak lahan kosong juga dimaksudkan untuk mengurangi beban kawasan pusat kota dan menambah pusat pertumbuhan ekonomi baru.

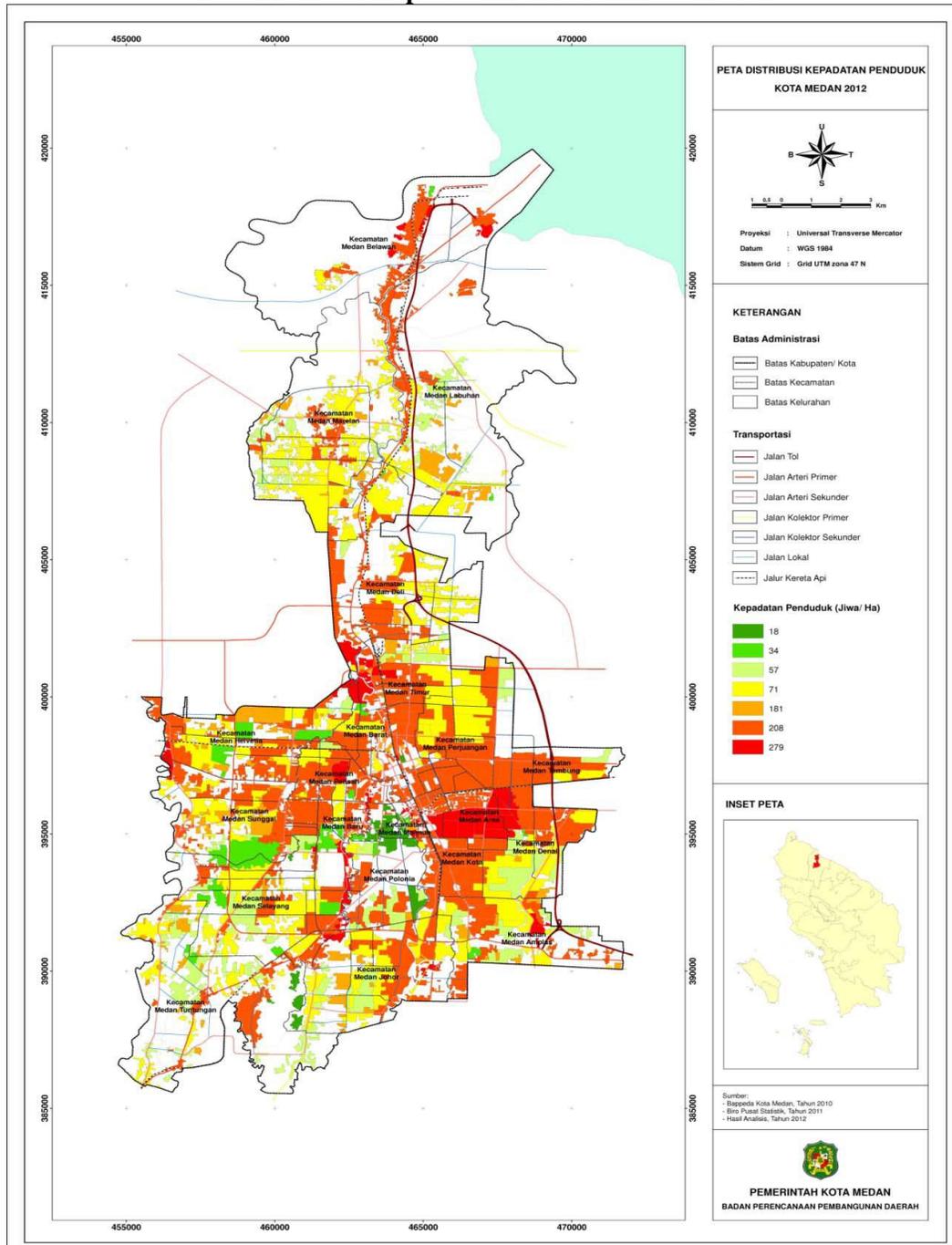
Tabel 2.6:
Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Kepadatan penduduk (jiwa/ha)
			Laki 2	Perempuan	
1	Medan Tuntungan	2,068	47.704	48.876	4,670
2	Medan Johor	1,458	78.344	78.588	10,764
3	Medan Amplas	1,119	67.102	67.492	12,028
4	Medan Denai	905	88.890	87.764	19,520
5	Medan Area	552	59.860	60.732	21,919
6	Medan Kota	584	43.899	46.253	15,437
7	Medan Maimun	298	25.573	26.363	17,428
8	Medan Polonia	901	30.677	30.903	6,835
9	Medan Baru	584	17.915	19.477	6,403
10	Medan Selayang	1,281	53.779	54.454	8,449
11	Medan Sunggal	1,544	67.077	68.082	8,754
12	Medan Helvetia	1,316	84.764	86.223	12,993
13	Medan Petisah	533	36.245	38.673	14,056
14	Medan Barat	682	46.472	47.641	13,800
15	Medan Timur	776	60.338	62.613	15,844
16	Medan Perjuangan	409	54.421	56.072	27,015
17	Medan Tembung	799	77.174	77.750	19,390
18	Medan Deli	2,084	97.058	94.066	9,171
19	Medan Labuhan	3,667	69.544	67.738	3,744
20	Medan Marelan	2,382	93.643	90.683	7,738
21	Medan Belawan	2,625	58.036	55.383	4,321
	Total	26,567	1.258.515	1.265.826	260,279
			2.524.341		

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan



Gambar 2.7
Peta Distribusi Kepadatan Penduduk Kota Medan



Gambaran tingkat kepadatan penduduk tersebut di atas sebetulnya masih lebih rendah jika dibandingkan apabila dilihat dari luas lahan terbangun di wilayah Kota Medan. Berdasarkan hasil Studi Analisis Penyebaran Penduduk Berdasarkan Struktur dan Pola Ruang Wilayah pada tahun 2012, bahwasanya beberapa kelurahan di Kota Medan memiliki tingkat kepadatan sangat tinggi yaitu sebesar 279 jiwa/ha di Kecamatan Medan Area yang tersebar di Kelurahan Tegal Sari I, Tegal Sari II, Tegal Sari III, Suka Ramai I, Kota Matsum I, Kota Matsum II, dan Kota Matsum IV. Kemudian disusul oleh Kecamatan Medan Belawan, yang tersebar di Kelurahan Belawan Bahagia, Belawan Bahari, Belawan I, Belawan II, dan Bagan Deli. Di Kecamatan Medan Johor, perkampungan kepadatan sangat tinggi tersebar di Kelurahan Kwala Bekala, Sukamaju, dan Titi Kuning. Di Medan



Amplas perkampungan kepadatan tinggi tersebar di dua Kelurahan yaitu Kelurahan Medan Amplas dan Timbang Deli. Di Kecamatan Medan Denai tersebar di Kelurahan Binjai, Tegal Sari Mandala I, Tegal Sari Mandala II, dan Tegal Sari Mandala I. Di Kecamatan Medan Kota tersebar di Kelurahan Mesjid dan Kota Matsum III. Di Kecamatan Medan Maimun tersebar di Kelurahan Sukaraja, Jati, Hamdan, dan Aur. Di Kecamatan Medan Polonia hanya di Kelurahan Madras Hulu. Di Kecamatan Medan Baru tersebar di Kelurahan Titi Rantai, Padang Bulan, Merdeka, Darat, dan Petisah Hulu. Di Kecamatan Medan Selayang tersebar di Kelurahan Beringin, PB Selayang I, dan PB Selayang II. Di Kecamatan Medan Sunggal tersebar di Kelurahan Sunggal, Simpang Tanjung, dan Lalang. Di Kecamatan Medan Helvetia tersebar di Kelurahan Cinta Damai, Dwikora, dan Helvetia Timur. Di Kecamatan Medan Petisan tersebar di Kelurahan Petisah Tengah, Sei Putih Timur I, dan Sei Putih Timur II. Di Kecamatan Medan Barat tersebar di Kelurahan Karang Berombak dan Pulo Brayan Kota. Di Kecamatan Medan Timur tersebar di Kelurahan Gaharu dan Pulo Brayan Darat II. Di Kecamatan Medan Deli hanya di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir. Di Kecamatan Medan Labuhan hanya di Kelurahan Sei Mati.

Selanjutnya tingkat kepadatan tinggi sebesar 208 Jiwa/Ha tersebar pada hampir semua kecamatan di Kota Medan. Hanya beberapa kelurahan yang tidak ada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi, misalnya Kelurahan Lau Cih dan Simalingkar B (Kecamatan Medan Tuntungan), Kelurahan Tegal Sari I, Tegal Sari III, dan Kota Matsum I (Kecamatan Medan Area), Kelurahan Jati (Kecamatan Medan Maimun), dan Kelurahan Angrung (Kecamatan Medan Polonia). Untuk sebaran kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan sebesar 71 Jiwa/Ha relatif merata pada kecamatan di Kota Medan. Ada beberapa kecamatan di Kota Medan yang sebaran tipe perkampungan ini sangat sedikit (Kecamatan Denai, Medan Kota, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Petisah, Medan Barat, Medan Timur, dll) bahkan tidak ada (Kecamatan Medan Area). Umumnya kecamatan tersebut adalah kecamatan yang berada pada inti kota Medan. Terakhir untuk kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan rendah sebesar 57 Jiwa/Ha sebagian besar terkonsentrasi di daerah (kecamatan) pinggiran Kota Medan. Hanya di Kecamatan Belawan yang tidak ada kelurahan dengan perkampungan kepadatan rendah.

Hal yang paling penting dalam dimensi kependudukan ini adalah bagaimana Kota Medan dapat memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal pada masa datang. Salah satu gambaran demografi yang kerap dianalisis yang dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan wilayah adalah struktur kependudukan berdasarkan komposisi umur penduduk. Sejalan dengan teori demografi yang menyatakan bahwa semakin tua kelompok umur penduduk, maka rasio jenis kelaminnya akan semakin mengecil, karena jumlah penduduk laki-laki semakin tua umumnya akan semakin banyak berkurang dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang lebih mampu untuk dapat bertahan hidup, selain



itu faktor hormonal dan gaya hidup sangat berpengaruh. Adapun komposisi umur penduduk Kota Medan Tahun 2020 dapat diuraikan pada Tabel dan Gambar berikut ini

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kota Medan Tahun 2020

Umur [1]	Komposisi Penduduk [2]	Persen [3]
0 - 4	109.403	4.33
5 - 9	207.926	8.23
10 - 14	222.481	8.81
15 - 19	214.162	8.48
20 - 24	208.562	8.26
25 - 29	204.059	8.08
30 - 34	201.678	7.98
35 - 39	216.482	8.57
40 - 44	199.255	7.89
45 - 49	178.679	7.07
50 - 54	157.551	6.24
55 - 59	129.506	5.13
60 - 64	102.166	4.04
65 - 69	73.668	2.91
70 - 74	41.660	1.65
>74	57.103	2.26
Jumlah	2.524.341	100.00

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Gambar 2.8
Komposisi Penduduk Kota Medan Tahun 2020



Berdasarkan Tabel 2.7 apabila ditinjau berdasarkan kelompok umur, maka penduduk Kota Medan tahun 2020 paling banyak berumur 10-14 tahun yaitu 222.481 jiwa atau sebanyak 8.81 persen, kemudian dengan kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 216.482 jiwa atau sebanyak 8.57 persen, kemudian dengan kelompok umur 15-19 tahun



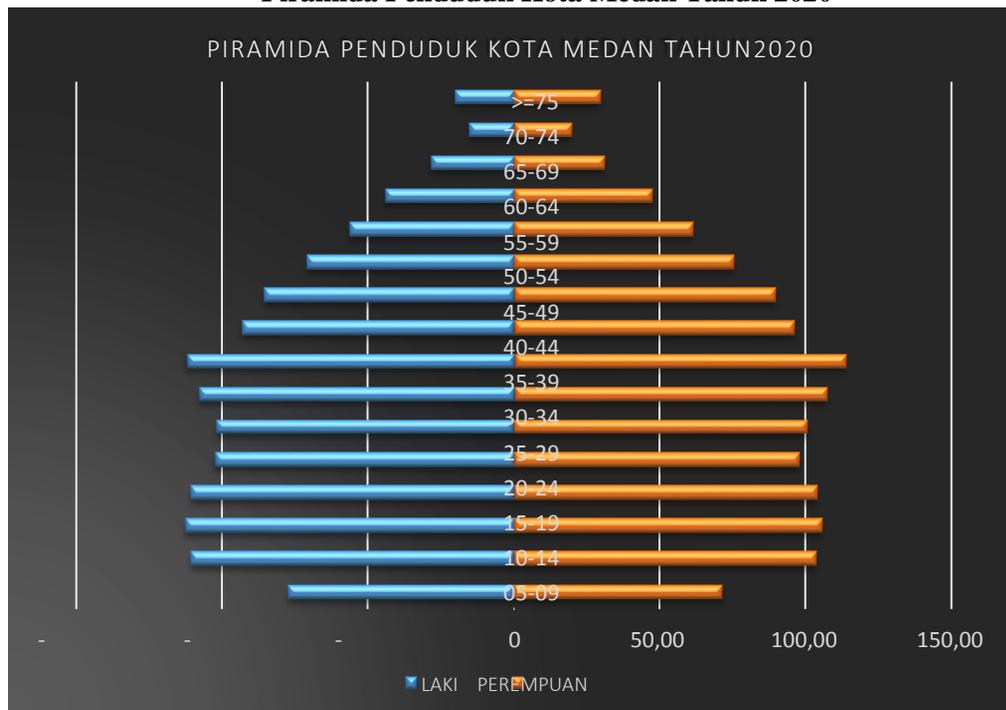
sebanyak 214.162 jiwa atau sebanyak 8.48 persen, kemudian berumur 20-24 tahun yaitu 208.562 jiwa atau sebanyak 8.26 persen, kemudian dengan kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 207.926 jiwa atau sebanyak 8.23 persen, kemudian berumur 25-29 tahun yaitu 204.059 jiwa atau sebanyak 8.08 persen, kemudian diikuti yang berumur 30-34 tahun yaitu 201.678 jiwa atau sebanyak 7.98 persen. Komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2020 menunjukkan adanya kecenderungan pola semakin menua yang ditandai dengan menurunnya proporsi penduduk muda dan meningkatnya proporsi penduduk usia kerja dan penduduk usia lanjut. Perbedaan struktur umur akan menimbulkan pula perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Sejalan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, akan meningkatkan pula usia harapan hidup, sehingga peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang makin besar menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Hal ini juga menjadi suatu tantangan agar penduduk usia lanjut yang masih potensial bisa dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar yaitu hampir seperempat penduduk Kota Medan (21,38). Hal ini harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entri tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia.

Disisi yang lain, Pemerintah Kota Medan harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Jika dicermati lebih lanjut, ternyata 4,3% penduduk Kota Medan merupakan balita. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kota Medan dalam penanganan penduduk balita terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan. Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur.



Gambar 2.9
Piramida Penduduk Kota Medan Tahun 2020



Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil. Ini berarti angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini. Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok 25-39 tahun menunjukkan jumlah yang paling besar.

Diduga penduduk kelompok umur ini adalah kelompok yang lahir pada tahun 1980-an yang mulai memasuki usia tersebut ditambah dengan migran yang masuk ke Kota Medan. Penduduk lansia (60 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang masih kecil yaitu 9,5 persen. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

2.1.3. Potensi Sumber daya

1) Perwujudan Kawasan Budidaya

Program pengembangan kawasan budidaya terdiri dari pengembangan kawasan perumahan; kawasan komersial (perdagangan, jasa, pemerintahan dan bangunan umum); kawasan perindustrian; kawasan khusus (pelabuhan, militer, Pertamina, PLN), fasilitas sosial dan umum, pertanian.



2) Kawasan Strategis Kota Medan

Pembangunan kawasan strategis memiliki manfaat sebagai pendorong utama pertumbuhan kota, seperti pembangunan kawasan industri, pembangunan kawasan pusat kota, pengembangan pusat pemerintahan dan pembangunan kawasan wisata. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Kawasan Strategis terdiri dari kawasan strategis bidang ekonomi, masih ada bidang sosial budaya dan lingkungan. Kawasan-kawasan yang berpotensi dikembangkan sebagai kawasan strategis di Kota Medan, antara lain:

- a) Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah di Pusat CBD Polonia;
- b) Kawasan Pelabuhan Belawan di Kecamatan Medan Belawan dengan kegiatan utama, pelabuhan penumpang, pelabuhan peti kemas, dan perikanan samudera;
- c) Kawasan militer;
- d) Kawasan depot pertamina di Kecamatan Medan Labuhan;
- e) Bangunan Pembangkit listrik PLN di Sicanang Kecamatan Medan Belawan; dan
- f) Kawasan wisata yang dapat dikembangkan sekaligus berfungsi sebagai RTH adalah kawasan wisata di Utara Medan (Kecamatan Medan Marelan), yang meliputi: *Theme Park*, *Water Front City*, dan danau Siombak. Kawasan Wisata di Selatan meliputi Kebun Binatang, dan Taman Mora Indah. Luas RTH tersebut diperkirakan mencapai sekitar 959,08 Ha (sembilan ratus lima puluh sembilan koma nol delapan hektar).

2.2.1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri atas dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial.

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi di Kota Medan dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah, dimana sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar merupakan basis utama perekonomian suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan digunakan untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula. Untuk mengetahui perkembangan kinerja



perekonomian Kota Medan, dapat dideskripsikan melalui PDRB Kota Medan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan atas dasar harga konstan pada tahun 2016 – 2020 secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 3,92 persen. Sedangkan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan atas Produk dasar harga berlakupada tahun 2016–2020 secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 7,07 persen. Baik PDRB ADHK maupun PDRB ADHB selama tahun 2016-2020, aktivitas perekonomian Kota Medan menunjukkan peningkatan dan menjadi motor penggerak pembangunan kota. Sedangkan pada tahun 2020, baik ADHK maupun ADHB mengalami penurunan, dimana pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan minus 1,98 persen, sedangkan atas dasar harga berlaku hanya sebesar 0,3 persen sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Meningkatnya PDRB dari tahun 2016-2020 baik berdasarkan atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektor pembentuk PDRB tersebut. Kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB selama tahun 2016 - 2020 bervariasi, tetapi tetap didominasi oleh informasi dan komunikasi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, industri pengolahan, real estate, jasa keuangan dan asuransi, transportasi dan pergudangan.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9 berikut:



Tabel 2.8
PDRB Seri Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,269,060.75	2,536,661.34	2,714,272.58	2,692,138.20	2,695,320.38
B	Pertambangan dan Penggalian	2,403.80	2,306.86	2,374.34	2,376.95	2,377.56
C	Industri Pengolahan	27,719,511.24	30,133,931.45	32,497,416.37	34,414,457.40	34,186,368.27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	160,872.20	194,621.60	211,137.13	221,608.33	233,493.46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	345,705.80	400,651.59	435,601.68	457,860.92	489,552.40
F	Konstruksi	35,026,070.80	39,045,126.48	42,986,701.49	46,722,922.99	45,610,724.81
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	45,907,066.42	50,034,464.02	55,538,093.77	61,710,075.99	62,278,300.91
H	Transportasi dan Pergudangan	11,713,716.87	12,914,639.62	14,012,114.47	15,395,335.18	14,136,327.26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,718,194.23	6,233,068.40	6,730,284.22	7,351,234.79	6,619,810.79
J	Informasi dan Komunikasi	9,206,951.07	10,362,863.45	11,403,891.04	12,442,785.52	13,604,941.68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,998,990.65	13,546,809.15	14,266,852.04	14,668,092.52	14,547,508.10
L	Real Estate	15,543,390.80	17,790,131.56	19,850,137.37	21,459,983.51	23,032,947.45
M,N	Jasa Perusahaan	4,700,540.68	5,254,705.46	5,758,765.70	6,463,389.25	6,721,610.37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,449,187.49	3,709,240.21	4,051,872.66	4,380,479.54	4,672,051.40
P	Jasa Pendidikan	4,975,731.06	5,225,326.47	5,688,748.20	6,150,105.68	6,262,517.09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,965,514.29	3,292,292.93	3,741,257.42	4,119,498.55	4,221,907.30
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,106,128.45	2,358,900.88	2,593,716.97	2,830,004.58	2,882,482.43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		184,809,036.60	203,035,741.48	222,483,237.45	241,482,349.90	242,198,241.66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		184,809,036.60	203,035,741.48	222,483,237.45	241,482,349.90	242,198,241.66

Sumber: BPS Kota Medan



Tabel 2.9
PDRB Seri Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,421,784.51	1,511,455.23	1,545,154.45	1,485,875.05	1,473,259.59
B	Pertambangan dan Penggalian	1,889.88	1,839.16	1,878.59	1,866.19	1,840.05
C	Industri Pengolahan	19,489,294.49	19,854,711.99	20,853,295.06	21,728,153.45	20,967,303.30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	141,753.91	155,275.71	162,691.51	169,573.40	179,588.04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	225,725.22	243,208.87	262,620.27	275,725.02	293,757.84
F	Konstruksi	25,707,200.56	27,546,865.74	29,049,293.71	31,263,230.89	29,630,931.57
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	34,023,438.36	36,330,526.00	38,498,257.17	40,849,510.90	40,106,896.15
H	Transportasi dan Pergudangan	7,931,237.13	8,564,449.01	9,131,750.20	9,693,260.34	8,476,902.36
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,323,221.15	3,549,563.15	3,782,240.63	4,081,707.43	3,662,074.12
J	Informasi dan Komunikasi	8,250,391.48	8,980,386.89	9,762,881.44	10,633,730.47	11,593,956.33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,903,046.92	8,969,577.12	9,147,862.83	9,337,940.35	9,429,174.20
L	Real Estate	10,105,209.81	10,775,341.16	11,567,798.60	12,168,167.34	12,710,092.85
M,N	Jasa Perusahaan	3,047,707.74	3,269,873.78	3,516,238.50	3,722,599.14	3,640,179.25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,237,178.19	2,263,707.65	2,457,691.84	2,622,848.73	2,696,386.49
P	Jasa Pendidikan	3,912,817.98	4,104,951.65	4,360,215.14	4,619,647.94	4,689,758.78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,960,515.71	2,127,139.08	2,308,291.05	2,416,319.07	2,413,401.68
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,380,450.46	1,490,469.58	1,598,976.52	1,710,425.19	1,704,323.24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		132,062,863.52	139,739,341.78	148,007,137.48	156,780,580.88	153,669,825.83
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		132,062,863.52	139,739,341.78	148,007,137.48	156,780,580.88	153,669,825.83

Sumber : BPS Kota Medan



Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan aspek strategis makro ekonomi yang perlu menjadi perhatian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Pertumbuhan ekonomi kota yang relatif baik ini tidak terlepas dari kontribusi masing-masing lapangan usaha pembentuk PDRB. Selama tahun 2020, hampir semua sektor mengalami pertumbuhan negatif kecuali sektor informasi dan komunikasi, pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah daur ulang, listrik dan gas, real estate dan administrasi pemerintahan dan jaminan sosial, jasa pendidikan dan jasa keuangan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan berdasarkan sektor dan sub sektor selama periode tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2016-2020 (Persen)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.96	6.31	2.23	-3.84	-0.85
B	Pertambangan dan Penggalian	-2.73	-2.68	2.14	-0.66	-1.40
C	Industri Pengolahan	4.90	1.87	5.03	4.20	-3.50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.04	9.54	4.78	4.23	5.91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.42	7.75	7.98	4.99	6.54
F	Konstruksi	8.05	7.16	5.45	7.62	-5.22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.06	6.78	5.97	6.11	-1.82
H	Transportasi dan Pergudangan	6.46	7.98	6.62	6.15	-12.55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.04	6.81	6.56	7.92	-10.28
J	Informasi dan Komunikasi	7.35	8.85	8.71	8.92	9.03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.89	0.75	1.99	2.08	0.98
L	Real Estate	6.60	6.63	7.35	5.19	4.45
M,N	Jasa Perusahaan	6.65	7.29	7.53	5.87	-2.21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.58	1.19	8.57	6.72	2.80
P	Jasa Pendidikan	6.43	4.91	6.22	5.95	1.52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.85	8.50	8.52	4.68	-0.12
R,S,T,U	Jasa lainnya	6.39	7.97	7.28	6.97	-0.36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO			5.81	5.92	5.93	-1.98
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		#REF!	5.81	5.92	5.93	-1.98

Sumber: BPS Kota Medan

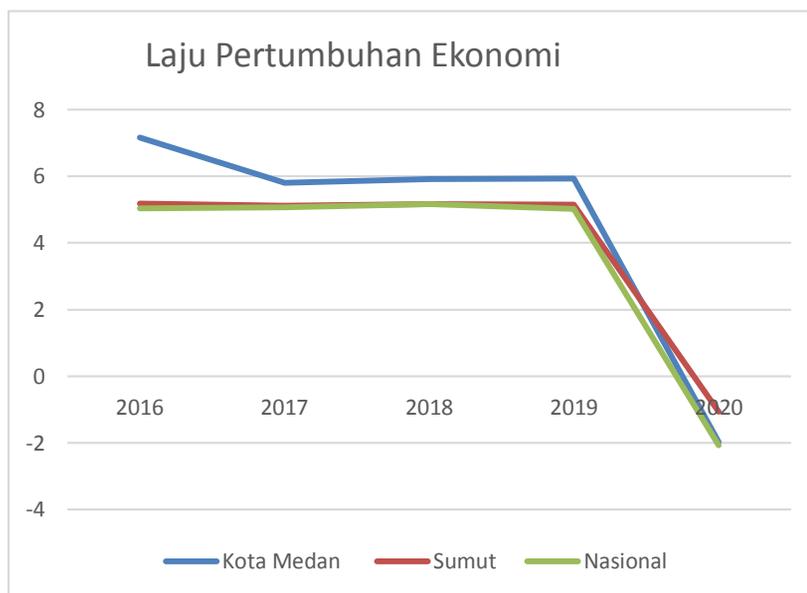


Tabel 2.10 di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan selama tahun 2016-2020 relatif cukup tinggi yaitu rata-rata di atas 6,11 persen, suatu prestasi yang menggembirakan mengingat kondisi ekonomi regional/nasional yang relatif melemah. Kondisi ini menggambarkan bahwa faktor fundamental ekonomi Kota Medan relatif cukup baik. Walaupun di Tahun 2017-2019 pertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami perlambatan menjadi 5,81 persen, 5,92 persen dan 5,93 persen. Namun demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Medan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 1,98 persen. Untuk lebih jelasnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan, Sumatera Utara dan Nasional tahun 2016 - 2020 divisualisasikan pada gambar berikut:

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Propinsi Sumatera Utara dan Kota Medan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan, Sumatera Utara dan Nasional					
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Medan	7,16	5,81	5,92	5,93	-1,98
Sumut	5,18	5,12	5,16	5,15	-1,07
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Gambar 2.10
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Propinsi Sumatera Utara dan Kota Medan



Selama tahun 2016-2020, tingkat laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang relatif tinggi sebagaimana disajikan di atas, memberikan dampak positif terhadap pergerakan sektor riil yaitu meningkatnya produksi barang dan jasa sehingga membuka lapangan kerja yang semakin luas. Hal ini sangat kontradiktif dengan kondisi tahun 2020, dimana pandemic Covid-19 melumpuhkan seluruh sendi-sendi perekonomian yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan serta menurunnya daya beli masyarakat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pasca



Covid-19 perlu dirumuskan bersama usaha dan upaya yang komprehensif dari seluruh stakeholder pembangunan Kota Medan.

Tentu hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah agar selalu berusaha seoptimal mungkin membangun ekonomi Kota Medan ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja di bidang ekonomi sebagaimana diuraikan di atas tentu tidak terlepas dari peran serta Pemerintah Daerah beserta seluruh stakeholder dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan ekonomi daerah yang cukup efektif. Tantangannya adalah ternyata pertumbuhan ekonomi yang cukup dinamis tersebut, ternyata belum mampu mewujudkan pertumbuhan kesempatan kerja baru, yang lebih masif, guna menekan angka pengangguran yang lebih kecil. Di samping itu, menjadi catatan juga bahwa kesempatan kerja baru yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang ada, juga tidak sepenuhnya diisi oleh angkatan kerja lokal, sebab secara empirik cukup banyak diisi oleh angkatan kerja dari luar daerah, terutama di sektor bangunan-bangunan dan perhotelan, sehingga perlu kebijakan yang dapat lebih mendorong masuknya angkatan kerja lokal di pasar kerja.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Indikator lain yang sangat penting dalam menentukan kondisi dan stabilitas perekonomian daerah adalah inflasi. Inflasi selain berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan, juga tidak lepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata-niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peran kebijakan pemerintah di bidang moneter. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat secara rata-rata. Adapun inflasi Kota Medan selama periode tahun 2016 - 2020 dapat diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.12
Inflasi Kota Medan Menurut Komoditi Tahun 2016 - 2020 (Persen)

No	Kelompok Pengeluaran	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Bahan Makanan	15.55	2.59	-4,64	3.79	1,89
2	Makanan Jadi, Minuman/ Rokok dan Tembakau	13.29	2.25	3,65	2.55	3,49
3	Perumahan, air, listrik, Gas, dan Bahan bakar	2.64	6.44	2,64	1.47	0,01
4	Sandang	2.66	1.12	1,20	5.47	1,64
5	Kesehatan	4.86	1.61	3,20	2.62	2,26
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	4.7	0.41	1,28	1.43	0,08
7	Transportasi dan Komunikasi	-1.89	2.79	3,69	1.29	-1,45
Kota Medan		6,6	3,18	1,00	2.43	1,76
Sumatera Utara		6.34	3.20	1.23	2.33	1.96

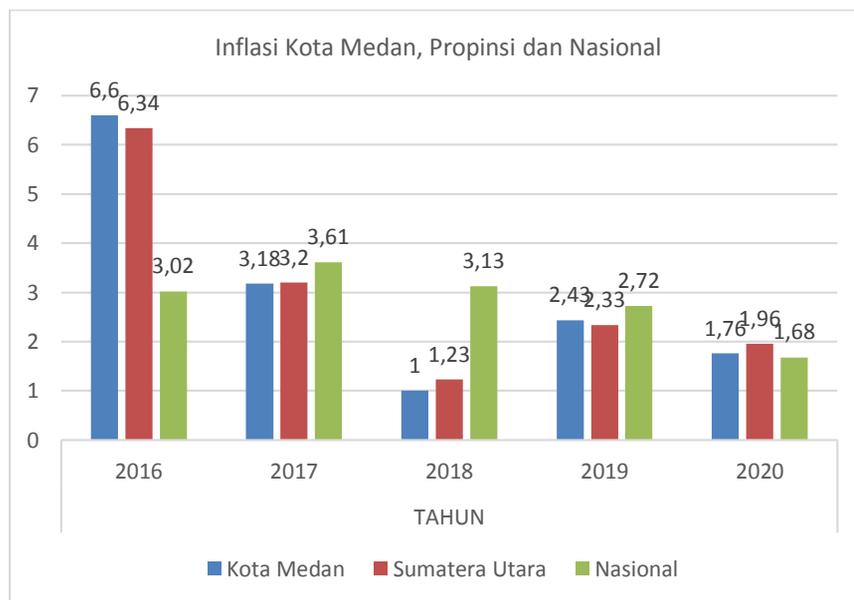


Nasional	3.02	3.61	3.13	2.72	1.68
----------	------	------	------	------	------

Sumber: BPS Kota Medan

Berdasarkan data tabel di atas di Kota Medan tingkat inflasi secara sektoral berfluktuasi cenderung menurun selama periode tahun 2016 - 2020. Menurunnya tingkat inflasi umum di Kota Medan disebabkan dari berbagai faktor eksternal dan internal yang secara relatif terkendali. Penurunan laju inflasi seluruh sektor yang relatif cukup besar disebabkan perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) Premium, Solar, Pertamina, dan Pertamina Plus serta kenaikan tarif listrik. Di samping itu, untuk menjaga agar tingkat inflasi terus terjaga telah dilakukan koordinasi secara intensif dengan penyedia barang (*supplier*), melakukan pemantauan terhadap jalur distribusi, menindak para pedagang yang sengaja melakukan penimbunan (spekulasi) hingga arahan ke masyarakat agar berkonsumsi secara bijak. Bentuk lainnya menjamin pasokan ketersediaan barang melalui komunikasi verbal, melakukan operasi pasar, mempercepat penyaluran beras miskin (Raskin) kemudian harus menjadi pilihan opsional adalah mendorong impor sejumlah barang kebutuhan dari negara lain melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sehingga program-program yang sifatnya antisipatif dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. Gambaran Inflasi Kota tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.11
Inflasi Kota Medan, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2016-2020



Di sisi lain, tingkat inflasi di Kota Medan cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2016 - 2020 rata-rata sebesar 6.70 persen. Penurunan laju inflasi seluruh sektoral yang relatif cukup besar yakni berasal dari bahan makanan rata-rata sebesar 5.66 persen, makanan jadi, minuman/rokok/tembakau rata-rata sebesar 13.79 persen, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rata-rata sebesar 16.21 persen, kesehatan rata-rata sebesar 14.48 persen, pendidikan, rekreasi, dan olahraga rata-rata sebesar 19.72 persen, sedangkan



sektoral yang mengalami peningkatan inflasi adalah khusus transportasi dan komunikasi dan sandang.

Penurunan tingkat inflasi pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2016 tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, untuk menjamin keseimbangan sisi permintaan dan penawaran, sehingga permintaan total tidak jauh melebihi penawaran total. Di samping itu, dilakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait melalui peran pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (*administered prices*), dan otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia dan TPID melalui komunikasi verbal, melakukan operasi pasar (pasar murah), mempercepat penyaluran Raskin kemudian harus menjadi pilihan (opsional) adalah mengimpor sejumlah barang kebutuhan dari negara/daerah lain sehingga program-program yang sifatnya antisipatif dapat dilakukan oleh masing-masing pihak. Di samping itu, untuk menjaga agar tingkat inflasi tetap terjaga telah dilakukan koordinasi secara intensif dengan penyedia barang (*supplier*), melakukan pemantauan terhadap jalur distribusi, menindak para pedagang yang sengaja melakukan penimbunan (spekulasi) hingga arahan ke masyarakat agar berkonsumsi secara bijak.

Dalam rangka menjaga stabilitas pasar, oleh karenanya diperlukan kebijakan dan program pengendalian harga pasar khususnya terhadap 9 (sembilan) kebutuhan pokok melalui koordinasi TPID.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi barang dan jasa selama satu periode. Indikator ini digunakan sebagai salah satu parameter untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, namun demikian parameter ini belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan secara menyeluruh. PDRB Kota Medan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan selama tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.13
PDRB Perkapita Kota Medan Menurut Harga Berlaku dan Konstan
Tahun 2016 - 2020

Tahun	PDRB Perkapita (Jutaan Rupiah)		Perubahan (Persen)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2016	83.45	59.24	11.99	5.39
2017	90.90	62.17	8.93	4.95
2018	98.26	65.37	8.09	5.15
2019	105.92	68.76	7.79	5.23
2020	106.23	67.40	10.28	7.78

Sumber: BPS Kota Medan.



PDRB per kapita atau pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. PDRB Perkapita berdasarkan atas harga berlaku pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan lebih besar jika dibandingkan dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 106.23 juta rupiah, angka ini meningkat 11.51 persen jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 83.45 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 PDRB-ADHK Kota Medan telah mencapai 67.40 juta rupiah dan mengalami peningkatan sebesar 14 persen atau sebesar Rp 56.21 juta rupiah pada tahun 2016. Peningkatan PDRB perkapita ini juga diharapkan dapat terus meningkatkan daya beli masyarakat guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu juga memperhatikan distribusinya sehingga dapat lebih merata dan berkeadilan. Gambaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Medan per kapita atas dasar harga berlaku dan konstan tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.12
PDRB Perkapita Kota Medan Menurut Harga Berlaku dan Konstan
Tahun 2016 - 2020



Sumber BPS

2.2.1.4 Indeks Gini

Pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, hal ini dapat dilihat dari kehidupan masyarakat, baik kemampuan memenuhi kebutuhan hidup makanan maupun non makanan. Disamping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Kesenjangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah - masalah sosial. Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini. Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal



(uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Kesenjangan tersebut diilustrasikan dalam bentuk Kurva Lorenz. Apabila kedua garis distribusi tersebut berimpit, berarti pemerataan pendapatannya sempurna, sedangkan apabila daerah antara kedua garis distribusi tersebut sangat lebar maka pemerataan pendapatannya sangat timpang. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius. Adapun rasio ketimpangan (Gini Rasio) Kota Medan Tahun 2016 - 2020

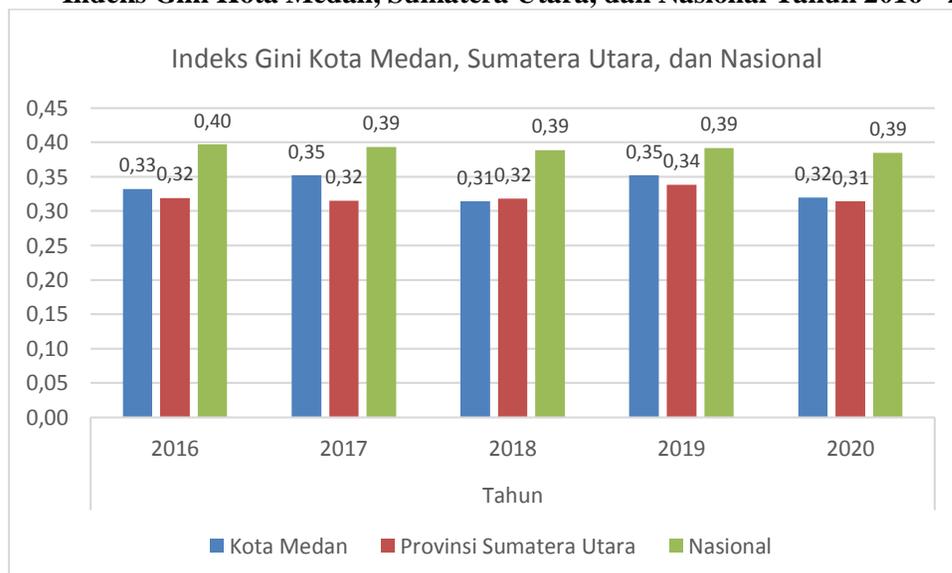
Tabel 2.14
Indeks Gini Kota Medan Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Kota Medan	0.332	0.352	0.314	0.352	0.314
Provinsi Sumatera Utara	0.319	0.315	0.318	0.338	0.314
Nasional	0.397	0.393	0.389	0.392	0,385

Sumber: BPS Kota Medan.

Dari Tabel di atas tampak bahwa Rasio Gini Kota Medan berfluktuasi sejak tahun 2016 - 2020 yakni sebesar 0.332 dan pada tahun 2016, sebesar 0.352 dan pada tahun 2017 menjadi 0.314 pada tahun 2018 dan menjadi 0.352 pada tahun 2019 dan 0,32 pada tahun 2020. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kota Medan pada tahun 2016 - 2020 termasuk wilayah yang ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kriteria moderat. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Medan masih belum bisa dinikmati secara merata oleh penduduk atau peningkatan pendapatan yang diterima golongan atas lebih besar daripada yang diterima golongan bawah. Adapun sebagai perbandingan rasio gini Kota Medan, Sumatera Utara dan Nasional divisualisasikan pada gambar berikut.

Gambar 2.13
Indeks Gini Kota Medan, Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2016 - 2020





2.2.1.5 Penduduk Miskin

Sebagaimana diketahui, kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional, yang fenomenanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, gender dan kondisi lingkungan. Secara umum kondisi kemiskinan ditandai oleh kerentanan, rendahnya akses terhadap pelayanan publik, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya, hal ini lah merupakan salah satu tantangan pembangunan kota saat ini dan saat mendatang. Adapun jumlah penduduk miskin Kota Medan tahun 2016 - 2020 diuraikan pada tabel berikut

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2016 – 2020 (jiwa)

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Jumlah Penduduk Miskin	206.870	204.000	186.450	183.790	183.540
Angka Kemiskinan	9.30%	9.11%	8.25%	8.08%	8.01%

Sumber : BPS Kota Medan.

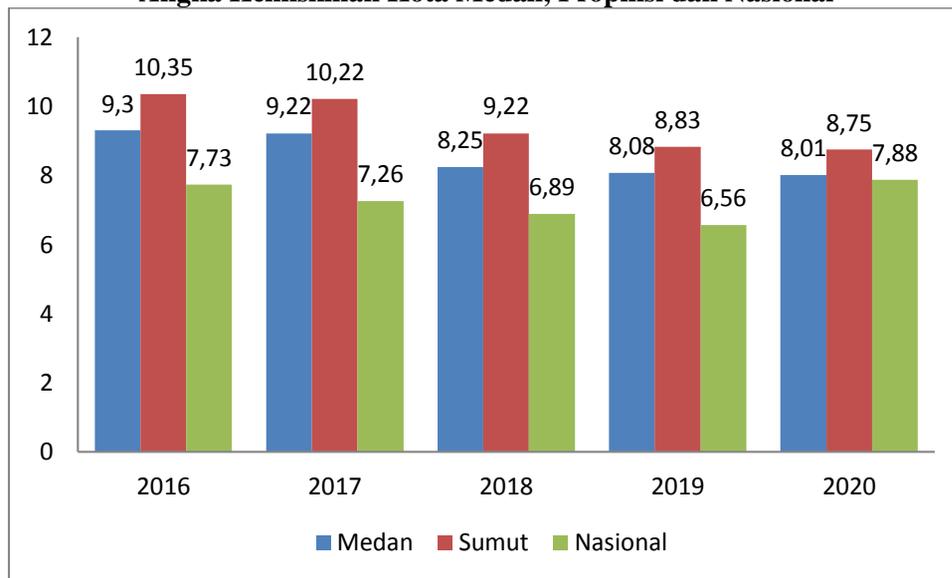
Dari Tabel di atas tampak bahwa jumlah penduduk miskin periode tahun 2016-2020 terus mengalami penurunan yakni pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 206.870 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 204.000 pada tahun 2018 186.450 pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin telah menjadi sebanyak 183.790 jiwa dan pada tahun 2020 sebesar 183.540. Ada penurunan angka kemiskinan pada tahun 2020, tetapi data tahun 2020 diperoleh pada Bulan Maret 2020 sebelum pandemi Covid-19.

Gambar 2.14
Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan





Gambar 2.15
Angka Kemiskinan Kota Medan, Propinsi dan Nasional



Dari tabel diatas Angka Kemiskinan untuk tahun 2020, Kota Medan masih lebih rendah dari Propinsi Sumatera Utara dan lebih tinggi dari angka capaian nasional. Tetapi dari jumlah penduduk maka Kota Medan menyumbang 14,3% dari angka kemiskinan sumatera Utara, yaitu 183.540 jiwa dari 1.283.310 penduduk miskin Propinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Kota Medan dalam pengentasan kemiskinan melakukan berbagai program di antaranya: Program PNPM Perkotaan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Jaminan Pelayanan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) yang diintegrasikan dengan JKN, Pemberian Makanan Tambahan untuk Gizi Buruk dan Gizi Kurang, Program Peningkatan Keterampilan untuk UMKM, Program Pendidikan bagi Panti Asuhan di PAUD, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pembangunan MCK, Penyediaan Air Bersih dan Sistem Sambungan dan Air program sanitasi, dan lain-lain.

Manfaat dari berbagai program yang dilaksanakan ini adalah untuk pengentasan kemiskinan dari pembangunan MCK, penyediaan air bersih dan sistem sambungan air limbah di Kota Medan adalah (1) terlayannya kebutuhan air bersih masyarakat berpenghasilan rendah, (2) masyarakat yang telah memiliki septictank terapung telah menggunakannya, sehingga lingkungan juga menjadi lebih bersih, (3) masyarakat telah menggunakan MCK komunal yang sudah dibangun, sehingga lingkungan menjadi lebih tertata dan sehat, dan (4) pencemaran lingkungan semakin berkurang karena air limbah rumah tangga tidak lagi tergenang di pekarangan rumah dan mencemari air tanah. Adapun realisasi program dalam mengentaskan kemiskinan adalah sebagai berikut:

a. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Tujuan pelaksanaan program JKN adalah : (1) Terselenggaranya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien, (2) Meningkatkan cakupan



masyarakat tidak mampu yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan Rumah Sakit, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Setiap peserta JKN berhak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan (RJ) dan rawat inap (RI), serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL) dan pelayanan gawat darurat. Pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Kota Medan telah diintegrasikan dengan BPJS. Kebijakan penyaluran dana dilakukan langsung kepada pemberi pelayanan kesehatan baik kepada Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit sebagai unit pelayanan kesehatan rujukan. Jumlah peserta JKN dan alokasi dana tahun 2016 - 2020 yang sudah diintegrasikan tersebut ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.16
Program JKN Kota Medan Tahun 2015-2019

Tahun	Program Pengentasan Kemiskinan	
	Peserta JKN (orang)	Alokasi (Rp Milyar)
[1]	[2]	[3]
2015	253.735	84.70
2016	253.174	70.03
2017	253.724	70.03
2018	329.822	91.03
2019	336.253	112.23

Sumber :Dinas Kesehatan Kota Medan.

Dari data Tabel 2.15 nampak bahwa alokasi dana program pengentasan kemiskinan melalui intervensi Program JKN pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 27.53 milyar jika dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan alokasi anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2019, diharapkan agar setiap peserta JKN mendapat kepastian jaminan yang baik dan sejahtera yang sesuai dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip equitas. Dengan terintegrasinya program JKN dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah daerah pada masyarakat miskin dengan harapan semakin meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan dengan titik beratnya pada upaya peningkatan kualitas menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat.

b. Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin)

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan rentan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga miskin dan rentan. Dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan



beras. Adapun implementasi program pengentasan kemiskinan melalui intervensi program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Kota Medan tahun 2015– 2019 ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.17
Program Raskin Tahun 2015-2019

Tahun	Program Raskin	
	Jumlah RTS	Jumlah Beras (ton)/Rp
[1]	[2]	[3]
2015	73.110	1.960.650
2016	73.110	1.960.650 kg
2017	73.110	Rp 106.151.760.000,-
2018	59.403	47.743 KPM
2019	57.553	57.003KPM

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Medan.

Penyelenggaraan program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi. Selain berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Program Raskin bermanfaat: (1) Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, (2) Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS, (3) Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi, (4) Stabilisasi harga beras di pasaran, (5) Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp 1.600,00/kg, dan menjaga stok pangan nasional, (6) Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Program Pembinaan Koperasi dan UMKM

Program pemberdayaan koperasi UMKM diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha mikro dalam rangka memperkuat usaha-usaha masyarakat, sekaligus meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM untuk menjadi usaha yang berdaya saing tinggi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan dan penguatan daya saing perekonomian daerah. Untuk lebih jelasnya, program pembinaan koperasi dan UMKM pada tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Program Peningkatan Keterampilan untuk UMKM
dan Realisasi Pembiayaan di Kota Medan Tahun 2016-2020

Tahun	No	Program Kemiskinan	Realisasi (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]
2015	1	Pelatihan Home Industri	133.595.000
	2	Pelatihan Akuntansi bagi Pelaku UMKM	80.775.000
	3	Pelatihan Bordir	111.632.000
	4	Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Aneka Limbah menjadi Produk Bernilai Ekonomi	107.607.500
	5	Pelatihan keterampilan tata Boga	112.520.000
2016	1	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap	669.570.000



		Pemanfaatan Sumber Daya dengan rincian kegiatan: (1) Pelatihan Jahit Menjahit2 angkatan di Kel. Sempakata dan Ladang Bambu, (2) Pelatihan Melukis di atas Kain di Kel. Helvetia Timur dan Kel. Sunggal, (3) Pelatihan pembuatan Souvenir/ Cendramata di Kel. Sililas dan Sei Seekaming, (4) Pelatihan Pengolahan Barang Bekas di Kel. Belawan dan Belawan Bahari	
	2	Pelatihan Diversifikasi Pengolahan Hasil Perikanan di Kel. Terjun dan Kel Paya pasir	148.265.000
2017	1	Pelatihan keterampilan pemanfaatan aneka limbah menjadi produk bernilai ekonomis yang dihadiri oleh 40 peserta dari kelurahan pada tanggal 4 s.d 10 September 2017 di Kelurahan Tanjung Mulia	91.724.500
	2	Keterampilan usaha home industri di kecamatan yang dihadiri oleh 30 peserta pada tanggal 2 s.d 7 September 2017 bertempat di Kantor Camat Medan Marelan	91.068.000
2018	1	Pelatihan Keterampilan Bordir sebanyak 30 orang	113,804,062
	2	Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Aneka Limbah menjadi Produk Bernilai Ekonomi sebanyak 40 orang	101,267,224
	3	Pelatihan Batik dan magang sebanyak 30 orang	209,449,592
	4	Pelatihan Kerajinan Kulit dan Magang sebanyak 50 orang	302,429,592
2019	1	Peningkatan keterampilan Home Industri di Kecamatan	90.573.000
	2	Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	130.192.000
	3	Pelatihan Kerajinan Batik sebanyak 50 Orang	135.914.000
	4	Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Aneka Limbah menjadi Produk bernilai ekonomis sebanyak 60 Orang	115.808.500
2020	1	Temu Konsultasi Pelaksanaan Bimbingan administrasi dan Perizinan bagi UMKM	119.900.000
	2	Fasilitasi Pembinaan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM di Era Ekonomi Digital	330.905.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.

Dari tabel di atas diketahui sampai tahun 2020 Pemerintah Kota Medan tetap menjalankan program peningkatan keterampilan yang diselenggarakan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Melalui berbagai program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan keterampilan (*skills*) dan kemampuan (*capabilities*), seperti kepemimpinan, manajemen, keuangan dan pencarian dana, program dan evaluasi secara berkelanjutan. Program ini adalah proses membantu individu atau kelompok untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan dan menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan melakukan perubahan khususnya dalam menghadapi pasar bebas yang telah diberlakukan sejak tahun 2015, termasuk melalui program-program lainnya. Walaupun program-program pembinaan terhadap koperasi dan UMKM terus dilakukan, namun harus diakui masih belum optimal, mengingat jumlah koperasi dan UMKM yang ada cenderung cukup besar sehingga memerlukan berbagai program fasilitasi dan pembinaan yang lebih luas dan berkelanjutan, khususnya terhadap kebutuhan prasarana



dan sarana pasar (pusat-pusat penjualan) bagi produk-produk UMKM guna meningkatkan akses pasarnya, termasuk promosi terpadu. Program pengembangan industri kecil menengah, peningkatan kemampuan teknologi industri, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, program diversifikasi dan peningkatan ketahanan pangan terkait dengan UMKM perlu dikaji kembali untuk dilaksanakan.

d. Program Pendidikan Bagi Panti Asuhan di PAUD

Pendidikan nonformal merupakan suatu program yang dekat dengan masyarakat dimana mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, salah satunya melalui program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini dapat menjadi jawaban bagi penyelenggaraan pendidikan nonformal maupun informal bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang ada di setiap lingkungan masyarakat. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dari sisi pendidikan bagi PAUD di panti asuhan yang dilakukan semuanya bersumber dari APBD.

Tabel 2.19
Program Pendidikan Bagi Panti Asuhan di PAUD di Kota Medan
Tahun 2015 - 2019

Tahun	Program/Kegiatan	Sasaran	Volume (eks)	Realisasi (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2015	Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan			
	Layanan terpadu pada per Pustakaaan pada Panti Asuhan dan Rumah Singgah	3 Panti Asuhan	1500350 Eks (@ 450 Eks, 1 Unit Rak	99.400.000
	Layanan Anak usia Dini Pada PAUD	5 PAUD	2.000 Eks Set Alat Peraga)	139.300.000
2016	Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan			
	Layanan terpadu pada per Pustakaaan pada Panti Asuhan dan Rumah Singgah	3 Panti Asuhan/ Rumah Singgah	350 Eks (@ 450 Eks, 1 Unit Rak)	110.600.000
	Layanan Anak usia Dini Pada PAUD	5PAUD	3.000 Eks (@ 500 Eks, 1Unit Rak, 1 Set Alat Peraga)	191.069.000
2017	Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan			
	Layanan terpadu pada per Pustakaaan pada Panti Asuhan dan Rumah Singgah	3 Panti Asuhan/ Rumah Singgah	350 Eks (@ 450 Eks, 1 Unit Rak)	67.297.500
	Layanan Anak usia Dini Pada PAUD	6 PAUD	3.000 Eks (@ 500 Eks, 1Unit Rak, 1 Set Alat Peraga)	132.111.000
2019	Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan			
	Layanan terpadu per Pustakaaan pada Panti Asuhan dan Rumah Singgah	4 Panti Asuhan/ Rumah Singgah	1200 Eks (@ 450 Eks, 1 Unit Rak)	73.970.000



	Layanan Anak usia Dini Pada PAUD	5 PAUD	2.000 Eks Alat Peraga	128.748.000
--	-------------------------------------	--------	--------------------------	-------------

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dari data tabel di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Medan sampai tahun 2019 tetap mengalokasikan anggaran untuk pendidikan di Pantai Asuhan di PAUD dengan harapan terpenuhinya tujuan pengembangan Anak Usia Dini yakni (a) kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur; serta (b) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah dengan mendorong komitmen seluruh lapisan masyarakat di dalam mengembangkan PAUD, dengan harapan dapat menambah pengetahuan tentang cara menstimulasi perkembangan sosial emosional anak usia 3-4 tahun. Hal ini disebabkan setiap anak perlu mendapat stimulasi rutin sedini mungkin dan terus menerus pada setiap kesempatan agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

e. Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan, ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan. Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah: (1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi Peserta PKH, (2) Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH, dan (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota RTSM/Keluarga Sangat Miskin (KSM). Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun (atau usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar) dan/atau ibu hamil/nifas. PKH memberikan bantuan tunai kepada RTSM dengan mewajibkan RTSM tersebut mengikuti persyaratan yang ditetapkan program, yaitu: (i) menyekolahkan anaknya di satuan pendidikan dan menghadiri kelas minimal 85% (delapan puluh lima persen) hari sekolah/tatap muka dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, dan (ii) melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan bagi anak usia 0-6 tahun, ibu hamil dan ibu nifas. Untuk lebih jelasnya, realisasi jumlah RTSM dan jumlah dana bantuan PKH pada tahun 2016 - 2020 ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel 2.20
Realisasi Jumlah RTSM dan Jumlah Dana Bantuan PKH
di Kota Medan Tahun 2015 - 2019

Tahun	Jumlah RTSM (KK)	Jumlah Dana Bantuan (Rp)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]
2015	16.309	30.108.551.250	21 Kecamatan
2016	29.309	35.515.171.401	21 Kecamatan
2017	29.036	14.518.000.000	21 Kecamatan
2018	51.534	174.406.090.000	43.645 PKM/21 Kec
2019	51.534	168.931.025.000	49.277 PKM/21 Kec

Sumber : PKH Kota Medan.

Berdasarkan atas data tabel 2.19 di atas diketahui bahwa jumlah RTSM yang mengikuti program PKH di Kota Medan cenderung fluktuatif, demikian juga alokasi biayanya, namun kepesertaannya tersebar di 21 (dua puluh satu) kecamatan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan program ini relatif cukup berhasil, terutama guna meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat terutama dari kelompok RTSM.

f. Pembangunan MCK, Penyediaan Air Bersih dan Sistem Sambungan Air Limbah

Salah satu kawasan yang menjadi kantong kemiskinan adalah kawasan Medan bagian Utara, khususnya di Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli serta Medan Marelan. Sebagian wilayah kecamatan tersebut adalah daerah pantai/pesisir yang salah satu fenomena alamnya adalah keterbatasan sumber air bersih/minum. Untuk itu, baik melalui APBD murni maupun kerjasama dengan pihak ketiga (PDAM Tirtanadi, Jaring Kesehatan Masyarakat (JKM) dan USAID) telah diselenggarakan program pembangunan MCK, penyediaan air bersih, pembangunan sarana sanitasi dan sistem sambungan air limbah pada kawasan-kawasan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan. Melalui program ini, masyarakat yang umumnya merupakan kelompok masyarakat kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan air bersih, sekaligus memperbaiki sanitasi lingkungannya secara lebih baik, bahwa perbaikan terhadap sanitasi juga berdampak pada kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat seperti pencegahan terhadap terjadinya kasus balita stunting.

Adapun realisasi program pembangunan MCK, penyediaan Air Bersih dan sistem sambungan Air Limbah di Kota Medan tahun 2015-2018 ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 2.21
Program Pembangunan MCK, Penyediaan Air Bersih dan
Sistem Sambungan Air Limbah di Kota Medan Tahun 2015-2018

Tahun	No	Program	Alokasi Dana
[1]	[2]	[3]	[4]
2015	1	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Cabang Labuhan, Amplas, dan Padang Bulan	3,022,000,000
	2	Pembuatan MCK Komunal dan Treatment	1,022,960,000
	3	Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah House Connection (Zona 9) Kecamatan Medan Perjuangan	7,215,800,000
	4	Pembuatan WC Terapung (Bio Filter) Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan	2,060,000,000



2016	1	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Cabang Labuhan, Amplas dan Padang Bulan	9.800.000.000
	2	Pembuatan MCK Komunal dan Treatment	1.500.000.000
	3	Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah House Connection (Zona 9) Kec. Medan Perjuangan	5.800.000.000
	4	Pembuatan WC Terapung (Bio Filter) Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan	4.600.000.000
2017	1	Pipa Distribusi Air Bersih untuk masyarakat Keca Medan Labuhan	1.141.700.000
	2	Pembuatan MCK Komunal Treatment	1.550.224.000
	3	Pembuatan Pipa Distribusi Air Limbah House Connection Zona 10 dan 11 Kecamatan Medan Perjuangan dan Kecamatan Medan Timur	7.813.700.000
	4	Pembuatan WC Terapung (Bio Filter)	-
	5	Pembuatan Pipa Distribusi Air Bersih MBR di Kecamatan Medan Selayang	1.144.614.000
	6	Pemasangan Pipa Distribusi Air Air Limbah di Zona I	1.440.940.000
	7	Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Untuk MBR di Kecamatan Medan Tuntungan	1.140.102.000
2018	1	Pembuatan Septic Tank Rumah Tangga (SNI) sebanyak 650 unit Tersebar di Kota Medan	7.014.700.000
	2	Pemasangan Pipa Sambungan Rumah Tangga Air Bersih sebanyak 200 SR tesebar di Kota Medan	6.703.802.700
	3	Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah di Zona 8,9,10,11 dan 12 sebanyak 421 SR yang tesebar di Kecamatan Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Timur dan Medan Kota	9.240.000.000
	4	Pembangunan Sumur Bor dan Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Kota Medan sebanyak 1 unit	1.500.768.900

Sumber: Bappeda Kota Medan.

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa beberapa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan diantaranya: pemasangan pipa distribusi air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Cabang Labuhan, Amplas, dan Padang Bulan, pembuatan MCK komunal dan treatment, pemasangan pipa distribusi air limbah *house connection* (Zona 9) Kecamatan Medan Perjuangan, pembuatan WC terapung (Bio Filter) Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan juga tetap dilakukan sampai 2019 di bidang fisik/lingkungan oleh Pemerintah Kota Medan.

Manfaat dari berbagai program yang dilaksanakan ini adalah untuk pengentasan kemiskinan dari pembangunan MCK, penyediaan air bersih dan sistem sambungan air limbah di Kota Medan adalah: (1) terlayannya kebutuhan air bersih masyarakat berpenghasilan rendah, (2) masyarakat yang telah memiliki septictank terapung telah menggunakannya, sehingga lingkungan juga menjadi lebih bersih, (3) masyarakat telah menggunakan MCK komunal yang sudah dibangun, sehingga lingkungan menjadi lebih tertata dan sehat, dan (4) pencemaran lingkungan semakin berkurang karena air limbah rumah tangga tidak lagi tergenang di pekarangan rumah dan mencemari air tanah.



Berdasarkan atas hasil evaluasi yang dilakukan maka dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tersebut berbagai tantangan yang muncul berhubungan dengan faktor struktural, kultural dan natural. Secara struktural faktor penghambat upaya menurunkan angka kemiskinan banyak disebabkan kebijakan-kebijakan nasional yang mempengaruhi dinamika makro ekonomi seperti: inflasi, laju pertumbuhan ekonomi yang progresif dan berkualitas. Secara kultural tantangan penurunan angka kemiskinan disebabkan kondisi-kondisi sosial budaya yang melekat pada kelompok masyarakat miskin, seperti: etos kerja yang rendah dan sikap-sikap membangun yang juga masih rendah, sedangkan faktor penghambat penurunan angka kemiskinan secara natural, disebabkan lapangan kerja yang masih terbatas, disamping pertumbuhan angkatan kerja yang relatif masih cukup tinggi dan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas pada kelompok masyarakat miskin. Oleh karena itu program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilaksanakan baik melalui program pemerintah maupun pemerintah kota harus terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk semaksimal mungkin dapat menurunkan jumlah masyarakat miskin yang masih ada melalui program-program yang berhubungan dengan faktor kultural dan natural.

Berbagai program keluaran dan *outcome* program penanggulangan kemiskinan di atas menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan selama kurun waktu tertentu berjalan relatif efektif. Walaupun dari sudut pandang ekonomi pembangunan ekonomi merupakan faktor utama menurunkan tingkat kemiskinan.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah. Terdapat tiga indikator IPM, yaitu indikator, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia disuatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kota Medan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan). Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan dari berbagai indikator, di antaranya, angka melek huruf, lama sekolah, dan konsumsi perkapita.

Angka melek huruf di Kota Medan selama tahun 2016 – 2020 menunjukkan peningkatan. Peningkatan angka melek huruf tersebut menggambarkan menurunnya jumlah penduduk yang buta aksara. Penurunan jumlah penduduk yang buta aksara selama periode tahun 2016 – 2020 diikuti dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2016



rata-rata lama sekolah 11,18 tahun, tahun 2017 angka rata-rata lama sekolah telah mencapai 11,25 tahun. Pada tahun 2018 menjadi rata-rata lama sekolah menjadi 11.37 tahun dan tahun 2019 rata-rata sekolah menjadi 11.38 tahun pada tahun 2020 menjadi 11.39 tahun.

Meningkatnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kota Medan tentu juga didukung konsumsi per kapita. Konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2020. Konsumsi per kapita pada tahun 2016 sebesar 646,92 pada tahun 2016 sebesar 646,92, tahun 2017 menjadi sebesar 650.62, tahun 2018 sebesar 653,09 dan tahun 2019 menjadi sebesar 655.67. Berbagai indikator tersebut di atas dapat dipergunakan untuk menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan selama tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.22
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan
Tahun 2016 – 2020

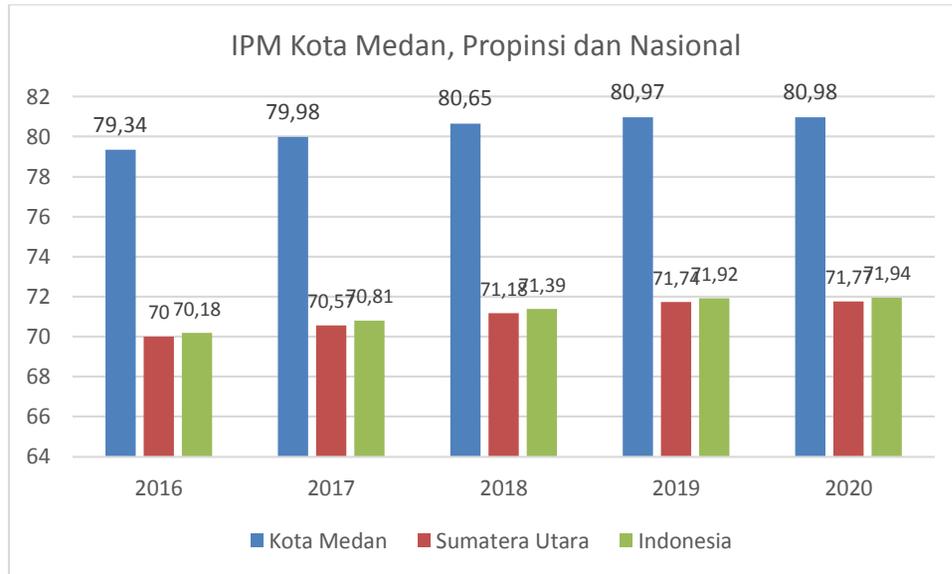
Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Medan	79,34	79,98	80,65	80,97	80,98
Sumatera Utara	70	70,57	71,18	71,74	71,77
Indonesia	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : BPS Kota Medan.

Dengan mengacu dari berbagai indikator tersebut dapat dikemukakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan selama tahun 2016–2020 cenderung mengalami peningkatan 2 persen dari tahun 2016 atau 0.4 persen per tahun. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat cenderung semakin membaik, seiring dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Di samping itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut juga menunjukkan semakin meningkatnya tingkat daya beli dan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan tingkat pendidikannya yang ditandai dengan bertambahnya usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan meningkatnya konsumsi (daya beli) per kapita masyarakat Kota Medan. Ada sebagai perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kota Medan, Sumatera Utara dan Nasional divisualisasikan pada gambar berikut,



Gambar 2.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Medan, Sumatera Utara dan Nasional



Sumber BPS

Berdasarkan profil pembangunan Kota Medan sebagaimana yang disajikan di atas, maka diketahui Kota Medan sesungguhnya terus tumbuh akan berkembang dari waktu ke waktu, dengan berbagai keberhasilan yang diprioritaskan diberbagai bidang pembangunan kota. Namun demikian, dibalik keberhasilan-keberhasilan tersebut, tentunya masih ada masalah dan tantangan pokok yang harus dapat diatasi secara bersama-sama dengan seluruh *stakeholder* pembangunan kota.

Tabel 2.23
Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Medan Tahun 2016 – 2020

TAHUN	IPM	IPM (LAKI-LAKI)	IPM (PEREMPUAN)	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	INDEKS PERBERDAYAAN GENDER (IDG)
2016	79,34	-	-	-	-
2017	79,98	84,35	78,73	93,34	61,23
2018	80,65	84,78	79,68	93,98	63,36
2019	80,97	85,09	80,00	94,02	63,93
2020	80,98	85,12	80,01	94,00	63,89

Sumber : BPS

2.2.1.7 Angka Melek Huruf

Perkembangan angka melek huruf di kota Medan cenderung semakin membaik yang ditandai dengan semakin mengecilnya warga masyarakat yang buta huruf. Angka ini tidak akan menjadi lebih besar sebab *drop out*, terutama *drop out* pada kelas 1 (satu) dan 2 (dua) potensial menjadi buta huruf. Meskipun adanya angka *drop out* di masa datang, mereka tidak bisa dikatakan sebagai warga yang buta huruf, karena sesungguhnya sebelum



memasuki dunia sekolah telah mendapatkan keterampilan membaca dan menulis. Pemberantasan buta huruf sesungguhnya memiliki substansi agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini hanya bisa terjadi apabila substansi buta huruf aksara sudah dapat ditingkatkan menjadi keberaksaraan fungsional. Dengan keberaksaraan fungsional semua warga akan dapat memfungsikan kegiatan membaca dan menulis untuk memenuhi informasi dan pengetahuan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas hidup.

Tabel 2.24
Angka Melek Huruf Kota Medan Tahun 2015 – 2020 (persen)

Indikator	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Angka melek huruf (usia > 15 tahun)	NA	NA	48,01	73,41	76,74	99,97

Sumber : LPPD Kota Medan

2.2.1.8 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua.

Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang. Angka Harapan Lama di Kota Medan pada tahun 2020 mencapai 14,74 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun 2016 (14.06 tahun). Sementara untuk Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Medan pada tahun 2020 mencapai 11.39 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun 2016 (11.18 tahun). Kondisi ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Medan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMA atau putus sekolah dikelas 2 SMA. Adapun Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.25
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
Kota Medan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14.06	14.45	14.72	14.73	14.74
2	Rata-Rata Lama Sekolah	11.18	11.25	11.37	11.38	11.39

Sumber: BPS Kota Medan



2.2.1.9 Angka Harapan Hidup

Aspek kesehatan merupakan salah satu unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Oleh karena itu pembangunan kesehatan diarahkan kepada upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia serta mutu kehidupan guna mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, produktif, sejahtera lahir dan batin menuju peradaban yang madani dalam menghadapi persaingan regional dan global. Secara khusus, tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta meningkatnya sistem *surveilans, monitoring* dan informasi tentang kesehatan

Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan disuatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya. Angka harapan hidup masyarakat Kota Medan setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Medan semakin membaik. Pada tahun 2020 angka harapan hidup mencapai 73.14 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 73.14 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kota Medan ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baiknya akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, meningkatnya perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, kondisi kesehatan lingkungan yang semakin membaik serta meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Medan. Adapun Angka Harapan Hidup di Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.26
Angka Harapan Hidup Kota Medan Tahun 2015 - 2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Angka Harapan Hidup (Tahun)	72.28	72.34	72.40	72.64	72.98	73.14

Sumber: Dinas Kesehatan

2.2.1.10 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun disajikan pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.27

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Pelayanan di Kota Medan Tahun 2015 - 2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (Persen)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100

Sumber: Dinas Kesehatan

Upaya penanganan gizi buruk di Kota Medan selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan yang baik, hal ini ditunjukkan sejak tahun 2016 -2020 cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan telah mencapai 100 persen.

Terkait dengan perawatan balita gizi buruk, dipahami bahwa balita dengan gizi buruk dapat memberikan kontribusi bagi angka kematian dan angka kesakitan bayi. Pembangunan kesehatan suatu bangsa dimulai dengan menciptakan generasi yang sehat dan produktif, oleh karenanya penanganan dan perawatan balita gizi buruk penting untuk diprioritaskan. Seperti yang ditarget secara nasional program perbaikan gizi nasional yaitu menurunkan prevalensi gizi buruk dan kurang pada tahun 2017. Kota Medan sendiri telah mampu menangani kasus-kasus gizi buruk yang terjadi dan mendapatkan perawatan yang semakin baik. Namun pencegahan agar jangan terjadi kasus-kasus gizi buruk harus lebih digiatkan lagi melalui program kesehatan ibu dan anak (KIA) di pelayanan-pelayanan kesehatan masyarakat. Analisis data cakupan perawatan gizi buruk di Kota Medan telah menunjukkan hasil yang optimal dalam 5 tahun terakhir ini (2016-2020), yaitu mencapai angka 100% (seratus persen). Artinya, seluruh balita gizi buruk yang ditemukan telah mendapat perawatan di sarana kesehatan. Namun demikian perlu pencegahan agar kasus gizi buruk jangan sampai terjadi kembali dalam lima tahun kedepan.

2.2.1.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun), dinyatakan dalam persentase. Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Medan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(Persen)	47.56	64.35	65.99	66.72	63.62

Sumber: BPS



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 16.06 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 menggambarkan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat menyebabkan semakin banyaknya angkatan kerja yang lebih memilih untuk bekerja dibandingkan dengan meningkatkan kompetensinya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2.2.1.12 Tingkat Pengangguran Terbuka

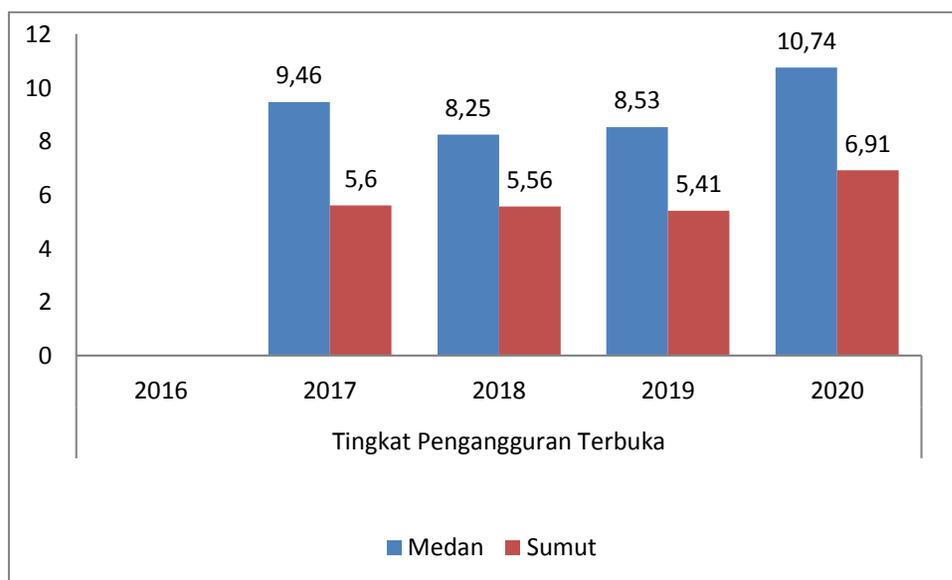
Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja, dinyatakan dalam persentase. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.29
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Medan Tahun 2016 - 2020

Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Medan	NA	9.46	8.25	8.53	10.74
Sumatera Utara		5.6	5.56	5.41	6.91

Sumber: BPS

Gambar 2.17
TPT Kota Medan dan Propinsi Sumatera Utara



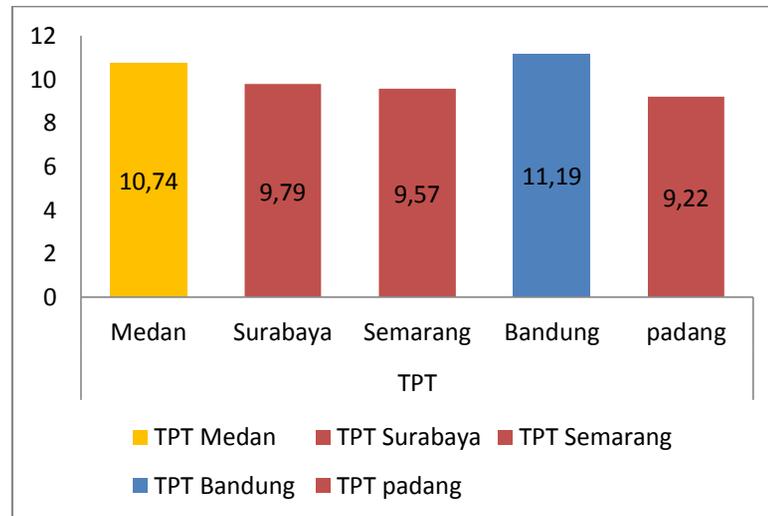
Sumber BPS

Berdasarkan data di atas tampak bahwa pada tahun 2020 tingkat pengangguran relatif mengalami peningkatan sebesar 00.98 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 penambahan angkatan kerja baru yang massif dari Kota Medan dan yang berasal dari luar Kota Medan tidak dapat diimbangi dengan penambahan lapangan kerja yang tersedia sehingga jurang (gap) sedikit mengalami



peningkatan, hal ini mengindikasikan terdapat kecenderungan yang searah antara lapangan kerja dengan jumlah pengangguran. Atau peningkatan angkatan kerja yang ada di Kota Medan relative tidak dapat dibarengi dengan perluasan lapangan kerja yang lebih tinggi, sehingga tingkat pengangguran mengalami peningkatan.

Gambar 2.18
TPT Kota Medan dan Kota Besar Lainnya



Sumber BPS

Dari tabel diatas dapat dilihat jika Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Kota Besar meliputi Kota Medan, Surabaya, Semarang, Bandung dan Padang maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Medan ada pada kategori tertinggi kedua. Hal ini merupakan dampak dari pandemi covid 19 yang mendera sektor perkonomian sehingga banyak terjadi perumahan karyawan. Hal ini harus dicermati sebagai suatu tantangan untuk membuka lapangan pekerjaan serta mendorong kegiatan UMKM untuk menjaga perekonomian Kota Medan.

2.2.1.13 Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Persentase PAD Terhadap Pendapatan merupakan perbandingan antara realisasi PAD dengan realisasi pendapatan, dinyatakan dalam persentase. Persentase PAD terhadap pendapatan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kota Medan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	31,41	39,46	38,47	33,15	37,85

Sumber: LPPD 2020



Tabel di atas menunjukkan bahwa Persentase PAD terhadap pendapatan Kota Medan selama 5 tahun terakhir cukup berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat.

2.2.1.14 Opini BPK

Opini BPK merupakan penilaian atas laporan keuangan daerah dalam hal ini laporan keuangan Pemko Medan yang dilakukan secara periodik setiap tahun. Hasil penilaian BPK atas laporan keuangan Pemko Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.31
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Medan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber: BPKAD

Tabel di atas menunjukkan bahwa Opini BPK Terhadap laporan keuangan Pemko Medan periode 2016 sampe 2020 masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian dan pada tahun 2020 dapat ditingkatkan dengan Wajar Tanpa Pengecualian dan capaian ini harus dipertahankan.

2.2.1.15 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh ketersediaan pangan utama yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Ketersediaan Pangan Utama di Kota Medan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun					
	satuan	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Ketersediaan Pangan Utama (Persen)	persen	99.43	102.94	106.42	154.87	154.87*

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan

Dari tabel di atas menunjukkan ketersediaan pangan utama Kota Medan cenderung meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yakni 99.43 di tahun 2016. Namun pada tahun-tahun berikutnya meningkat sehingga mencapai 154.87 di tahun 2019 dan tahun 2020. Ketersediaan pangan utama ini menunjukkan tingkat keragaman dan ketersediaan konsumsi pangan di Kota Medan.

2.2.1.16 Struktur Ekonomi

Struktur PDRB Kota Medan menggambarkan kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Medan. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar sampai terkecil dalam pembentukan PDRB selama periode tahun 2016 – 2020 adalah



lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor rata-rata sebesar 25.23 persen, konstruksi rata-rata sebesar 19.18 persen, industri pengolahan rata-rata sebesar 14.5 persen, real estate rata-rata sebesar 8.8 persen, jasa keuangan dan asuransi rata-rata sebesar 6.4 persen, transportasi dan pergudangan rata-rata sebesar 6.2 persen, informasi dan komunikasi rata-rata sebesar 5 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum rata-rata sebesar 3 persen jasa perusahaan rata-rata sebesar 2.6 persen, jasa pendidikan rata-rata sebesar 2.6 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib rata-rata sebesar 1.8 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial rata-rata sebesar 1.62 persen, jasa lainnya rata-rata sebesar 1.16 persen, pertanian, Kehutanan, dan Perikanan rata-rata sebesar 1.18 persen, pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang rata-rata sebesar 0.2 persen, pengadaan listrik dan gas rata-rata sebesar 0,09 persen, sedangkan pertambangan dan penggalian tidak memiliki kontribusi terhadap pembentukan PDRB.

Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah kecenderungan meningkatnya kontribusi sektor jasa-jasa terhadap PDRB, karena sektor ini cenderung menumbuhkan lapangan kerja secara masif di samping produktivitasnya yang juga cenderung tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu kebijakan untuk dapat mengoptimalkan kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB pada masa datang. Struktur PDRB Kota Medan menurut lapangan usaha dan Atas Dasar Harga Berlaku selama tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.33
Struktur Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan
Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2016 - 2020 (Persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,22	1,25	1,22	1,11	1,11
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	14,90	14,84	14,61	14,25	14,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,19	0,20	0,20	0,19	0,20
F	Konstruksi	18,85	19,23	19,32	19,35	18,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,33	24,64	24,96	25,55	25,71
H	Transportasi dan Pergudangan	6,30	6,36	6,30	6,38	5,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,10	3,07	3,03	3,04	2,73
J	Informasi dan Komunikasi	4,95	5,10	5,13	5,15	5,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,99	6,67	6,41	6,07	6,01
L	Real Estate	8,35	8,76	8,92	8,89	9,51
MN	Jasa Perusahaan	2,50	2,59	2,59	2,68	2,78
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,83	1,83	1,82	1,81	1,93



P	Jasa Pendidikan	2,68	2,57	2,56	2,55	2,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,61	1,62	1,68	1,71	1,74
RSTU	Jasa lainnya	1,12	1,16	1,17	1,17	1,19
	PDRB	100.0	100.00	100.00	100.0	100,0

Sumber: BPS Kota Medan

2.2.8. Ekspor dan Impor

Aktivitas dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor sangat diperlukan terutama untuk negara-negara yang memiliki bentuk perekonomian terbuka. Adanya perbedaan berupa keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif merupakan faktor yang selanjutnya dapat mendorong terjadinya pertukaran di antara dua Negara/Kota. Kegiatan pertukaran berupa impor yang dilakukan oleh suatu negara ditujukan untuk memenuhi permintaan suatu negara terhadap komoditas yang dihasilkan dari luar negeri. Kegiatan perdagangan internasional berupa impor dikatakan tidak dapat dihindarkan karena adanya perbedaan keunggulan komparatif yang berdampak pada biaya produksi dan harga. Perkembangan ekonomi Kota Medan tahun 2020 tidak terlepas dari kegiatan ekspor dan impor yang memiliki peran penting untuk memperluas pasar produk yang dihasilkan dan sekaligus mendukung perekonomian Kota Medan yang semakin terbuka. Untuk nilai ekspor Kota Medan dicatat berdasarkan nilai *free on board* (fob), yaitu nilai barang ekspor hingga berada di atas kapal baik di Pelabuhan Belawan tahun 2016 - 2020 yang siap diekspor ke negara tujuan. Begitupun nilai impor yang dicatat berdasarkan nilai *cost insurance & freight* (cif) yang merupakan nilai barang di atas kapal berdasarkan pelabuhan bongkar. Ekspor melalui wilayah Kota Medan menurut kelompok barang ekonomi adalah pertanian, pertambangan dan penggalian, industri dan lainnya. Nilai ekspor dan impor melalui wilayah Kota Medan selama tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Nilai Ekspor Melalui Wilayah Kota Medan
Menurut Kelompok Barang Ekonomi Tahun 2016 - 2020

Tahun	Ekspor (Nilai FO B000 USD)	Impor (Nilai CIF 000USD)	Surplus Perdagangan (000 USD)
[1]	[2]	[3]	[4]
2015	74,296.92	69,621.19	4,675.73
2016	79,948.23	67,575.40	12,372.83
2017	88,743.55	74,555.74	14,187.81
2018	90,639.48	77,876.69	12,762.79
2019	87,367.53	70,547.31	16,820.22
2020	NA	NA	NA

Sumber: BPS Kota Medan.

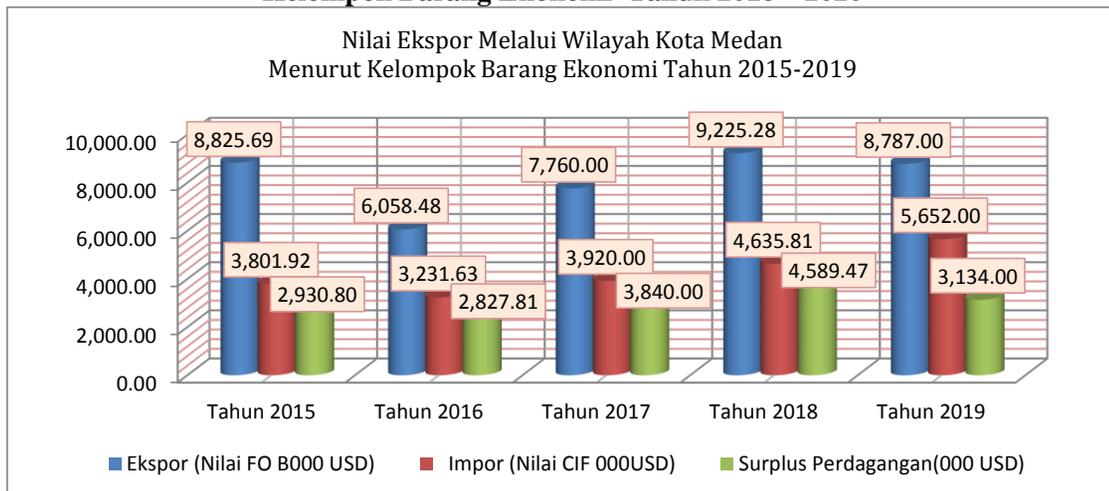
Berdasarkan data tabel di atas nilai ekspor melalui wilayah Kota Medan yang dicatat nilai *free on board* (fob) cenderung mengalami peningkatan sampai tahun 2018 yakni secara rata-rata 6.91 persen kecuali tahun 2019 mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 3.61 persen pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan ekspor



melalui wilayah Kota Medan disebabkan kondisi ekonomi global/regional yang relatif belum kondusif. Di samping itu, kegiatan investasi dan arus modal diperkirakan akan dapat pulih sebagai dampak secara perlahan peningkatan peringkat kredit (*credit rating*) beberapa negara Eropa akhir-akhir ini.

Sedangkan untuk nilai impor tahun 2019 melalui wilayah Kota Medan juga mengalami peningkatan sampai tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Dari tabel 2.32 di atas nilai impor melalui wilayah Kota Medan yang dicatat berdasarkan nilai *cost insurance & freight* (CIF) mengalami peningkatan sebesar 11.86 persen pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2015, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan yakni sebesar 9.41 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini sesuai dengan kecenderungan ekonomi terbuka pada saat ini sekaligus untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, maka setiap daerah cenderung hanya akan menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan kompetitif baik dilihat dari sisi kualitas maupun harga. Selanjutnya dari selisih ekspor dan impor diperoleh surplus perdagangan sebesar 16,820.22 USD pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 259.74 persen jika dibandingkan dengan tahun 2015. Jika ditinjau dari kecenderungan ini menunjukkan bahwa Kota Medan tetap memiliki posisi strategis dalam perdagangan dalam dan luar negeri khususnya dengan daerah-daerah di Indonesia bagian barat. Peningkatan impor terutama didorong oleh pertumbuhan dalam bentuk investasi mesin dan perlengkapan yang berasal dari impor, serta alat angkut impor. Trend peningkatan konsumsi dalam negeri mendorong kebutuhan mesin-mesin baru untuk menjamin kecukupan kapasitas produksi ke depan. Oleh karena aktivitas perdagangan internasional atau perdagangan di antara negara-negara terjadi karena adanya perbedaan spesialisasi dalam menghasilkan atau memproduksi komoditas baik berupa barang maupun jasa. Spesialisasi yang dimiliki oleh satu negara untuk menghasilkan barang maupun jasa akan menyebabkan biaya untuk menghasilkan barang maupun jasa tersebut lebih murah. Perbedaan spesialisasi baik dalam bentuk sumberdaya maupun teknologi yang selanjutnya mendorong terciptanya permintaan dan penawaran dalam perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Dengan membandingkan nilai ekspor dan impor melalui wilayah Kota Medan, tampak jelas bahwa nilai ekspor lebih besar dari pada nilai impor. Kondisi ini mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Adapun nilai ekspor dan impor melalui wilayah Kota Medan tahun 2015 - 2020 dapat divisualisasikan pada gambar berikut.

Gambar 2.19
Nilai Ekspor Melalui Wilayah Kota Medan Menurut
Kelompok Barang Ekonomi Tahun 2016 – 2020



Selanjutnya, dengan adanya penandatanganan kesepakatan Perdagangan Bebas juga memberikan peluang pasar dan tekanan pada tingkat daya saing industri local serta menjadi tantangan bagi seluruh pelaku usaha (sektor swasta) untuk dapat mendapatkan peluang yang seluas-luasnya dengan terjadinya revolusi industry 4.0. Oleh karena itu, dari sisi pemerintah daerah perlu terus memformulasikan kebijakan dan program yang terpadu untuk lebih menggairahkan ekspor-impor terutama dari sisi debirokratisasi dan deregulasi.

2.2.9. Angka Partisipasi Kasar

Sekolah sebagai lembaga pendidikan resmi, dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara berencana, sengaja, terarah, sistematis, oleh para pendidik profesional dengan program yang dituangkan kedalam kurikulum untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar akan mampu menjadi potensi pembangunan apabila berkualitas dan dibina dengan baik. Pembinaan yang baik akan menghasilkan mutu angkatan kerja yang baik. Mutu angkatan kerja antara lain tercermin dalam tingkat pendidikan dan latihan. Selanjutnya keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kota di bidang pendidikan dapat diketahui berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia



sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Adapun Angka Partisipasi Kasar di Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.35

Angka Partisipasi Kasar di Kota Medan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
SD/MI (%)	129.52	124.68	120.80	124.68	112.13
SLTP/MTs (%)	123.89	120.93	127,50	126.46	133.97

Sumber: Dinas Pendidikan, *BPS

Dari tabel di atas menunjukkan nilai APK pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. APK SD/MI tertinggi sebesar 129,52% di tahun 2016 dan terendah sebesar 112.13% di tahun 2020, APK SMP/MTs tertinggi sebesar 133.97% di tahun 2020 dan terendah 120.93% ditahun 2017.

2.2.10. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Adapun Angka Partisipasi Murni di Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Tabel 2.34 berikut.

Tabel 2.36

Angka Partisipasi Murni di Kota Medan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
SD/MI (%)	104.75	104.74	102.03	100.06	89.60
SLTP/MTs (%)	87.52	87.52	95,33	95.71	76.28

Sumber: Dinas Pendidikan

Dari tabel di atas menunjukkan nilai APM pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. APM SD/MI tertinggi sebesar 104.75% di tahun 2016 dan terendah sebesar 89.60% di tahun 2020, APM SMP/MTs tertinggi sebesar 95.71% di tahun 2018 dan terendah 76.28% ditahun 2020. Data ini memberi makna bahwa pada tahun 2020 hanya 89.60% penduduk pada kelompok umur SD/MI yang masih sekolah, dan 76,28 % penduduk kelompok umur SLTP/MTs yang masih sekolah. Dengan kata lain masih terdapat penduduk pada kelompok umur SD/MI dan SLTP/MTs yang tidak bersekolah.



2.2.11. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Medan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	90.74	90.74	53,94	57.46	57.46

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, *BPS

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Medan selama periode 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun yakni angka partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar 90.74 persen, angka partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2018 sebesar 53.94 persen dan partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar 57.46 persen.

2.2.12. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga Jumlah Keluarga Sejahtera P1 dan P2 di Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Tabel 2.37 berikut.

Tabel 2.38
Indeks Kedalaman Kemiskinan

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Keluarga Sejahtera P1 (Persen)	persen	1.51	1.56	1.50	1.16	1.08
Keluarga Sejahtera P1 (Persen)	persen	0.21	0.32	0.37	0.09	0.23

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas tampak bahwa besarnya Indeks Kedalaman Kemiskinan P1 Kota Medan Tahun 2016 sampai dengan 2020 berfluktuasi dan cenderung menurun yakni pada tahun 2016 besarnya 1.51 persen dan kemudian menurun pada tahun 2020 sebesar 1.08 persen, sedangkan indeks kedalaman kemiskinan P2 Kota Medan Tahun 2016 sampai dengan 2020 juga berfluktuasi dan cenderung menurun yakni pada tahun 2016 besarnya 0.21 persen dan kemudian menurun pada tahun 2019 sebesar 0.09 persen dan mencapai



0,23 pada tahun 2020. Untuk itu, diperlukan perhatian yang lebih serius dari instansi yang terkait dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ini.

2.2.13. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Pembangunan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh tingginya kesempatan kerja, dengan demikian jumlah penduduk Kota Medan yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berupa proses produksi Untuk mewujudkan program pembangunan kota yang berhasil guna dan berdaya guna perlu didukung oleh sumber daya manusia yang produktif. Oleh karena sumber daya manusia berperan penting dalam proses pembangunan kota, karena sumber daya manusia merupakan penggerak faktor-faktor produksi. Sumber daya manusia yang dimaksudkan di sini adalah penduduk kota yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Jumlah penduduk Kota Medan yang termasuk dalam angkatan kerja selama tahun 2016–2020 dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.39

Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Medan Tahun 2016 – 2020 (Jiwa)

No	Kegiatan Utama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Angkatan Kerja	973,156	1,073,908	1,130,034	1,104,418	1,134,643
	Bekerja	863,783	972,274	1,020,281	1,010,253	1,012,820
	Pengangguran	113,486	101,626	91,753	94,165	121,823
2	Bukan Angkatan Kerja	719,296	594,983	414,873	701,879	648,888
	Sekolah	276,080	190,208	182,827	197,160	179,124
	Mengurus Rumah Tangga	339,556	322,428	326,831	326,792	377,065
	Lainnya	116,169	82,347	63,561	73,509	92,699
	Jumlah	836,782	1,668,891	1,685,253	180,6297	1,783,531
	Rasio Penduduk	0.510	0.582	0.605	0.559	0.636

Sumber: BPS Kota Medan.

Berdasarkan tabel di atas jumlah angkatan kerja periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuasi yakni pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja sebanyak 973.156 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan pengangguran) dan 719.296 jiwa bukan angkatan kerja (terdiri dari mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya) dan pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja sebanyak 1.134.643 jiwa adalah angkatan kerja (terdiri dari yang bekerja dan pengangguran) dan jumlah yang bekerja sebanyak 1.012.820 jiwa dan pengangguran mencapai 121.823 jiwa. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana banyak perusahaan yang menghadapi tantangan berat dalam menjalankan roda bisnis dan memilih opsi merumahkan sebagian karyawan untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.



2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Peranan sektor ekonomi suatu daerah terhadap pembentukan PDRB menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah. Tingginya peranan suatu sektor dalam perekonomian, memberikan gambaran bahwa sektor tersebut merupakan sektor andalan yang terus dapat dikembangkan serta menjadi pendorong roda perekonomian semakin berkembang. Distribusi persentase PDRB sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusi terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB, sehingga tampak sektor-sektor andalan yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah yang bersangkutan.

Dari data PDRB sebelumnya, menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kota Medan tahun 2016 – 2020 berdasarkan rata-rata kontribusi sektor terhadap PDRB Kota Medan. Kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Medan dari yang memberikan kontribusi terbesar sampai terkecil dalam pembentukan PDRB selama periode tahun 2016 – 2020 adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor rata-rata sebesar 25.23 persen, konstruksi rata-rata sebesar 19.18 persen, industri pengolahan rata-rata sebesar 14.5 persen, real estate rata-rata sebesar 8.8 persen, jasa keuangan dan asuransi rata-rata sebesar 6.4 persen, transportasi dan pergudangan rata-rata sebesar 6.2 persen, informasi dan komunikasi rata-rata sebesar 5 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum rata-rata sebesar 3 persen jasa perusahaan rata-rata sebesar 2.6 persen, jasa pendidikan rata-rata sebesar 2.6 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib rata-rata sebesar 1.8 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial rata-rata sebesar 1.62 persen, jasa lainnya rata-rata sebesar 1.16 persen, pertanian, Kehutanan, dan Perikanan rata-rata sebesar 1.18 persen, pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang rata-rata sebesar 0.2 persen, pengadaan listrik dan gas rata-rata sebesar 0,09 persen, sedangkan pertambangan dan penggalian tidak memiliki kontribusi terhadap pembentukan PDRB.

Laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2016 - 2020 cenderung menunjukkan peningkatan yaitu tahun 2015 sebesar 5.74 persen, tahun 2016 sebesar 7,16 persen, tahun 2017 sebesar 5,81 persen, tahun 2018 sebesar 5,92 persen dan tahun 2019 sebesar 5.93 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2016 dibandingkan



dengan tahun 2015 ini akibat adanya percepatan investasi ekonomi global yang berdampak pada ekonomi negara-negara berkembang serta membuka kesempatan bagi angkatan kerja yang mencari pekerjaan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB per kapita. Semakin tinggi PDRB yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Secara rinci RDRB per kapita sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.7 di atas menunjukkan terjadinya kenaikan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2016 - 2020 yakni sebesar 72.58 juta perkapita/tahun pada tahun 2015, menjadi 82.76 juta perkapita/tahun pada tahun 2016, kemudian menjadi 75.03 juta perkapita/tahun pada tahun 2017, kemudian menjadi 88.91 juta perkapita/tahun pada tahun 2018 dan menjadi 96.32 juta perkapita/tahun pada tahun 2019. Peningkatan PDRB per kapita tersebut, belum sepenuhnya menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat. Hal tersebut, disebabkan beberapa faktor inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat Untuk melihat perkembangan daya beli masyarakat secara riil digunakan PDRB berdasarkan harga konstan. Berdasarkan harga konstan, PDRB per kapita Kota Medan selama tahun 2016 - 2020 atas dasar harga konstan meningkat secara rata-rata sekitar 6,32 persen/tahun yakni 51,76 juta perkapita/tahun tahun 2015, kemudian 59.03 juta perkapita/tahun pada tahun 2016, menjadi 53.26 juta perkapita/tahun tahun 2017, menjadi 59.15 juta perkapita/tahun tahun 2018 dan menjadi 62.53 juta perkapita/tahun pada tahun 2019.

Selain PDRB indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah inflasi. Tingkat inflasi di Kota Medan selama periode tahun 2013-2017 cenderung menunjukkan angka yang berfluktuasi dan cenderung menurun yakni sebesar 3.32 persen selama tahun 2015, menjadi sebesar 6.60 selama tahun 2016, sebesar 3,18 persen pada tahun 2017, sebesar 1.00 persen pada tahun 2018 dan 2.43 persen pada tahun 2019. Sedangkan menurut komoditi yang mempengaruhi inflasi tahun 2017 cenderung didominasi oleh sandang, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olah raga serta transportasi dan komunikasi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya inflasi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi, mekanisme pasar dan kebijakan Pemerintah Pusat. Berdasarkan atas data tersebut di atas, maka Kota Medan merupakan salah satu pasar potensial yang besar, didukung oleh jumlah penduduk yang besar pada masa yang akan datang.



2.3.1.1. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita

Tingkat konsumsi masyarakat dapat menggambarkan karakteristik masyarakat, pada masyarakat yang ekonominya belum mapan biasanya sebagian besar pendapatan akan dialokasikan kepada kebutuhan pokok. Sedangkan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mapan cenderung lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan di Kota Medan mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 yakni, jumlah pengeluaran rata-rata perkapita sebulan menurut kelompok barang makanan. Adapun besarnya pengeluaran per kapita per bulan di Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.40
Pengeluaran Per Kapita Per Bulan di Kota Medan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Pengeluaran Per Kapita per Bulan	Rupiah	1.199.417	1.217.750	1.237.083	1.252.750	1.240.833

Sumber: BPS Kota Medan

Gambar 2.20
Pengeluaran Perkapita Per Bulan di Kota Medan Tahun 2016 - 2020



2.3.1.2. Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Kasus kriminalitas di Kota Medan tahun 2016 - 2020 untuk Jenis Tindak Pidana (JPT) cenderung mengalami penurunan yakni secara rata-rata sebesar 5.55 setiap tahun, sedangkan untuk Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) untuk periode tahun 2016 - 2020 mengalami peningkatan yakni secara rata-rata sebesar 4.09 persen. Kasus kriminal yang sangat



menonjol adalah curas, curat, curanmor, anirat, judi, peras/ancam, narkoba, penggelapan dan penipuan. Adapun kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Medan selama tahun 2016 - 2020 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Jumlah Jenis Tindakan Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana Tahun 2016 - 2020

No	Jenis Kejadian	2016	2017	2018	2019	2020
		JTP	JTP	JTP	JTP	JTP
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[6]	[7]
1	Curas	479	416	305	294	272
2	Curat	1.399	1396	1.171	985	1.018
3	Curanmor	1.782	1427	1.242	1.261	1.079
4	Anirat	1.028	981	906	836	901
5	Judi	434	444	235	58	132
6	Peras/Ancam	163	142	114	102	91
7	Narkoba	1.898	1028	1.852	2.117	2.350
8	Penggelapan	1.385	1040	1.125	1.086	1.166
9	Penipuan	593	796	817	852	1.206
Jumlah Kasus Menonjol		2,687	1753	1868	1.671	1845
Jumlah Kasus		11.369	9.423	9.635	9.262	10.060
		PTP	PTP	PTP	PTP	PTP
1	Curas	394	306	206	213	195
2	Curat	999	852	819	723	687
3	Curanmor	546	389	303	361	306
4	Anirat	749	724	668	646	680
5	Judi	410	431	227	62	138
6	Peras/Ancam	149	160	112	101	54
7	Narkoba	1.890	856	1.679	1.827	2.403
8	Penggelapan	472	625	672	742	741
9	Penipuan	288	416	408	422	507
Jumlah Kasus Menonjol		2.180	1870	1847	1.752	1839
Jumlah Kasus		8.502	6.629	6.941	6.849	7613

Sumber : LPPD Kota Medan

Walaupun jumlah angka kriminalitas cenderung dapat terus ditekan dari tahun 2016 ke tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yang signifikan sebanyak 798 kasus dan hal ini harus dicermati sebagai dampak pandemi yang memberi tekanan terhadap perekonomian sehingga berdampak pada keamanan dan ketertiban umum untuk itu perlu meningkatkan citra kota yang aman dan nyaman, perlu kebijakan yang lebih terpadu untuk dapat terus menekan angka kriminalitas yang terjadi, khususnya terhadap wisatawan yang berkunjung ke Kota Medan.

2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Selama tahun 2016 - 2020 fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja kunci antara lain:

A. Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik.

Selama 5 (lima) tahun terakhir kondisi jalan di Kota Medan mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2020, ada 98 persen jalan dalam kondisi baik dan refocussing anggaran untuk penanggulangan



dampak Covid-19, menyebabkan berkurangnya anggaran pemeliharaan infrastruktur Kota, khususnya jalan. Adapun Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik Kota Medan Tahun 2016 - 2020 divisualisasi pada gambar berikut.

Tabel 2.42

Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik Kota Medan Tahun 2016 - 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (Persen)	93.50	97.59	98.00	99.00	98.00

Selain sebagai urat nadi perekonomian daerah, jalan juga sekaligus mempengaruhi persepsi terhadap sebuah kota. Oleh karena itu, perlu kebijakan yang lebih relevan untuk mewujudkan kondisi jalan seluruhnya dalam kondisi baik/mantap, guna meningkatkan citra Kota Medan sebagai kawasan investasi yang menarik, misalnya dengan lebih mengoptimalkan alokasi anggaran untuk pengelolaan urusan kebinamargaan.

B. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Persentase rumah tangga bersanitasi selama 5 (lima) tahun terakhir di Kota Medan mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2016 hanya 82.80 persen rumah tangga bersanitasi layak dan aman berkisar 2% di Kota Medan dan meningkat terus untuk sanitasi layak sebesar 90.72 % dan sanitasi aman sebesar 4.85 % pada tahun 2020. Dengan demikian, Kota Medan tentunya masih membutuhkan program-program pembangunan sanitasi yang lebih progresif untuk mendukung pencapaian target nasional.

Rumah Tangga Bersanitasi cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebanyak 82.80 persen dan menjadi 89.86 persen pada tahun 2019 dan 90,72 persen pada tahun 2020. Untuk pelayanan air limbah di Kota Medan terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terpusat (*Off Site*) yaitu melalui jaringan perpipaan dan SPAL setempat (*on site*). Secara umum untuk Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik di Kota Medan sudah mencapai 98,60%. Dari data yang ada sampai dengan tahun 2018, jumlah total sambungan rumah pada sistem air limbah terpusat (*off site*) adalah sebanyak 19.247 sambungan rumah atau kurang lebih 3,7% dari jumlah keluarga yang ada di Kota Medan, dengan perincian berikut:

Tabel 2.43

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Di Kota Medan Tahun 2016 - 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
Rumah Tangga Bersanitasi Layak	82		89	89.86	90.72
Rumah Tangga Bersanitasi Aman	2		3.7	3.89	4.85

Sumber : RPIJM dan Roadmap



C. Jumlah Rumah Layak Huni

Selama 5 (lima) tahun terakhir jumlah rumah layak huni di Kota Medan berfluktuasi. Sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah, pada tahun 2016 terdapat 97.29 persen rumah layak huni di Kota Medan dan meningkat cukup tajam pada tahun 2017 hingga menjadi 99.79 persen rumah layak huni, namun tahun 2018 dan 2019 cenderung mengalami penurunan masing-masing menjadi 83.13 persen pada tahun 2018 dan menjadi 93.75 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Penurunan yang terjadi pada 2 (dua) tahun terakhir disebabkan antara lain meningkatnya jumlah penduduk akibat arus urbanisasi yang mengakibatkan tumbuhnya wilayah kumuh di Kota Medan.

Tabel 2.44
Jumlah Rumah Layak Huni Di Kota Medan Tahun 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
Jumlah Rumah Layak Huni	97,29	99,79	83,13	93,75	93,75

Berdasarkan atas data tabel di atas, diketahui Kota Medan membutuhkan program-program terpadu untuk mengurangi rumah tidak layak huni, guna menghapus kawasan-kawasan kumuh Kota Medan dan program ini telah dicanangkan secara nasional.

D. Persentase Kawasan Kumuh

Persentase kawasan kumuh lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2015 sesuai Surat Keputusan Walikota, terdapat 2.19 persen kawasan kumuh dan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 0.24 persen. Dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi penurunan persentase kawasan kumuh di Kota Medan, disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan sehingga perlunya renovasi maupun pembangunan rumah baru.

Tabel 2.45
Kawasan Kumuh Di Kota Medan Tahun 2016 - 2020

Ha	2016	2017	2018	2019	2020
Kawasan Kumuh	200, 219	0,68	0,27	0	819.80

Sumber: Dinas PKP2R

Kawasan Kumuh pada tahun 2019 kawasan kumuh tuntas menjadi 0 hektar dari 200,219 ha di tahun 2015. Namun dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 maka terdapat indikator-indikator penentuan kawasan kumuh dan terdapat penambahan (updating) kawasan kumuh di tahun 2020 seluas 819,80 ha.



Berdasarkan atas data tabel di atas, perlu kebijakan yang lebih terpadu, dalam meningkatkan tata bangunan, sebab juga akan berpengaruh terhadap aspek-aspek lingkungan hidup lainnya.

2.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi

2.3.3.1. Perizinan

Dalam pembangunan perekonomian yang dinamis ditingkat nasional maupun tingkat regional dan, penanaman modal (investasi) menjadi faktor yang sangat penting karena berperan sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya strategis implementasi dan transfer keahlian dan teknologi, pertumbuhan ekspor dan meningkatkan neraca pembayaran. Penanaman modal tersebut akan memberikan banyak ganda (*multiplier effect*) dan manfaat bagi banyak pihak termasuk perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Laju pertumbuhan investasi dan tingkat produktivitas yang dihasilkan akan mendorong tinggi dan luasnya jangkauan dampak yang ditimbulkan.

Pemerintah Kota Medan telah memiliki Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik. Dinas tersebut berfungsi untuk mengendalikan pemberian izin dan non izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan melalui satu atap. Diantara izin yang proses administrasinya telah diserahkan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berasal dari Dinas Kesehatan, Bina Marga, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, serta Perhubungan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan pelayanan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Pada tahun 2019 jenis dan jumlah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah 137 jenis izin, 91 perizinan dan 46 non perizinan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sejak terbentuknya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, peningkatan kinerja terus diupayakan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk meminimalisir kesulitan dalam pelayanan administrasi serta memberikan sarana ruangan yang lebih baik untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna jasa perizinan maka telah dilakukan beberapa upaya, diantaranya: melakukan pergantian meja loket menjadi lebih baru dan lebih rapi, menambah meja loket khusus untuk layanan perbantuan OSS (*Online Single Submission*), menambah wallpaper di ruangan



lobby dan ruang rapat, mendekorasi ulang tata ruang lobby dan menambahkan asesoris seperti bunga dan gambar, mengganti gordena (tirai) dengan warna dan desain yang baru sehingga memberikan nuansa yang lebih segar dan nyaman. Kamar kecil (toilet) juga dilakukan pembenahan lantai dan dinding sehingga lebih bersih dan nyaman. Selain itu peningkatan di bidang Teknologi Informasi dimana pengurusan izin sudah dilakukan secara on-line, dan masyarakat dapat menggunakan layanan *SMS Gateway* dan Website DPMPTSP untuk melihat perkembangan mengenai izin yang diajukan. DPMPTSP Kota Medan juga menyediakan 2 (dua) unit perangkat *touch screen* di ruang tunggu sebagai sarana bagi pemohon untuk dapat mengakses informasi tentang berkas yang dimohonkan sudah sampai tahap mana prosesnya, dan juga dapat mengakses informasi tentang DPMPTSP Kota Medan. Petugas informasi juga sudah ditambah menjadi 4 (empat) personil, yang sebelumnya hanya 2 (dua) orang, dan telah ditambah 4 (empat) orang untuk petugas layanan perbantuan OSS sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal.

2.3.3.2. Investasi

Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi suatu daerah. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi. Secara umum investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya dukung daerah tersebut terhadap investasi, dan adanya iklim investasi yang kondusif.

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan daerah untuk menentukan faktor faktor yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing perekonomian daerah terhadap daerah lainnya juga sangat penting dalam upaya meningkatkan daya tariknya dan memenangkan persaingan.

Hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kestabilan politik dan ekonomi serta jaminan keamanan karena memiliki sangat berpengaruh terhadap tingkat resiko usaha. Dalam kasus daerah berkembang ketiga bagian ini sering didengarkan, akan tetapi dalam kenyataannya sering tidak sesuai. Sejumlah faktor lain yang juga berpengaruh pada iklim berinvestasi adalah kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi.



Dalam hal ini Kota Medan didukung oleh ketersediaan tenaga kerja dan infrastruktur yang memadai, seperti: pelabuhan Belawan dan Bandara Kuala Namu Deli Serdang yang sangat dekat dengan Kota Medan. Selain hal tersebut, pemerintah kota juga telah melakukan berbagai program dalam rangka meningkatkan nilai investasi baik investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA). Program-program tersebut diantaranya: program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi, maupun program peningkatan pelayanan. Perkiraan total investasi baik investasi dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA) di Kota Medan selama tahun 2016– 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 2.46
Nilai Investasi di Kota Medan Tahun 2016-2020

PMA	2016		2017		2018		2019		2020		
	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	Proyek	Investasi (US\$. Ribu)	
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0,0			1	0,0				
	Pertambangan			1	7,4						
	Total(Sektor)	1	0,0	1	7,4	1	0,0				
Sektor Sekunder	Industri Makanan	30	25.636,0	28	44.946,5	23	9.039,8	25	14.799,5	63	8.392,8
	Industri Tekstil			1	0,0						
	Industri Kayu	5	0,0	4	215,8	3	0,0	5	98,2	7	811,2
	Industri Kertas dan Percetakan			5	774,0	3	0,0	3	0,0	6	0,0
	Industri Kimia Dan Farmasi	19	17.492,5	12	24.751,5	9	35.552,3	14	20.218,5	31	15.806,3
	Industri Karet dan Plastik	5	9.857,2	6	0,0	5	0,0	5	0,0	12	0,0
	Industri Mineral Non Logam	5	5.624,5	3	13.839,4	2	0,0	3	0,0	1	0,0
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2	6,5	6	133,9	3	439,6	5	1.204,4	9	0,0
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam			1	17,1	2	387,0	2	986,9	2	700,0
	Industri Lainnya	4	0,0	5	0,0			3	2.200,0		
Total(Sektor)	70	58.616,7	71	84.678,2	50	45.418,7	65	39.507,5	131	25.710,3	
Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	6	7.075,9	7	190.102,8	5	290,4	13	206,8	9	3.482,3
	Konstruksi	5	150,0	5	5.209,8	5	526,1	18	924,2	11	3.461,6
	Perdagangan dan Reparasi	51	4.346,8	53	1.229,1	35	2.034,8	65	734,1	88	255,2
	Hotel dan Restoran	19	1.628,7	13	2.585,8	15	358,1	54	2.196,7	147	979,3
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	6	143,3	10	6.225,1	5	15.928,2	12	10.936,5	13	642,3
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	9	6.632,7	12	4.212,6	9	3.516,3	18	2.518,5	31	4.503,5
	Jasa Lainnya	20	5.679,4	29	11.454,3	28	6.322,6	84	90.131,9	121	1.224,0
	Total(Sektor)	116	25.656,8	129	221.019,5	102	28.976,5	264	107.648,7	420	14.548,2
Total	187	84.273,5	201	305.705,1	153	74.395,2	329	147.156,2	551	40.258,5	



PMDN		2016		2017		2018		2019		2020	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)								
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	0,0					10	162.393,4	15	256,5
	Kehutanan	1	500,0								
	Perikanan							1	6.972,8	5	0,0
	Total(Sektor)	2	500,0					11	169.366,2	20	256,5
Sektor Sekunder	Industri Makanan	15	261.443,9	15	1.074.212,7	15	443.128,1	29	513.790,5	82	72.497,0
	Industri Kayu			1	5.578,7	1	0,0	1	0,0	5	1.571,9
	Industri Kertas dan Percetakan	2	526,4	6	384.851,8	7	123.105,5	4	30.626,0	18	8.239,1
	Industri Kimia Dan Farmasi	1	288.263,4	8	511.770,9	4	30.002,0	23	54.728,1	38	26.278,5
	Industri Karet dan Plastik	3	0,0	7	230.060,6	8	318.655,5	22	73.982,4	25	3.182,8
	Industri Mineral Non Logam	1	23.349,8	3	825,0	3	11.152,2	3	0,0	3	0,0
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1	13.996,9	2	9,4	6	6.303,9	7	1.368,8	17	3.875,9
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam									5	0,0
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain					1	0,0	3	0,0	9	0,0
	Industri Lainnya									2	0,0
Total(Sektor)	23	587.580,4	42	2.207.309,1	45	932.347,2	92	674.495,8	204	115.645,2	
Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	5	941.261,3	5	312.199,8	3	32.250,0	9	292.511,8	23	45.653,3
	Konstruksi	1	368.430,0	1	1.107.052,2	2	336.187,2	54	329.235,9	334	210.516,1
	Perdagangan dan Reparasi	8	1.000,0	6	1.528,2	10	2.984,7	240	274.898,1	734	224.933,0
	Hotel dan Restoran	8	79.506,7	3	650,0	7	3.300,0	56	381.316,5	87	22.583,6
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	6	65.819,0	8	34.264,9	7	499.956,7	52	2.843.142,0	102	1.290.788,6
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	3	0,0	2	200,0	2	0,0	21	2.060.122,4	28	2.089.863,8
	Jasa Lainnya	3	0,0	4	50,0	8	30.294,3	64	80.914,1	185	127.398,5
	Total(Sektor)	34	1.456.017,0	29	1.455.945,1	39	904.972,9	496	6.262.140,8	1.493	4.011.736,9
Total	59	2.044.097,4	71	3.663.254,2	84	1.837.320,1	599	7.106.002,8	1.717	4.127.638,6	



2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja tetapi juga terkait dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial. Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

A. Kualitas Tenaga Kerja

Pendidikan menjadi salah satu tolok ukur kemajuan suatu wilayah dikarenakan dengan adanya pendidikan, penduduk yang mengenyam pendidikan akan lebih berkontribusi pada pembangunan karena daya pikir, wawasan dan pengetahuan yang luas. Kualitas tingkat pendidikan juga dirasa sangat penting karena kualitas tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembangunan yang akan dilakukan. Oleh karena tingkat Pendidikan berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan penduduk untuk mengolah sumber daya alam dengan baik. Disamping itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan penduduk dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sehingga taraf kehidupan cenderung meningkat. Adapun tingkat pendidikan penduduk Kota Medan Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.47
Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Medan
Tahun 2016 – 2020 (Jiwa)

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Tidak/Belum Sekolah	533,167	542.334	576.817	594.523	624.275
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	172,555	177.438	182.786	185.948	185.367
3	Tamat SD/ Sederajat	285,565	277.238	271.132	268.284	258.245
4	SLTP/Sederajat	352,243	348.044	341.157	338.550	332.604
5	SLTA/Sederajat	897,771	896.892	891.700	882.790	884.033
6	Pendidikan Tinggi	235,760	237.614	238.500	237.029	239.817
Jumlah		2.477.061	2.479.560	2.502.092	2.507.124	2.524.341

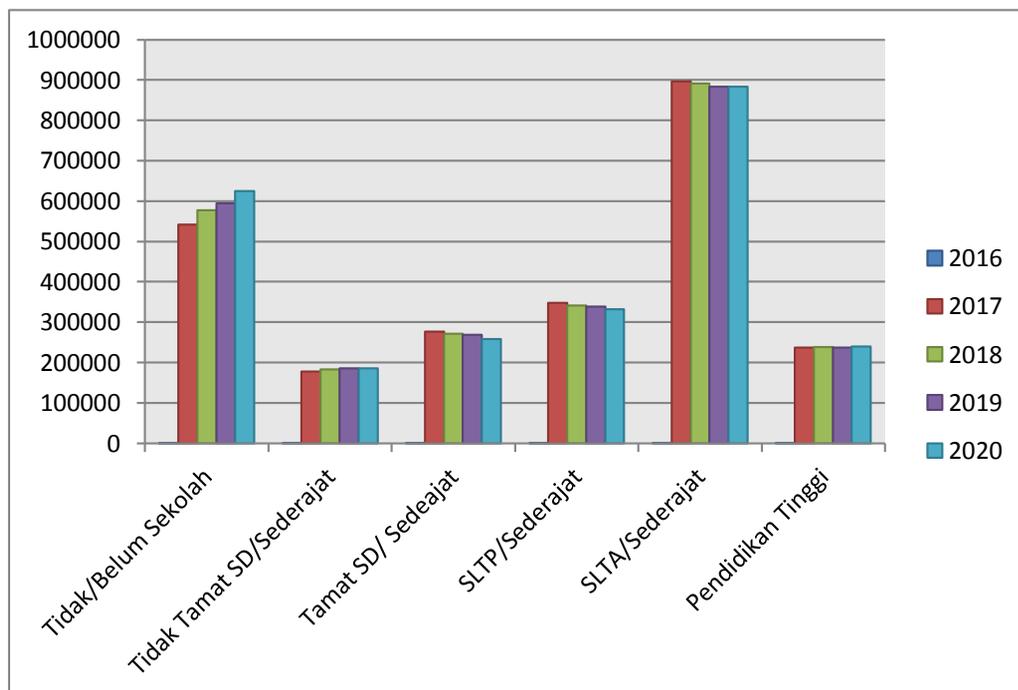
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

Dari Tabel di atas nampak jumlah penduduk di lihat dari aspek kualitas pendidikan, penduduk Kota Medan periode tahun 2016 – 2020 relatif baik. Hal ini ditunjukkan dari persentase penduduk yang tidak/belum sekolah, tidak belum tamat SD/ sederajat,



Tamat SD/ sederajat dan SLTP/ sederajat tinggal 54 persen. Disisi lain, proporsi penduduk yang memiliki ijazah SLTA/ sederajat sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 yakni secara rata-rata sebesar 13 persen, hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun yang merupakan program di sektor pendidikan relatif cukup berhasil. Hal lain yang cukup membanggakan proporsi jumlah penduduk yang telah meneyam pendidikan tinggi di Kota Medan sejak tahun 2016 - 2020 secara rata-rata sebesar 9.53 persen dan telah mendekati 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengenyam pendidikan telah mengalami perkembangan, selain karena kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan. Karena proses pencerdasan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan merupakan elemen penting agar dapat menjaga tingkat daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Kota Medan dalam jangka panjang. Dinamika yang berkembang saat ini, aspek pendidikan yang baik sangat memegang peranan sentral dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya komposisi tingkat pendidikan penduduk Kota Medan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat divisualisasikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.21
Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Medan Tahun 2016 - 2020



Berdasarkan perkembangan dunia pendidikan saat ini, di berbagai jenjang pendidikan, Kota Medan sesungguhnya cukup potensial berkembang menjadi pusat pendidikan regional wilayah barat di luar Jawa.

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai



penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Adapun rasio ketergantungan di Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.48
Rasio Ketergantungan di Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Umur 0 - 14 Tahun	570.531	476.697	537.491	563.883	239.810
2	Umur 15 – 64 Tahun	1.781.473	1.843.689	1.804.525	1.787.399	1.812.100
3	Umur 65+ Tahun	125.057	159.174	160.076	155.842	172.431
4	Rasio Ketergantungan	39.04	34.48	38.65	40.26	24,07

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Rasio ketergantungan di Kota Medan kurun waktu 2016 - 2020 berkisar antara 39.04 persen sampai dengan 40.26 persen. Pada tahun 2019 rasio ketergantungan total sebesar 40.26 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 40 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi dan pada tahun 2020 sebesar 22,7 persen. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk belum produktif (umur 0-14 tahun) ditambah dengan jumlah penduduk nonproduktif (umur 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif (umur 15-64 tahun). Rasio Ketergantungan dapat dilihat berdasarkan usia, yaitu Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.



Rasio Ketergantungan Muda merupakan perbandingan jumlah penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun). Rasio Ketergantungan Muda mengalami fluktuasi pada selang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016 rasio ketergantungan muda sebesar 32 persen mengalami peningkatan menjadi 31.55 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 13.23; ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 13 orang usia belum produktif (usia 0-14 tahun). Adapun rasio ketergantungan muda Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.49
Rasio Ketergantungan Muda dan Tua Kota Medan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Umur 0 - 14 Tahun	570.531	476.697	537.491	563.883	239.810
2	Umur 15 – 64 Tahun	1.781.473	1.843.689	1.804.525	1.787.399	1.812.100
3	Umur 65+ Tahun	125.057	159.174	160.076	155.842	172.431
4	Rasio Ketergantungan Muda	32.03	25.86	29.79	31.55	13.23
5	Rasio Ketergantungan Tua	7.02	8.63	8.87	8.72	9.5

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Rasio Ketergantungan Tua merupakan perbandingan jumlah penduduk usia tidak produktif (usia 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan tua mengalami kenaikan dalam selang waktu antara tahun 2016 hingga tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 sebesar 9.5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang berusia produktif harus menanggung kurang lebih 9-10 orang usia tidak produktif.

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketahanan pangan, lingkungan hidup, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan perpustakaan dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan yaitu pariwisata, pertanian perdagangan dan perindustrian. Urusan pemerintahan fungsi penunjang yaitu administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan penelitian dan pengembangan.



2.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar

2.4.1.1. Urusan Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan indikator-indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang pendidikan diantaranya pendidikan usia dini, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka putus sekolah, dan rata-rata lama sekolah, angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV, angka Kelulusan (AL) SD/MI, angka kelulusan (AL) SMP/MTs, tingkat partisipasi warganegara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini, persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi, Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara), Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik, persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik, persentase SD dan SMP Terakreditasi, Angka Kelulusan (AL) SD/MI, Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja pendidikan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 – 2020 disajikan pada tabel berikut



Tabel 2.50
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	42.15	44.93	41.91	41.36	41.86
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	NA	NA	NA	77.52	79.97
3	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Persen	60.78	65.70	69.54	76.74	80.71
4	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Persen	NA	NA	NA	35.75	43.13

Sumber: Dinas Pendidikan

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini untuk Kota Medan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebesar 42.15 persen sedangkan tahun 2020 telah mencapai sebesar 41.86 persen dan tingkat partisipasi Paud pada tahun 2020 sudah mencapai 79,97 persen.



Tabel 2.51

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Sekolah Dasar (SD),
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	APK SD/MI/Paket A	Persen	124.68	104,31	117,80	101.67	105.9
2	APM SD/MI/Paket A	Persen	105.39	90.51	100,16	108.01	93.25
3	APS SD/MI	Persen	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02
4	Angka Melanjutkan(AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	106.74	106.74	106.85	117.48	103.28
5	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	89.60
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	101.	99.13-	84.97	85.15	89.60
7	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	86.23	88.21	88.12	89.7	89.12

Sumber: Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu untuk Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan.

Untuk tingkat pendidikan dasar Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2016 sampai tahun 2020 sudah melewati angka 100 persen dan pada tahun 2016 sebesar 124.68 persen



kemudian pada tahun 2017 sebesar 104.31 persen dan pada tahun 2018 sebesar 117.80 pada tahun 2019 sebesar 101,67 persen dan pada tahun 2020 sebesar 105.90 persen.

Angka Partisipasi Murni pada tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuasi dan pada tahun 2016 sebesar 105.39 persen kemudian pada tahun 2017 sebesar 90.51 persen dan pada tahun 2018 sebesar 100.16 persen pada tahun 2019 sebesar 108.01 persen dan pada tahun 2020 sebesar 93.25 persen

Untuk capaian Angka Putus Sekolah cenderung menurun dari tahun 2016-2020 dan capaian pada tahun 2020 sebesar 0.02 persen. Dan indikator lainnya Angka melanjutkannya pada tahun 2020 sebesar 103.28 persen, Angka Kelulusan SD sudah mencapai 89,6 persen, tingkat partisipasi warganegara umur 7-12 tahun pada tahun 2020 sebesar 89,60 persen dan Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sudah mencapai 89,12 persen.

Tabel 2.52
**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	APK SMP/MTs/Paket B	Persen	120.93	103.23	126,46	97.59	114.07
2	APM SMP/MTs/Paket B	Persen	87.35	77.28	95,71	74.00	79.88
3	APS SMP/MTs	Persen	0.11	0.10	0.14	0.06	0.06
4	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		99.09	99.09	99.09	100	100
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	95.32	100.08	100.23	78.84	82.50
6	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	88.79	88.92	89.08	89.50	89.63

Sumber: Dinas Pendidikan

Untuk tingkat pendidikan menengah Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuasi dan pada tahun 2016 sebesar 120.93 persen kemudian pada tahun 2017 sebesar 103.23 persen dan pada tahun 2018 sebesar 126.46 persen pada tahun 2019 sebesar 97.59 persen dan pada tahun 2020 sebesar 114.07 persen.

Angka Partisipasi Murni pada tahun 2016 sampai tahun 2020 berfluktuasi dan pada tahun 2016 sebesar 87.35 persen kemudian pada tahun 2017 sebesar 77.28 persen dan pada tahun 2018 sebesar 95.71 persen pada tahun 2019 sebesar 74 persen dan pada tahun 2020 sebesar 79.88 persen.

Untuk capaian angka putus sekolah tingkat menengah cenderung menurun dari tahun 2016-2020 dan capaian pada tahun 2020 sebesar 0.06 persen. Dan indikator lainnya



Angka melanjutkannya pada tahun 2020 sebesar 103.28 persen, angka kelulusan SMP sudah mencapai 100 persen, tingkat partisipasi warganegara umur 13-15 tahun pada tahun 2020 sebesar 82.50 persen dan Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sudah mencapai 89,63 persen.

Tabel 2.53
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pendidikan Pemerintah Kota Medan
Tahun 2016-2020

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV	Persen	89	89	89	89.62	95.60
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	NA	48.01	73.41	76.74	99.79
3	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	Persen	67.90	82.60	92.20	96.70	97.80
4	Persentase SMP Terakreditas	persen	82.50	82.70	95.60	98.20	98.97
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	60.28	67.56	71.24	79.66	83.71

Sumber: Dinas Pendidikan

Tabel 2.54
Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah

Jenjang Pendidikan	Tahun							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SD								
Jumlah Sekolah	824	832	832	927	855	860	966	946
Jumlah penduduk usia 6-12 tahun	254.115	261.788	266.122	224.392	228.105	266.122	236.149	261.391
Rasio (per 10.000 orang)	32	32	31	41	37	32	41	36
SMP								
Jumlah Sekolah	355	356	366	336	465	389	494	544
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	112.633	115.387	109.974	115.387	109.907	109.741	139.506	133.319
Rasio (per 10.000 orang)	32	31	33	29	42	35	35	41

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Medan

2.4.1.2. Urusan Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kota Medan telah



melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata. Penyelenggaraan program kesehatan di Kota Medan, tidak hanya menekankan kepada upaya kuratif dan rehabilitatif, akan tetapi Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Kesehatan juga melakukan upaya promotif dan preventif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai capaian indikator kerja pada bidang kesehatan diantaranya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (maskin), cakupan kunjungan bayi, rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota, persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar, persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, presentase Balita Gizi Buruk/*Stunting* yang mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan, persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup. Adapun realisasi capaian indikator kinerja kesehatan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.55

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kesehatan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100.00	79.05	79.08	52.94	
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	90.32	89.80	88.24	92.80	
3	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	



NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	75.70	90.50	90.50	98.43	
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (maskin)	Persen	56.66	56.66	60.72	60.72	
8	Cakupan kunjungan bayi	Persen	93.99	93.10	93.10	93.00	
9	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	Persen	-	-	-	1110/1	
10	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	-	-	-	80.39	87.17
11	Persentase ibu bersalin mendapatkan Pelayanan persalinan	Persen	-	-	-	92.80	92.33
12	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	-	-	-	105.55	94.51
13	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	-	-	-	62.62	47.51
14	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	-	-	-	14.42	0
15	Persentase orang usia 15 - 29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	-	-	-	89.43	2.80
16	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	-	-	-	67.06	37.85
17	Persentase penderita hipertensi yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	-	-	-	101.47	31.55
18	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	-	-	-	100	59.75
19	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	-	-	-	100	67.11
20	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	-	-	-	2.87	38.38



NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
21	Persentase Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	-	-	-	100	
22	Presentase Balita Gizi Buruk/ <i>Stunting</i> yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	Persen	-	-	-	100	
23	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	-	-	-	100	
24	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Per 100.000	-	-	-	16	

Sumber: Dinas Kesehatan

Dari tabel diatas untuk indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 yakni pada tahun 2016 sebesar 100 persen dan kemudian sebesar 52.94 persen pada tahun 2019, sedangkan untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yakni sebesar 90.32 persen pada tahun 2016 menjadi 92.80 persen pada tahun 2019. Untuk indikator Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100 persen.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA cenderung meningkat periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yakni sebesar 90.50 persen menjadi 98.43 persen pada tahun 2019. Untuk indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (maskin) cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yakni 100 persen pada tahun 2015 menjadi 60.72 persen pada tahun 2019 dan untuk indikator cakupan kunjungan bayi juga mengalami penurunan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2019 yakni 99.99 persen pada tahun 2019 menjadi 93.00 persen pada tahun 2019.

Untuk indikator lainnya capaian sampai 2019 adalah rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota sebesar 1110/1, persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 80.39 persen, persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sebesar 92.80 persen, persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 105.55 persen, persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 62.62 persen, persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 14.42 persen, persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 89.43 persen, persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai



standar sebesar 67.06 persen, persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 101.47 persen, persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100 persen, persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar sebesar 100 persen, persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sebesar 2.87 persen, presentase Balita Gizi Buruk/*Stunting* yang mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan sebesar 100 persen, persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100 persen dan angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup sebesar 16 persen.

Dari berbagai informasi di atas terlihat bahwa penanganan terhadap kesehatan inti masyarakat sudah semakin baik. Sarana, prasarana dan tenaga kesehatan di Kota Medan juga sudah memadai. Saat ini di Kota Medan terdapat 39 unit Puskesmas dan 41 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) serta 1390 unit Posyandu. Meski jumlah tersebut terbilang memadai tetapi jika dilihat dari kuantitas sebaran sarana kesehatan tersebut dapat dikategorikan belum merata. Sebaran Puskesmas misalnya, untuk di Kecamatan Medan Denai terdapat 4 unit Puskesmas. Kemudian di Kecamatan lainnya seperti ; Medan Area, Medan Kota, Medan Petisah, Medan Barat dan Medan Labuhan memiliki masing-masing 3 unit Puskesmas. Sedangkan di kecamatan lainnya hanya diisi oleh 1 atau 2 puskesmas. Untuk fasilitas kesehatan Posyandu, yang paling banyak berada di wilayah Kecamatan Medan Area dengan jumlah 112 unit dan Posyandu yang paling sedikit berada di wilayah Medan Baru dengan jumlah 15 unit.

Tabel 2.56
Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Medan Pada Tahun 2016 hingga Tahun 2019

Tahun	Jumlah Sarana Kesehatan				
	Rumah Sakit	Puskesmas	Posyandu	Klinik/Balai Kesehatan	Pustu
2015	79	39	1.390	747	41
2016	79	39	1.390	747	41
2017	79	39	1.390	747	41
2018	77	39	1.390	281	41
2019	77	39	1.390	281	41
2020	75	39	1345		41

Sumber: BPS Kota Medan

Selain masih terdapatnya sebaran yang belum merata, jumlah sarana kesehatan juga belum menunjukkan adanya peningkatan jumlah sarana yang signifikan bahkan cenderung tidak terjadi pertumbuhan atau penambahan sarana kesehatan di Kota Medan sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2020. Beberapa sarana kesehatan justru mengalami penurunan seperti Rumah Sakit yang pada tahun 2016 berjumlah 79 unit menjadi 77 unit pada tahun 2020 dan Klinik atau Balai Kesehatan Masyarakat yang pada tahun 2016 berjumlah 747 unit menjadi 281 unit pada tahun 2020. Kondisi ini tentu harus mendapatkan perhatian dari Pemerintahan Kota Medan ke depan agar fasilitas dan sarana kesehatan yang ada di tiap kecamatan dapat tersebar secara merata sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.



Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga dapat mengambil langkah-langkah kebijakan dengan agenda pengembangan Puskesmas Pembantu (Pustu) menjadi Puskesmas, dan Puskesmas-Puskesmas yang ada juga dapat dikembangkan menjadi Puskesmas dengan layanan Rawat Inap. Sehingga kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan dapat terpenuhi dengan memberikan menyediakan akses yang lebih merata.

Jumlah Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi di Kota Medan selama tahun 2016 - 2020 masih mengalami fluktuasi, jumlah kematian bayi tertinggi di Tahun 2018, dan terendah di Tahun 2016. Adapun rasio kematian bayi sebesar 0.32 di tahun 2015 dan kondisi akhir di tahun 2019 sebesar 0.46. Peningkatan jumlah kematian bayi ini, menjadi tantangan bagi bagi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program kesehatan. Jumlah kematian bayi di Kota Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.57
Jumlah Kematian Bayi di Kota Medan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020
[1]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Angka Kematian Bayi/100.000 Kelahiran Hidup (Orang)	Per 100.000 kelahiran hidup	0.008	0.43	0,59	0.46	0.46

Sumber: Dinas Kesehatan

Jumlah Kasus Kematian Ibu

Jumlah kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran di Kota Medan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih ditemukan dan persentasenya semakin mengecil sebagaimana disajikan pada tabel 2.48 dibawah ini, pada Tahun 2016 jumlah kasus kematian ibu sebanyak 6 kasus, dan terakhir pada tahun 2020 Jumlah kematian Ibu menjadi 19.08 kasus. Jumlah Kematian Ibu di Kota Medan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.58
Jumlah Kematian Ibu di Kota Medan Tahun 2016 - 2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
[1]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Angka Kematian Ibu Melahirkan/ 100.000 Kelahiran (Orang)	Per 100.000 kelahiran	1	4	10.27	19.08	19.08

2.4.1.3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur di bidang jalan jembatan merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Medan,



khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat dari capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya adalah panjang jalan Kota dalam kondisi baik tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebesar 93.50 persen pada tahun 2017 mencapai 97.59 persen pada tahun 2018 mencapai 98 persen dan pada tahun 2019 mencapai 99 persen dan menurun pada tahun 2020 menjadi 98 persen. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing sehingga ada keterbatasan disisi anggaran.

Sedangkan untuk panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m) dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terjadi penurunan dikarenakan perubahan cuaca ekstrim sehingga terjadi sedimentasi.

Tabel 2.59
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	Persen	93.50	97.59	98.00	99.	98.00
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk.	Jiwa/km	658	686	683	665	770
3	Daftar panjang jalan kota yang direhabilitasi/ direkonstruksi selama tahun 2019	Km	-	-	-	224.27	
4	Daftar panjang jalan kota yang seharusnya direhabilitasi/ direkonstruksi	Km	243.75	604.00	198.44	270.42	188.44
5	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5m)	Persen	65.05	68.59	71.20	71.20	71.20
6	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	88.58	90.89	91.96	93.00	87.00
7	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	-	-	-	26.68	41.25
8	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Persen	29.78	29.78	29.78	29.78	29.78
9	Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah	Persen	-	-	-	9.66	9.662
10	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	-	-	53,94	-	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan kondisi penataan ruang di Kota Medan yang ada saat ini, selain pencapaian terhadap RTH Kota Medan, indikator lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah pertumbuhan wilayah Kota Medan. Berdasarkan indikator pertumbuhan wilayah



terlihat adanya ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan kawasan utara Kota Medan. Hal ini menggambarkan dari ketimpangan fasilitas pelayanan antara pusat kota dan kawasan utara Kota Medan yang berimplikasi juga terhadap ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi pada wilayah tersebut. Hal ini juga yang perlu menjadi pertimbangan mengapa revisi RTRW Kota Medan diprioritaskan pelaksanaannya agar pertumbuhan wilayah di Kota Medan lebih merata.

2.4.1.4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

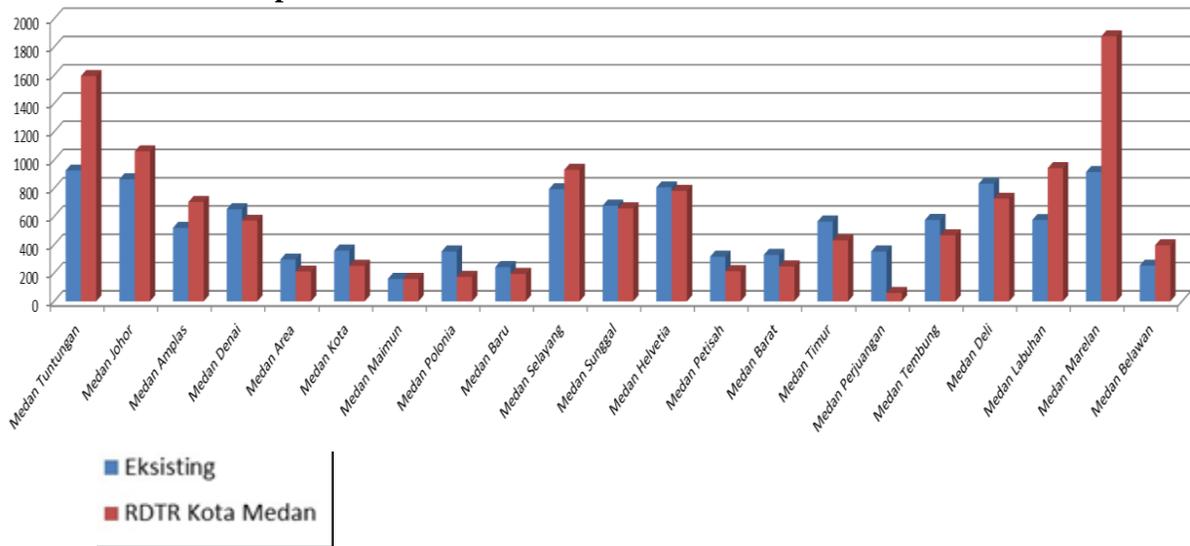
Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Arah pengembangan PKP di Kota Medan saat ini sangat ditentukan oleh kebutuhan hunian masyarakat baik untuk kebutuhan pribadi maupun untuk kebutuhan investasi. Sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kota Medan merupakan kota penting dalam melaksanakan perannya pada konteks regional yakni Pusat Pemerintahan Provinsi, Perdagangan-Jasa, Keuangan, Budaya dan peran lokal sebagai pusat pemerintahan skala Kota. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh.

Pada gambar dibawah, dapat dijelaskan bahwa untuk Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Polonia dan Kecamatan Medan Selayang, ketersediaan lahan pengembangan PKP sudah semakin terbatas. Sedangkan kecamatan lainnya masih tersedia cukup luas antara 500-1000 Ha. Dengan kondisi tersebut, diharapkan pengembangan PKP di Kecamatan yang terbatas lahannya mulai diarahkan kepada pengembangan hunian vertikal. Pendekatan pengembangan hunian vertikal berbasis (*Transit Oriented Development*) TOD dapat dilakukan pada Pusat Pelayanan Kota serta Optimasi Pemanfaatan Ruang, yakni dengan memaksimalkan pemanfaatan ruang kawasan permukiman. Optimalisasi pemanfaatan lahan dapat dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan arahan RTRW Kota Medan dan RDTR Kota Medan yang meliputi:

- a. Merevitalisasi penggunaan lahan dan bangunan;
- b. Intensifikasi pemanfaatan ruang vertikal pada kawasan kepadatan tinggi;
- c. Mengembangkan lahan-lahan perumahan yang efisien dan layak huni melalui pembangunan rumah susun dan perumahan kota.

Gambar 2.22

Grafik Proporsi Ketersediaan dan Pemanfaatan Lahan Permukiman Tahun 2019



Berbagai capaian indikator kerja pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diantaranya rumah Tangga pengguna air bersih untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan yakni tahun 2016 rumah tangga pengguna air bersih sebesar 67.55 persen dan pada tahun 2020 mencapai 87 persen.

Kawasan Kumuh pada tahun 2019 kawasan kumuh tuntas menjadi 0 hektar dari 200,219 ha di tahun 2015. Namun dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 maka terdapat indikator-indikator penentuan kawasan kumuh dan terdapat penambahan (updating) kawasan kumuh di tahun 2020 seluas 819,80 ha yang membawa dampak terhadap berkurangnya keberadaan kawasan layak huni di Kota Medan menjadi 25.690,2 Ha atau 96,9% dari luas wilayah Kota Medan.

Tabel 2.60
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Rumah Tangga pengguna air bersih	Persen	67.55	70.29	83.82	NA	87
2	Lingkungan pemukiman kumuh	Hektar	200,219	68	27	0.24	819,80
3	Rumah Tidak layak huni	Unit			45.493	NA	NA

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang

Pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan yang dilakukan oleh PDAM Tirtanadi bisa dikatakan sudah mencakup seluruh kota Medan dan sekitarnya. Secara keseluruhan cakupan pelayanan PDAM Tirtanadi di Kota Medan pada tahun 2020 sudah mencapai 87,45 % dengan jumlah penduduk terlayani sebesar 1.868.690 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 2.61
Cakupan Pelayanan Air Minum Tahun 2020

Lokasi	Jumlah Pelanggan	Penduduk Terlayani	Jumlah Penduduk Wilayah Adm	Jumlah Penduduk Wilayah Teknis	Cakupan Pelayanan	Cakupan Pelayanan Wil. Teknis
Kawasan Kota Medan	434.947	1.868.690	2.229.408	2.229.408	87.45%	87.45%

Sumber : PDAM Tirtanadi

2.4.1.5. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah harus diiringi dengan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang stabil di daerah. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Pembinaan politik daerah pada tahun 2016 sebanyak 10 kegiatan dan terus meningkat menjadi 11 kegiatan pada tahun 2018 dan tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 7 kegiatan, sedangkan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2016 sebanyak 7 kegiatan, kemudian tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kegiatan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel 2.55

Tabel 2.62
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	10	10	11	11	7
2	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	7	7	0	1	1

Sumber LPPD

Untuk meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, pelaksanaan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui penanganan terhadap pelanggaran Perda Kota Medan yang realisasinya relatif rendah perlu lebih diefektifkan. Disamping itu Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan yang belum direalisasi perlu menjadi fokus perhatian pemerintah daerah.



Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dibagi menjadi 3 sub urusan yaitu, 1) ketentraman dan ketertiban umum, 2) Bencana dan 3) Kebakaran. Adapun capaian jumlah indikator pada kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pemerintah kota medan tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.63
Jumlah Pelanggaran Perda/Perwal Kota Medan
Tahun 2016-2020

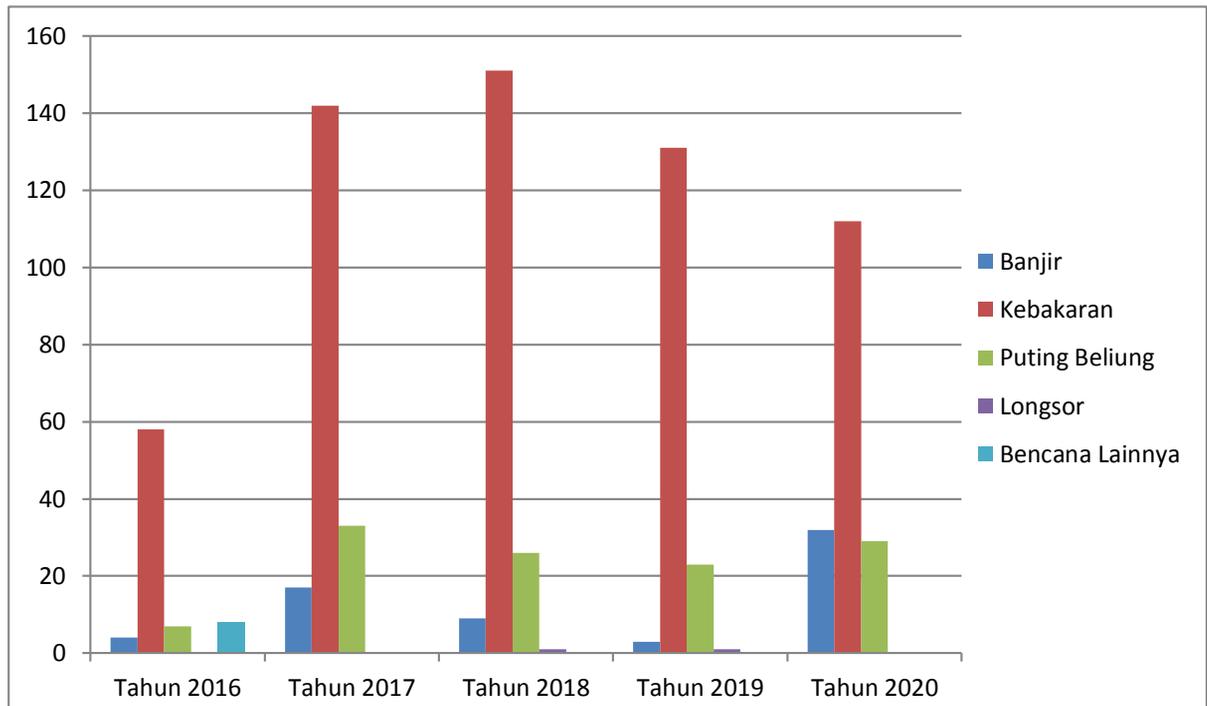
No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jenis Pelanggaran						
	Pedagang Kaki Lima	Pedagang	299	369	2.100	2.122	1.138
	Gelandangan pengemis	Orang	591	358	175		68
	Pekerja Seks Komersial	Orang	57		11		
	Umbul-umbu/baliho/spanduk	Unit	60	1.502	2.154	2.697	2.654
	Bangunan reklame	Unit		63	453	970	173
	Bangunan	Unit		4	49	201	419
	Kawasan Tanpa Rokok	Tersangka				18	
	Tempat Usaha	Tempat				26	
	Protokol Kesehatan (razia masker)	Orang					13.822
	protokol kesehatan di tempat keramaian	Tempat					590
	Total		1.007	2.296	4.942	6.034	18.864

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, 2021

Dari tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran Perda/Perwal Kota Medan dari tahun 2016-2020 dengan peningkatan rata-rata 88,45%, sedangkan pada tahun 2020 meningkat signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi Covid-19, sehingga dilakukannya penertiban ataupun razia protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020. Razia Protokol kesehatan pada tahun 2020 mencapai angka 14.412 pelanggaran atau 76,4% dari total pelanggaran tahun 2020. Tingginya angka pelanggaran Perda/Perwal Kota Medan tahun 2020 yang mencapai angka 18.864 pelanggaran, sebagian besar atau 18.708 dapat ditangani dengan baik dengan capaian penanganan sebesar 99,17%.



Gambar 2.23
Grafik Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kota Medan
Tahun 2016-2020



Sumber: BPBD Kota Medan, 2021

Tabel 2.64
Jumlah Kejadian Bencana dan Kebakaran di Kota Medan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banjir	4	17	9	3	32
2	Kebakaran	58	142	151	131	219
3	Puting Beliung	7	33	26	23	29
4	Longsor			1	1	
5	Bencana Lainnya	8				
	Total	77	192	187	158	280

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kejadian bencana dan kebakaran di Kota Medan mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan, dimana terjadi kenaikan pada tahun 2017 menjadi 192 atau naik 149,4% dan mengalami penurunan di tahun berikutnya menjadi 187 kasus pada tahun 2018 dan 158 kasus pada tahun 2019. Selanjutnya, angka bencana dan kebakaran mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 280 kasus. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus dengan perlunya perencanaan strategis khususnya dalam penanganan kasus kebakaran dikarenakan dari data tersebut kasus kebakaran memiliki persentase pertumbuhan kasus tertinggi dibanding dengan kejadian lainnya.



2.4.1.6. Urusan Wajib Sosial

Pemasalahan sosial khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Medan yang harus diselesaikan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap penyandang PMKS, diantaranya yaitu memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial, dan meningkatkan peran serta potensi sumber daya kesejahteraan sosial. Berbagai indikator kerja pada bidang Sosial diantaranya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, PMKS yg memperoleh bantuan sosial, persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM). Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan sosial Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 – 2020

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi - Panti Asuhan = 47 - Panti Narkoba = 7 - Panti Lansia = 2 - Yayasan = 35 Rumah Singgah = 1	Sarana	104	104	92	92	Na
2	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tdk potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	4.81	4.81	4.81	4.81	Na
3	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Persen	9.89	9.89	35.19	38.22	Na
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	-	-	-	100	25.18

Sumber: Dinas Sosial



Berdasarkan tabel 2.60 diatas pada tahun 2016 tampak bahwa sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti yang rehabilitasi sebanyak 104 sarana, kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 92 sarana. Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sejak tahun 2016 - 2020 tetap sebanyak 4.81 persen. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan sejak tahun 2016 - 2020 yakni pada tahun 2015 sebanyak 9.89 persen sedangkan tahun 2019 menjadi 38.22 persen. Sedangkan besarnya persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) pada tahun 2019 telah mencapai 100 persen dan menurun pada tahun 2020 yang hanya mencapai 25.18 persen.

2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.4.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah penduduk angkatan kerja harus disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Keterbatasan lapangan pekerjaan mengakibatkan tingkat pengangguran di daerah semakin meningkat. Berdasarkan data statistik Kota Medan, tingkat pengangguran terbuka Kota Medan cenderung menurun dari tahun 2016 - 2020 yakni tahun 2016 sebesar 11 persen, tahun 2017 sebesar 9.75 persen, tahun 2018 sebesar 9.46 persen dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 8.25 persen dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 10.73 persen dampak dari pandemi Covid-19. Untuk angka pengangguran, Pemerintah Daerah Kota Medan telah melakukan upaya-upaya diantaranya meningkatkan dan mengembangkan usaha produktif bagi tenaga kerja mandiri sektor informal, meningkatkan potensi ketenagakerjaan yang produktif dan kompetitif, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada tahun pada tahun 2016 sebanyak 973.156 jiwa angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, pada tahun 2017 untuk angkatan kerja sebanyak 1.073.908 jiwa dan bukan angkatan kerja sebanyak 594.983 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 1.130.034 jiwa angkatan kerja dan bukan angkatan kerja sebanyak 414.873 jiwa, pada tahun 2019 sebanyak 1.104.418 jiwa angkatan kerja dan 701.879 jiwa bukan angkatan kerja.

Jumlah pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi peserta/buruh berfluktuasi dan cenderung menurun sejak tahun 2016 - 2020 yakni pada tahun 2016 sebanyak 26.87 persennaik pada tahun 2017 sebesar 35.70 persen dan pada tahun 2018 menurun menjadi 31.01 persen, pada tahun 2019 menjadi 25.14 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 26.86 persen. Pencari kerja yang ditempatkan cenderung meningkat dari tahun 2016 - 2020 yakni pada tahun 2016 sebanyak 59.24 persen dan meningkat menjadi 63.17



persen pada tahun 2019. Namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi hanya 34.79 persen dikarenakan dampak pandemi yang berlangsung.

Sedangkan untuk indikator lainnya sampai tahun 2020 capaian untuk partisipasi Angkatan Kerja sebanyak 64,89 persen, persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi tidak ada terkait reconfiguring, persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) telah mencapai sebanyak 117.35 persen, persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota sebanyak 63.61 persen, persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh mediator Hubungan Industrial sebanyak 5.54 persen, persentase instruktur bersertifikat kompetensi sebanyak 9.4 persen, persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan telah mencapai sebanyak 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan tenaga kerja Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	TPAK	Persen	60.28	60.05	64.35	65.99	64.89
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	11	9.75	9.46	8.25	10.73
3	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi peserta/ buruh	Persen	26.87	35.70	31.01	25.14	26.86
4	Pencari kerja yang ditempatkan	Persen	59.24	59.34	48.19	63.17	34.79
5	Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	60.28	60.05	64.35	65.99	64.89
6	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja	Persen	-	-	-	0	NA
7	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	-	-	93	75	NA
8	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	-	-	-	-	117.35
9	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja	Persen	104.29	143.44	84.90	111.67	63.61



NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	dalam wilayah Kota						
10	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Persen	-	-	-	22.93	5.54
11	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Persen	11.95	11.02	9.79	9.84	9.4
12	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan

2.4.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kesetaraan gender, peningkatan keterampilan dan pengetahuan, dan peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak. Terhadap capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator tersebut diantaranya yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas, partisipasi angkatan kerja perempuan, persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan), persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani, partisipasi angkatan kerja perempuan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.67
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	66.21	66.49	2.09	2.16	2,16
2	Angka melek huruf perempuan usia 15 thn ke atas	Persen	3.87	3.87	100	100	Na
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	90.74	90.74	53.94	57.46	57.46
4	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	-	-	-	89.73	14.02
5	Persentase anak korban	Persen	-	-	-	0.001	0.001



NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota						
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	-	-	-	0.0001	2.34
7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persen	-	-	-	100	100
8	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD Kota Medan	Kursi	5	5	6	6	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Dari tabel di atas tampak bahwa persentase partisipasi perempuan di kelembagaan pemerintahan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun yakni pada tahun 2016 sebesar 66.21 persen, tahun 2017 sebesar 66.49 persen, tahun 2018 sebesar 2.09 persen dan pada tahun 2019 sebesar 2.16 persen. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 yakni pada tahun 2016 sebanyak 3.87 persen dan kemudian menjadi 100 persen sejak tahun 2019.

Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 yakni pada tahun 2016 sebesar 90.74 persen menjadi 57.46 persen pada tahun 2020. Sejak tahun 2019 capaian dari indikator lainnya yaitu persentase ARG pada belanja langsung APBD sebesar 89.73 persen dan menurun pada tahun 2020 menjadi 14.02 persen, persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota sebesar 0.001 persen, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) sebesar 0.0001 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 2.34 persen, persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sebesar 100 persen.

Partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 yang sebesar 90.74 persen, menurun pada tahun 2018 menjadi 53.94 persen dan berturut turut pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 57.46 persen. Pada aspek proporsi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan juga masih rendah dan periode 2016-2020 capaian tertinggi partisipasi perempuan di lembaga legislatif Kota Medan hanya sebesar 12 persen. Hal ini menandakan bahwa keterpilihan perempuan pada pemilihan legislatif masih sangat rendah dibandingkan keterpilihan laki-laki.

2.4.2.3. Urusan Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan di Kota Medan, selain berfokus kepada peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan, Pemerintah Kota Medan juga melakukan program dalam rangka pemerataan distribusi, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Dalam



rangka penguatan ketahanan pangan, Pemerintah Kota Medan telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya beras, daging, telur, dan ikan. Terhadap capaian kinerja ketahanan pangan dapat dilihat dari capaian kinerja indikator yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya regulasi Ketahanan Pangan, ketersediaan pangan utama, persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan), tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan. Berbagai indikator kerja pada bidang ketahanan pangan diantaranya regulasi untuk peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2016 sampai dengan 2020 telah mengeluarkan peraturan WaliKota diantaranya adalah Perwal No. 15 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan, Perwal No. 74 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan, Perda No.10 Tahun 2017 tentang pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis, Perwal No.89 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Perda Kota Medan No. 10 tahun 2017, Perwal No.21 tahun 2011 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal. Untuk ketersediaan pangan cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yakni pada tahun tahun 2016 telah mencapai 99.43 persen, tahun 2017 telah mencapai 103.94 persen, tahun 2018 telah mencapai 146.42 persen, tahun 2019 dan tahun 2020 telah mencapai 154 persen.

Untuk indikator lainnya sampai tahun 2020 untuk persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan) masih belum tersedia dan juga tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Ketahanan Pangan dihubungkan dengan analisis ketersediaan beras di Sumatera Utara terhadap kebutuhan beras Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada table 2.67 dan 2.68 berikut.

Tabel 2.68
Analisis Ketersediaan Beras di Sumatera Utara
Terhadap Kebutuhan Beras Kota Medan Tahun 2020

No.	Keterangan	Jumlah	Satuan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Konsumsi beras per Kapita (Nasional)	92.9	Kg/Kap/Thn
2	Jumlah Penduduk Kota Medan	2524321	Jiwa
3	Konsumsi beras per tahun di Kota Medan	986.400	Ton
4	Produksi Beras di Kota Medan*	3440.34	Ton
5	Kekurangan beras di Kota Medan	76.552 (surplus)	Ton
6	Konsumsi beras per Kapita di Kota Medan	103.7	Kg



	berdasarkan atas produksi beras di Kota Medan		
--	---	--	--

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

Tabel 2.69
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 – 2020

NO	Indikator	Satuan	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Regulasi Ketahanan Pangan - Perwal No. 15 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan. - Perwal No. 74 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan. - Perda No.10 Tahun 2017 tentang pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis - Perwal No.89 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Perda Kota Medan No. 10 tahun 2017 - Perwal No.21 tahun 2011 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	
2	Ketersediaan pangan utama	Persen	103.94	146.42	154.87	130.81

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan

2.4.2.4. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Pengelolaan kualitas lingkungan hidup ditujukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ukuran kualitas lingkungan hidup yang umum digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang memberi gambaran tentang kualitas air, udara dan tutupan lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator utama di bidang lingkungan hidup yang tertuang di Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 - 2020 serta merupakan salah satu indikator baru yang ditambahkan di RPJMD Perubahan tahun 2013-2018 dan Renstra



Perubahan Tahun 2013-2018 dimana target nasional untuk indikator tersebut berada pada rentang 66,5-68,6.

Adanya perubahan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dari Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merupakan salah satu sebab ditambahkannya indikator ini di Tahun 2018. Meskipun belum dilakukan perhitungan secara khusus terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Medan, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 telah melakukan perhitungan dengan mengambil sampel beberapa lokasi yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kota Medan, sehingga meskipun IKLH yang diperoleh bukan merupakan angka riil, namun bisa dijadikan sebagai *benchmarking* terhadap indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Medan. Dari nilai IKLH yang didapat dapat disimpulkan bahwa capaian indikator ini melampaui dari target yang telah ditetapkan dimana targetnya sebesar 63.

Tabel . 2.70
Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	Target
Indeks Kualitas Air (IKA)	77,5	
Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,59	
Indeks Tutupan Hutan (ITH)	45,6	
Total	67,17	63

Sumber: LK DLH Prov. Sumut, 2018

Izin Lingkungan merupakan salah satu indikator kinerja bidang lingkungan hidup. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan yang disesuaikan dengan besaran atau luasan kegiatan serta perubahan bentuk lahan dan bentang alam. Jumlah izin lingkungan yang berhasil diproses merupakan salah satu indikator capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Sebagai gambaran bahwa jumlah izin lingkungan yang telah diterbitkan terus bertambah setiap tahun, sebagaimana tabel berikut.

Tabel – 2.71
Jumlah Izin Lingkungan yang Diterbitkan oleh DLH Kota Medan (2016 – 2020)

Capaian Penghargaan	Kinerja>Nama	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1. Dokumen AMDAL/UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ DELH yang telah tersusun		137	64	88	247	Na
2. Penilaian Perizinan PPLH		30	35	84	96	
- Izin Pembuangan Air Limbah		20	25	40	77	
- Izin TPS Limbah B3		10	10	44	29	

Sumber: DLH Kota Medan, 2020

1) Penanggulangan

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Bentuk



penanggulangan yang umum dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, berupa:

- Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam kurun waktu 2016-2019, DLH Kota Medan terus berupaya untuk menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan dengan melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau badan usaha.

Tabel 2.72
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan oleh DLH
Kota Medan (2016 – 2020)

Capaian Kinerja>Nama Penghargaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Jumlah usaha/kegiatan yang sudah dilakukan pengawasan oleh petugas DLH meliputi Hotel, Rumah sakit, Showroom/bengkel, Mall, Industri dan pengumpul.	100	100	115	100	
2. Penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran/ pengerusakan lingkungan hidup	18	19	25	25	
3. Pengujian emisi kendaraan bermotor	1500	1500	1500	1500	

Sumber: DLH Kota Medan, 2020

2) Pemulihan

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dapat dilakukan dengan tahapan berupa penghentian sumber pencemaran, remediasi, rehabilitasi, restorasi atau cara lain yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa kegiatan pemulihan lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan antara lain sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.73
Kegiatan Pemulihan Pencemaran Lingkungan oleh DLH Kota Medan (2016 – 2020)

Capaian Kinerja/ Nama Penghargaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Peningkatan kapasitas melalui Program Kampung Iklam	2	2	-	1	
2. Pelaksanaan penghijauan pada lahan kritis dan kawasan lindung	-	1.500	1.500	1.500	
3. Sekolah adiwiyata nasional	-	4	12	4	



Capaian Kinerja/ Nama Penghargaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
4. Sekolah adiwiyata provinsi	-	3	32	9	
5. Sekolah adiwiyata kota	-	71	39	70	

Sumber: DLH Kota Medan, 2020

Keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah mendorong Pemerintah Daerah harus bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)

NO	Indikator	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Terlaksananya pengelolaan sampah diwilayah kota	Persen	91.29	91.29	90.33	32.56	77.80	85
2	Kebersihan	Pesen	57.14	41.66	41.66	42.11	42.11	
3	Tempat pembuangan sementara (TPS) sampah per satuan penduduk	Persen	2.43	2.43	0.025	0.05	0.39	
4	Penegakan hukum lingkungan	Persen	100.00	6.89	6.89	100.00	36.00	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota (Kategori Baik)	Persen	-	-	-	-		57.6
6	Ketaatan penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan ,izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Persen	-	-	-	-	86.05	64

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Dalam kaitan pengendalian pencemaran udara, sumber pencemaran udara di Kota Medan pada umumnya disebabkan oleh jenis kegiatan seperti industri pengolahan, transportasi, dan kegiatan keseharian rumah tangga. Di wilayah Kota Medan, terdapat berbagai jenis industri pengolahan yang berpotensi mencemari udara, antara lain industri makanan, industri minuman, industri kayu, industri kimia dasar, industri mineral non logam, industri logam dasar, dan industri tekstil. Tetapi sumber pencemaran yang cukup besar adalah yang berasal dari lalu lintas kendaraan bermotor. Dengan jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan seperti kendaraan umum, kendaraan pribadi yang diperkirakan



mencapai 781.038 unit pada tahun 2020, maka beban pencemaran udara yang ditimbulkan diperkirakan cukup signifikan. Pencemaran udara yang paling tinggi terdapat di ruas-ruas jalan yang paling padat lalu lintasnya dan rawan kemacetan. Sumber pencemaran lain adalah yang berasal dari pembakaran limbah padat domestik/sampah oleh masyarakat, baik pembakaran secara terbuka maupun dengan menggunakan kompor atau alat masak. Pengendalian pencemaran udara dilakukan dengan pengujian dan pemeriksaan emisi kendaraan bermotor di Kota Medan, dan peralatan pendeteksi pencemaran udara.

Di samping itu, pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait dengan sistem persampahan yang diterapkan. Untuk itu, sampai saat ini Pemerintah Kota Medan telah menerapkan sistem pelayanan persampahan dalam beberapa kelompok sistem, masing – masing: (1) sistem door to door dengan menggunakan compactor, (2) system door to door dengan pemindahan transfer depo, (3) sistem komunal melalui sarana container. Secara operasional pengelolaan pelayanan persampahan didukung oleh prasarana sarana persampahan antara lain Becak Sampah 385 unit, Container Sampah 90 unit, Compactor Truck 30 unit, Armroll Truck 14 unit, Tipper Truck 90 unit, Truck Tinja 7 unit, Bulldozer 5

unit, Excavator 1 unit, Wheel Loader 3 unit, Pick-Up 11 unit (DKP Kota Medan, 2019).



Sistem pelayanan persampahan di Kota Medan terbagi menjadi tiga jenis wilayah layanan pengumpulan sampah (Gambar 2-14) dan menerapkan strategi pengumpulan sampah yang berbeda. “Medan I” adalah area perkotaan dalam pusat kota dan menerapkan layanan pengumpulan sampah door-to-door dengan menggunakan truk dan mengangkut sampah langsung ke TPA Terjun. “Medan II” adalah area di sekeliling pusat kota dan menerapkan layanan pengumpulan sampah door-to-door

dengan menggunakan gerobak dorong dan/atau becak motor dan sampahnya dibawa ke TPS, kemudian dibawa dengan truk ke TPA. “Medan III” adalah area pinggiran kota dimana sistem pengumpulan sampah komunal diterapkan. Masyarakat diminta untuk membawa sendiri sampah mereka ke titik pengumpulan sampah komunal dimana ada kontainer sampah yang disiapkan, dan kemudian kontainer dibawa ke TPA dengan menggunakan truk. Mengingat kapasitas dari kedua TPA tersebut semakin terbatas, sedang sistem pengolahan sampah sampai saat ini masih konvensional maka salah satu kebutuhan utama pengembangan aspek teknis operasional persampahan dalam jangka menengah dan panjang adalah penambahan ketersediaan TPA yang bersifat regional, di samping juga penataan dan penambahan tempat penyimpanan sementara (TPS) sampah.



Sebagai tempat pengolahan akhir sampah, TPA Terjun saat ini merupakan satu satunya TPA yang masih beroperasi. Sebelumnya TPA Namo Bintang yang dibangun tahun 1987 sempat beroperasi, sebelum pada akhirnya ditutup pada tahun 2013. Di TPA Namo Bintang sebenarnya masih ada lahan yang dapat menampung sampah namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Juli 2013 memerintahkan menutupnya sementara dan mengalihkannya ke TPA Terjun. TPA Terjun yang dibangun pada lahan seluas 13,7 ha dan mulai dioperasikan pada tahun 1993 sendiri, sudah hampir mencapai umur teknisnya dan kapasitas tampungan sampah yang semakin terbatas. Sebagai solusi sementara, direncanakan akan dibangun tambahan 3,5 Ha lokasi TPA di sebelah TPA Terjun. Lokasi ini dirancang sebagai *sanitary landfill* dengan lapisan bawah, fasilitas pengolahan lindi, pipa ventilasi gas, dan tutupan tanah secara teratur. Namun, diperkirakan bahwa usianya hanya 4-5 tahun. Solusi lain yang bisa diterapkan adalah mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membangun TPA Regional Mebidang yang lokasinya direncanakan berada di Kabupaten Deli Serdang. Kemudian alternatif solusi lainnya adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap TPA eksisting melalui teknologi tepat guna, untuk kemudian bisa dimanfaatkan kembali sebagai *landfill*.

Peraturan Presiden No. 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengharuskan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga mengacu kepada Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Jakstrada di tingkat provinsi, paling tidak satu tahun pada tingkat kabupaten/kota dan enam bulan pada tingkat provinsi setelah berlakunya peraturan presiden dimaksud. Pemerintah Kota Medan, telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kemudian, UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah membagi sampah ke dalam tiga tipe: a) sampah rumah tangga, b) sampah sejenis sampah rumah tangga (timbunan sampah dari area komersil, area industry, area khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya), dan c) sampah khusus (sampah berbahaya dan beracun, sampah bencana, sampah konstruksi dan penghancuran bangunan, dan sampah lainnya yang memerlukan pengolahan khusus). Untuk menyusun rencana pengelolaan sampah yang baik, data komposisi sampah yang akurat adalah penting. Skenario masa mendatang dapat diperkirakan dari data komposisi sampah yang tersedia sangat bervariasi tergantung dimana dan dalam kondisi yang bagaimana contoh-contoh sampahnya dikumpulkan. Survey komposisi sampah yang komprehensif telah dilakukan sebagai bagian dari proyek



percontohan dari *Japan International Cooperation Agency (JICA)* tentang “*Project for Capacity Development for Developing National Green House Gas Inventories (Sub Project 3)*” pada tahun 2011. Contoh sampah diambil secara acak dari 33 truk pengumpul sampah yang mengambil sampahnya dari 12 kecamatan di daerah selatan Medan (Medan Tuntungan, Medan Amplas, Medan Area, Medan Kota, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Petisah, Medan Barat) dengan total 1.000 L (559,73 kg) dari Oktober sampai Desember 2011. Contoh sampah tersebut diambil saat dibawa ke TPA Namo Bintang (sudah ditutup saat ini) ketika truk sampah sedang membuang sampah ke area TPA sebelum didatangi oleh para pemulung. Sampah basah yang baru datang langsung dipisah-pisahkan ke dalam 9 kategori (+ 4 sub kategori) dan ditimbang secara berurutan. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar setengahnya (48%) adalah sampah makanan, sementara kertas (17%) dan plastik (14%) yang merupakan sampah daur ulang terbesar mengikuti sebagai sampah dengan proporsi terbesar selanjutnya.

Analisis komposisi sampah mengambil contoh sampah dekat dengan lokasi akhir (sebelum sampah dibuang ke TPA) mungkin tidak merefleksikan komposisi pada sumber secara akurat. Sering kali terjadi para pemulung atau pengumpul sampah mengambil sampah yang berharga (plastik, kertas, logam, kaca, dsb.) selama proses pengumpulan dan pengangkutan sampah. Hal yang lain adalah bahwa kertas akan menjadi lebih berat timbangannya karena kertas menyerap kadar air ketika dicampur dengan sampah basah. Plastik termasuk botol pet juga akan menjadi lebih berat karena cairan atau makanan sisa kadang-kadang masih tertinggal. Untuk memahami komposisi sampah di sumber yang sebenarnya, Tim IGGES melakukan studi skala kecil rumah tangga masyarakat. Hasil dari studi dimaksud menunjukkan bahwa sekitar setengah dari contoh sampah terdiri dari sampah organik (47,9%), kertas (13,3%), kaca (12,5%), dan plastik (11,2%). Persentase kaca lebih besar dari hasil survey JICA yang mana hanya ada 1%. Akan tetapi komponen utama lainnya memiliki proporsi yang mirip. Rata-rata timbulan sampah 0,91 kg/orang lebih banyak dari pada jumlah standar timbulan sampah per kapita (0,7 kg/orang) yang mana sering digunakan dalam memperkirakan jumlah total timbulan sampah. Ukuran percontohan dari lima rumah tangga memang minim akan tetapi kesesuaian dengan hasil dari survey JICA menandakan bahwa hasil dari JICA tersebut dapat digunakan untuk mewakili data komposisi sampah di Kota Medan.

Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2017 sebanyak 738,279 Ton/Tahun pada tahun 2025 diperhitungkan meningkat menjadi 800,908 Ton/Tahun sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Medan. Dengan diterbitkannya Perwali Kota Medan No. 26 Tahun 2019 target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari potensi sampah pada tahun



2025. Pengurangan sampah melalui kegiatan Pembatasan, Pendaauran Ulang, Pemanfaatan kembali dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah. Penanganan sampah melalui kegiatan Pemilahan sampah dari sumbernya, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir. Penanganan sampah dari sumbernya akan mengurangi volume yang akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara signifikan.

Pengelolaan Persampahan adalah belum terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 UU 18/2008 merumuskan definisi pengelolaan sampah yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 4 UU NO. 18 Tahun 2008 mengamanatkan tujuan pengelolaan sampah adalah (1) meningkatkan kesehatan masyarakat; (2) meningkatkan kualitas lingkungan; (3) menjadikan sampah sebagai sumber daya. Untuk itu diatur penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam dua aspek yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah diatur pada Pasal 20, meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah; pendaauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Untuk mengimplementasikan kegiatan pengurangan sampah ini, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut (1) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; (2) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; (3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; (4) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan (5) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pemerintah Kota Medan, telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari potensi sampah pada tahun 2025. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah diminta untuk menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Demikian juga halnya, masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Penanganan Sampah dilaksanakan mengacu pada Pasal 22 ayat (1) UU No. 18/2008 meliputi:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Pemilahan, belum terlaksana terkait dengan sistem pewadahan yang memisahkan sampah berdasarkan jenis belum optimal. Hal ini dimulai



- belum adanya kesadaran Pemilahan sampah di tingkat masyarakat belum berjalan dengan baik, khususnya inisiasi program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), walaupun wadah sampahnya telah dibuat terpisah serta belum adanya sistem pengumpulan sampah yang terpisah di Kota Medan. Peran Bank Sampah dan TPS3R dimasyarakat perlu dioptimalkan agar pemilahan sampah dari sumbernya dapat terlaksana dengan baik.
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Jumlah TPS belum memenuhi persyaratan, saat ini hanya ada 82 TPS yang aktif di Kota Medan sementara kebutuhan TPS di Kota Medan sebanyak 151 TPS.
 3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Jumlah armada truk angkutan sampah yang ada belum mampu mengakomodasi pengangkutan timbulan sampah yang ada di Kota Medan. Perlu perencanaan pengadaan truk yang dikombinasikan dengan kegiatan 3R untuk mengurangi timbulan sampah yang ada di Kota Medan.
 4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam pengolahan sampah melalui kemitraan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum serta penerapan teknologi tepat guna penanganan sampah perlu segera dilaksanakan pemerintah Kota Medan
 5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahanebelumnya ke media lingkungan secara aman. Permasalahan pemrosesan akhir adalah kapasitas daya tampung Tempat Prosesan Akhir (TPA) yang ada saat ini. Perlu segera melaksanakan pengadaan lahan di sebelah TPA Terjun seluas 3,5 Ha untuk menangani kapasitas tampung sampah yang ada saat ini. Selain itu juga tetap mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membangun TPA regional Mebidang sebagai solusi terhadap penampungan sampah yang lebih permanen.

2.4.2.5. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, menciptakan data dan informasi kependudukan yang akurat dan akuntabel, serta memberikan pelayanan prima di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Terkait dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis NIK Kota Medan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cukup fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP semakin baik. Pada tahun 2016, persentase kepemilikan KTP masyarakat Kota Medan sebesar 84.94 persen dan pada tahun



2020 sudah mencapai 96.34 persen dan capaian Penduduk berumur dari 17 tahun keatas yang mempunyai KTP Elektronik sebesar 96 persen.

Sedangkan persentase kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk cenderung fluktuatif dan pada tahun 2020 telah mencapai 83.02 persen. Untuk indikator lainnya sampai tahun 2020 diantaranya persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang mempunyai akta kelahiran sebesar 83.02 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Kepemilikan KTP	Persen	84.94	87.57	31.35	97.00	96.34
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Per 1000	85.89	34.05	35.51	54.29	83.02
3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
4	Persentase Penduduk usia 0- 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Persen	-	-	-	75.20	83.02
5	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun keatas yang mempunyai KTP Elektronik	Persen	-	-	-	92.69	96

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.4.2.6. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan penyelenggaraan tugas desentralisasi khususnya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka melalui APBD Kota Medan 2016 - 2018 telah dilaksanakan program dan kegiatan pokok urusan kependudukan dan catatan sipil sebagai berikut: program keluarga berencana dengan pelibatan PKK dan TNI, program kesehatan reproduksi remaja, program pelayanan kontrasepsi, program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR Mandiri, program pengendalian penduduk, advokasi dan KIE penggerak. Dengan begitu banyaknya program KB bahkan dengan pelibatan PKK dan TNI tentu menjadi persoalan kritis ketika angka prevalensi peserta KB aktif malah menurun sejak tahun 2017.

Ada beberapa tantangan mengapa angka prevalensi KB menurun diantaranya adalah tidak banyak terlaksananya program KB untuk pria, masih tidak terkoordinasinya lintas sektoral dalam menggerakkan KB berbasis wilayah. Bila situasi ini terus dibiarkan dan tidak ada kebijakan strategis oleh pimpinan Kota Medan untuk penggalakan KB, maka



situasi kependudukan dapat tidak terkendali. Apalagi untuk Kota Medan belum terpetakannya strategi bonus demografi yang akan dihadapi kota setidaknya setelah tahun 2035.

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan diantaranya melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Pengendalian angka kelahiran di masyarakat diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Kinerja urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diukur diantaranya melalui indikator PKK aktif dan Posyandu. PKK aktif dan Posyandu sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada table berikut :

Tabel 2.76
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Medan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prevalensi peserta KB aktif	Persen	76.38	76.01	67.23	64.80	69,68
2	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan.	Persen	104.86	104.86	110.22	114.39	100
3	TFR					2.29	2.28
4	Keluarga Pra Sejahtera I	Persen	1.51	1.56	1.50	1.16	1.08
5	Keluarga Pra Sejahtera II	Persen	0.21	0.32	0.37	0.09	0.23

Sumber : Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

Jika dilihat dari tabel di atas, prevalensi peserta KB aktif di Kota Medan mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 prevalensi peserta KB aktif masih sebesar 76,38% dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Namun pada tahun 2018 menurun menjadi 67,23 % dan kembali menurun menjadi 64,80% pada tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020 dengan capaian 69.68 persen. Ini menunjukkan apakah PUS melakukan KB mandiri sehingga tidak terpantau atau memang mengalami penurunan dalam CPR karena kurangnya kampanye KB.

Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan mengalami peningkatan periode tahun 2016 sampai dengan yakni pada tahun 2020 yakni sebesar 104.86 persen pada tahun 2016 menjadi 114.39 persen pada tahun 2020. Keluarga Pra Sejahtera I mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 yakni pada tahun 2016 sebesar 1.51 persen dan menjadi 1.08 persen pada tahun 2020. Keluarga Pra Sejahtera II mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 yakni pada tahun



2016 sebesar 0.21 persen dan menjadi 0.09 persen pada tahun 2019. Dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 0.23 persen dikarenakan oleh pandemic Covid-19.

2.4.2.7. Urusan Wajib Perhubungan

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kota Medan, harus diiringi dengan pembangunan sarana jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar. Salah satu indikator di bidang berhubungan adalah angkutan darat bertujuan untuk meningkatkan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun serta kelancaran masyarakat menjalankan aktivitasnya. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah orang/barang yang terangkut oleh angkutan darat adalah sebesar 2.23 persen. Untuk kelancaran lalulintas kota sejak tahun 2019 di beberapa ruas jalan di Kota Medan diantaranya adalah Jl. Brigjen Katamso sebesar 87 persen, Jl. Gatot Subroto sebesar 74 persen, Jl. Imam Bonjol sebesar 79 persen, Jl. Perintis Kemerdekaan sebesar 56 persen, Jl. Sisingamangaraja sebesar 84 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Perhubungan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 – 2020

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Angkutan Darat	Persen	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23
2	Kinerja lalulintas Kota	Persen					
	- V/CRatiodiJalanKota	Persen	-	-	-	***	83.50
	- Jl. Brigjen katamso	Persen	-	-	-	0,87	
	- Jl. Gatot Subroto	Persen	-	-	-	0,74	
	- Jl. Imam Bonjol	Persen	-	-	-	0,79	
	- Jl. Perintis Kemerdekaan	Persen	-	-	-	0,56	
	- Jl.Sisingamangaraja	Persen	-	-	-	0,84	

Sumber: Dinas Pehubungan

Untuk kinerja lalu lintas kota dan jumlah perlengkapan jalan di Kota Medan yang dikendalikan dengan *traffic light*, *warning light* dan *traffic pedestrian*. Peran dari persimpangan, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), halte dan jembatan penyeberangan dalam jaringan jalan sangat penting, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki ruas-ruas jalan relatif pendek, karena kapasitas sistem jaringan jalan sangat ditentukan oleh kapasitas persimpangan yang ada. Adapun perlengkapan prasarana jalan Kota Medan sampai tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.78
Perlengkapan Prasarana Jalan Kota Medan Tahun 2020

No.	Prasarana Jalan	Jumlah
[1]	[2]	[3]
1.	Rambu : Rambu Peringatan Rambu Larangan Rambu Perintah Rambu Petunjuk	1031 buah 1380 buah 1335 buah 1166 buah
2.	Marka Jalan	213.222 M2
3.	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) <i>Traffic Light</i> <i>Warning Light</i>	114 Persimpangan 84 Lokasi
4	Halte : Dengan Bangunan	65 unit
5	Jembatan Penyeberangan	3 Lokasi
6	Zebra Cross	
7	ATCS	94 Lokasi
8	ITS	23 Lokasi

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Medan

2.4.2.8. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika menjadi hal yang strategis bagi daerah. Dengan semakin pesatnya perkembangan sistem informasi dan teknologi, hal tersebut memberikan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik di masyarakat. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.79
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 – 2020

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Website milik Pemerintah Daerah www.pemkomedan.go.id	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Pameran/ Expo MTQ, Ramadhan Fair dan PRSU	kali	2	2	2	3	3
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	-	-	-	82.08	
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	-	-	-	100	48.38
5	Persentase masyarakat yang	Persen	-	-	-	73.07	



NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota						
6	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ Tidak	-	-	-	Ada	Ada
7	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	Persen	-	-	-	21.05	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari tabel diatas ada pun yang capaian kinerja kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika diantaranya adalah Pemerintah Kota Medan telah memiliki situs resmi yang dapat diakses melalui alamat <http://www.pemkomedan.go.id> dan juga terdapat sub domain yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan sistem informasi, Pemerintah Kota Medan telah melakukan Pameran/ Expo dalam kegiatan MTQ, Ramadhan Fair dan PRSU yakni pada tahun 2016 sebanyak 2 kali dan kemudian tahun 2019 dan tahun 2020 sebanyak 3 kali. Ada pun capaian indikator lainnya sampai tahun 2019 diantaranya adalah persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebanyak 82.08 persen, persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebanyak 100 persen, persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota sebanyak 73.03 persen, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi *e-government* telah tersedia, persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo sebanyak 21.05 persen.

2.4.2.9. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Peningkatan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan langkah strategis yang dilakukan daerah dalam meningkatkan peran ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan koperasi, usaha kecil, dan menengah di daerah, dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan koperasi, usaha kecil, dan menengah di tengah masyarakat, merupakan wadah untuk berinovasi dan memberikan nilai tambah bagi produk-produk unggulan yang ada di daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota dan penyerapan tenaga kerja. Persentase koperasi aktif pada tahun 2016 sebesar 28.73 persen, pada tahun 2017 sebesar 62.18 persen, pada tahun 2018 sebesar 30.83 persen dan pada tahun 2019 sebesar 22.82 persen. Sedangkan usaha mikro dan kecil pada tahun 2015 sebesar 88.48 persen, pada tahun 2016



sebesar 99.67 persen, pada tahun 2017 sebesar 43.04 persen, pada tahun 2018 sebesar 96.46 persen dan pada tahun 2019 sebesar 96.46 persen. Untuk indikator lainnya sampai tahun 2019 adalah meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirasausaha sebesar 92.86 persen, persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha belum ada. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan koperasi usaha kecil dan menengah pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.80
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Koperasi Aktif	Persen	28.73	62.18	30.83	22.82	22.82*
2	Usaha Mikro dan Kecil	Persen	99.67	43.04	96.46	96.64	96.64*
3	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirasausaha	Persen	-	-	-	92.86	107,84
4	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Persen	-	-	-	0	

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.4.2.10. Urusan Penanaman Modal

Aktifitas penanaman modal dan investasi di Kota Medan memberikan dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut. Aktifitas investasi pada setiap sektor menstimulasi aktifitas lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi barang dan jasa, peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal, dan terjadi arus distribusi barang dan jasa antar daerah dan lintas sektor. Kinerja penanaman modal di Kota Medan dapat dilihat diantaranya melalui kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN dan PMA di Kota Medan. Untuk Realisasi PMDN cenderung fluktuatif, nilai realisasi PMDN pada tahun 2016 sebesar Rp 4.305,58 Milyar pada tahun 2017 menurun menjadi RP 3.351,05 Milyar dan pada tahun 2018 menurun drastis pada nilai sebesar Rp 636,71 Milyar dan pada Tahun 2019 menurun menjadi 536,67 Milyar dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 3.874,96 Milyar. Sedangkan Nilai Realisasi PMA pada tahun 2016 US\$ 950,40 Ribu dan tahun 2017 US\$ 15,60 Ribu , 2018 US\$ 16,56 Ribu dan 2019 US\$ 17,09 Ribu dan pada tahun 2020 menjadi US\$ 33.143 ribu. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Penanaman Modal Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.81

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Nilai Realisasi PMDN	Milyar Rupiah	4.305.58	3.351.05	636.71	536.67	3.874.96
2	Nilai Realisasi PMA	Ribu US\$	950.40	15.60	16.56	17.09	33.143

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.4.2.11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan merupakan hal yang strategis bagi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur sipil semata, akan tetapi organisasi kepemudaan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkesinambungan. Selain itu, aktifitas olahraga juga merupakan wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda untuk menyalurkan minat dan bakat serta menumbuhkembangkan kreatifitas di tengah masyarakat. Untuk itu, pembangunan prasarana dan sarana yang mendukung aktifitas kepemudaan dan olahraga menjadi penting dan strategis bagi daerah untuk dikembangkan. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.82

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk	Per 1000 penduduk	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0034
2	Lapangan olahraga per 1000 penduduk	Per 1000 penduduk	5.84	0.10	0.42	0.42	0.21
3	Prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Orang/ Persen	168 (4,15)	57 (0,99)	152 (2,55)	128 (2,20)	Na
4	Akumulasi atlit yang dibina dan berprestasi	persen	4.053	5.780	5.970	5.830	0
5	Jumlah pemuda yang menjadi kader anti kenakalan	Orang	40	40	40	40	40*
6	Jumlah event Olah Raga	kali	13	22	23	24	Na

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Dari tabel diatas tampak juga bahwa tampak bahwa capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga diantaranya adalah Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik



swasta) per 1000 penduduk di Kota Medan tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 yakni 0.004 per 1000 penduduk.

Sedangkan Lapangan olahraga per 1000 penduduk mengalami penurunan dari 5.84 per 1000 penduduk tahun 2016 pada tahun 2017 menjadi 0.10 per 1000 penduduk, pada tahun 2018 menjadi 0.42 per 1000 penduduk, pada tahun 2019 0.42 per 1000 penduduk, dan tahun 2020 semakin menurun menjadi 0.21 per 1000 penduduk.

Untuk prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun yakni pada tahun 2016 sebanyak 168 orang pada tahun 2017 menjadi 57 orang pada tahun 2018 menjadi 152 dan pada tahun 2019 menjadi 128 orang.

Jumlah pemuda yang menjadi kader anti kenakalan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tetap sebanyak 40 orang. Jumlah event Olah Raga tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung meningkat yakni tahun 2016 sebanyak 13 kali menjadi 24 kali pada tahun 2019 yakni pada event berikut : penyelenggaraan Kompetisi Olahraga antar pelajar, peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi, penyelenggaraan Olahraga Sister City, olahraga *Car Free Day*, pembinaan dan pengiriman cabor prestasi di tingkat daerah untuk POSPEDASU, pembinaan dan pengiriman cabor prestasi di tingkat daerah untuk POSPENAS, pembinaan dan pengiriman cabor prestasi di tingkat daerah untuk PEPARPENAS, pembinaan dan pengiriman cabor prestasi di tingkat daerah untuk POPNAS, kejuaraan Sepak Bola Pelajar Sumut, pembinaan PPLPD (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah Kota Medan), pengembangan Olahraga Rekreasi, liga Pendidikan Kota Medan, mengikuti Tournament Internasional cabang olahraga prestasi, lomba Lari Medan 10K, pembinaan dan pengiriman cabor prestasi di tingkat daerah untuk PEPARPEDA, perlombaan Dayung Tradisional, kompetisi Futsal Antar SKPD Kota Medan, kompetisi Sepak Bola Antar SKPD Kota Medan, perlombaan Gerak Jalan Beregu Antar Pelajar, Instansi dan Umum, pembinaan dan Pengiriman Peserta Festival Olahraga Rekreasi Nasional, kejuaraan Paint Ball Kota Medan, kejuaraan Gulat antar Pelajar Piala Wali Kota Medan, kejuaraan Tenis Lapangan antar pelajar Piala Wali Kota Medan, kompetisi Sepak Bola Kelompok Usia, pembinaan Atlet Pelajar Sepak Bola Medan Soccer U-14 dan U-16, kejuaraan Karate Antar Pelajar Tingkat Kota Medan, kejuaraan Sepak Bola Pelajar Sumut, pembinaan dan pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah untuk POPDASU, pembinaan Cabor, festival Olahraga Rekreasi Kota, olahraga Untuk LANSIA, kejuaraan Karate antar pelajar tingkat Kota Medan.

2.4.2.12. Pertanahan

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang penting untuk ditangani, terutama dengan terbatasnya ketersediaan tanah di wilayah kota. Adapun realisasi capaian



indikator kinerja urusan pertanahan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.83
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Luas lahan bersertifikat	Persen	64.08	64.08	64.08	64.08	64.08
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen	82.00	0.00	0.00	0.00	0
3	Penyelesaian Ijin Lokasi	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100
4	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	-	-	-	67.90	
5	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	-	-	-	67.90	

Sumber: Badan Pertanahan

Penyelesaian kasus tanah di Kota Medan selama periode 2016 - 2020 cenderung mengalami penurunan yang drastis yakni pada tahun 2016 telah mencapai 82.00 persen kemudian pada tahun 2019 menjadi 0 persen. Luas lahan bersertifikat mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah 64.08 persen. Untuk indikator lainnya sejak tahun 2019 bahwa persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan telah mencapai sebesar 67.90 persen dan tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal sebesar 67.00 persen tahun 2019, dan penyelesaian ijin lokasi telah mencapai 100 persen. Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ijin Terpadu Satu Pintu diharapkan proses perizinan di Kota Medan dapat dilakukan secara optimal.

2.4.2.13. Statistik

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang statistik daerah, antara lain perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan statistik daerah; dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang statistik daerah. Penyediaan dan pengelolaan sistem data dan statistik daerah yang terintegrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Pencapaian kinerja urusan statistik selama tahun 2016 - 2020 antara lain tersedianya dokumen Buku Kota Medan dalam angka dan Buku PDRB Kota untuk penyusunan rencana pembangunan daerah serta sejak tahun 2016 persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi



pembangunan daerah telah mencapai 100 persen. Ada pun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Statistika Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.84

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Buku "Kota dalam Angka"	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kota"	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	-	-	-	100	100
4	Persentase PD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	-	-	-	100	100

Sumber: BPS Kota Medan

2.4.2.14. Urusan Kebudayaan

Pengembangan seni budaya di Kota Medan diselenggarakan secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah, pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan gelar seni dan budaya dalam bentuk pagelaran, pameran dan festival. Dalam rangka upaya mendorong peningkatan pengembangan seni dan budaya daerah pengembangan potensi dan budaya daerah dilakukan misi seni dan budaya dalam bentuk diplomasi dan promosi keluar daerah.

Pencapaian kinerja urusan Kebudayaan selama tahun 2016 - 2020 antara lain penyelenggaraan festival seni dan budaya (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri) mengalami penurunan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yakni pada tahun 2016 dilakukan sebanyak 104 kali sedangkan tahun 2019 hanya 2 kali dan pada tahun 2020 tidak dilaksanakan karena situasi pandemi Covid-19.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebanyak 29 buah menjadi 63 buah pada tahun 2019. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan mengalami penurunan periode tahun 2016, sampai dengan tahun 2020 yakni berturut turut



pada tahun 2016, 2017 dan 2018 pada angka 42 persen lalu meningkat pada tahun 2019 menjadi 58 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi 32.07 persen.

Jumlah Group Kesenian per 10.000 penduduk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebanyak 37 buah menjadi 73 buah pada tahun 2020. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Kebudayaan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.85

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (dalam daerah, luar daerah dan luar negeri)	kali	104	3	2	2	0
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	buah	29	29	29	63	Na
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	42	42	42	58	32.07
4	Jumlah Group Kesenian per 10.000 penduduk	buah	37	42	62	64	73

Sumber: Dinas Kebudayaan

2.4.2.15. Urusan Perpustakaan dan kearsipan

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Pencapaian kinerja urusan Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2016 - 2020 antara lain koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah berfluktuasi dan cenderung menurun yakni pada tahun 2016 sebanyak 34,22 persen dan kemudian menjadi 25.25 persen pada tahun 2020.

Pengunjung perpustakaan juga cenderung mengalami penurunan yakni sebanyak 3.75 persen pada tahun 2016 menjadi 2.78 persen pada tahun 2019 dan 0,75 persen pada tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan dan mobilitas warga dengan cukup berdiam di rumah.



Penerapan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami penurunan yakni 100 persen pada tahun 2016 menjadi 35.18 persen pada tahun 2019 dan menjadi 28.35 persen pada tahun 2020.

Kegiatan Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuasi dan cenderung menurun yakni 11 kegiatan pada tahun 2016 menjadi 1 kegiatan pada tahun 2020. Untuk indikator lainnya yakni persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan. Sedangkan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah fluktuatif dari 94.349 dan menjadi 91.702 eksemplar pada tahun 2020. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Perpustakaan dan kearsipan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel 2.77 berikut.

Tabel 2.86

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan dan kearsipan
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Persen	34.22	34.41	23.54	24.81	25.25
2	Pengunjung perpustakaan	Persen	3.75	2.72	3.26	2.78	0.75
3	Nilai Budaya Baca	Persen	-	-	-	2.78	
4	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	Persen	-	-	-	100	100
5	Koleksi buku yg tersedia diperpustakaan daerah	eks	94.349	102.229	84.151	89.804	91.702
6	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Persen	100.	16.42	35.18	35.18	28.35
7	Kegiatan Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	Kegiatan	11	18	5	3	1
8	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Ps40 dan 59U 43/2009)	Poin	-	-	-	19.55	18.27
9	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	poin	-	-	-	2.16	0.17
10	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	poin	-	-	-	6.32	12.08

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



2.4.3. Urusan Pilihan

2.4.3.1. Urusan Pilihan Pariwisata

Pemerintah Kota Medan terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Medan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor pariwisata. Pencapaian kinerja urusan Pariwisata selama tahun 2016 - 2020 antara lain jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Medan mengalami jumlah yang berfluktuasi dari tahun ke tahun yakni jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2016 sebanyak 136.681 orang, pada tahun 2017 sebanyak 610.749 orang, pada tahun 2018 sebanyak 186.255 orang dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 173.71 orang. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun yakni 3.09 persen pada tahun 2016, 3.07 persen pada tahun 2017, 3.03 persen pada tahun 2018, pada tahun 2019 3,04 persen dan tahun 2020 menurun menjadi 2.72 persen dampak dari Covid-19 yang membatasi pergerakan arus wisatawan domestik dan mancanegara. Adapun realisasi capaian indikator kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.87

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 – 2020

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kunjungan wisata (jumlah per Orang)	Orang	136.681	610.749	186.255	173.718	
2	Pdrb Sektor Pariwisata	persen	3.09	3.07	3.03	3.04	2.72

Sumber: Dinas Pariwisata

2.4.3.2. Urusan Pilihan Pertanian dan Perikanan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidayaan dan nelayan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Salah satu arah kebijakan pembangunan urusan bidang Kelautan dan Perikanan yaitu peningkatan produksi kelautan dan perikanan, serta peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk hasil kelautan dan perikanan.



Capaian kinerja indikator keberhasilan tersebut antara lain ditunjukkan melalui jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan tangkap di Kota Medan.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian diantaranya, yaitu mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan, meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pertanian, dan mendorong tumbuh kembangnya usaha pertanian yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Kinerja di bidang pertanian dapat dinilai melalui indikator kinerja di bidang pertanian, salah satu indikator kinerja di bidang pertanian yaitu Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung meningkat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yakni pada tahun 2016 sebesar 4.26 ton/ha, pada tahun 2017 menjadi 4.4 ton/ha, pada tahun 2018 sebesar 4.6 ton/ha, menjadi 5.09 ton/ha pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 6.22 ton/ha. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan, tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yakni pada tahun 2016 sebesar 1.06 milyar menjadi 1.24 milyar pada tahun 2019. Produksi perikanan mengalami jumlah yang fluktuasi yakni pada tahun 2016 sebesar 146.24 ton, pada tahun 2017 sebesar 146.24 ton, pada tahun 2018 sebesar 82.95 ton, pada tahun 2019 sebesar 131.47 ton. Sampai dengan tahun 2020 mencapai 132.558 ton/tahun. Konsumsi Ikan Rata-Rata tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebesar 114.68 kg menjadi 100.23 kg pada tahun 2019. Sejak 2010 capaian indikator lainnya adalah produktivitas pertanian (pangan) per hektar per tahun sebesar 3105.9/ha pada tahun 2016 dan mengalami penurunan produksi pada tahun 2020 menjadi 2148.5, persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular hanya sebesar 38 persen. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota (sumber data : one data KKP) 132.588 ton, persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional sebesar 100 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Urusan Pertanian dan Perikanan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel 2.83 berikut:

Tabel 2.88

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	4.26	4.4	4.6	5.09	6.22
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Milyar Rp	1.06	0.81	1.26	1.24	NA
3	Produktivitas pertanian (pangan) per hektar per tahun	Ha	3105.9	3231	1586.55	1507.77	2148.5



NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
4	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	70	166.67	NA	176.63	38
5	Produksi perikanan	Ton	146.24	146.24	82.95	131.47	132.558
6	Konsumsi Ikan Rata-Rata	kg	114.68	100.0	100.00	100.23	NA
7	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)	Kg/ Kapita	31,27	37,27	30,02	38,49	44.49
8	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota (sumberdata:onedataKKP)	Ton	96.936	97.421	114.525	129.366	132.588
9	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Perikanan

2.4.3.3. Urusan Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sub urusan perdagangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari : perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan dari negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik terdorong untuk memperluas pasar keluar daerah bahkan keluar negeri. Pencapaian kinerja urusan Perpustakaan dan Kearsipan selama tahun 2016 - 2020 antara lain kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2016 sebesar 24.77 persen dan kemudian pada tahun 2020 menjadi 27.00 persen. Ekspor Bersih Perdagangan US\$ mengalami peningkatan yang drastis sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yakni sebesar 2.93 US\$ miliar pada tahun 2016 menjadi 3.15 US\$ miliar pada tahun 2020.

Capaian indikator lainnya sampai tahun 2020 adalah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) sebesar 100 persen. Persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 97.58 persen, persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sebesar 90.12 persen. Adapun realisasi capaian indikator



kinerja urusan perdagangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.89

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 – 2020**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2016	Persen	24.77	24.77	25.11	24.96	27.00
2	Ekspor Bersih Perdagangan US \$	US\$ Milyar	2.93	3.84	4.59	12.69	3.15
3	Persentase peningkatan Ekspor	Persen	-31.35	28.08	18.88	-4.75	0.63
4	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	Persen	-	-	-	74.56	100
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	-	-	-	55.96	97.58
6	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	-	-	-	60.88	90.12

Sumber: Dinas Perdagangan

2.4.3.4. Urusan Perindustrian

Sektor industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di Kota Medan. Kontribusi sektor perindustrian dan perdangan terhadap perekonomian di Kota Medan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB Kota Medan cenderung mengalami peningkatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yakni tahun 2016 sebesar 27 milyar rupiah dan kemudian menjadi 30 milyar rupiah pada tahun 2017. Pertumbuhan industri juga cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 20 % dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Capaian indikator lainnya sampai tahun 2020 yakni persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait telah mencapai 54,64 %. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Perindustrian Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 diuraikan pada Tabel 2.85 berikut.



Tabel 2.90

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 – 2020**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (miliar Rp)	Milyar Rp	27.719,51	30.133, 93	32.497,42	34.414,46	34.186,37
	Pertambahan jumlah industri besar	Persen	15.34	29.06	7.24	31.53	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	-	-	-	0	54,64

Sumber : Perindustrian

2.4.4. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.4.4.1. Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan urusan administrasi pemerintahan dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Perbaikan dan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik memberikan dampak terhadap penilaian masyarakat atas kinerja pelayanan publik. Dari aspek pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kota Medan telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan, diantaranya yaitu pengelolaan keuangan yang berbasis sistem informasi yang selama ini telah dikembangkan yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang mana sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Pemerintah Kota Medan telah memiliki 8 sistem informasi manajemen Pemda yakni SIMDA Keuangan, SIMDA Perencanaan, SIMDA Pendukung Keputusan, SIMDA Kepegawaian, SIMDA Perizinan, SIMDA Pengelolaan Barang Daerah, SIMDA LPPD dan SIMDA Sistem Informasi Geografis dan juga sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu melakukan survey kepuasan layanan masyarakat. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Penunjang Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 diuraikan pada Tabel 2.86 berikut.



Tabel 2.91

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 (Persen)

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Sistim Informasi Manajemen Pemda 8 buah SIMDA : 1. SIMDA Keuangan 2. SIMDA Perencanaan 3. SIMDA Pendukung Keputusan 4. SIMDA Kepegawaian 5. SIMDA Perizinan 6. SIMDA Pengelolaan Barang Daerah 7. SIMDA LPPD 8. SIMDA Sistem Informasi Geografis	Buah	8	8	8	8	
2	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada/ Tdak	ada	ada	ada	ada	

Sumber : Sekretariat Daerah

2.4.4.2. Pengawasan

Penyelenggaraan penunjang urusan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan tingkat Leveling atas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan yang masih berada pada Leveling 2. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan pengawasan tahun 2016 - 2020 dapat dilihat dari table 2.87 berikut ini.

Tabel 2.92

Pencapaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2016 – 2020

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Jumlah Temuan	berkas	421	996	1214	1314	1883
2	Temuan yang ditindaklanjuti	berkas	1016	1153	1696	1695	1431
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persen	-	-	-	Level2	Level2
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persen	-	-	-	Level 2	Level2

Sumber : Inspektorat

Dari tabel di atas pencapaian kinerja urusan pengawasan sampai tahun 2019 adalah maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mencapai level 2, peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah mencapai level 2.

2.4.4.3. Perencanaan

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah secara garis besar berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah



di bidang perencanaan pembangunan daerah. Pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2016 - 2020 antara lain Pemerintah Kota Medan telah tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda No.8/2009 ttg RPJP Kota Medan Tahun 2006-2025 dan juga Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Perda No.2/2019 ttg RPJMD Kota Medan 2016-2021 serta dokumen RKPD setiap tahunnya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebanyak 92.16 persen dan kemudian pada tahun 2020 menjadi 116.53 persen. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Perencanaan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 - 2020 diuraikan pada Tabel 2.88 berikut.

Tabel 2.93

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pemerintahan
Kota Medan Tahun 2016 - 2020**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn Perda No.8/2009 ttg RPJP Kota Medan Tahun 2006-2025	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn Perda/Perkada Perda No.2/2019 ttg RPJMD Kota Medan 2016-2021	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn Perkada	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	92.15

Sumber:Badan Perencanaan dan Pembangunan

2.4.4.4. Keuangan

Penyelenggaraan penunjang urusan keuangan diantaranya diarahkan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan. Hasil pencapaian kinerja penunjang urusan keuangan tahun 2016 - 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini.



Tabel 2.94

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Pemerintahan
Kota Medan Tahun 2016 – 2020**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	TW, TMP, WDP, WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
2	Prosentase peningkatan pendapatan daerah	Persen	23.37	5.36	-0.01	29.62	-25.32
3	Rasio PAD	Persen	34.24	34.97	38.12	33.15	36.62
4	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfe rrependitures)	Persen	54.29	53.72	58.76	59.52	*
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-	-	-	19.71	
6	Assets management	Ya/ Tidak	-	-	-	ya	
7	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	-	-	-	9.10	

Sumber: BPKAD dan BPPRD

Dari tabel di atas pencapaian kinerja urusan keuangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 antara lain adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 masih tetap dengan wajar dengan pengecualian (WDP) dan pada tahun 2020 meningkat pada Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Persentase peningkatan pendapatan daerah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berfluktuasi yakni pada tahun 2016 sebesar 23.37 persen, pada tahun 2017 sebesar 5.36 persen, pada tahun 2018 sebesar -0.01 persen dan pada tahun 2019 sebesar 29.62 persen dan menurun pada tahun 2020 sebesar -25,32 persen Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah berfluktuasi yakni pada pada tahun 2016 sebesar 34.24 persen, pada tahun 2017 sebesar 34.97 persen, pada tahun 2018 sebesar 38.12 persen dan pada tahun 2019 sebesar 33.19 persen dan tahun 2020 sebesar 36,62 persen. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebesar 54.29 persen, pada tahun 2017 sebesar 53.72 persen, pada tahun 2018 sebesar 58.78 persen dan pada tahun 2019 sebesar 59.52 persen. Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD sebesar 19.71 persen, assets management pengelolaan telah sesuai, cash Management : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya sebesar 9.10 persen.



2.4.4.5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pencapaian kinerja urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan selama tahun 2016 - 2020 antara lain, terlaksananya pelantikan pejabat struktural dan fungsional, terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karir PNS, terlaksananya penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, terlaksananya kegiatan penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS dan terlaksananya kegiatan seleksi penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 9.02 persen, persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 9.92 persen.

Tabel 2.95

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Medan Tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase jabatan struktural <i>eselonering</i> yang terisi	-	66,70	92,32	95,48	88,21
2.	Persentase PNS dengan jabatan fungsional tertentu (JFT)	-	-	58,19	58,44	53,86
3.	Persentase pejabat struktural yang mengikuti pelatihan kepemimpinan sesuai jenjangnya	-	-	32	30,52	30,30
4.	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional	-	-	5,1	7,81	1,98
5	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	-	-	9.02
6	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat	Persen	-	-	-	9.92



Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)						
---	--	--	--	--	--	--

Sumber : BKD dan PSDM

2.4.4.6. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan dalam pemerintahan daerah sangat diperlukan untuk mendesign kebijakan, program dan kegiatan yang benar-benar tepat sesuai dengan kebutuhan kota. Temuan fakta sosiologis, hukum dan juga filosofis akan menjadi dasar pijak berbasiskan data. Demikian pula evaluasi program ataupun kebijakan yang dijalankan pemerintahan kota menjadi domain kerja dari penelitian dan pengembangan. Jika dilihat berdasarkan periode tahun, maka pada tahun 2017 terdapat 4 penelitian dengan 2 penelitian yang fokus pada sektor transportasi dan *smart city*. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah penelitian menjadi 6 penelitian dengan fokus penelitian paling banyak dari sektor Ekonomi Kota dengan 2 penelitian. Pada tahun 2019, jumlah penelitian turun menjadi 5 penelitian yang terbagi rata; satu penelitian pada bidang infrastruktur, satu penelitian bidang pendidikan, satu penelitian bidang kesehatan, satu penelitian bidang sejarah dan satu penelitian bidang fasilitas umum.

Tabel 2.96
Cakupan Penelitian Badan Pengembangan dan Penelitian Kota Medan
Tahun 2017-2019

No	Jenis Penelitian	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Bidang infrastruktur	-	1	1
2.	Bidang Pendidikan	-	1	1
3.	Bidang Kesehatan	1	1	1
4.	Bangunan Bersejarah	-	-	1
5.	Fasilitas Umum	-	-	1
6.	PEmilu & politik	1	1	-
7.	Transportasi dan smart city	2	-	-
8.	Ekonomi Kota	-	2	-
	Jumlah	4	6	5

Sumber: Badan Pengembangan dan Penelitian Kota Medan

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengembangan dan Penelitian selama ini adalah hasil penelitian belum banyak dipergunakan untuk menentukan kebijakan Pembangunan Kota Medan. Dengan demikian, maka penting bagi Pemerintah Kota Medan ke depan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan kota. Sehingga hasil-hasil penelitian lebih bersifat terapan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan Kota Medan.



Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah serta berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Pemberian dan Penghargaan atau Insentif Inovasi Daerah telah mengamanatkan kepada Kemendagri untuk melakukan pengukuran indeks inovasi daerah.

Pemerintah Kota Medan untuk lima tahun perencanaan ke depan memandang perlu untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akan memberi kemudahan bagi masyarakat. Bersamaan dengan inovasi yang dilakukan akan menjadikan Kota Medan sebagai kota inovatif.

2.4.4.7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hasil pencapaian kinerja urusan pendukung DPRD tahun 2016 - 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.97

**Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD
Kota Medan Tahun 2016 – 2020**

NO	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Medan	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan maupun Dokumen Rencana Tahunan	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD

2.5. Pencapaian Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

Perkembangan capaian realisasi indikator kinerja RPJMD Kota Medan 2016-2021 dilihat dari 121 indikator capaian kinerja. Pada tahun 2016, berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat beberapa urusan yang beralih kewenangannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi, diantaranya urusan kehutanan, pendidikan menengah, kelautan, pengelolaan Terminal tipe A, dan lainnya, sehingga beberapa indikator yang terkait urusan tersebut kewenangannya juga beralih.



Berdasarkan hasil penilaian realisasi capaian indikator kinerja dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, sebanyak 21 indikator atau telah mencapai target 36.21 persen dan sebanyak 37 indikator atau 63.79 persen belum mencapai target.

1. Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 1 yaitu Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota. Berdasarkan data dibawah, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Medan untuk misi 1 Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan terdapat 2 indikator yang mencapai target dan 9 indikator yang tidak mencapai target.
2. Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 2 yaitu Menumbuh kembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan budaya daerah dan identitas lokal multikulturalisme. Berdasarkan data di bawah, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Medan untuk misi 2 Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan terdapat 1 indikator yang mencapai target dan 1 indikator yang tidak mencapai target.
3. Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 3 yaitu Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah. Berdasarkan data dibawah, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Medan untuk misi 3 Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan terdapat 6 indikator yang mencapai target dan 8 indikator yang tidak mencapai target.
4. Perkembangan capaian realisasi indikator kinerja RPJMD dalam Misi 4 yaitu: Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern serta berkelanjutan. Berdasarkan data dibawah, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Medan untuk misi 4 Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan terdapat 3 indikator yang mencapai target dan 9 indikator yang tidak mencapai target.
5. Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 5 yaitu Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Berdasarkan data dibawah, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Medan untuk misi 5 Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan terdapat 9 indikator yang mencapai target dan 7 indikator yang tidak mencapai target.
6. Perkembangan capaian realisasi indikator Kinerja RPJMD dalam Misi 6 yaitu Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan. Berdasarkan data dibawah, capaian



indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Medan untuk misi 1 Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 2 indikator telah mencapai target.

Hasil pencapaian kinerja sasaran RPJMD 2015-2021 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini:



Tabel 2.98
Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Medan Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2020					Evaluasi Capaian Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	[15]
	Misi Kesatu: Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota													
	Tujuan 1: Menciptakan dan memelihara rasa aman, nyaman serta tertib sosial dalam masyarakat													
	Sasaran 1: Meningkatnya suasana keamanan dan ketertiban kota yang kondusif													
1	Persentase penanganan terhadap pelanggaran Perda Kota Medan	Persen	96	97	98	99	99	100	-	-	102.04	-	96,91	Tidak Tercapai
	Sasaran 2: Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana													
2	Rata-rata waktu respon kejadian tanggap darurat	menit	14.5	14	13.5	13	11	10	-	-	1 Hari, 2 Jam 50 Menit	-		Tidak Tercapai
3	Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran (<i>response time rate</i>)	menit	17.5	17	16.5	16	15	15	-	-	15	15.4	15.4	Tidak Tercapai
	Sasaran 2: Meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan stakeholder dalam pembangunan kota di berbagai bidang													
	Tujuan 2: Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan stakeholder dalam pembangunan kota di berbagai bidang													
	Sasaran 1: Meningkatnya Perencanaan Partisipatif													
4	Persentase program RPJMD yang diakomodasi dalam RKPD	Persen	82	84	86	87	89	90	72.73	84	85.81	100.00	92.15	Tercapai
5	Persentase peningkatan PAD Kota Medan	persen	4	6	8	10	12	12	5.22	5.5	7.04	11.55	18,82	Tidak Tercapai



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2020					Evaluasi Capaian Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	[15]
6	Opini atas laporan keuangan daerah	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	*	Tidak Tercapai
Tujuan 3: Meningkatkan bentuk-bentuk kegotongroyongan dan tanggung jawab sosial perusahaan														
Sasaran 1: Meningkatnya jumlah partisipasi perusahaan swasta dalam pembangunan kota														
7	Persentase peningkatan penyaluran dana CSR ke Pemerintah Kota Medan	persen	26.7	33.3	49.3	56.0	61.3	66.7	-	-	0			Tidak Tercapai
Tujuan 4: Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan pemuda serta perempuan dalam pembangunan kota														
Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan kota														
8	Persentase Peningkatan Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	Persen	4.07	4.23	4.39	4.56	4.72	4.89	4.21	10.17	2.09	2.16	2.16	Tidak Tercapai
9	Persentase Peningkatan Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	88.22	88.81	89.13	89.74	89.99	89.99	90.74	90.74	53.94	57.46	57,46	Tidak Tercapai
Sasaran 2: Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan														
10	Persentase menurunnya konflik antar pelajar dan pemuda	Persen	3.81	3.20	3.04	2.66	2.39	2.08	-	-	20	-	na	Tidak Tercapai
Tujuan 5: Menciptakan Medan sebagai Kota Atlit Berprestasi														
Sasaran 1: Meningkatnya prestasi Atlit Kota Medan dalam penyelenggaraan event-event olahraga Nasional dan Internasional														
11	Persentase meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi	persen	23.10	32.20	41.40	50.80	60.00	61.40	41.5	0.99	2.55	2.20	na	Tidak Tercapai
Misi Kedua: Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial berdasarkan budaya daerah dan identitas lokal multikulturalisme														



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2020					Evaluasi Capaian Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	[15]
	Tujuan 1: Mewujudkan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh dan saling menghargai													
	Sasaran 1: Meningkatnya keamanan wilayah melalui penguatan kelembagaan kemasyarakatan yang efektif, kokoh dan saling menghargai													
12	Persentase menurunnya konflik antar OKP	persen	4.81	4.20	3.94	3.66	3.09	2.88	-	-	0.1	-	-	Tidak Tercapai
	Tujuan 2: Melindungi, memelihara, melestarikan bangunan-bangunan bersejarah dan cagar budaya dengan ciri khas masing-masing													
	Sasaran 1: Meningkatnya Jumlah wisatawan melalui pengembangan wisata berbasis kearifan lokal													
13	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	persen	3	3	4	4	4	5	4.49	13.22	0	0		Tidak Tercapai
	Misi Ketiga: Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah													
	Tujuan 1: Meningkatkan daya saing dan perekonomian kota													
	Sasaran 1: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro													
14	Pertumbuhan ekonomi	Persen	7.09	7.34	7.54	7.75	7.90	9.02	5.89	7.34	6.05	5.93	-1,98	Tidak Tercapai
15	PDRB ADHB	Milyar Rp	179,699.52	201,263.46	225,415.07	252,415.07	282,123.52	282,123.52	184,515.57	198,059.01	222,058.07	241,482.35	242,198.24	Tidak Tercapai
16	PDRB ADHK	Milyar Rp	51,674.83	55,085.38	58,721.77	61,721.77	66,729.00	66,729.00	51,678.92	55,472.15	62,193.78	67,634.11	67,834	Tercapai
17	Laju Inflasi	Persen	3.81	3.36	5.04	5.80	5.01	5.01	6.60	3.18	1.00	2.43	1.76	Tercapai
	Sasaran 2: Meningkatnya aktivitas sektor industri dan perdagangan													
18	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	12.00	12.14	12.28	12.43	12.57	12.57	15.1	6.59	14.15	14.61	14.12	Tidak Tercapai



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2020					Evaluasi Capaian Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	[15]
19	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	26.95	26.95	26.98	26.99	27.00	27.00	26.66	24.77	25.11	24.99	25.55	Tidak Tercapai
Sasaran 3: Meningkatnya Produktivitas pertanian dan perikanan														
20	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	0.64	0.38	0.23	0.14	0.08	0.08	1.06	0.81	1.26	1.24	0.61	Tercapai
Sasaran 4: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Penataan dan Pembinaan Perusahaan Daerah														
21	Dana Penyertaan Modal Pemko pada Perusahaan Daerah	Milyar Rp	3	4	4	5	5	6	5	5	5	20	10	Tercapai
Tujuan 2: Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal														
Sasaran 1: Meningkatnya realisasi investasi di Kota Medan														
22	Realisasi Investasi PMDN	Milyar Rp	4.257,75	5.237,67	6.203,55	7.243,77	8.203,45	9.253,55	2.044.09	3.663.25	1.275.88	8.550.15		
23	Realisasi Investasi PMA	US\$	650.929,25	680.929,25	726.456,67	765.754,21	780.321,52	780.321,52	1.433.278.	-	743.90	-	-	
Tujuan 3: Meningkatkan kesempatan dan lapangan kerja														
Sasaran 1: Meningkatnya lapangan kerja yang masif dan <i>skilled labor</i>														
24	Angka Partisipasi Kerja	Persen	71.82	73.61	74.40	77.29	80.00	80.00	60.05	67.12	48.70	65.99	65.99	Tidak Tercapai
Tujuan 4: Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UMKM dan Koperasi dalam perekonomian kota														
Sasaran 1: Meningkatnya produktivitas Koperasi dan UMKM dalam perekonomian kota														



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2020					Evaluasi Capaian Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
25	Persentase meningkatnya usaha UMKM	Persen	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	96.67	43.04	96.46	96.46	-	
26	Menurunnya angka pengangguran kota	persen	5.72	5.01	4.65	4.08	3.64	3.06	9.75	9.46	9.46	8.25	10,73	Tidak Tercapai
Tujuan 5: Mewujudkan Medan Kota Kreatif dan Inovatif														
Sasaran 1: Berkembangnya ekonomi kreatif untuk mewujudkan Medan Kota Kreatif														
27	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB	persen	4.82	5.01	5.32	5.46	5.63	5.88	-	-	-	-	-	Tidak Tercapai
Tujuan 1: Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang kota yang dinamis dan produktif														
Sasaran 1: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perencanaan tata ruang kota secara memadai														
28	Persentase pembangunan fisik bangunan yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Persen	26.60	27.80	29.10	30.50	34.10	36.98	-	-	-	-	-	Tidak Tercapai
Sasaran 2: Meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang kota														
29	Persentase bangunan yang memiliki IMB di Kota Medan	Persen	52.60	52.80	53.10	53.50	54.10	54.98	52.40	52.40	53.60	64.88	64,88	Tercapai
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan sehat														



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2020					Evaluasi Capaian Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	[15]
30	Luas kawasan permukiman kumuh (Ha)	Ha	150	130.3	100.3	50.3	0	0	200	179.3	70.93	70.09	70,09	Tidak Tercapai
31	Persentase rasio rumah layak huni	Persen	98	98.5	99	100	100	100	97.29	99.79	83.13	93.75	94,49	Tidak Tercapai
Tujuan 2: Menyediakan berbagai fasilitas, utilitas kota seperti sistim informasi manajemen, telekomunikasi, kelistrikan, gas dan air bersih yang semakin handal, berkecukupan serta ramah lingkungan														
Sasaran 1: Meningkatnya akses pelayanan air limbah														
32	Persentase akses pelayanan air limbah	Persen	91	92	94	95	95	95	97.8	97.8	97.8	97.8	-	Tidak Tercapai
Sasaran 2: Meningkatnya akses pelayanan air minum														
33	Persentase pelayanan air minum layak perkotaan	Persen	82	90	95	95	100	100	67.15	67.29	70.84	80.52	-	Tidak Tercapai
Sasaran 3: Tersedianya sistem jaringan drainase perkotaan secara terpadu dan berfungsi baik														
34	Persentase menurunnya lokasi rawan genangan/ banjir	Persen	36.27	31.37	27.45	25.49	21.56	19.61	-	-	4.83	4.83	-	Tidak Tercapai
Tujuan 3 : Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan jalan dan transportasi perkotaan terutama di wilayah lingkaran luar yang semakin terpadu, efisien, efektif dan ramah lingkungan (Medan dengan infrastruktur terbaik)														
Sasaran 1: Terwujudnya infrastruktur jaringan jalan dan transportasi perkotaan yang berkualitas dan nyaman														
35	Proporsi panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persen	94.5	95.5	96.5	97.5	98.5	99.5	94.74	97.59	98.00	99.00	98.41	Tidak Tercapai



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2020					Evaluasi Capaian Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	[15]
	Sasaran 2: Terwujudnya sarana dan prasarana dan sistem transportasi publik yang nyaman serta mengendalikan kemacetan													
36	Persentase menurunnya titik kemacetan	Persen	32.27	30.26	28.44	26.29	25.42	19.81	-	-	2	-	-	Tidak Tercapai
37	Persentase menurunnya titik kecelakaan	Persen	26.28	24.35	22.40	20.48	18.55	17.66	-	-	4.83	-	-	Tidak Tercapai
	Tujuan 4 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kawasan Lindung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
	Sasaran 1: Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
38	Persentase peningkatan luasan RTH dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	Persen	12.5	13	14	15	16	17	29.78	29.78	29.78	9.66	9,66	Tidak Tercapai
	Tujuan 5: Memastikan kelestarian lingkungan hidup													
	Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan pengangkutan sampah													
39	Persentase peningkatan volume penanganan sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA)	Persen	87	91	95	98	100	100	91.29	90.33	32.56	77.80	-	Tidak Tercapai
	Misi Kelima: Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan													
	Tujuan 1: Mewujudkan Medan sebagai Pusat Pendidikan Regional													
	Sasaran 1: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan													



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2020					Evaluasi Capaian Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	[15]
40	Persentase kondisi sekolah SD dalam keadaan baik	Persen	91	92	93	94	94	95	100	100	100	88.91	83.82	Tidak Tercapai
41	Persentase kondisi sekolah SMP dalam keadaan baik	Persen	91	92	93	94	94	95	100	100	100	92.63	88.71	Tidak Tercapai
Sasaran 2: Meningkatkan mutu dan kualitas tenaga pendidik														
42	Persentase guru tersertifikasi SD/MI	Persen	50	52	54	56	58	60	47.38	47.38	48.05	63.73	42.44	Tidak Tercapai
43	Persentase guru tersertifikasi SMP/MTs	Persen	51	53	56	58	62	65	53.71	53.71	58.13	86.86	51.46	Tidak Tercapai
Sasaran 3: Meningkatnya minat baca masyarakat														
44	Pencanangan Medan kota literasi	Ya/ Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tercapai
Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua														
Sasaran 1: Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat														
45	Persentase menurunnya angka putus sekolah SD/MI/Paket A	Persen	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	Tercapai
46	Persentase menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs/Paket B	Persen	0.09	0.09	0.07	0.06	0.106	0.06	0.11	0.089	0.14	0.06	0.06	Tercapai
47	Persentase angka melanjut sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	112.00	114.00	116.00	118.00	120.00	123.87	106.74	107.25	111.71	117.48	103.28	Tidak Tercapai



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2020					Evaluasi Capaian Akhir Tahun 2020	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	[15]	
	Tujuan 3: Mewujudkan Medan sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan regional														
	Sasaran 1: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan														
48	Cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	72.00	76.00	81.00	85.00	89.00	92.00	70.03	72.45	31.01	92.00	87.65	Tidak Tercapai	
49	Meningkatnya usia harapan hidup	Tahun	72.78	73.08	73.38	73.78	74.18	74.18	72.34	72.40	72.64	72.98	73.14	Tidak Tercapai	
	Tujuan 4 : Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan balita														
	Sasaran 1: Meningkatnya kesehatan ibu, bayi, balita dan anak														
50	Persentase menurunnya angka kematian ibu, anak dan balita	Persen	2.60	1.90	1.20	0.50	0.02	0.00	1.00	4.00	10.27	19.08	NA	Tidak Tercapai	
	Tujuan 5: Memerangi HIV/AIDS, DBD.TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular														
	Sasaran 1: Menurunnya jumlah penderita HIV/AIDS, DBD, TBC, penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular														
51	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular dan tidak menular	Persen	15	30	45	60	80	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Tujuan 6:Mewujudkan Medan bebas dari kemiskinan (Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan)														
	Sasaran 1: Menurunnya tingkat kemiskinan														
52	Persentase menurunnya angka kemiskinan	Persen	1.64	1.82	2.03	2.12	2.23	2.32	1.44	1.67	1.00	0.96	0.07	Tidak Tercapai	



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD Tahun 2016-2021						Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016-2020					Evaluasi Capaian Akhir Tahun 2020
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	(14)	[15]
	Sasaran 2: Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)													
53	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	9.89	Tercapai
	Sasaran 3: Meningkatkan jumlah sarana sosial													
54	Persentase penurunan jumlah PMKS	Persen	0.021	0.019	0.017	0.014	0.010	0.008	0.019	0.017	0.017	0.012	0.012	Tidak Tercapai
	Tujuan 7: Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan													
	Sasaran 1: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan													
55	Rasio Kepemilikan e-KTP	Persen	86.65	88.73	97.47	99.35	100	100	84.94	87.57	85.48	92.69	96.34	Tidak Tercapai
56	Rasio Kepemilikan akta kelahiran	Persen	61.43	62.51	62.98	63.75	65.08	65.32	72.15	75.80	35.51	75.20	83.02	Tercapai
	Misi Keenam: Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan													
	Tujuan 1: Mewujudkan Medan sebagai Kota Religius													
	Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan tempat ibadah bagi seluruh pemeluk agama													
57	Rasio rumah ibadah	Persen	10.8	10.9	11.2	11.5	11.7	11.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	Tidak Tercapai
	Tujuan 1: Menyelenggarakan berbagai program kerja sosial kemasyarakatan dan keagamaan bagi seluruh agama													
	Sasaran 1: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan umat beragama													
58	Menurunnya konflik dan potensi SARA	Persen	4.82	4.01	3.62	2.24	1.86	0.84	-	-	0.7	0.1		Tercapai



2.6. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* pada tahun 2015 yang diklaim sukses membawa penduduk dunia khususnya negara dunia ketiga memenuhi kebutuhan dasarnya (kesehatan, pendidikan, Standar Hidup) yang diukur dengan *Human Development Index*, maka *United Nation (UN)* melalui *Sustainable Development Working Group* mencanangkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai sasaran jangka panjang komunitas dunia dalam mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui adanya keseimbangan pembangunan sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Pertumbuhan, efisiensi dan stabilitas ekonomi harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat dan terjaganya lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi dan salah satu sasaran SDGs untuk mewujudkan keseimbangan ketiga hal tersebut adalah *Sustainable and Resilient Infrastructure Development*. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, menyetujui *Outcome Document SDGs* yang berisi tentang deklarasi, tujuan, target dan cara pelaksanaan SDGs hingga tahun 2030 sebagai kerangka kerja pembangunan global baru pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* yang berakhir tahun 2015.

Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millenium Development Goals (MDGs)* yang berakhir pada tahun 2015. Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator, adapun tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Tahun 2016-2030 yaitu :

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
- c. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;



- d. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- g. Menjamin akses sumber energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- h. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- i. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- j. Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara;
- k. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- l. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- p. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif disemua tingkatan;
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki empat pilar utama, yakni pilar sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Kondisi lingkungan merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Gambaran capaian indikator SDGs Kota Medan tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :



TABEL 2.99
PENCAPAIAN PROGRAM SDGS 2
PENGHAPUSAN KEMISKINAN DAN KELAPARAN
JANUARI-DESEMBER TAHUN 2016-2019

No	Indikator	Jumlah Sasaran	Target	Kom1s/d12	
			2016	Abs	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Tahun 2016				
1	Prevalensi Gizi Buruk (%)	104	100	104	100
2	Prevalensi Gizi Kurang (%)	1036	75	831	80,21
3	Cakupan Desa Garam Beryodium (%)	TAD	100	TAD	100
4	Cak. Bayi 6 - 11 Bln yg mendapat Kapsul Vit. A (%)	26.020	85	22.416	86,14
5	Cak. Bayi 12 - 59 Bln yg mendapat Kapsul Vit. A (%)	184.502	85	162.618	88,13
6	Cak. Ibu Nifas yg mendapat Kapsul Vit. A (%)	52.792	100	47.382	89,75
7	Cak. ASI Eksklusif (0 - 6 Bulan)	13.344	42	5.135	38,48
8	Cak Ibu Hamil mendapat tablet tambah darah (TTD)	56.115	85	50.256	89,55
9	Cak Ibu Hamil anemia	37.369	-	291	0,77
10	Cak Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	1.036	75	831	80,21
11	Cak. Remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	TAD	15	TAD	TAD
12	Cak Bayi lahir mendapat IMD	50.779	41	6139	12,08
13	Cak. Bayi BBLR <2500 gr	50.779	-	224	0,44
14	Cak. Balita yang mempunyai KIA/KMS	217.331	100	195.402	89,90
15	Cak. Balita yang naik BB	176.882	80	137.639	77,81
16	Cak. Balita yang tidak naik BB	176.882	-	16.269	9,19
17	Cak. Balita yang tidak naik BB 2X berturut-turut	176.882	-	1758	0,9
18	Cak Balita dibawah garis merah (BGM)	176.882	-	1437	0,81
	PENCAPAIAN PROGRAM SDGS 3 KESEHATAN YANG BAIK				
1	Angka Kematian Bayi (PER 1000 Kelahiran Hidup)	-	-	5	-
2	Angka Kematian Bayi (PER 1000 Kelahiran Hidup)	-	-	11	-
3	Angka Kematian Balita (PER 1000 Kelahiran Hidup)	-	-	3	--
4	Proporsi Neonatus yg ditangani (%)	7.854	100	201	2,5
5	Cak. Kunjungan Neonatus 1-28 hari (%)	52,359	90	41.526	79,31
	PENCAPAIAN PROGRAM SDGS 3 KESEHATAN YANG BAIK				
1	Angka Kematian ibu /100.000 KH (angka absolut)	-	-	3	-
2	Cakupan Pertolongan Persalinan Nakes Terlatih (%)	52.792	90	47.684	90,32
3	Cakupan Komplikasi Persalinan	11.223	80	913	8,13
4	Kunjungan K 1 (%)	56.115	90	52.580	93,70
5	Kunjungan K 4 (%)	56.115	90	50.256	89,55
	PENCAPAIAN PROGRAM SDGS 3 KESEHATAN YANG BAIK				
1	Angka Penemuan TB (%)	11.022	100	6.543	59,36



No	Indikator	Jumlah Sasaran	Target	Koml/s/d12	
			2016	Abs	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2	Jlh Kasus TB Paru BTA +	3520	100	3120	88,63
3	Angka Kematian TB (%)	-	-	52	-
4	Prevalensi Diare / 1000 penduduk	509.570	100	18.047	3,5
5	Angka Kematian Diare	0	0	0	0
6	Prevalensi DBD / 1000 penduduk	1362	100	1362	100
7	Angka Kematian DBD	-	-	5	-
8	Jumlah kasus AIDS	-	-	166	-
8	Jumlah Kasus HIV	-	-	313	-
9	Jumlah meninggal HIV	-	-	5	-
10	Cakupan Desa UCI (%)	151	100	151	100
11	Cakupan Imunisasi Campak (%)	48.334	100	48.737	100,9
	PENCAPAIAN PROGRAM SDGS 5				
1	KB Aktif lama	354.611	70	264.611	74.6
2	KB Aktif baru	63.457	70	15.992	3.3
3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	-			
	PENCAPAIAN PROGRAM SDGS 6 :AIR BERSIH DAN SANITASI				
1	Proporsi Rumah Tangga dgn Akses Air Bersih yg terlindungi (%)	282.956	85	271.092	95,80
2	Cakupan Jamban Keluarga	352,701	90	283.577	80,40
	Tahun 2017				
	Pencapaian Program SDGs 2				
	Meningkatkan Gizi Serta				
1	Pemberian kapsul vitamin A	Anak	216.268	187.525	86,7
2	Balita naik berat badannya	Anak	180.135	153.455	85,1
3	Balita Gizi buruk	Anak	99	99	100
4	Balita yang ditimbang	Anak	235.465	198.783	84,4
5	Bayi Mendapat ASI Eksklusif	%	14.023	4.927	35,1
6	Home Visit Lansia dengan resiko tinggi	Orang			
7	Pembinaan Kelompok Usia Lanjut sesuai standar	Kelompok	186	186	100
	Pencapaian Program SDGs 3				
1	Angka Kematian Ibu	orang	3		
2	Angka Kematian Bayi	Orang	20		
3	Pelayanan Posyandu	Posyandu	1.373		
4	Angka kesembuhan penderita paru	Orang	2.840	2.182	76,83
5	Cakupan UCI	%	39.540	37.522	94,9
6	Angka Bebas Jentik (AJB)	%			
7	Kasus PMS yang diobati	Orang		5.033	
8	Pasien yang mendapat pelayanan HIV/AIDS	Orang		20.504	
9	Penyuluhan Napza	Sekolah	400	100	25
	Pencapaian Program SDGS5				
1	Kunjungan lengkap ibu hamil	Bumil	43.375	9.379	90,8
2	Pelayanan dan atau rujukan bumil resiko tinggi	Bumil	8.675	6.858	79,1
	Tahun 2018				
1	Pemberian kapsul vitamin A	Anak	216.268	187.525	86,7
2	Balita naik berat badannya	Anak	180.135	153.455	85,1
3	Balita Gizi buruk	Anak	99	99	100
4	Balita yang ditimbang	Anak	235.465	198.783	84,4
5	Bayi Mendapat ASI Eksklusif	%	14.023	4.927	35,1
6	Home Visit Lansia dengan resiko tinggi	Orang			
7	Pembinaan Kelompok Usia Lanjut sesuai standar	Kelompok	186	186	100



No	Indikator	Jumlah Sasaran	Target	Koml/s/d12	
			2016	Abs	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Pencapaian Program SDGs 3				
1	Angka Kematian Ibu	orang	3		
2	Angka Kematian Bayi	Orang	20		
3	Pelayanan Posyandu	Posyandu	1.373		
4	Angka kesembuhan penderita paru	Orang	2.840	2.182	76,83
5	Cakupan UCI	%	39.540	37.522	94,9
6	Angka Bebas Jentik (AJB)	%			
7	Kasus PMS yang diobati	Orang		5.033	
8	Pasien yang mendapat pelayanan HIV/AIDS	Orang		20.504	
9	Penyuluhan Napza	Sekolah	400	100	25
	Pencapaian Program SDGS5				
1	Kunjungan lengkap ibu hamil	Bumil	43.375	9.379	90,8
2	Pelayanan dan atau rujukan bumil resiko tinggi	Bumil	8.675	6.858	79,1
	Tahun 2019				
	Pencapaian Program SDGs 2				
1	Pemberian kapsul vitamin A	Anak	173.317	152.690	88,10
2	Balita naik berat badannya	Anak	193.636	135.183	69,80
3	Balita Gizi buruk	Anak	-	85	100
4	Balita yang ditimbang	Anak	193.636	159.408	82,30
5	Bayi Mendapat ASI Eksklusif	%	13.066	4.506	34,50
6	Home Visit Lansia dengan resiko tinggi	Orang	3.057	3.057	100
7	Pembinaan Kelompok Usia Lanjut sesuai standar	Kelompok	187	187	100
	Pencapaian Program SDGs 3				
1	Angka Kematian Ibu	Orang		5	
2	Angka Kematian Bayi	Orang		28	
3	Pelayanan Posyandu	Posyandu	1.370	1.370	66,18
4	Angka kesembuhan penderita paru	Orang	3.418	2.265	100
5	Cakupan UCI	%	151	151	
6	Angka Bebas Jentik (AJB)	%			
7	Kasus PMS yang diobati	Orang			
8	Pasien yang mendapat pelayanan HIV/AIDS	Orang		8.004	
9	Penyuluhan Napza	Sekolah			
	Pencapaian Program SDGS5				
1	Kunjungan lengkap ibu hamil	Bumil	42.931	39.250	91,40
2	Pelayanan dan atau rujukan bumil resiko tinggi	Bumil	8.586	68	0,80
	Tahun 2019				
1	Pemberian kapsul vitamin A	Anak	200.620	175.491	87.5
2	Balita naik berat badannya	Anak	152.243	121.795	80.0
3	Balita Gizi buruk	Anak	74	74	100.0
4	Balita yang ditimbang	Anak	191.409	152.243	80.0
5	Bayi Mendapat ASI Eksklusif	%	17.449	5.307	30.4
6	Home Visit Lansia dengan resiko tinggi	Orang	44.341	5.513	12.43
7	Pembinaan Kelompok Usia Lanjut sesuai standar	Kelompok	187	187	100.0
	Pencapaian Program SDGs 3				
1	Angka Kematian Ibu	Orang	7		
2	Angka Kematian Bayi	Orang	25		
3	Pelayanan Posyandu	Posyandu	1.354		



No	Indikator	Jumlah Sasaran	Target	Koml/s/d12	
			2016	Abs	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	Angka kesembuhan penderita paru	Orang	13.080	1.027	7.85
5	Cakupan UCI	%	151	150	99.34
6	Angka Bebas Jentik (AJB)	%	95	42.078	93.44
7	Kasus PMS yang diobati	Orang		5.105	
8	Pasien yang mendapat pelayanan HIV/AIDS	Orang	79.517	44.950	56.52
9	Penyuluhan Napza	Sekolah	467	380	81.40
	Pencapaian Program SDGS5				
1	Kunjungan lengkap ibu hamil	Bumil	42.298	33.942	80.02
2	Pelayanan dan atau rujukan bumil resiko tinggi	Bumil	8.460	4.384	51.80
	Pencapaian Program SDGS6				
1	Inspeksi sanitasi sarana air bersih	Sarana	100%	-	-
2	Pengawasan depot air minum	Depot	948	360	37,90
3	Inspeksi sanitasi sarana pembangunan sampah	Sarana	-	-	-
4	Inspeksi sanitasi sarana pembangunan limbah	Sarana	-	-	-
5	Pemeriksaan penyehatan lingkungan pada perumahan	Rumah	92%	42.078	93,44
6	Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum	TTU	85	1.850	64
7	Rumah Sehat	Rmh	92%	42.078	93.44

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Medan

Berdasarkan hasil penilaian realisasi capaian indikator kinerja dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 terhadap pencapaian program SDGS2, program SDGS3, program SDGS5, program SDGS5 diperoleh hasilnya adalah

- a. Untuk tahun 2016 dari 45 indikator sebanyak 8 indikator atau 17.77 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat tinggi, sebanyak 12 indikator atau 26.66 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai tinggi, sebanyak 1 indikator atau 2.22 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai sedang, sebanyak 2 indikator atau 4.44 persen realisasi capaian indikator memperoleh rendah, sebanyak 4 indikator atau 8.88 persen realisasi capaian indikator memperoleh sangat rendah dan 8 indikator tidak tersedia data dari penyedia data yang berwenang.
- b. Untuk tahun 2017 dari 18 indikator sebanyak 4 indikator atau 22.22 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat tinggi, sebanyak 5 indikator atau 27.77 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai tinggi, sebanyak 2 indikator atau 11.11 persen realisasi capaian indikator memperoleh sangat rendah, dan 6 indikator tidak tersedia data dari penyedia data yang berwenang.
- c. Untuk tahun 2018 dari 18 indikator sebanyak 5 indikator atau 27.77 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat tinggi, sebanyak 2 indikator atau 11.11 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai tinggi, sebanyak 2 indikator atau 11.11 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai sedang, sebanyak



2 indikator atau 11.11 persen realisasi capaian indikator memperoleh sangat rendah dan 7 indikator tidak tersedia data dari penyedia data yang berwenang.

- d. Untuk tahun 2019 dari 25 indikator sebanyak 6 indikator atau 24.00 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat tinggi, sebanyak 4 indikator atau 16.00 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai tinggi, sebanyak 2 indikator atau 8.00 persen realisasi capaian indikator memperoleh rendah, sebanyak 4 indikator atau 16.00 persen realisasi capaian indikator memperoleh sangat rendah dan 6 indikator tidak tersedia data dari penyedia data yang berwenang.

2.7. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dalam pembangunan di Kota Medan sampai dengan 2020 disajikan pada tabel di bawah. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemko Medan dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target dan realisasi capaian tahun 2020 terkait SPM sebagaimana disebut di atas dapat dilihat pada tabel 2.95 berikut :

Tabel 2.100
Target dan realisasi capaian SPM Kota Medan Tahun 2020

No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Urusan Pendidikan			
A	Indikator Pemerataan			
1	Angka Partisipasi Murni Usia Sekolah (AP Mus) PAUD	100%	79.97%	79.97%
2	Angka Partisipasi Murni Usia Sekolah (AP Mus) SD/MI/P-A	100%	84.07%	84.07%
3	Angka Partisipasi Murni Usia Sekolah (AP Mus) SMP/MTs/P-B	100%	91.67%	91.67%
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100%	112.13%	112.13%
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100%	133.97%	133.97%
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100%	89.60%	89.60%
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100%	76.28%	76.28%
8	Angka Melanjutkan (AM) SD Sederajat ke SMP Sederajat	100%	103.28%	103.28%
9	Perbandingan Antar Jenjang SD/MI dengan SMP/MTs	2 : 1		
10	Rasio Siswa dengan Sekolah SD/MI	120 : 1	285:1	1:2.25
11	Rasio Siswa dengan Sekolah SMP/MTs	150 : 1	250:1	1:1.75
12	Rasio Siswa dengan Kelas SD/MI	20 : 1	23:1	1:1
13	Rasio Siswa dengan Kelas SMP/MTs	25 : 1	28:1	1:1
14	Rasio Siswa dengan Guru SD/MI	20 : 1	18:1	10:9
15	Rasio Siswa dengan Guru SMP/MTs	25 : 1	27:1	1:1
B	Indikator Mutu, Relevansi dan Daya			



No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Saing			
1	Angka Mengulang (AU) SD/MI	0%	0.27%	0.27%
2	Angka Mengulang (AU) SMP/MTs	0%	0.15%	0.15%
3	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0%	0.03%	0.03%
4	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0%	0.06%	0.06%
5	Angka Lulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%
6	Angka Lulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%
7	Kelayakan Guru Mengajar (GL) SD/MI	100%	89.12%	89.12%
8	Kelayakan Guru Mengajar (GL) SMP/MTs	100%	89.63%	89.63%
9	Ruang Kelas Baik (RKB) SD/MI	100%	83.82%	83.82%
10	Ruang Kelas Baik (RKB) SMP/MTs	100%	88.71%	88.71%
2	Urusan Kesehatan			
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	41.677	36.329	87.17
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	39.782	36.729	92.33
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	37.602	35.536	94,51
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	150.585	71.574	47.53
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar	82.384	0	0
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.595.244	44.615	67.51
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	181.251	117.813	64.99
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	4.375	2.936	67.11
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko HIV	79.517	30.877	38.83
10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	433.067	136.651	31.55
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	28.871	17.251	59.75
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	3.3.213	2.663	84.88
3	Urusan Pekerjaan Umum			
1	Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap	100%	98%	98%
2	Presentase Panjang Jalan Kota yang direhabilitasi/direkonstruksi	100%		
3	Rumah tangga Bersanitasi	100%	90.72%	90.72%
4	Rumah tangga pengguna air bersih	100%	87%	87%
5	Kawasan Kumuh	0%	819.80ha	819.80ha
6	Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah	30%	9.662%	0.32%
4	Urusan Perumahan Rakyat			
1	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota	100%	0	0
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hari Kota yang ditangani	100%		
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0%	NA	NA
4	Rumah layak huni	100%		
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	Urusan Sosial			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	638 org	2.534	25.18%
2	Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal	1%		



No	Jenis Indikator	Indikator Standar Pelayanan Minimal		Capaian
		Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng			
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	10%		
	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
No	Indikator			
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dengan batas 1 (satu) Tahun			

Catatan : Belum ada penerapan dalam anggaran, sehingga tidak ada laporan dari bidang tentang warga negara yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada

Berdasarkan hasil penilaian realisasi capaian indikator kinerja Tahun terhadap pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat dan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diperoleh hasilnya adalah

- a. Untuk urusan pendidikan dari 25 indikator sebanyak 6 indikator atau 24.00 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat tinggi, sebanyak 6 indikator atau 24.00 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai tinggi, sebanyak 2 indikator atau 8.00 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai sedang, dan 11 indikator telah mencapai target yang ditentukan.
- b. Untuk urusan kesehatan dari 12 indikator sebanyak 4 indikator atau 33.33 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat tinggi, sebanyak 1 indikator atau 8.33 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai tinggi, sebanyak 1 indikator atau 8.33 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai sedang, sebanyak 3 indikator atau 25.00 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai rendah, sebanyak 3 indikator atau 25.00 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai sangat.
- c. Untuk urusan pekerjaan umum dari 6 indikator sebanyak 1 indikator atau 16.66 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat tinggi, sebanyak 2 indikator atau 33.33 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai tinggi, sebanyak 1 indikator atau 16.66 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai rendah, dan sebanyak 1 indikator atau 16.66 persen realisasi capaian indikator memperoleh nilai rendah.



- d. Untuk urusan perumahan rakyat dari 4 indikator sebanyak 3 indikator atau 75.00 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat tinggi, dan 1 indikator telah mencapai target yang ditentukan.
- e. Untuk urusan sosial dari 3 indikator sebanyak 3 indikator atau 100.00 persen realisasi capaian indikator kinerja memperoleh nilai sangat rendah.

Arahan RPJPD Kota Medan Tahun 2006-2025

1. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Kota Jangka Panjang

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pokok pembangunan kota jangka panjang daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka pembangunan kota jangka panjang dengan jangka waktu 20 tahun dilakukan secara bertahap dimana setiap tahap berjangka waktu 5 tahun. Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan seluruhnya terdiri dari 4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan masing-masing RPJMD memiliki fokus dan skala prioritas yang sifatnya simultan dan berkesinambungan secara utuh dan konsisten menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana digambarkan oleh visi dan misi yang telah ditetapkan dan disepakati.

a. RPJMD ke-4 (2021-2025)

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kota 2025, maka secara makro, tujuan dan sasaran pembangunan kota jangka menengah daerah keempat (2021-2025) yang ditetapkan baik di bidang ekonomi maupun kesejahteraan sosial diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.101
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Indikator Kesejahteraan Sosial Kota Medan Tahun 2010 – 2025

No	Uraian	Satuan	Perkiraan			
			2010	2015	2020	2025
A	Indikator Makro Kesejahteraan Sosial					
1	Jumlah Penduduk Tengah Tahun	ribu jiwa	2.202,06	2.337,26	2.472,47	2.607,67
2	Pertumbuhan Penduduk	persen	1,29	1,11	1,03	0,94
3	Luas Wilayah	km ²	265.1	265.1	265.1	265.1
4	Kepadatan Penduduk	jiwa/km ²	8.306,51	8.816,53	9.326,54	9.836,56
5	APS					
	a. 7 - 12	persen	98.83	99.19	99.55	99.91
	b. 13 - 15	persen	95.52	96.74	97.95	99.17
	c. 16 - 18	persen	81.87	86	90.23	94.46
	d. 19 - 24	persen	38.72	44,00	49.29	54.56



6	Umur Harapan Hidup	tahun	72.92	74.58	76.23	77.89
7	Angka Kelahiran Kasar	rata-rata kelahiran PUS	2.09	1.89	0,01	1.48
8	Angka Kematian Kasar	per 1000 penduduk	2.17	1.62	1.06	0.51
9	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	14.38	12.09	9.8	7.52
10	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	103.1	94.38	85.67	76.95
11	Angka Kesakitan Umum	persen	10.76	9.7	8.65	7.6
12	TPAK	persen	56.91	58.14	61.87	65.6
13	Pengangguran Terbuka	persen	9.8	8.8	7.8	6.8
14	IPM	-	76.81	78.36	79.9	81.44
15	Penduduk Miskin	persen	6.49	5.74	4.99	4.24
16	Gini Ratio	-	0.26	0.25	0.24	0.22
17	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	11.84	12.84	13.84	14.84
B	Indikator Makro Ekonomi					
1	PDRB ADHB	Rp. Triliun	63.01	84.58	106.16	127.74
2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	8.13	8.72	9.3	9.88
3	PDRB Per Kapita ADHB	Rp. Juta	28.61	36.19	42.94	48.99
4	Inflasi	persen	5.56	5.03	4.5	3.96
5	Ekspor	Nilai FOB 000 US\$	4.723,17	6.248,70	7.774,25	9.299,80
6	Impor	Nilai CIF 000 US\$	1.563,17	2.081,53	2.599,89	3.118,25
7	Perkiraan Investasi	Rp. Triliun	9.35	12.81	16.27	19.73
8	APBD	Rp. Milyar	2.152,64	2.752,39	3.352,13	3.951,87
9	PAD	Rp. Milyar	477,99	663,71	849,42	1.035,13

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-3, maka RPJMD ke-4 ditujukan kepada **perwujudan kota yang aman, nyaman dan religius**. Hal ini didasari oleh masyarakat Kota Medan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju melalui percepatan pembangunan semua bidang yang telah berhasil ditumbuhkan dalam RPJPD ke-1,2 dan 3.

Pada RPJMD ke-4 ini diharapkan akan tumbuh dan berkembangnya pemahaman dan kehidupan beragama di masyarakat dengan tetap saling menghargai diantara para penganutnya, terjaminnya keamanan dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial serta terpenuhinya kondisi lingkungan hidup bagi masyarakat kota. Untuk menciptakan suasana Kota Medan yang aman, nyaman dan religius, pembangunan harus menumbuhkan berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pekerjaan, daya beli, barang dan jasa dan tidak terkecuali jaminan pasar bagi produk-produk mereka. Tidak dapat dipungkiri, meningkatnya kriminalitas medan berbagai gangguan sosial lainnya yang telah demikian



meresahkan masyarakat, tidak terlepas dari factor pengangguran yang tidak hanya menghilangkan pendapatan kelompok masyarakat yang menganggur tetapi juga meruntuhkan sistem nilai sosial dan nilai individu orang-orang yang merasakannya. Dengan demikian pembangunan ekonomi dan berbagai infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat diabaikan karena pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh pertumbuhan investasi merupakan strategi yang efektif dalam penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kota yang dilandasi oleh religiusitas akan mewujudkan tatanan hidup yang harmoni dan kondusif. Kondisi ini akan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkurangnya kesenjangan antara inti kota dan wilayah lingkaran luar, membaiknya pengelolaan sumber daya dan kualitas lingkungan kota, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga kota.

Walaupun prioritas dan fokus pembangunan kota jangka menengah keempat ditekankan kepada misi perwujudan kota yang aman, nyaman dan religius, namun pada hakekatnya keseluruhan misi yang ditetapkan harus diimplementasikan secara simultan dan seimbang dengan intensitas yang diselaraskan dengan masalah, tantangan dan potensi sumber daya produktif yang dimiliki dan dapat dikelola dalam pembangunan kota pada RPJMD keempat. Untuk itu, proses pembangunan kota pada RPJMD keempat ini diarahkan kepada:

- 1) Misi pertama **“mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis”** akan dicapai melalui:
 - a) Peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kota, ditunjukkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PDRB, dan pendapatan perkapita dalam jangka menengah selama tahun 2021-2025, serta penurunan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi diharapkan rata-rata mencapai 9,88% pertahun, sementara PDRB (dengan harga berlaku) tahun 2025 mencapai Rp 127,74 Triliun, pendapatan perkapita tahun 2025 mencapai Rp 48,99 juta, tingkat pengangguran terbuka di bawah 6,80%, dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 4,24%.
 - b) Peningkatan kontribusi, volume dan kualitas sector jasa perdagangan, keuangan dan industri dalam pembentukan PDRB, sehingga membentuk kerangka dan struktur perekonomian kota yang tangguh, kuat dan kokoh. Sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri menjadi ciri dan mesin penggerak perekonomian kota.



- c) Perwujudan perekonomian kota yang efisien, didukung produk-produk unggulan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta pengelolaan sumber daya ekonomi kota yang berkualitas dan berkelanjutan.
 - d) Ketersediaan kebutuhan pokok warga kota secara cukup seperti sandang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan serta jaminan kehidupan yang layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
 - e) Peningkatan taraf hidup warga kota, yang didorong dengan meningkatnya penyediaan lapangan kerja, dan pendapatan, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan harga diri serta hak-hak lokal, dan nasional.
 - f) Pemenuhan kebutuhan primer, sekunder dan tersier warga kota, dengan distribusi dan ketersediaan yang terjamin, sehingga menciptakan stabilitas harga dengan tingkat inflasi rata-rata dibawah satu digit.
 - g) Pengembangan MEBIDANG (Kawasan Polonia – Belawan-Kuala Namu) sebagai kawasan cepat tumbuh, dengan keterkaitan sektor-sektor ekonomi yang tinggi antar kawasan, serta berfungsi sebagai basis penyerapan tenaga kerja. Karena kondisi keterbatasan lahan, maka akan ada beberapa kegiatan yang akan berlokasi di wilayah tetangga seperti industri, peternakan, produksi sayur mayur dan pangan. Namun Kota Medan diharapkan sebagai pusat pemasaran dari kegiatan tersebut yang akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan aksesibilitas yang baik antara wilayah tetangga dengan Kota Medan.
 - h) Peningkatan daya saing lokal, regional dan nasional yang tinggi, sehingga menjadikan Medan sebagai pusat jasa perdagangan regional, nasional, dan internasional, disamping sebagai pusat lalu lintas keuangan yang berskala besar.
 - i) Keragaman pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu, sehingga masyarakat terbebas dari sikap ketergantungan, kebodohan, dan penderitaan, serta keterbelakangan.
 - j) Peningkatan peranan ekonomi kota, di tingkat regional, nasional maupun internasional, sehingga kemajuan ekonomi lebih bermanfaat bagi warga Kota Medan, investor dan menarik wisatawan manca negara.
- 2) Misi kedua “**mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan, menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri**” akan dicapai melalui:
- a) Peningkatan derajat dan kualitas pendidikan secara berkesinambungan dan berdaya saing global, sehingga membentuk sumber daya manusia yang cerdas, unggul dan mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, yang ditandai oleh



- meningkatnya IPM mencapai 81,44 tahun 2025, dengan rata-rata lama sekolah 14,84.
- b) Peningkatan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat secara berkesinambungan, dengan dukungan lingkungan kota yang sehat, sehingga menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, mencerminkan kesehatan untuk semua, yang ditandai oleh meningkatnya IPM mencapai 81,44 tahun 2025, dengan angka harapan hidup 77,89.
 - c) Pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dengan penyebaran yang merata dan didukung tingkat produktivitas yang tinggi, dengan perkiraan penduduk tetap mencapai 2,60 juta jiwa pada tahun 2025.
 - d) Peningkatan pelayanan umum yang berkualitas, adil dan merata serta berdaya saing global.
 - e) Perwujudan masyarakat kota yang kuat, dinamis dan mandiri.
 - f) Pembentukan masyarakat yang kreatif, kompetitif, inovatif dan produktif, sehingga menjadi pilar penting dalam pembangunan kota.
 - g) Peningkatan kepemimpinan dan kontribusi Kota Medan dalam berbagai kerjasama antar daerah, regional, nasional bahkan internasional.
 - h) Peningkatan investasi dalam pembangunan kota mencapai 19,73 Triliun tahun 2025.
 - i) Peningkatan kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan sebagai pusat kegiatan jasa perdagangan, bisnis keuangan, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional.
- 3) Misi ketiga “**mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal dan berwawasan lingkungan**” akan dicapai melalui:
- a) Ketersediaan rencana tata ruang kota yang berkualitas (berdaya guna dan berhasil guna) serta berkesinambungan, ditunjang oleh penetapan Peraturan Daerah beserta ketentuan pelaksanaan sebagai dasar pembangunan prasarana dan sarana, serta terciptanya mekanisme pembangunan yang mampu menjamin pemanfaatan rencana tata ruang kota sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan panjang disertai dukungan transparansi serta upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota secara komprehensif dan tegas, namun mampu mengakomodir kebutuhan perkembangan kota dengan tetap memelihara dan melestarikan lingkungan.
 - b) Ketersediaan prasarana dan sarana sosial serta ekonomi yang modern, handal dan asri, khususnya disektor perhubungan, pendidikan, kesehatan secara terintegrasi. Adanya kawasan-kawasan pusat perdagangan modern yang berskala regional, nasional, dan internasional. Pengembangan kawasan industri baru dengan



teknologi tinggi. Adanya kawasan perumahan dan permukiman yang sehat, adil dan asri, serta adanya kawasan perkantoran baru pemerintahan kota yang terintegrasi.

- c) Pembangunan jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi di dalam kota dan juga yang makin memantapkan integrasi MEBIDANG antara lain dengan membangun *Outer-Outer Ringroad*. Demikian pula perlu diciptakan prasarana dan sarana yang terintegrasi satu sama lain berbasis angkutan massal (*mass rapid transportation*), melalui pengaktifan kembali angkutan umum kereta api (dengan perubahan menjadi *monorail*, *fly over* ataupun *subway*) yang melayani angkutan lokal untuk mengurangi beban mode angkutan jalan raya. Angkutan lokal adalah angkutan jarak dekat dengan melayani Kota Medan dengan kota-kota lain disekitarnya. Terpenuhinya pasokan energi tenaga listrik, gas dan sumber energi lainnya serta air bersih sesuai kebutuhan yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Terbangunnya prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman perkotaan sesuai Standar Nasional Indonesia secara merata, di seluruh wilayah yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang kota. Terselenggaranya pelayanan pos dan telekomunikasi serta sistem informasi yang terintegrasi secara efisien dan modern, guna terciptanya masyarakat Kota Medan yang menguasai informasi.
- d) Peningkatan profesionalisme aparaturnya Pemerintah Kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional; birokrasi kota yang rasional, dan non diskriminatif; disertai peningkatan kerjasama dan sinkronisasi pembangunan yang dilengkapi dengan database dan sistem informasi pembangunan kota yang transparan dan terintegrasi.
- e) Ketersediaan infrastruktur yang mampu sejajar dengan perkembangan jaman dan teknologi serta mampu mengakomodir kebutuhan pendukung sektor jasa perdagangan, keuangan dan industri serta memiliki keunggulan kompetitif pelayanan dibanding kota-kota lain di dunia, sekaligus terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya lokal untuk mewujudkan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dalam daya saing regional serta modal pembangunan kota.
- f) Ketersediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi dan utilitas kota, dimana sumber pendanaannya dari masyarakat dan dunia usaha berdasarkan kemitraan dalam kerjasama pembangunan.
- g) Pembentukan ruang kota yang nyaman dengan ruang terbuka yang memadai untuk menjamin kualitas kesehatan dan hidup masyarakat kota yang lebih baik dan terpenuhinya baku mutu kualitas lingkungan air, tanah dan udara, dengan tetap



- memelihara nilai-nilai kawasan dan bangunan yang dilestarikan atau memiliki nilai sejarah; serta terwujudnya konservasi sumber daya air dan sumber daya lainnya yang mampu menjaga berlangsungnya pembangunan kota yang berkelanjutan.
- h) Pengembangan sinergitas diantara berbagai pelaku pembangunan kota, khususnya antara Pemerintah – DPRD – Masyarakat – PerguruanTinggi – Press – Dunia Usaha.
 - i) Peningkatan fungsi dan daya dukung ruang dalam rangka menjaga kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara selaras, serasi, seimbang, lestari dan asri.
 - j) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, sehingga terlaksananya keterpaduan pembangunan prasarana dan sarana dengan mengedepankan peran serta masyarakat secara luas, dan keterpaduan antar wilayah dan antar aktor pembangunankota(*stakeholder*).
- 4) Misi ke empat “**mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan**”, akan dicapai melalui:
- a) Pemerataan pembangunan kota sampai ke wilayah lingkaran luar, dengan tingkat kesenjangan yang rendah, yang ditandai oleh Gini Ratio 0,22.
 - b) Peningkatan kualitas hidup, kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kota secara merata.
 - c) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kota seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan transportasi secara adil dan merata.
 - d) Penurunan tingkat kemiskinan relative dan hapusnya kemiskinan absolut. Kemiskinan relative kurang dari 4,24%.
 - e) Pemanfaatan agama sebagai kekuatan pendorong, landasan moral, etika, dan perekat kohesi sosial dalam pembangunan kota dan kehidupan masyarakat.
 - f) Terselenggaranya jaminan dan perlindungan terhadap rasa aman dan nyaman masyarakat yang tinggi dari setiap ancaman, gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.
 - g) Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan kota.
 - h) Perwujudan ekonomi kota yang didukung oleh infrastruktur modern dan seimbang antara lingkaran luar dan inti kota.
 - i) Pembentukan pengusaha dan perusahaan mikro, kecil, dan menengah menjadi usahawan formal dan maju serta terintegrasi dengan kegiatan ekonomi sektor moderen.

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini, merupakan tahapan ke-4 atau tahapan terakhir dari periode RPJPD Tahun 2006-2025. Dengan demikian visi, misi dan tujuan pembangunan kota yang tertuang dalam RPJPD tersebut diharapkan akan dapat dicapai



pada periode RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini. Oleh karena itu dalam penyusunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, perlu memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD pada masing-masing misi. Hal ini perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dimulai dari periode 5 tahun pemerintahan yaitu RPJMD ke-1 hingga periode RPJMD ke-4 atau periode terakhir dari RPJPD.

Tujuan dan sasaran pembangunan secara umum diukur dari sejauh mana capaian yang diperoleh atas berbagai indikator yang dianggap sesuai dan relevan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pada RPJPD Kota Medan tahun 2006-2025 jenis indikator yang akan dicapai pada setiap tahapan periode RPJMD meliputi Indikator Makro Kesejahteraan Sosial (17 indikator) dan Indikator Makro Ekonomi (9 indikator).

Untuk kepentingan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD ini yang perlu dan relevan untuk diketahui adalah sudah sampai sejauh mana capaian indikator tersebut hingga periode tahapan RPJMD ke-3 yang berakhir tahun 2020. Capaian indikator yang terdiri dari Indikator Makro Kesejahteraan Sosial dan Indikator Makro Ekonomi sampai akhir tahapan periode RPJMD ke-3 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.102
CAPAIAN INDIKATOR DALAM RPJMD sampai Periode RPJMD -3 (2016-2020)

No	URAIAN	SATUAN	PROYEKSI			REALISASI
			2010	2015	2020	2020
A	Indikator Makro Kesejahteraan Sosial					
1	Jumlah Penduduk Tengah Tahun	ribu jiwa	2,20	2.337,00	2.472,00	2.435,25
2	Pertumbuhan Penduduk	persen	1,29	1,11	1,03	1,45
3	Luas Wilayah	km ²	265,10	265,10	265,10	265,10
4	Kepadatan Penduduk	jiwa/km	8.306,00	8.816,00	9.326,00	9.189,63
5	APS					
	a.7-12	persen	98,83	99,19	99,55	NA
	b.13-15	persen	95,52	96,74	97,95	NA
	c.16-18	persen	81,78	86,00	90,23	NA
	d.19-24	persen	38,72	44,00	49,29	NA
6	Umur Harapan Hidup	tahun	72,92	74,58	76,28	73,14
7	Angka Kelahiran Kasar	rata rata kelahiran PUS	2,09	1,89	1,69	NA
8	Angka Kematian Kasar	per 1000 penduduk	2,17	1,62	1,06	NA
9	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	14,38	12,09	9,80	0,46
10	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	103,10	94,38	85,67	NA
11	Angka Kesakitan Umum	persen	10,76	9,70	8,65	NA
12	TPAK (AGUSTUS 2020)	persen	56,91	58,14	61,87	63,62



13	TPT	persen	9,80	8,80	7,80	10,74
14	IPM	poin	76,81	78,36	79,90	80,98
15	Penduduk Miskin	persen	6,49	5,74	4,99	8,01
16	Gini Ratio	poin	0,26	0,25	0,24	0,32
17	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	11,84	12,84	13,84	11,39
B	Indikator Makro Ekonomi		2010	2015	2020	2020
1	PDRB ADHB (Lapangan Usaha)	Rp Triliun	64,01	84,58	106,16	242,20
2	Pertumbuhan Ekonomi	persen	8,13	8,72	9,30	-1,98
3	PDRB Perkapita ADHB	Rp Juta	28,61	36,19	42,94	55,18
4	Inflasi	Persen	5,56	5,03	4,50	1,76
5	Ekspor	Nilai FOB 000 US\$	4.723,15	6.248,70	7.774,25	
6	Impor	Nilai CIF 000 US\$	1.563,17	2.081,53	2.599,89	
7	Perkiraan Investasi	Rp Triliun	9,35	12,81	16,27	
8	APBD	Rp Milyar	2.152,64	2.752,39	3.352,13	3.852.959.101.693
9	PAD	Rp Milyar	477,99	663,71	849,42	1.509.831.081.747



Tabel 2.103
INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD TAHUN 2016-2021

No	IKK	Satuan	TARGET					CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
I	ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT											
	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI											
1	PDRB ADHB	milyar (RP)	179.699,52	201.263,46	225.415,07	252.464,87	282.754,66	184.809,03	203.035,74	222.483,23	241.482,34	242.198,24
2	PDRB ADHK	milyar (RP)	51.674,83	55.085,38	58.721,77	62.697,57	66.729,00	132.062,86	139.739,34	148.007,14	156.780,59	153.669,83
3	PDRB PERKAPITA (Harga Berlaku)	juta (Rp)	76,3	84,39	93,68	103,58	115,42	83,45	90,9	98,26	105,92	106,23
4	PDRB PERKAPITA (Harga Konstan)	juta (Rp)	22,83	23,95	25,12	26,35	27,64	59,24	62,17	65,37	68,76	67,4
5	Laju inflasi	%	3,8	4,4	4,3	4,04	4	6,6	3,18	1	2,43	1,76
6	Persentase penduduk miskin	%	9,64	12	7,76	6,96	6,24	9,3	9,11	8,25	8,08	8,01
7	Laju Perumbuhan Ekonomi (LPE)	%	7	7,34	5,6	6,5	6,7	7,16	5,81	5,92	5,93	-1,98
	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL											
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	78,1	81,51	85,08	88,79	92,67	42,15	44,93	41,91	41,36	41,86
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,95	99,36	99,96	99,97	99,98	Na	48,01	73,41	76,74	99,97
3	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	Kegiatan	6	15	22	26	30	104	3	2	2	0
4	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	unit	10	15	22	26	30	29	29	29	63	NA
II	ASPEK PELAYANAN UMUM											



	FOKUS PELAYANAN URUSAN WAJIB	%											
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	100	100	100	100	104,75	104,74	102,03	100,06	89,6	
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	98	100	100	100	100	87,52	87,52	95,33	95,71	76,28	
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	82	83,7	85,3	87	88,2						
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,05	0,03	0,03	0,02	0,02	
5	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,12	0,1	0,09	0,07	0,06						
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,62	0,59	0,55	0,52	0,49						
7	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	89,6	
8	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100						
9	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100	100	100	100	100						
10	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	109,7	113,09	116,57	120,17	123,87	106,74	106,74	106,85	117,48	103,28	
11	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/Mts	%	118,91	125,46	132,36	139,66	147,34						
12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	93,98	96,46	99	99,62	100	89	89	89	89,62	95,6	
13	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	79,05	79,08	52,94		
14	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	100	100	100	100	100	90,32	89,8	88,24	92,8		



15	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC TCA	%	100	100	100	100	100	75,7	90,5	90,5	98,43	
18	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100	56,66	56,66	60,72	6,72	
20	Cakupan Kunjungan Bayi	%	100	100	100	100	100	93,99	93,1	93,1	93,1	
21	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Angkutan Darat	%	2,19	2,15	2,11	2,08	2,04	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
23	Kepemilikan KTP	%	86,65	92,4	97,47	99,35	100	84,94	87,57	31,35	97	96,34
24	Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk	per seribu	614	619	626	637	650	85,89	34,05	35,51	54,29	83,02
25	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	4,07	4,23	4,39	4,56	4,72	66,21	66,21	2,09	2,16	2,16
26	Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 tahun Ke Atas	%	89,9	90,05	90,2	90,35	90,5	3,87	3,87	100	100	NA
27	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	88,22	88,39	89,13	89,74	89,99	90,74	90,74	53,94	57,46	57,46
28	Prevelensi Peserta KB Aktif	%	76,12	78	79,92	81,9	83,92	76,38	76,01	67,23	64,8	69,68
29	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di Setiap Desa/Kelurahan	%	103,2	101,57	99,97	98,39	96,84	104,86	104,86	110,22	114,39	100



30	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	21,94	21,82	21,7	21,5	21,45		1.51	1.56	1.50	1.16	1.08
31	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	unit	120	140	160	180	200		104	104	92	92	NA
32	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	4,95	5,09	5,23	5,38	5,53						
33	PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89		9,89	9,89	35,19	38,22	NA
34	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,82	73,51	74,4	77,29	80		60,28	60,05	64,35	65,99	64,89
35	Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	30,03	33,14	38,91	42,1	45		59,24	59,34	48,19	63,17	34,79
36	Koperasi Aktif	%	30,79	33,82	37,14	40,8	44,81		28,73	62,18	30,83	22,82	22,82
37	Usaha Mikro dan Kecil	%	86	83,59	81,25	78,97	76,75		99,67	43,04	96,46	96,64	96,64
38	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Di Lestarkan	%	75,41	77,49	81,49	83,75	86,61		42	42	42	58	32,07
39	Kunjungan Wisata	orang	258.813	274.929	292.049	310.235	329.235		136681	610749	186255	173718	
40	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	% per jumlah penduduk	5,74	6,11	6,59	7,16	7,8		3,09	3,07	3,03	3,04	2,72
41	Gelanggang /Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	% per jumlah penduduk	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06		0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0034
42	Lapangan Olahraga	Per 10.000 penduduk	127	129	131	133	135		5,84	0,1	0,42	0,42	0,21
43	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	8	8	8	8	8		10	10	11	11	7
44	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	5	5	5	5	5		7	7	0	1	1
45	Sistem Informasi	SIM	8	8	8	8	8		8	8	8	8	
46	Ketersediaan Pangan Utama	kg	110.374,11	110.749,06	111.125,29	111.502,79	111.881,58			103,94	146,42	154,87	130,81



47	PKK Aktif	%	100	100	100	100	100						
48	Posyandu	%	100	100	100	100	100						
49	Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	97	100,92	104,99	109,23	113,64		100	16,42	35,18	35,18	28,35
50	Kegiatan Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	%	9,77	23,85	58,23	142,17	347,18		11	18	5	3	1
51	Luas Lahan Bersertifikat	%	37,72	35,57	33,55	31,63	29,83		64,08	64,08	64,08	64,08	64,08
52	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	85,04	88,19	91,45	94,84	98,35		82	0	0	0	0
53	Penyelesaian Ijin Lokasi	%	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100
54	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	%	32,71	32,11	31,51	30,98	30,35		34,22	34,41	23,54	24,81	25,25
55	Pengunjung Perpustakaan	%	3,08	2,54	2,09	1,72	1,41		3,75	2,72	3,26	2,78	0,75
56	Produksi Perikanan	%	88,73	89,76	90,81	91,88	92,88		146,24	146,24	82,95	131,47	132,558
FOKUS PELAYANAN URUSAN PILIHAN													
1	Konsumsi Ikan	%	76,51	78,22	79,97	81,76	83,59		114,68	100	100	100,23	NA
2	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	3,4	2,74	2,2	1,77	1,43		4,26	4,4	4,6	5,09	6,22
3	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	0,64	0,38	0,23	0,14	0,08		1,06	0,81	1,26	1,24	NA
4	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	12	12,14	12,28	12,43	12,57		27719,51	30133,93	32497,42	34414,46	34186,37
5	Pertumbuhan Industri	%	12,21	14,91	18,22	22,26	27,2		15,34	29,06	7,24	31,53	
6	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	26,95	26,97	26,98	26,99	27		24,77	24,77	25,11	24,96	27
7	Ekspor Bersih Perdagangan (milyar US\$)	milyar US\$	4.081,32	4.131,24	4.181,78	4.232,93	4.284,70		2,93	3,84	4,59	12,69	3,15
III	ASPEK DAYA SAING												



No	IKK	Satuan	TARGET					CAPAIAN KINERJA				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH											
1	Konsumsi Per Kapita	kg	655,67	658,06	661,35	664,65	667,98					
	FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR											
1	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL		100	100	100	100	100					
2	Penegakkan Hukum Lingkungan		100	100	100	100	100	100	6,89	6,89	100	36
3	Penanganan Sampah		100	100	100	100	100	91,29	90,33	32,56	77,8	85
4	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk		2,51	2,59	2,68	2,77	2,86	2,43	2,43	0,025	0,05	0,39
5	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik		97,34	100	100	100	100	93,5	97,59	98	99	98
6	Pemeliharaan Jalan Kota				100	100	100					
7	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih		66,23	64,94	63,68	62,44	61,22	67,55	70,29	83,82	NA	87
8	Lingkungan Permukiman Kumuh		0,61	0,5	0,41	0,34	0,28					
9	Rumah Layak Huni		100	100	100	100	100	97,29	99,79	83,13	93,75	93,75
10	Persentase Rumah Bersanitasi		84,4	86,04	87,71	89,4	91,14	82		89	89,86	90,72
11	Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah BerHPL/HGB		30	30	30	30	30	29,78	29,78	29,78	29,78	29,78
	FOKUS IKLIM INVESTASI											
	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	milyar rupiah	82,03	82,54	83,68	84,52	85,11	4305,58	3351,05	636,71	536,67	3874,96
	FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA											
1	IPM		79,88	80,31	80,74	81,17	81,6	79,34	79,98	80,65	80,97	80,98



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya mendukung pembiayaan pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan kota yang akan dicapai. Pada Bab ini disajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir, dan kerangka pendanaan proyeksi APBD 5 (lima) tahun ke depan selama periode RPJMD Tahun 2021-2026.

3.1. Kinerja Keuangan Masa lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan kerangka kebijakan menengah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah untuk proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, dengan penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan, dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Menganalisis kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya



bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya.

Berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan, Struktur APBD terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Selanjutnya, secara umum komponen APBD, terdiri atas:

A. Komponen Pendapatan

Secara umum sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintahan Kota Medan dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) jenis pendapatan, yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Khusus terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, terdiri atas: (1) Dana Perimbangan yang mencakup: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum (DAU) dan (c) Dana Transfer Khusus, (2) Dana Insentif Daerah, (3) Dana Otonomi Khusus, (4) Dana Keistimewaan, dan (5) Dana Desa.
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti, Pendapatan Hibah.

B. Komponen Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.

1. Belanja Operasi adalah merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja daerah ini terdiri atas:
 - a. belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan



- f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal adalah merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja daerah ini terdiri atas:
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja tidak terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer adalah merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja daerah ini terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, maka setiap daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan daerahnya dengan cara lebih mengoptimalkan belanja modal dari pada belanja lainnya. Sebab pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

C. Komponen Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Selanjutnya:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas (a) SiLPA; (b) pencairan Dana Cadangan; (c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d) penerimaan Pinjaman Daerah; (e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas (a) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; (b) penyertaan modal daerah; (c) pembentukan Dana Cadangan; (d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (e)



pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Secara umum komponen pembiayaan difungsikan untuk tetap menjaga keseimbangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah bila terjadi surplus atau defisit. Selanjutnya, periode kinerja keuangan Kota Medan yang disajikan adalah untuk periode tahun 2016-2020. Data kinerja keuangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Medan, diuraikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:



Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2016 - 2020 Kota Medan

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan (Persen)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	PENDAPATAN	4.308.116.916.024,91	4.409.065.482.200,50	4.253.618.758.532,53	5.518.768.106.206,31	3.988.761.485.152,01	0,21
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.353.309.574.014,91	1.739.756.922.633,50	1.636.204.514.683,53	1.829.665.882.248,31	1.509.831.081.747,01	4,24
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.125.638.762.947,32	1.370.149.681.442,32	1.312.070.185.618,00	1.472.414.654.505,00	1.195.850.162.642,00	2,73
1.1.1.1	Pajak Hotel	95.822.427.293,65	109.115.442.280,84	119.664.695.854,00	121.142.393.806,00	56.205.691.378,00	(7,21)
1.1.1.2	Pajak Restoran	130.918.135.516,14	151.046.712.629,11	172.788.503.072,00	209.883.937.066,00	138.477.531.250,00	4,30
1.1.1.3	Pajak Hiburan	33.103.004.155,25	37.725.171.779,43	43.079.908.039,00	43.768.753.146,00	14.648.947.982,00	(9,19)
1.1.1.4	Pajak Reklame	17.508.256.230,32	22.310.887.064,51	13.727.520.958,00	19.017.920.055,00	20.128.387.583,00	8,33
1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	228.208.022.998,00	255.943.080.406,00	278.135.298.509,00	294.962.540.702,00	280.282.891.169,00	5,47
1.1.1.6	Pajak Parkir	16.866.401.417,00	19.387.844.772,30	22.209.803.703,00	26.567.809.962,00	14.119.016.934,00	0,57
1.1.1.7	BPHTB	265.622.050.024,00	402.576.535.076,00	275.741.255.103,00	302.724.851.911,00	415.999.704.894,00	16,81
1.1.1.8	PBB	326.560.520.614,00	360.038.223.339,00	375.535.355.171,00	444.001.353.429,00	246.199.574.457,00	(2,94)
1.1.1.9	Pajak Air Tanah	10.989.944.693,96	12.005.784.095,13	11.187.845.209,00	10.345.094.428,00	9.788.416.995,00	(2,62)
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	115.597.958.126,00	113.452.533.261,00	85.204.885.174,00	90.431.692.016,04	89.669.151.517,15	(5,37)
1.1.2.1	Jasa Retribusi Umum	49.982.792.847,00	47.340.635.834,00	49.133.750.800,00	53.721.082.950,00	42.764.137.860,00	(3,14)
1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	1.399.691.000,00	431.737.417,00	7.663.700.765,00	10.203.311.294,04	8.895.199.139,15	406,56
1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	62.339.087.254,00	63.344.676.171,00	28.417.433.609,00	26.507.297.772,00	38.009.814.518,00	(4,21)
							-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan	8.948.679.468,00	11.095.561.295,00	11.901.953.037,00	14.638.487.560,00	17.831.106.538,27	19,02
1.1.3.1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	8.948.679.468,00	11.095.561.295,00	11.901.953.037,00	14.638.487.560,00	-	18,08
1.1.3.2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.182.067.765,00		10.984.450.655,00		17.831.106.538,27	48,29
1.1.3.3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Swasta						



NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan (Persen)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	285.124.173.473,59	245.059.146.635,18	227.027.490.854,53	252.181.048.167,27	206.480.661.049,59	(7,11)
1.1.4.1	Jasa Giro	17.187.304.142,00	13.653.856.292,00	9.104.877.911,00	22.867.495.990,00	23.057.507.497,00	24,53
1.1.4.2	Denda Pajak	1.026.670.562,70	1.065.000.683,31	8.471.380.920,29	4.105.127.695,57	7.983.969.042,00	185,53
1.1.4.3	Pendapatan dari Pengembalian	45.170.915.168,19	32.595.722.515,16	25.599.560.543,32	48.848.890.438,95	8.780.406.944,15	(10,13)
1.1.4.4	Pendapatan BLUD	140.762.750.221,10	116.820.037.133,71	100.440.765.179,92	91.202.749.601,75	90.201.459.358,44	(10,33)
1.1.4.5	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	1.799.457.111,00	-	-	-	
1.1.4.6	Dana Kapitasi	81.102.304.160,00	79.125.072.900,00	83.410.906.300,00	85.156.784.441,00	76.149.631.400,00	(1,38)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER/ DANA PERIMBANGAN	2.772.807.342.010,00	2.669.308.559.567,00	2.617.414.243.849,00	3.401.878.083.958,00	2.056.223.073.978,00	(3,82)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.900.853.852.448,00	2.122.769.416.793,00	2.157.180.424.946,00	2.156.807.334.247,00		13,29
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	224.272.293.448,00	199.321.136.670,00	216.767.245.746,00	139.174.722.132,00	217.184.970.404,00	4,47
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.611.940.995.000,00	1.583.624.375.000,00	1.583.624.375.000,00	1.660.238.913.000,00	1.493.919.764.000,00	(1,73)
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	64.640.564.000,00	339.823.905.123,00	356.788.804.200,00	357.393.699.115,00	345.118.339.574,00	106,86
1.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya						
1.2.2.1	Dana Penyesuaian & Otonomi	336.747.526.000,00	-	-	-	8.538.533.000,00	
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya						
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	535.205.963.562,00	546.539.142.774,00	390.135.098.003,00	1.245.070.749.711,00	414.168.796.427,00	31,48
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi	-	278.479.395,00			-	
1.2.4	Bantuan Keuangan						
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari provinsi dan Pemerintah lainnya		-	70.098.720.900,00		-	
1.3	Total Lain-Lain Pendapatan Yang sah	-	-		287.224.140.000,00		



NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan (Persen)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.3.1	Hibah	-	-		287.224.140.000,00		
2	BELANJA	4.523.672.134.655,15	4.394.045.824.264,53	4.213.480.509.726,24	5.509.288.700.981,01	3.852.959.101.693,55	(1,57)
2.1	Belanja Operasi	3.584.201.317.240,59	3.396.530.032.362,53	3.455.113.095.305,68	4.066.028.241.541,64	3.376.395.195.795,27	(0,70)
2.1.1	Belanja Pegawai	2.441.393.474.914,00	2.207.347.032.699,00	1.694.592.398.172,00	1.798.919.361.881,00	1.640.220.871.179,91	(8,87)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.101.425.831.408,59	1.133.180.467.613,53	1.717.381.657.249,68	2.006.736.639.708,64	1.460.907.314.219,36	11,02
2.1.3	Belanja Bunga						-
2.1.4	Belanja Hibah	40.988.310.918,00	55.317.675.150,00	43.007.039.884,00	254.079.939.952,00	273.555.760.396,00	127,79
2.1.5	Bantuan Bantuan Sosial	394.000.000,00	724.656.900,00	132.000.000,00	6.292.300.000,00	1.711.250.000,00	1.149,06
2.2	Belanja Modal	936.599.131.961,06	997.475.991.902,00	753.996.886.210,07	992.661.245.694,74	308.278.278.057,33	(13,80)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	40.930.175.600,00	66.525.256.216,00	53.238.817.927,00	24.746.094.000,00	20.687.014.370,00	(6,84)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	187.784.175.600,00	133.047.008.057,00	173.633.532.132,38	229.035.641.075,13	129.850.666.107,00	(2,51)
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.818.457.515,00	58.403.395.809,00	106.842.921.753,46	240.827.998.427,00	74.701.206.791,00	24,92
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	566.401.311.764,06	733.321.157.013,00	411.121.088.418,23	467.234.704.167,00	81.829.575.489,33	(20,83)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	44.665.170.447,00	6.179.174.807,00	9.160.525.979,00	30.816.808.025,61	1.209.815.300,00	25,60
2.3	Belanja Tak Terduga	2.871.385.453,50	-	4.370.528.210,49	599.213.744,63	168.285.627.840,95	6.987,58
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.871.385.453,50	-	4.370.528.210,49	599.213.744,63	168.285.627.840,95	6.987,58
2.4	Transfer	1.559.196.340,00	1.799.344.960,00	1.522.843.400,00	1.436.985.100,00		(1,87)
2.4.1	Transfer Bantuan Keuangan	1.559.196.340,00	1.799.344.960,00	1.522.843.400,00	1.436.985.100,00		(1,87)
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.559.196.340,00	1.799.344.960,00	1.522.843.400,00	1.436.985.100,00		(1,87)
							-
3	Pembiayaan						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	252.575.606.530,03	30.461.191.559,59	28.701.504.535,76	48.608.840.240,07	506.651.260.365,37	229,49
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	45,83

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan



Tabel 3.2
Target Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2020 Kota Medan

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	PENDAPATAN	5.490.162.683.364,97	5.523.623.117.419,81	5.239.408.011.116,00	6.257.239.035.331,00	4.757.852.448.866,16
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.884.851.580.562,97	2.031.995.548.717,81	2.112.663.059.116,00	2.312.760.384.058,00	1.813.909.461.511,16
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.331.127.546.952,00	1.387.127.546.952,00	1.511.000.000.000,00	1.732.098.260.569,00	1.359.509.068.000,00
1.1.1.1	Pajak Hotel	91.980.801.593,00	94.980.801.593,00	117.000.000.000,00	140.700.000.000,00	70.247.40.000,00
1.1.1.2	Pajak Restoran	126.215.837.083,00	132.215.837.083,00	170.000.000.000,00	204.000.000.000,00	180.000.000.000,00
1.1.1.3	Pajak Hiburan	38.308.417.000,00	38.808.417.000,00	43.000.000.000,00	45.300.000.000,00	32.530.000.000,00
1.1.1.4	Pajak Reklame	89.852.375.000,00	94.352.375.000,00	107.229.883.724,00	120.544.873.783,00	25.646.627.000,00
1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	235.755.254.753,00	239.755.254.753,00	244.755.254.753,00	288.821.952.000,00	300.000.000.000,00
1.1.1.6	Pajak Parkir	14.000.000.000,00	19.000.000.000,00	22.000.000.000	30.000.000.000,00	17.184.801.000,00
1.1.1.7	BPHTB	336.974.000.000,00	336.974.000.000,00	339.974.000.000,00	370.085.122.322,00	280.000.000.000,00
1.1.1.8	PBB	386.540.861.523,00	419.040.861.523,00	454.040.861.523,00	515.795.969.214,00	444.600.000.000,00
1.1.1.9	Pajak Air Tanah	11.500.000.000,00	12.000.000.000,00	13.000.000.000,00	16.850.343.250,00	9.300.000.000,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	224.335.400.000,00	255.573.650.000,00	250.841.500.000,00	177.218.150.000,00	94.865.269.721,14
1.1.2.1	Jasa Retribusi Umum	64.263.600.000	85.516.600.000	87.516.600.000	92.516.600.000	69.594.283.493
1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	13.125.400.000	10.283.650.000	10.283.650.000	10.283.650.000	7.505.356.059
1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	145.273.400.000	159.773.400.000	153.041.250.000	74.067.900.000	33.347.531.756
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan	10.312.868.999,00	12.181.227.000,00	12.300.000.000,00	13.144.465.118,00	15.784.824.073,00
1.1.3.1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.312.868.999,00	12.181.227.000,00	12.300.000.000,00	13.144.465.118,00	1.651.236.798,00
1.1.3.2	Bagian Laba atas Penyertaan	-	-	-	-	14.133.587.275,00



NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Modal pada BUMN					
1.1.3.3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Swasta	-	-	-	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	319.075.764.611,97	377.113.124.765,81	338.521.559.116,00	390.299.508.371,00	343.750.299.717,02
1.1.4.1	Jasa Giro	15.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	13.000.000.000,00
1.1.4.2	Denda Pajak	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
1.1.4.3	Pendapatan dari Pengembalian	31.395.020.420,45	45.835.865.858,81	6.942.508.209,00	7.902.043.032,00	7.532.264.894,00
1.1.4.4	Pendapatan BLUD	182.004.596.008,52	206.527.041.000	206.878.833.000,00	206.878.833.000,00	206.364.256.778,43
1.1.4.5	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-
1.1.4.6	Dana Kapitasi	83.676.148.183,00	102.750.217.907,00	102.700.217.907,00	153.518.632.339,00	110.853.778.044,59
1.2	PENDAPATAN TRANSFER/ DANA PERIMBANGAN	3.605.032.623.407,00	3.491.627.568.702,00	3.126.744.952.000,00	3.636.639.051.273,00	2.767.360.207.355,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.565.242.386.000,00	2.236.515.051.000,00	2.246.744.952.000,00	2.322.736.850.000,00	2.117.360.207.355,00
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	251.854.146.000,00	259.392.185.000,00	274.821.363.000,00	222.464.581.000,00	207.810.387.000,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.611.940.995.000,00	1.611.940.995.000,00	1.583.624.375.000,00	1.686.885.959.000,00	1.560.956.851.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	691.447.245.000,00	365.181.871.000,00	388.299.214.000,00	413.386.310.000,00	348.592.969.355,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah pusat Lainnya					
1.2.2.1	Dana Penyesuaian& Otonomi	41.291.769.000,00	-	-	-	-
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya					
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	1.005.810.684.007,00	1.154.798.738.307,00	780.000.000.000,00	1.313.902.201.273,00	650.000.000.000,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi		278.479.395,00	-		-
1.2.4	Bantuan Keuangan					
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari provinsi dan Pemerintah lainnya	2.687.784.400,00	100.035.300.000,00	1000.000.000.000	-	-



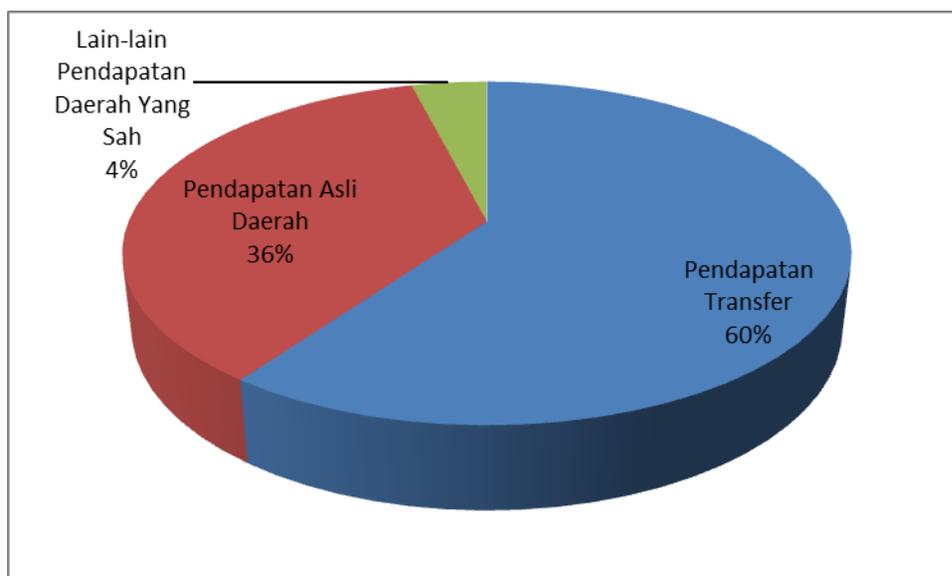
NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.3	Total Lain-Lain Pendapatan Yang sah	278.479.395,00	-	-	307.839.600.000	-
1.3.1	Hibah	278.479.395,00	-	-	307.839.600.000	-
2	BELANJA	5.735.922.591.995,00	5.546.733.964.019,40	5.449.562.922.528,00	6.302.963.592.428,05	5.252.856.581.219,53
2.1	Belanja Operasi	4.413.092.921.342,00	4.119.300.403.261,40	4.274.124.864.704,00	4.992.707.636.172,86	4.294.875.117.881,45
2.1.1	Belanja Pegawai	2.959.163.209.701,00	2.498.899.756.155,40	1.855.875.120.770,00	2.057.885.655.821,05	1.981.850.865.489,19
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.394.929.711.641,00	1.552.599.863.106,00	2.353.248.743.934,00	2.619.454.280.488,81	1.983.356.923.800,00
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	54.000.000.000,00	60.000.000.000	60.000.000.000,00	300.321.777.700,00	319.567328.592,00
2.1.5	Bantuan Bantuan Sosial	5.000.000.000,00	7.800.784.000,00	5.000.000.000,00	15.045.922.163,0	10.100.000.000,00
2.2	Belanja Modal	1.306.656.265.903,00	1.411.306.657.578,00	1.168.438.057.824,00	1.300.255.956.255,19	447.981.463.338,08
2.2.1	Belanja Modal Tanah	127.753.253.750,00	123.861.070.001,00	83.540.345.416,00	154.731.492.200,00	99.913.037.609,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.462.784.815,00	202.867.433.668,00	248.265.156.814,00	281.401.693.765,00	164.181.345.778,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	165.980.705.070,00	147.054.051.225,00	257.627.189.304,00	288.235.969.283,19	78.349.252.882,08
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	725.993.893.093,00	925.144.505.938,00	565.547.093.298,00	543.314.136.365,00	104.006.730.400,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	51.465.629.175,00	12.379.596.746,00	13.458.272.992,00	32.572.664.642,00	1.531.096.669,00
2.3	Belanja Tak Terduga	16.173.404.750,00	16.126.903.180,00	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	510.000.000.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	16.173.404.750,00	16.126.903.180,00	7.000.000.000,00	10.000.000.000,00	510.000.000.000,00
2.4	Transfer	1.815.697.900,00	7.350.344.960,00	1.522.843.400,00	1.592.352.845,00	1.810.493.180,00
2.4.1	Transfer Bantuan Keuangan	1.815.697.900,00	7.350.344.960,00	1.522.843.400,00	1.592.352.845,00	1.810.493.180,00
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.815.697.900,00	7.350.344.960,00	1.522.843.400,00	1.592.352.845,00	1.810.493.180,00
3	Pembiayaan					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	252.575.606.530,03	35.461.191.559,59	43.701.504.535,76	67.316.909.942,05	506.814.625.533,37
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000	15.000.000,00,00	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00



Dari Tabel 3.1 di atas diperoleh gambaran pendapatan daerah selama tahun 2016-2020, secara umum kinerja Pendapatan Daerah, realisasinya mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 4.308.116.916.024,91 pada Tahun Anggaran 2016 menjadi sebesar Rp. 5.518.768.106.206,31 pada Tahun Anggaran 2019, dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 9,52 persen. Pada tahun 2020, Pendapatan menurun menjadi Rp. 3.988.761.485.152,01 dengan laju pertumbuhan minus 27,72 akibat pandemi Covid-19.

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2016-2020 masih didominasi oleh sumber pendapatan transfer dengan proporsi rata-rata sebesar 59,93 persen, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar 36,07 persen, kemudian penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 4,0 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah relatif mulai kokoh karena besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*) yang disajikan pada gambar 3.2 berikut ini.

Gambar 3.1
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2016-2020



Sumber : Diolah dari LHP Kota Medan

Dapat kita lihat pada Gambar 3.2 di atas bahwa Pendapatan Daerah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2016-2020, sebanyak 60 persen adalah Pendapatan Transfer, 36 persen adalah Pendapatan Asli dan 4 persen adalah Lain-Lain Pendapatan yang sah.

Secara terperinci, target dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2016-2020 tersebut diuraikan sebagai berikut:

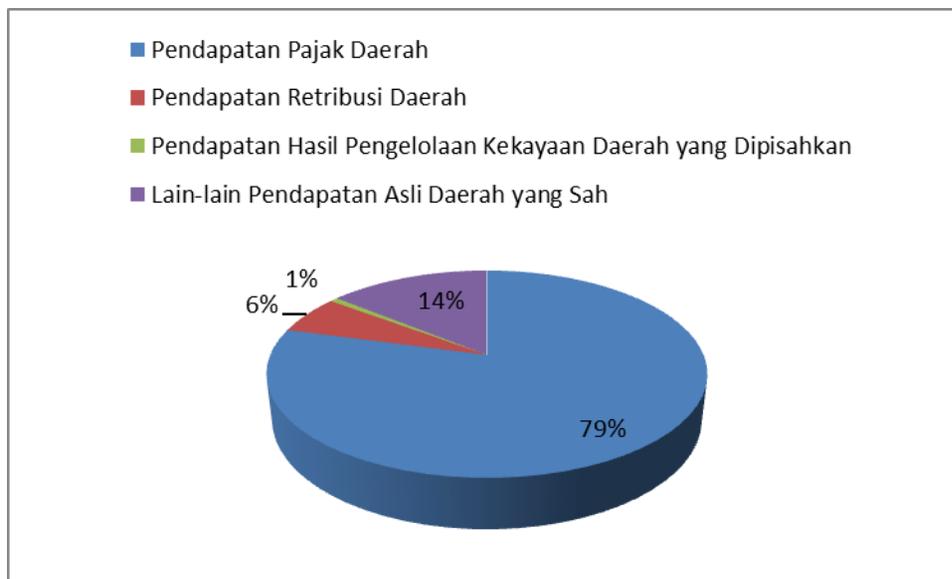


A. Pendapatan

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) pajak daerah, (b) retribusi daerah, (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sejak Tahun Anggaran 2016-2020 rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 79,2 persen. Sisanya terdiri dari pendapatan retribusi daerah sebesar 6,0 persen, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0.70 persen, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 14.10%. Rata-rata kontribusi realisasi pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020 disajikan pada grafik 3.3 berikut ini.

Gambar 3.2
Rata-rata Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2016-2020



Sumber : Diolah dari LHP Kota Medan

Dapat dilihat pada Gambar 3.3 , sebesar 79% adalah Pendapatan Pajak Daerah, Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 14 persen, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 6 persen, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan hanya 1 persen.

2) Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan

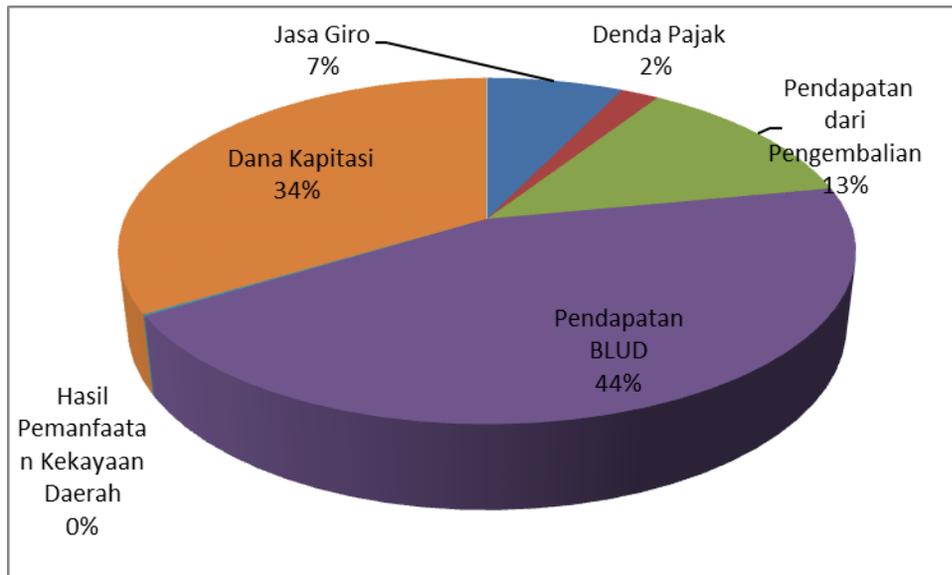
Pendapatan Transfer yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas : (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang mencakup: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum (DAU) dan (c) Dana Transfer Khusus, (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, (3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, (4) Bantuan Keuangan, dan (5)

Total Lain-Lain Pendapatan Yang sah. Selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 pendapatan transfer berfluktuasi yakni dari Rp. 2.772.807.342.010 pada Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp. 2.056.223.073.978 pada Tahun Anggaran 2020 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya minus 3,82 persen.

3) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Jasa Giro, Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah dan Dana Kapitasi. Selama periode Tahun Anggaran 2016-2020, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016, Dana Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 285.124.173.473,59 hingga pada tahun 2020 sebesar Rp. 206.480.661.049,59. Hanya pada tahun 2019, dana ini memiliki pertumbuhan positif yaitu sebesar Rp. 252.181.048.167,27, meskipun begitu masih dibawah besaran dana pada tahun 2016. Berikut adalah rata-rata kontribusi realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

Gambar 3.3
Rata-Rata Kontribusi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020



Sumber : Diolah dari LHP Kota Medan

B. Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara



pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disyahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi dan pengesahan.

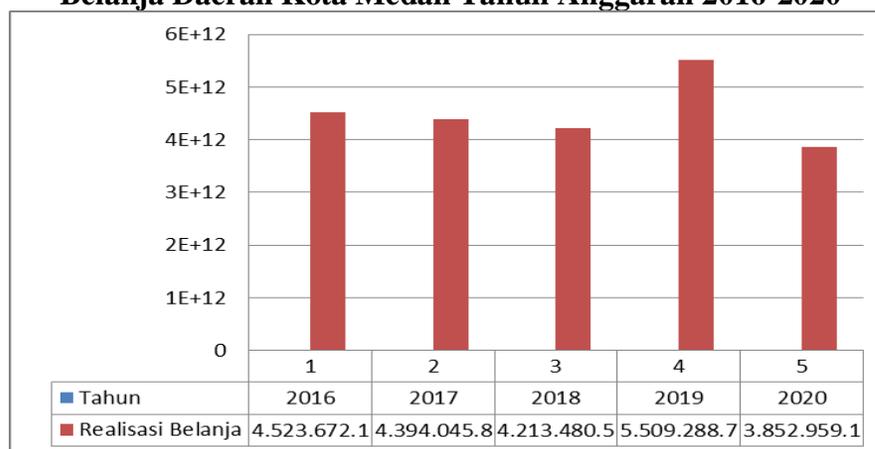
Konsekuensi pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran dititikberatkan pada fleksibilitas kebijakan pengeluaran daerah yang sesuai dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah sebagai wujud implementasi dari kebijakan operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran Belanja Daerah APBD. Melalui Belanja Daerah untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dalam peningkatan kualitas layanan publik diharapkan dapat menjadi komponen yang berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan gambaran umum upaya pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Pada komponen Belanja Daerah dapat diperlihatkan seberapa besar porsi belanja langsung yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan terkait langsung dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2020, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 secara keseluruhan, realisasi belanja daerah Kota Medan berfluktuasi dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yakni sebesar Rp. 3.852.959.101.693,55 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya minus 1,57 persen. Berikut ini diagram perkembangan realisasi Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020 dapat dilihat pada gambar 3.5 berikut ini:

Gambar 3.4
Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020



Sumber : Diolah dari LHP Kota Medan

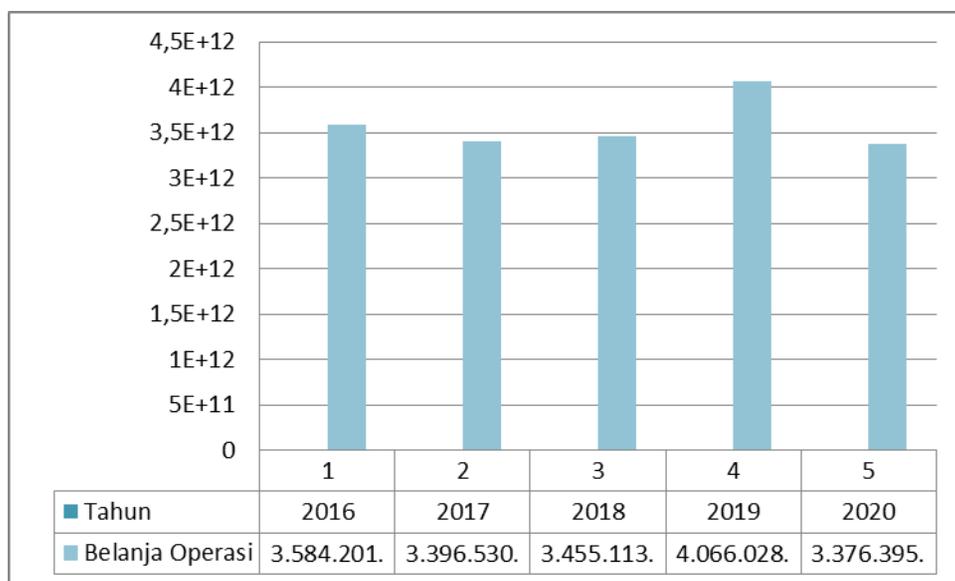


Belanja Daerah terbagi ke dalam empat kelompok belanja yaitu: (a) Belanja Operasi dan (b) Belanja Modal, (c) Belanja Tak Terduga, dan (d) Belanja Transfer.

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, (c) Belanja Bunga, (d) Belanja Hibah, dan (e) Belanja Bantuan Sosial. Selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 secara keseluruhan, realisasi belanja operasi Kota Medan berfluktuasi yakni Rp. 3.584.201.317.240,59 pada Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp. 3.376.395.195.795,27 pada Tahun Anggaran 2020 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya minus 0,7 persen. Berikut adalah Diagram perkembangan Belanja Operasi Tahun Anggaran 2016-2020,

Gambar 3.5
Belanja Operasi Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020



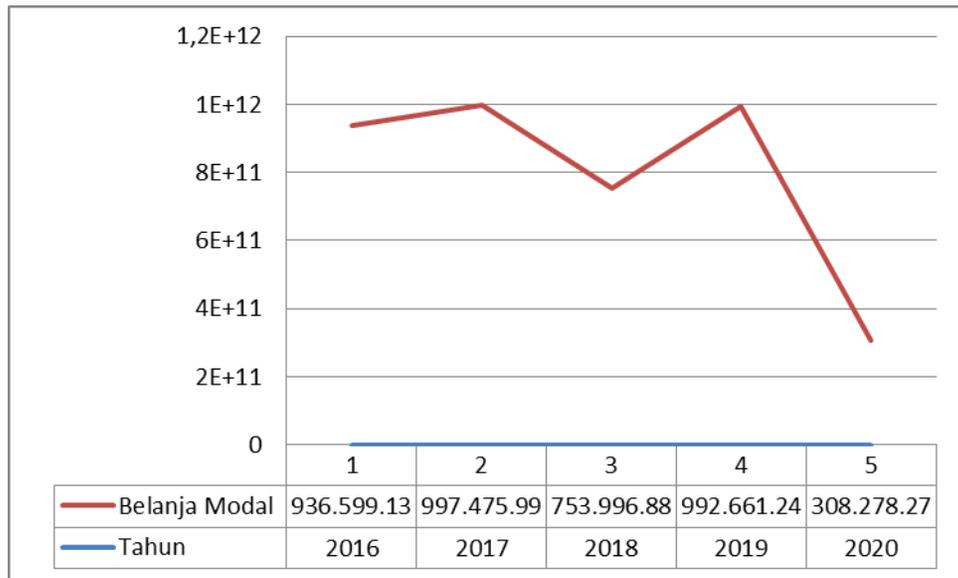
Sumber : Diolah dari LHP Kota Medan

2) Belanja Modal

Belanja modal terdiri atas: (a) Belanja Modal Tanah, (b) Belanja Peralatan dan Mesin, (c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jarring dan (e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 secara keseluruhan, belanja modal Kota Medan berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan yakni Rp. 936.599.131.961,06 pada Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp. 308.278.278.057,33 pada Tahun Anggaran 2020 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya minus 13,8 persen. Berikut adalah Diagram perkembangan Belanja Modal Tahun Anggaran 2016-2020.



Gambar 3.6
Belanja Modal Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020

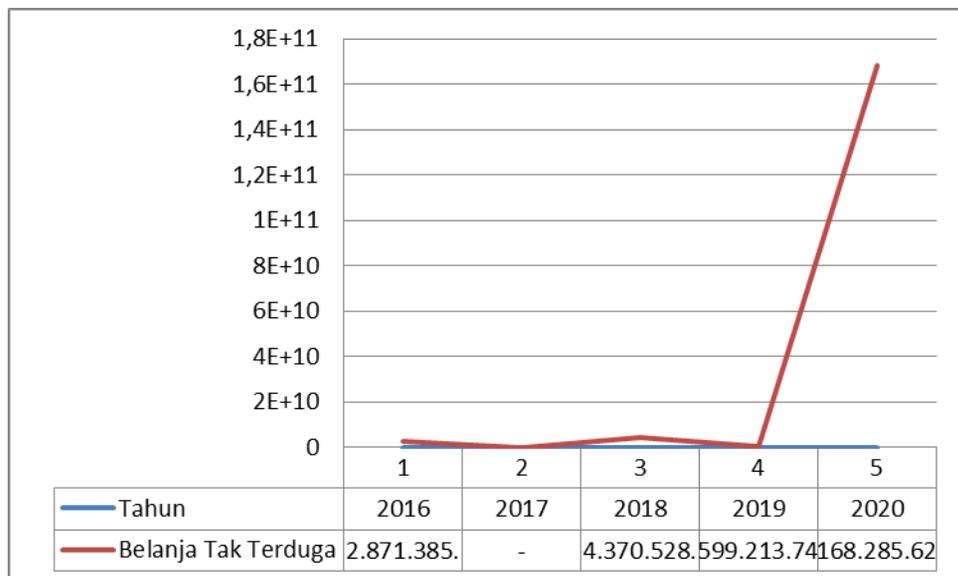


Sumber : Diolah dari LHP Kota Medan

3) Belanja Tak Terduga

Selama periode Tahun Anggaran 2016-2020 secara keseluruhan, rata-rata realisasi Belanja Tak Terduga Kota Medan berfluktuasi dan mengalami peningkatan yakni Rp. 2.871.385.453,5 pada Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp. 168.285.627.840,95 pada Tahun Anggaran 2019 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 9.316,78 persen. Berikut adalah Diagram perkembangan Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2016-2020.

Gambar 3.7
Belanja Tak Terduga Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020

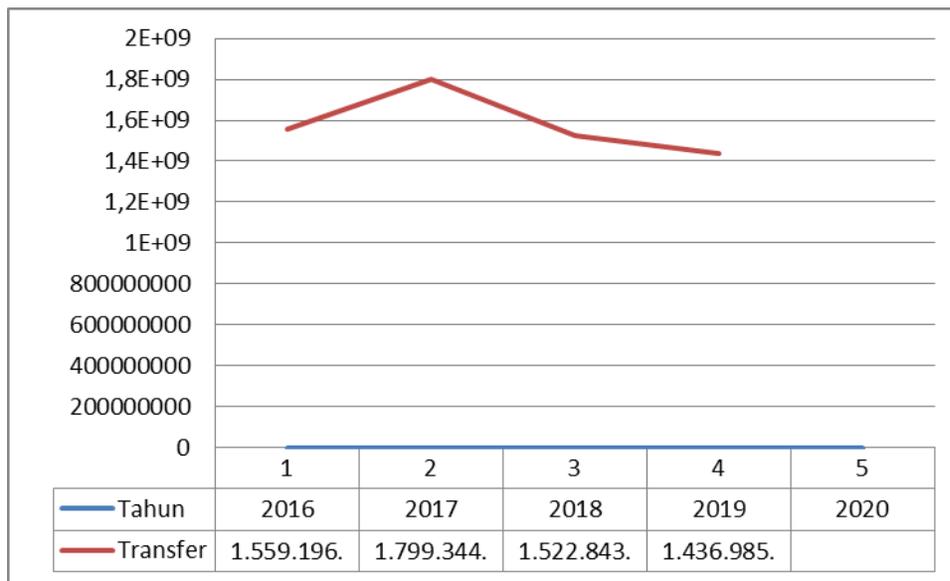


Sumber : Diolah dari LHP Kota Medan

4) Belanja Transfer

Selama periode Tahun Anggaran 2016-2020, belanja transfer Kota Medan berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan yakni Rp. 1.559.196.340,00 pada Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp. 1.436.985.100,00 pada Tahun Anggaran 2019 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya minus 1,87 persen. Berikut adalah Diagram perkembangan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2016-2020.

Gambar 3.8
Belanja Transfer Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2020



Sumber : Diolah dari LHP Kota Medan

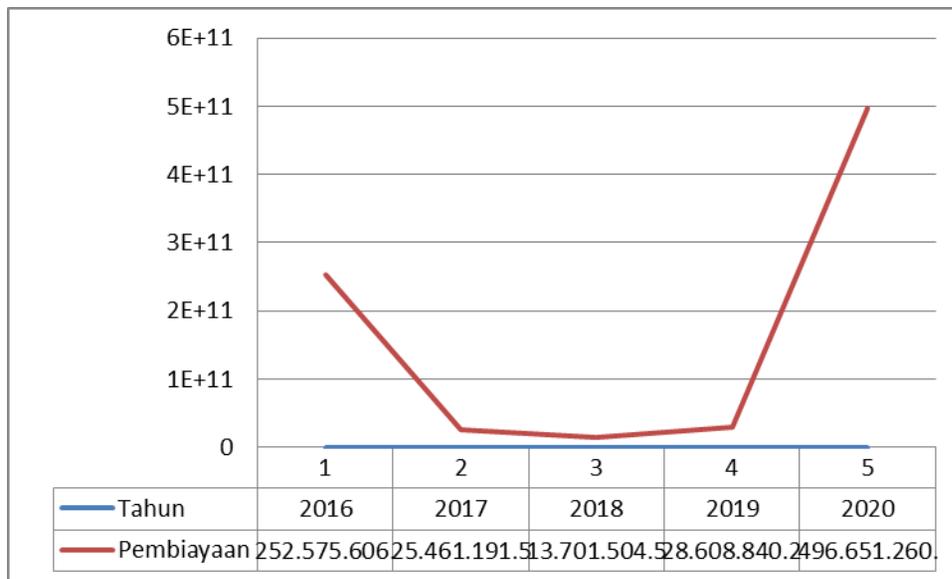
C. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan, realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya.

Periode Tahun Anggaran 2016-2020 realisasi pembiayaan berfluktuasi dan meningkat dari Rp. 252.575.606.530,03 pada Tahun Anggaran 2016 menjadi Rp 496.651.260.365,37 pada Tahun Anggaran 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar

402,18,83 persen. Berikut adalah Diagram perkembangan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016-2020.

Gambar 3.9
Pembiayaan Tahun Anggaran 2016-2020



Sumber : Diolah dari LHP Kota Medan

Berdasarkan gambar 3.10 diperoleh gambaran bahwa pembiayaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan. Dan kembali meningkat untuk tahun 2019 dan 2020.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca atau laporan posisi keuangan merupakan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset atau aktiva adalah harta atau sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset terdiri atas aset lancar dan aset tetap.

Sedangkan liabilitas merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh suatu organisasi baik dalam bentuk ekuitas dana lancar, ekuitas yang diinvestasikan pada aset tetap maupun ekuitas dana cadangan.

Melihat kepada perkembangan Neraca Pemerintah Kota Medan selama 5 tahun terakhir periode tahun 2015 sampai dengan 2019 kenaikan rata-rata neraca (Aset, kewajiban dan ekuitas dana) daerah pertumbuhannya sekitar 2.43 persen (dua koma empat tiga persen) per tahunnya. Aset tetap lainnya dengan rata-rata penurunan per tahun 87.77 persen (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen), Investasi jangka panjang dengan pertumbuhan 2.43 persen (dua koma empat puluh tiga persen) per tahun, dan aset



lancar mengalami pertumbuhan 18.47 persen (delapan belas koma empat puluh tujuh persen) per tahun. Untuk lebih lengkapnya perkembangan tersebut selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:



Tabel 3.3 Perkembangan Neraca Daerah Kota Medan Tahun 2016 s/d 2020

No	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (Persen)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas di Kas Daerah	35,400,941,789.60	43,535,931,704.86	67,030,194,067.23	499,727,369,204.78	620.252.762.130,80	186,65
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	20,473,500.00	79,986,000.00	48,138,000.00	135,718,500.00	54.539.000,00	93,25
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	78,557,211.00	1,254,440.00	259,707,299.73	124.355.335,98	5.113,13
1.1.4	Kas di BLUD	60,249,770.19	101,562,855.90	286,715,874.82	514,576,221.57	1.258.682.711,01	118,74
1.1.5	Kas Lainnya	367,309,065.00	31,531,000.00	0.00	0.00	0,00	(22,85)
1.1.6	Kas di BOS	2,447,409,738.00	364,203,356,.01	1,291,930,298.02	6,187,209,390.02	864.903.315,02	115,62
1.1.7	Piutang Pendapatan	815,930,904,134.26	756,306,431,257.51	1,811,018,724,417.47	1,393,778,338,669.58	1.982.626.322.399,07	37,84
1.1.8	Piutang Lainnya	5,516,628,592.36	9,275,160,840.11	9,313,568,734.72	6,363,555,451.49	6.496.452.175,43	9,74
1.1.9	Penyisihan Piutang	(147,961,416,548.11)	(208,764,488,668.27)	(463,353,571,433.08)	(777,392,944,529.41)	(1.036.403.552.819,93)	66,03
1.1.10	Beban Dibayar Dimuka	890,500,000.00	571,791,666.66	1,177,174,999.99	1,113,639,666.65	1.048.245.333,33	14,70
1.1.11	Persediaan	84,050,887,906.11	98,074,400,535.91	83,702,843,516.13	138,273,109,274.65	183.725.365.931,81	25,02
	JUMLAH ASET LANCAR	796,723,887,947.41	699,655,067,759.69	1,510,516,972,915.31	1,268,960,279,149.06	1.760.048.075.512,52	31,60
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Permanen						
1.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	324,308,344,048.53	331,600,938,315.53	348,389,095,998.53	364,779,713,931.53	367.667.767.142,53	3,20
1.2.3	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	324,308,344,048.53	331,600,938,315.53	348,389,095,998.53	364,779,713,931.53	367.667.767.142,53	3,20
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	324,308,344,048.53	331,600,938,315.53	348,389,095,998.53	364,779,713,931.53	367.667.767.142,53	3,20
1..3	ASET TETAP						
1.3.1	Tanah	23,414,110,751,880.50	23,225,350,253,680.50	27,019,586,805,071.50	27,122,939,869,271.50	27.139.943.961.877,50	3,99
1.3.2	Peralatan dan Mesin	1,258,951,595,156.57	1,326,107,112,169.01	1,439,760,705,509.87	1,622,381,932,471.17	1.699.723.742.417,82	7,84
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1,403,482,876,864.71	1,265,392,014,951.51	1,395,132,472,241.26	1,583,642,221,873.41	1.702.630.732.738,77	5,36
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4,236,645,318,379.69	5,008,132,867,480.50	5,263,371,320,142.92	5,668,140,168,968.62	5.799.952.310.418,21	8,33
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	94,040,358,192.90	80,457,690,070.67	51,598,534,390.64	54,836,729,355.68	58.400.330.494,31	(9,38)
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	91,835,101,867.67	23,618,681,018.67	38,776,922,136.67	114,166,275,036.67	115.815.882.625,67	46,44



No	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (Persen)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Akumulasi Penyusutan	(2,192,629,323,304.73)	(2,718,078,363,934.80)	(5,003,843,601,129.08)	(5,640,731,917,155.62)	(5.430.430.893.921,95)	29,26
	JUMLAH ASET TETAP	28,306,436,679,037.30	28,210,980,255,416.06	30,204,383,158,363.70	30,525,375,279,821.41	31.086.036.066.650,33	2,41
1.4	ASET LAINNYA						
1.4.1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	338,550,426,659.52	338,550,426,659.52	338,550,426,659.52	338,550,426,659.52	338.550.426.659,52	0
1.4.2	Aset Tidak Berwujud	11,949,040,807.47	12,405,862,746.34	9,555,582,369.63	8,733,685,600.34	7.890.673.581,71	(9,35)
1.4.3	Aset Lain- lain	162,370,349,797.27	917,464,630,591.72	407,704,685,385.28	380,420,367,295.74	317.216.217.633,23	96,54
1.4.4	Tagihan Jangka Panjang Angsuran BOT	18,344,944,713.60	17,115,954,539.40	16,817,588,995.50	14,726,086,209.45	13.503.469.707,00	(7,30)
	JUMLAH ASET LAINNYA	531,214,761,977.86	1,285,536,874,536.98	772,628,283,409.93	742,430,565,765.05	677.160.787.581,48	22,35
	JUMLAH ASET	29,958,683,673,011.10	30,527,773,136,028.26	32,835,917,510,687.50	32,901,545,838,667.05	33.890.902.696.886,84	3,17
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	14,547,236.00	1,254,440.00	37,601,750.73	124.355.377,98	759,21
2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	204,382,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(25,00)
2.1.3	Pendapatan Diterima di Muka	7,643,628,145.31	9,704,279,685.51	5,247,362,924.33	10,895,505,117.43	12.311.907.874,38	25,42
2.1.4	Hutang Beban	95,670,705,964.24	143,019,365,064.71	174,402,608,871.78	108,767,372,420.67	91.841.304.225,00	4,56
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	56,278,423,982.00	100,225,877,606.00	140,983,969,653.00	1,621,020,885.00	1.385.646.003,00	1,35
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	159,797,140,816.55	252,964,069,592.22	320,635,195,889.11	121,321,500,173.83	105.663.213.480,36	2,50
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
2.2.1	Utang Dalam Negeri	95,164,939,997.87	0.00	0.00	0.00	0.00	(25,00)
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	95,164,939,997.87	0.00	0.00	0.00	0.00	(25,00)
	JUMLAH KEWAJIBAN	254,962,080,814.42	252,964,069,592.22	320,635,195,889.11	121,321,500,173.83	105.663.213.480,36	(12,28)
2.3	EKUITAS						
2.3.1	Ekuitas	29,703,721,592,196.70	30,274,809,066,436.04	32,515,282,314,789.40	32,780,224,338,493.22	33.785.239.483.406,48	3,30
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	29,958,683,673,011.10	30,527,773,136,028.26	32,835,917,510,687.50	32,901,545,838,667.05	33.890.902.696.886,84	3,17

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan



Aset merupakan elemen neraca pemerintah daerah yang membentuk informasi berupa posisi keuangan Aset merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset terdiri atas: (1) Aset Lancar, (2) Investasi Jangka Panjang, (3) Aset Tetap, (4) Dana Cadangan, dan (5) Aset Lainnya. Kota Medan memiliki aset pada tahun 2016, sebesar Rp. 29,958,683,673,011.10 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 33.890.902.696.886,84 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,17 persen. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, dengan rata-rata tumbuh 2,41 persen per tahun. Aset tetap pada tahun 2016 sebesar dari Rp 28.306.436.679.037,30 menjadi Rp. 31.086.036.066.650,33 pada Tahun Anggaran 2020.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban muncul karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 254.962.080.814,42 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 105.663.213.480,36 dengan tingkat pertumbuhan sebesar minus 12,28 persen.

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Medan Tahun 2016 sebesar Rp. 29,704.721.592.196,70 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 33.785.239.483.406,48 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 3,3 persen per tahun.

Berdasarkan atas neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio diantaranya:

1. Rasio Likuiditas adalah rasio digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain: (a) Rasio lancar = aktiva lancar :



- kewajiban jangka pendek dan (b) Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek
2. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain: (a) Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset dan (b) Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas
 3. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain: (a) Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut. Rata-rata umur piutang = $365 : \text{perputaran piutang}$ Dimana : $\text{Perputaran piutang} = \frac{\text{pendapatan daerah/rata-rata piutang}}{\text{pendapatan daerah}}$. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = $(\text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang}) : 2$ dan (b) Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut. Rata-rata umur persediaan = $365 : \text{perputaran persediaan}$ Dimana : $\text{Perputaran persediaan} = \frac{\text{nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun}}{\text{rata-rata nilai persediaan}}$. Sedangkan, rata-rata nilai persediaan = $(\text{saldo awal persediaan} + \text{saldo akhir persediaan}) : 2$

Berdasarkan data Tabel 3.3, maka dapat digambarkan analisis rasio keuangan Kota Medan Tahun 2016-2020 dapat diuraikan pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Analisis Rasio Keuangan Tahun 2015-2019 Kota Medan

NO	URAIAN	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	Kali	4.99	2.77	4.71	10.46	16,66
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	Kali	4.46	2.38	4.45	9.32	14,92
3	Rasio total hutang terhadap total asset	Persen	0.85	0.83	0.98	0.37	0,311
4	Rasio hutang terhadap Modal	Persen	0.86	0.84	0.99	0.37	0,313
5	Rata-rata umur piutang	Hari	57	46	116	41	87
6	Rata-rata umur persediaan	hari	7	8	7	9	17

Sumber : data diolah



Berdasarkan tabel analisis rasio keuangan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rasio lancar (*current ratio*), rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2016 adalah sebesar 4,99 dan kemudian tahun 2020 sebesar 16,66 hal ini berarti kemampuan menutupi kewajiban jangka pendek semakin tinggi atau semakin baik.
- b. Rasio cepat (*quick ratio*), rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel di atas, quick rasio pada tahun 2016 sebesar 4,46 serta periode tahun 2020 quick rasio sebesar 14,92. Hal ini berarti kemampuan pemerintah Kota Medan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.
- c. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Medan. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2016 sebesar 0,85 persen dan pada tahun 2020 sebesar 0,311. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva kecil.
- d. Rasio Hutang Terhadap Modal. Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2016 rasio hutang terhadap modal pemerintah Kota Medan sebesar 0,86 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,313. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kota Medan, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.
- e. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Terjadi fluktuasi dimana pada tiap 5 tahun, rata-rata umur piutang Kota Medan sangat beragam. Pada tahun 2016 lamanya umur piutang 57 hari kemudian pada tahun 2020 menjadi 87 hari. Hal ini berarti bahwa rata-rata umur piutang terjadi fluktuasi dan tidak selalu cepat berubah menjadi kas.
- f. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), Pada tahun 2016 lamanya umur persediaan Pemerintah Kota Medan yakni 7 hari kemudian



pada tahun 2020 menjadi 17 hari. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata umur persediaan relatif cepat.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa *Current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Medan adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada table di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Medan relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik. Di antara penyebab dari kapabilitas keuangan tersebut adalah karena Kota Medan termasuk Pemerintah Daerah yang mampu mengumpulkan PAD dalam jumlah yang relatif cukup besar di Indonesia

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya yang diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggung jawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK).

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2016-2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

Selama Periode Tahun Anggaran 2016-2020, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; dan (3) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

- a. meningkatkan pendapatan daerah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak secara *on-line* dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan;
- b. meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- c. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);



- d. meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- e. meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Teknis dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan; dan
- f. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan kota serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Ada pun Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2016-2020 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- b. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan;
- c. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan KUKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
- d. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan - kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
- e. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost) dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
- f. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Medan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD;
- g. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi dan



- jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- 3) mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; dan
 - 5) mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Perkembangan perbandingan realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah secara rata-rata belanja operasi sebesar 78.27 persen, belanja modal sebesar 20.06 persen, belanja tak terduga sebesar 0.04 persen dan belanja transfer sebesar 0.03 persen. Rincian rata-rata proposi belanja dalam Struktur APBD Kota Medan tahun 2016-2019 berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan pada Tabel 3.4 berikut: Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, baik Belanja Operasi maupun Belanja Modal. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Medan Tahun 2016-2019

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	2016	2,441,393,474,914.00	4,523,672,134,655.15	53.97
2	2017	2,207,347,032,699.00	4,399,045,824,264.53	32.53
3	2018	1,694,592,398,172.00	4,228,480,509,726.24	40.08
4	2019	1,798,919,361,881.00	5,529,288,700,981.01	32.53

Sumber : Diolah dari LHP Kota Medan



3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2016 sampai 2020.



Tabel 3.6
Defisit Riil Anggaran Kota Medan Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
PENDAPATAN DAERAH	4,308,116,916,024.91	4,409,065,482,200.50	4,253,618,758,532.53	5,518,768,106,206.31	3,988.761.485.152,01
BELANJA DAERAH	4,523,672,134,655.15	4,394,045,824,264.53	4,213,480,509,726.24	5,509,288,700,981.01	3.852.959.101.693,55
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	5,000,000,000.00	15,000,000,000.00	20,000,000,000.00	10.000.000.000,00
Defisit Riil	-215,555,218,630.24	10,019,657,935.97	25,138,248,806.29	-10,520,594,774.70	135.802.383.458,46
Total Realisasi Penerimaan	252,575,606,530.03	35,461,191,559.79	43,701,504,535.76	68,608,840,240.07	504.099.366.078,37
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	37,020,387,899.79	45,480,849,495.76	68,839,753,342.05	506.651.260.365,37	622.430.887.156,83



Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Data SiLPA lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2016 sampai 2020, nilai SiLPA tertinggi pada tahun 2020 yaitu Rp. 622.430.887.156,83 dan tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 506.651.260.365,37,- jika dibandingkan dengan posisi SiLPA pada Tahun 2016 sebesar Rp 37,020,387,899.79,-. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini:



Tabel 3.7
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Kota Medan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	67,316,909,942.05		43,701,504,535.76		67,316,909,942.05		506,651,260,365.37		622.430.887.156,83	
2	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	67,316,909,942.05		43,701,504,535.76		67,316,909,942.05		506,651,260,365.37		622.430.887.156,83	



3.3. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan atas data 5 (lima) tahun sebelumnya terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Medan terhadap pendapatan transfer ke depan masih cukup tinggi rata-rata sekitar 40.09% (empat puluh koma nol sembilan persen). Tingginya ketergantungan ini disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan gaji Pegawai Negeri Sipil dan kebijakan pembangunan di Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah sumber utama penerimaannya berasal dari bagi hasil pajak provinsi dan penerimaan lainnya berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan meningkatnya fungsi Kota Medan akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja, baik belanja operasi maupun belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Jumlah belanja daerah ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri.

Penggunaan belanja operasi tersebut tercermin dalam RAPBD Pemerintah Kota Medan tahun bersangkutan yang penggunaannya diarahkan kepada lebih prioritas untuk membiayai berbagai urusan Pemerintah Daerah baik urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang untuk menstimulus kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Fokus belanja daerah 2021-2026 diarahkan kepada program kebutuhan infrastruktur dasar, sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu anggaran belanja juga diarahkan penggunaannya untuk mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan di wilayah pusat pertumbuhan yang baru, sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang Dan Karo, bahwa Kota Medan diperuntukkan sebagai Kawasan Perkotaan inti yang terdiri dari pusat-pusat kegiatan utama dan sebagai pendorong pengembangan kawasan perkotaan sekitar. Sedangkan belanja operasi penggunaannya lebih diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan social, sedangkan belanja modal diarahkan untuk belanja tanah, belanja perlatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan dan belanja asset tetap lainnya, belanja tak terduga dan belanja transfer.

Mengikuti perubahan klasifikasi belanja sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah Kota Medan Tahun 2016-2021 akan selalu melakukan penyesuaian dan mengacu kepada ketentuan tersebut, dimana belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja barang jasa, belanja transfer dan belanja



hibah.

Adapun arah pengelolaan belanja Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2021-2026 adalah: Belanja operasi mengalami peningkatan, disebabkan peningkatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial untuk beberapa tahun ke depan. Untuk menekan pertumbuhan belanja pegawai tersebut perlu dilakukan melalui rasionalisasi jumlah pegawai dan efisiensi organisasi yang disesuaikan dengan kebijakan formasi dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Diharapkan jumlah pegawai yang diterima tiap tahunnya akan lebih kecil dari jumlah pegawai yang pensiun. Sedangkan operasi lainnya akan diupayakan pemanfaatannya dalam menstimulus aktivitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya dan dalam pengalokasiannya disesuaikan dengan kondisi yang ada dan diupayakan seefisien mungkin disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja modal mulai tahun anggaran 2021 diarahkan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih serta berbagai urusan Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya akan selalu diupayakan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam kerangka melaksanakan pemerintahan yang baik dan amanah. Untuk itu belanja barang dan jasa mulai tahun anggaran 2021 diperkirakan akan semakin meningkat.

Peningkatan pendapatan daerah tahun 2021-2026 diarahkan untuk dapat meningkatkan belanja operasi dan belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer untuk mendukung pembangunan perkotaan serta target pertumbuhan ekonomi kota. Dengan menekan peningkatan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, belanja modal diperkirakan dapat meningkat sejak tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan adanya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang perlu disediakan bagi masyarakat.

Selanjutnya sejak awal tahun 2020 penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Medan dalam memproyeksi penerimaan tahun 2021-2026 juga harus melakukan penyesuaian akibat dampak pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini.

Berdasarkan atas data pendapatan Daerah tahun 2016-2020 serta dampak pandemic Covid 19 maka rencana Pendapatan Daerah periode 2021-2026 dapat diperkirakan sebagaimana tabel 3.8 berikut:



Tabel 3.8
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Medan 2021-2026

No	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-Rata LP (%)
[1]	(2)	[3]	[4]	[5]	[6]	(7)	(8)	(9)
1	PENDAPATAN	5.590.441.985.742	6.811.602.671.723,12	6.940.332.868.833,04	6.973.538.252.933,35	7.169.036.551.245,25	7.543.857.247.117,89	6,4
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.303.884.831.820	2.725.627.014.521,51	2.777.299.699.494,87	2.790.587.434.395,53	2.868.819.613.660,54	3.018.810.892.996,19	6,4
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.839.208.839.926	2.179.917.459.685,85	2.221.244.533.259,06	2.231.871.873.373,94	2.294.440.850.193,03	2.414.401.727.775,47	6,4
1.1.1.1	Pajak Hotel	106.667.963.496	147.855.119.423,63	150.253.384.036,04	150.972.257.528,65	155.204.659.842,74	163.319.267.459,70	
1.1.1.2	Pajak Restoran	264.563.978.490	315.886.525.147,91	321.875.130.637,34	323.415.112.587,36	332.481.830.495,24	349.865.068.839,81	
1.1.1.3	Pajak Hiburan	28.894.640.327	54.597.358.827,91	55.632.420.524,93	55.898.588.722,75	57.465.666.808,07	60.470.159.959,67	
1.1.1.4	Pajak Reklame	42.353.448.958	44.540.318.017,80	45.384.717.419,95	45.601.856.425,05	46.880.272.776,64	49.331.326.881,22	
1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	340.926.056.751	407.062.019.606,28	414.779.138.416,62	416.763.611.044,69	428.447.289.229,62	450.847.915.861,37	
1.1.1.6	Pajak Parkir	32.034.633.163	38.249.005.068,75	38.974.133.187,50	39.160.601.342,12	40.258.441.584,13	42.363.284.680,05	
1.1.1.7	BPHTB	379.808.249.409	453.486.936.554,95	462.084.183.165,47	464.294.982.428,08	477.311.169.575,44	502.266.559.808,03	
1.1.1.8	PBB	633.049.605.957	705.610.695.724,67	718.987.727.504,79	722.427.658.140,17	742.680.415.448,90	781.510.178.435,84	
1.1.1.9	Pajak Air Tanah	10.910.263.375	13.026.736.313,95	13.273.698.366,42	13.337.205.155,08	13.711.104.432,24	14.427.965.849,78	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	124.689.699.185	141.056.813.883,85	143.730.981.797,63	144.418.649.456,79	148.467.325.923,35	156.229.683.671,03	6,4
1.1.2.1	Jasa Retribusi Umum	73.392.111.259	87.633.405.517,32	89.294.767.593,76	89.721.990.194,19	92.237.283.832,51	97.059.750.933,12	
1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	11.437.067.979	10.300.207.593,91	10.495.479.866,80	10.545.694.524,64	10.841.335.741,38	11.408.156.258,71	
1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	39.860.519.947	43.121.191.025,49	43.938.686.488,98	44.148.907.092,13	45.386.591.018,97	47.759.550.552,29	
			-					
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang dipisahkan	15.839.423.877	24.593.836.990,02	25.060.089.189,72	25.179.986.880,92	25.885.890.313,03	27.239.289.385,71	6,4



No	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-Rata LP (%)
[1]	(2)	[3]	[4]	[5]	[6]	(7)	(8)	(9)
1.1.3.1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.640.378.992	5.540.562.261,69	5.645.600.745,24	5.672.611.602,61	5.831.639.326,42	6.136.536.517,95	
1.1.3.2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	11.199.044.885	21.063.021.848,33	21.462.336.533,27	21.565.021.107,88	22.169.581.486,95	23.328.679.770,34	
1.1.3.3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Swasta	-	-	-	-	-	-	
			-					
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	324.146.868.832	380.058.903.961,79	387.264.095.248,46	389.116.924.683,88	400.025.547.231,13	420.940.192.163,99	6,4
1.1.4.1	Jasa Giro	17.928.737.013	21.406.717.829,25	21.812.548.333,87	21.916.908.464,62	22.531.333.761,18	23.709.345.637,52	
1.1.4.2	Denda Pajak	21.092.631.780	10.111.270.516,77	10.302.960.903,35	10.352.254.471,92	10.642.472.731,22	11.198.896.039,49	
1.1.4.3	Pendapatan dari Pengembalian	31.511.472.558	11.619.105.186,45	11.839.381.239,92	11.896.025.670,24	12.229.522.482,16	12.868.921.945,98	
1.1.4.4	Pendapatan BLUD	168.715.518.445	201.444.501.871,87	205.263.505.069,81	206.245.569.425,57	212.027.520.623,75	223.113.013.389,23	
1.1.4.5	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.6	Dana Kapitasi	84.898.509.036	135.477.308.557,44	138.045.699.701,51	138.706.166.651,53	142.594.697.632,82	150.050.015.151,77	
			-	-	-	-	-	
1.2	DANATRANSFER	3.286.557.153.922	3.844.408.747.801,60	3.917.291.398.683,62	3.936.033.318.989,82	4.046.377.277.544,54	4.257.935.125.812,03	6,4
1.2.1	DANA PERIMBANGAN (Dana Transfer Pusat)	2.290.683.590.086	2.846.502.156.625,57	2.900.466.403.542,58	2.914.343.418.207,42	2.996.045.010.468,19	3.152.688.049.970,39	
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	195.275.311.870	255.917.642.866,13	260.769.352.828,09	262.016.979.805,91	269.362.443.732,97	283.445.593.941,55	
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.609.444.973.262	1.956.713.555.848,17	1.993.809.109.500,88	2.003.348.305.754,85	2.059.510.783.179,61	2.167.188.747.908,98	



No	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-Rata LP (%)
[1]	(2)	[3]	[4]	[5]	[6]	(7)	(8)	(9)
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	351.329.880.008	601.401.461.346,25	612.802.884.977,98	615.734.784.003,29	632.996.480.737,15	666.091.608.610,87	
1.2.1.4	Dana Bantuan Operasional Sekolah	134.633.424.946	32.469.496.565,03	33.085.056.235,63	33.243.348.643,37	34.175.302.818,46	35.962.099.508,99	
1.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	-	-	-	
1.2.2.1	Dana Penyesuaian & Otonomi		-	-	-	-	-	
1.2.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	995.873.563.836	997.906.591.176,03	1.016.824.995.141,05	1.021.689.900.782,40	1.050.332.267.076,35	1.105.247.075.841,65	
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	995.873.563.836	997.906.591.176,03	1.016.824.995.141,05	1.021.689.900.782,40	1.050.332.267.076,35	1.105.247.075.841,65	6,4
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi		-	-	-	-	-	
1.2.4	Bantuan Keuangan		-	-	-	-	-	
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari provinsi dan Pemerintah lainnya		-	-	-	-	-	
1.3	Total Lain-Lain Pendapatan Yang sah		-	-	-	-	-	
1.3.1	Hibah		-	-	-	-	-	
2	BELANJA	6.044.510.281.714	5.523.076.021.164,03	5.627.782.998.973,18	5.654.708.608.975,73	5.813.234.434.805,88	6.117.169.358.355,16	6,4
2.1	Belanja Operasi	4.975.060.567.624	4.762.326.411.096,93	4.852.611.028.570,21	4.875.827.899.596,19	5.012.518.346.060,97	5.274.589.211.666,84	
2.1.1	Belanja Pegawai	2.160.726.989.881	2.251.727.096.711,70	2.294.415.543.918,33	2.305.392.964.001,98	2.370.023.053.499,66	2.493.935.616.059,08	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.444.283.317.619	2.130.915.453.319,04	2.171.313.542.396,37	2.181.701.992.279,12	2.242.864.491.349,78	2.360.128.788.077,32	



No	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rata-Rata LP (%)
[1]	(2)	[3]	[4]	[5]	[6]	(7)	(8)	(9)
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja Hibah	294.353.972.360	359.622.644.133,34	366.440.402.946,48	368.193.603.341,86	378.515.655.116,99	398.305.692.486,10	
2.1.5	Bantuan Bantuan Sosial	75.696.287.764	20.061.216.932,85	20.441.539.309,03	20.539.339.973,23	21.115.146.094,54	22.219.115.044,35	
2.2	Belanja Modal	915.222.629.304	545.993.650.487,63	556.344.647.799,00	559.006.427.582,68	574.677.784.270,50	604.723.819.810,01	6,4
2.2.1	Belanja Modal Tanah	104.021.215.119	46.913.985.965,10	47.803.385.580,20	48.032.096.480,60	49.378.642.923,12	51.960.319.996,38	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292.387.128.132	207.522.578.818,00	211.456.810.751,78	212.468.506.408,80	218.424.913.320,36	229.844.882.715,33	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	171.270.266.965	120.123.722.077,43	122.401.038.531,83	122.986.655.039,79	126.434.500.438,11	133.044.909.953,77	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	343.430.337.877	169.164.771.573,26	172.371.812.706,74	173.196.509.786,43	178.051.953.566,72	187.361.092.481,04	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.113.681.211	2.268.592.053,85	2.311.600.228,44	2.322.659.867,07	2.387.774.022,19	2.512.614.663,50	
2.3	Belanja Tak Terduga	154.227.084.785	214.755.959.579,48	218.827.322.603,98	219.874.281.796,86	226.038.304.474,41	237.856.326.878,31	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	154.227.084.785	214.755.959.579,48	218.827.322.603,98	219.874.281.796,86	226.038.304.474,41	237.856.326.878,31	
2.4	Transfer	-	-	-	-	-	-	
2.4.1	Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
3	Pembiayaan	454.068.295.972	633.532.800.099,40	645.543.372.575,17	648.631.915.451,27	666.815.860.401,76	701.679.176.138,56	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	454.068.295.972	633.532.800.099,40	645.543.372.575,17	648.631.915.451,27	666.815.860.401,76	701.679.176.138,56	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	105.463.158.900	131.411.653.516,53	133.902.967.602,36	134.543.614.031,78	138.315.450.743,35	145.547.035.228,52	



Tabel 3.9
Proyeksi Kapasitas Riil Kota Medan tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan	5.590.441.985.742	6.811.602.673.723,12	6.940.332.868.833,04	6.973.538.252.933,35	7.169.036.551.245,25	7.543.857.247.117,89
2	Belanja Wajib dan Mengikat	2.726.677.854.311	2.782.044.827.610	3.013.197.697.465	3.088.798.746.560	3.222.092.081.936	3..355.465.024.536
3	Kapasitas Riil	2.863.764.131.431	4.029.557.846.113	3.927.135.171.368	3.884.739.506.373	3.946.944.469.309	4.188.392.222.582



Sejalan dengan perkembangan kota ke depan diharapkan akan memberikan dampak kepada peningkatan Pendapatan Daerah khususnya PAD. Diperkirakan selama periode 2021-2026 pendapatan daerah ditargetkan akan mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk Pendapatan transfer diharapkan juga mengalami peningkatan hal ini didasarkan kepada adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan dana bantuan dan lain sebagainya. Sumber pendapatan ini selama periode 2021-2026 masih optimis akan diterima khususnya dalam pembayaran tunjangan dan sertifikasi guru.

Khusus mengenai Pendapatan Asli Daerah, peranan Pajak dan Retribusi akan terus diupayakan terjadi peningkatan. Rasa optimis peningkatan PAD didasarkan kepada kerja keras aparaturnya dan kondisi ekonomi yang semakin stabil, keyakinan tersebut didasari oleh penetapan kota Medan masuk ke dalam kawasan Metropolitan Mebidangro yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Kawasan Mebidangro.

Peningkatan Pajak Daerah akan sejalan dengan perkembangan fungsi kota ke depan khususnya perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Aktivitas jasa perkotaan akan semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya dinamika usaha dan urbanisasi. Kondisi tersebut akan mendorong meningkatnya penerimaan Pemerintah Daerah dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan jenis pajak lainnya. Selanjutnya Retribusi Daerah juga mengalami peningkatan, baik melalui pelayanan jasa umum, jasa usaha maupun pelayanan perizinan. Retribusi pelayanan perizinan akan meningkat melalui penerimaan. Sedangkan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah bersumber dari, penjualan, aset daerah dan penerimaan jasa giro.

Tabel 3.10
Proyeksi Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak

Jenis Pajak	Tahun						Asumsi Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Pajak Hotel	257	280	305	333	363	395	9%
Pajak Restoran	2409	2674	2968	3295	3657	4059	11%
Pajak Hiburan	328	338	348	358	369	380	3%
Pajak Air Tanah	434	469	506	547	590	638	8%
Pajak Reklame	8000	9200	10580	12167	13992	16091	15%
Pajak Parkir	208	239	275	316	364	418	8%
Pajak PPJ	4	4	4	4	4	4	-
PBB	515824	526140	536663	547397	558344	569511	2%
BPHTB	13098	13360	13627	13900	14178	14461	2%

Sumber : Bappeda Kota Medan



3.4 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Pendapatan Transfer), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer. Arah kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Adapun kebijakan untuk pengelolaan dan peningkatan PAD diarahkan melalui :

- a) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- b) Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat.
- c) Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- d) Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak dengan meninjau ulang beberapa ketentuan perda tentang pajak dan retribusi daerah.
- e) Peningkatan pendapatan daerah dari komponen PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, terutama pajak restoran, pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- f) Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
- g) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- h) Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.



- i) Penerapan dan penegakkan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak/retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.
- j) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta SKPD penghasil.
- k) Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
- l) Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD yang sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

- a) Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak.
- b) Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.
- c) Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi.
- d) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan pendapatan transfer.

Besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di Kota Medan dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Kota Medan untuk mencari alternative pembiayaan. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternative pembiayaan pembangunan diantaranya adalah :

1. Peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (TJSL) dalam Penganggaran Pembangunan Daerah

Sumber pendapatan daerah Tahun 2021-2026 selain berasal dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud diatas, potensi pendapatan daerah juga berasal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau biasa disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam



usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang.

Kegiatan program CSR/TJSPL pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun ekonomi, ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendidikan dan lingkungan. Implementasi CSR/TJSPL di Kota Medan harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dan dengan koridor tetap skala prioritas Kota Medan.

Dalam rangka mendorong minat perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan di Kota Medan melalui Program CSR/TJSPL, Pemerintah Kota Medan akan melakukan upaya-upaya melalui :

- a. Diseminasi/Sosialisasi program CSR/TJSPL Kota Medan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinergi program pembangunan dengan perusahaan-perusahaan yang telah bermitra di Kota Medan.
- c. Membentuk dan mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi CSR/TJSPL.
- d. Peningkatan kerjasama melalui updating data penawaran program prioritas pembangunan melalui CSR/TJSPL.
- e. Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong peningkatan peran perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam program CSR/TJSPL.

2. Obligasi Daerah

Selama ini Pemerintah Daerah mengandalkan dana pemerintah berupa APBN dan APBD untuk membiayai pembangunan daerah. Perolehan sumber pembiayaan yang bersifat konvensional tersebut menyebabkan daerah memiliki kapasitas fiskal yang terbatas dalam penyediaan infrastruktur. Oleh karenanya, untuk percepatan pembangunan daerah diperlukan terobosan-terobosan untuk mencari alternative sumber-sumber pembiayaan lainnya. Penerbitan obligasi daerah dapat menjadi salah satu alternative instrument pembiayaan pembangunan daerah yang menjadi inovasi Kepala Daerah dalam menyediakan sumber pembiayaan yang akan berdampak pada peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Obligasi Daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (*Revenue Bond*); Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai Obligasi Daerah pada saat



diterbitkan. Dengan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah dengan jenis *index bond*, yaitu Obligasi Daerah yang nilai jatuh temponya dinilai dengan *index* tertentu dari nilai nominal.

3.5 Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021-2026

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah kedepan diarahkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target indikator kinerja utama (IKU) dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Medan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.
4. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2026

Adapun kebijakan pembiayaan daerah kedepan sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada :

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.



3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan kedepan diarahkan pada :
 - 1) Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
 - 2) Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Adapun hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD adalah :

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan bagian dari investasi langsung. Untuk itu perlu dilakukan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko atas penyertaan modal tersebut.
- b. Dana untuk penyertaan modal harus berasal dari surplus APBD.
- c. Penyertaan modal harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- d. Penyertaan modal dapat berupa uang atau barang milik daerah.
- e. Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.



- f. Penyertaan modal pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan sehingga keputusan penyertaan modal harus didasarkan pada analisis investasi agar dana publik terbebas dari risiko kerugian



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Kajian isu strategis dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan kota. Permasalahan pembangunan kota menggambarkan kinerja pemerintah kota atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan yang ditemukan, dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan dimasa mendatang. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal dimasa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Medan pada masa lima tahun mendatang.

4.1. Permasalahan Pembangunan Kota

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pembangunan Kota Medan selama beberapa tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok pembangunan Kota Medan adalah; (1) Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami perlambatan (2) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta masalah sosial (3) Pelayanan dasar yang masih belum optimal; (4) Kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah belum optimal dan pelayanan publik yang belum memuaskan. Masalah utama pembangunan tersebut dipicu oleh berbagai permasalahan yang dikelompokkan berdasarkan pendekatan 3 (aspek), sebagai berikut :

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Medan berfluktuasi pada periode 2016 sampai 2020. Jika dibandingkan dengan capaian Pertumbuhan Ekonomi Propinsi dan rata rata nasional, pertumbuhan Ekonomi Kota Medan masih menunjukkan trend yang positif, akan tetapi pada capaian tahun 2020 terkontraksi sangat dalam disebabkan pandemi Covid-19. Perlambatan perekonomian Kota Medan lebih tinggi dari kontrakasi perekonomian yang dialami oleh Propinsi Sumatera Utara dan hal ini harus dicermati khususnya sektor sektor yang mengalami penurunan yang signifikan.



2. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kota Medan mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 2,73 % menjadi 10,74 % dan ini menjadi yang tertinggi di Sumatera Utara. Sementara capaian tingkat propinsi Sumatera Utara hanya sebesar 6,91 %. Apalagi melihat kondisi saat ini dimana pandemi covid belum bisa dikendalikan, tentu hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan karena dengan tingginya angka pengangguran terbuka dikhawatirkan memberi dampak pada aspek sosial, gangguan kamtibmas, meningkatnya angka kemiskinan, dan penyakit sosial lainnya.

3. Distribusi Pendapatan Penduduk Belum Merata

Indeks pemerataan pendapatan Kota Medan berfluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan 2020, di kisaran angka 0,3 dan termasuk kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan penduduk di Kota Medan masih harus menjadi prioritas Pemerintah Kota Medan dengan upaya peningkatan pemerataan pendapatan.

4. Penanggulangan Kemiskinan Belum Optimal

Pada periode Tahun 2016 sampai 2018 Pemerintah Kota Medan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 206.807 jiwa menjadi 186.450 jiwa dan berhasil menurunkannya ke angka 183.540 jiwa pada tahun 2020, dengan catatan angka tersebut disampaikan BPS pada awal bulan Maret 2020 di awal terjadinya pandemi. Secara persentase angka kemiskinan di Kota Medan masih dikategorikan rendah tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara maka jumlah penduduk miskin Kota Medan sangat besar sekitar 14,5 %. Untuk itu perlu upaya dari Pemerintah Kota untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin Kota Medan.

4.1.2 Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

1. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal dan memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma II. Sementara untuk Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Medan mencapai 11,37 tahun. Kondisi ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Medan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMA atau putus sekolah dikelas 2 SMA.



Kondisi inimayoritas disebabkan karena faktor kemiskinan sehingga prioritas orang tua adalah untuk segera memperkerjakan anak nya yang sudah memasuki usia 15 tahun keatas agar dapat membantu ekonomi keluarga. Hal ini dimungkinkan karena adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:PER.24/MEN/XII/2008 tentang Metode Penghitungan Persediaan dan kebutuhan tenaga kerja, Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi "*Penduduk Usia Kerja, yang selanjutnya disingkat PUK, adalah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun dan lebih atau disebut tenaga kerja*".

Hal – hal tersebut tentu akan menjadi tantangan bagi Kota Medan untuk meningkatkan kinerja khususnya angka harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah

2. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM Kota Medan setiap tahunnya mengalami fluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. APM SD/MI terendah sebesar 78.01 dan APM SMP/MTs 74.00 ditahun 2019. Data ini memberi makna bahwa pada tahun 2020 hanya 78,01% penduduk pada kelompok umur SD/MI yang masih sekolah, dan 74,00 % penduduk kelompok umur SLTP/MTs yang masih sekolah. Dengan kata lain masih terdapat penduduk pada kelompok umur SD/MI dan SLTP/MTs yang seharusnya sekolah tetapi tidak bersekolah. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dengan melakukan kajian mendalam penyebab banyaknya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.

3. Peningkatan Mutu Pendidik

Mutu guru, baik yang telah tersertifikasi dan telah memperoleh renumerasi maupun belum adalah sangat strategis dalam peningkatan kualitas hasil pembelajaran. Salah satu cara untuk melihat standar mutu guru adalah melalui UKG (Uji Kopetensi Guru). Uji Kompetensi Guru meliputi pengujian pedagogik dan kompetensi keprofesionalan. Berdasarkan data hasil UKG yang telah dilaksanakan semenjak tahun 2012 rata – rata nilai UKG adalah SD 38,63 , SDLB 40,03 , SMA 42,60 , SMK 45,77 , SMP 46,7 dan TK 41,72. Berdasarkan nilai rata–rata hasil UKG, maka isu yang perlu menjadi perhatian pemerintahan kota Medan ke depan adalah perlu dilakukan pelatihan guru, terutama para guru yang merupakan tanggungjawab Pemko Medan dari segi pembinaan (PAUD, SD Dan SMP). Jenis pelatihan yang



harus dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pelaku didik adalah pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dalam bidang kemampuan profesional tampak kelemahan guru merata terutama pada semua bidang studi (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PPKN)

B. Urusan Kesehatan

Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola yang meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana/sarana kesehatan, kuantitas, dan kualitas tenaga medis dan para medis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Medan termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus. Berdasarkan atas kondisi umum penyelenggaraan urusan kesehatan sampai tahun 2019, berbagai isu-isu pokok penyelenggaraan kesehatan dalam lima tahun yang akan datang di Kota Medan antara lain:

1. Jumlah Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi di Kota Medan selama tahun 2015-2019 masih mengalami fluktuasi, jumlah kematian bayi tertinggi di Tahun 2018, dan terendah di Tahun 2016. Adapun rasio kematian bayi sebesar 0.32 di tahun 2015 dan kondisi akhir di tahun 2019 sebesar 0.46. Peningkatan jumlah kematian bayi ini, menjadi tantangan bagi bagi Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program kesehatan untuk menurunkan angka kematian bayi pada masa yang datang.

2. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Jumlah kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran di Kota Medan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel 2.26 dibawah ini menunjukkan kecenderungan peningkatan, pada Tahun 2016 jumlah kasus kematian ibu sebanyak 6 kasus, dan terakhir pada tahun 2020 Jumlah kematian Ibu menjadi 19.08 kasus. Kondisi ini menggambarkan bahwa program bidang kesehatan perlu lebih ditingkatkan untuk menurunkan angka kematian ibu.

3. Optimalisasi pelaksanaan program kesehatan

a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).



- b. Mewujudkan pencapaian Kota Medan sebagai pusat layanan kesehatan. Untuk itu Masyarakat harus dibangun kepercayaan bahwa pelayanan kesehatan sudah relatif baik, khususnya pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Pada sisi lain pelayanan kesehatan dan kompetensi tenaga medis di layanan kesehatan khususnya milik pemerintah kota perlu dioptimalkan kualitasnya.
- c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada layanan kesehatan dan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah kota Medan, khususnya bagi masyarakat yang jauh dari perkotaan dan di kawasan daerah pesisir.
- d. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah-daerah yang masih rentan layanan kesehatan. Untuk itu peningkatan pendidikan medis dan tenaga kesehatan perlu dilakukan oleh pemerintah kota Medan menuju *world smart city*.
- e. Pengetahuan sebagian masyarakat terhadap aturan dan tata cara untuk memperoleh pengobatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih relatif rendah untuk itu diperlukan sosialisasi dan media promosi mengenai manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dan bagaimana cara masyarakat mengakses pelayanan kesehatan melalui JKN tersebut.
- f. Sebagian masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar Kota Medan bahkan sampai ke luar negeri dikarenakan mutu pelayanan kesehatan harus dapat meningkatkan kompetensi diri dan dapat melayani sesuai dengan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan sehingga minat masyarakat yang berobat ke luar negeri menjadi turun.
- g. Munculnya penyakit serta virus baru sehingga diperlukan sosialisasi pencegahan dengan pola hidup sehat dengan tetap memperhatikan hygiene sanitasi personal sehingga dapat memutus penularan bakteri maupun virus.
- h. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tertentu perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan peran serta masyarakat seperti gerakan masyarakat hidup sehat untuk mengurangi angka kesakitan dengan upaya penyuluhan, penyelidikan, melakukan tindakan karantina dan menyelenggarakan upaya kesehatan melalui kegiatan pemberantasan penyakit baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
- i. Belum optimalnya aspek regulasi dan sistem informasi kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan. Puskesmas dengan aplikasi sistem informasi puskesmas dapat mengembangkan suatu sistem jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi program *mobile health* yang terhubung dengan pusat data atau Bank Data Kesehatan Kota/Kabupaten.



- j. Belum adanya integrasi dan mekanisme dari seluruh pelaku pembangunan kesehatan untuk menjadikan Medan sebagai pusat pelayanan kesehatan regional. Diharapkan tugas dan tanggung jawab dari pelaku pembangunan kesehatan akan dapat bekerja secara terpadu dan bersinergis untuk menghasilkan data yang berkualitas serta validitas yang baik sehingga tidak terdapat perbedaan informasi data bila dikembangkan untuk suatu publikasi baik dicetak elektronik atau diakses secara online.
4. Penanganan Wilayah Rawan Bencana Rawan Kejadian Luar Biasa Bidang Kesehatan

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumatera Utara menyatakan sebaran paling banyak berada di Kota Medan sampai dengan 22 Agustus 2021, Kota Medan masih merupakan zona merah dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 40.065 orang dengan rincian 29160 orang sembuh, meninggal 793 orang dan selebihnya sedang dalam perawatan. Jumlah pasien positif covid mengalami peningkatan di Kota Medan, disebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan dan belum optimalnya upaya tracing atau penemuan kasus covid-19 dimana seharusnya target adalah 1 : 15. Satu orang terkonfirmasi positif Covid-19 maka 15 orang terdekat yang kontak langsung harus di tracing.

Program penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu lebih ditingkatkan terutama pencegahan penularan covid-19. Respon kejadian tanggap darurat, merupakan masalah serius yang perlu diperhatikan ditengah-tengah pandemic covid-19 yang terus meningkat dan perilaku masyarakat yang masih jauh dari harapan. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa dengan mengkaji data surveilans epidemiologi penyakit, status gizi masyarakat, imunisasi, kerentanan lingkungan, kerentanan pelayanan kesehatan, daerah penyebaran agar mendapat perhatian lebih.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Permasalahan utama saat ini dalam pengelolaan sumber daya air adalah permasalahan banjir di Kota Medan. Penyebab permasalahan banjir di Kota Medan sebetulnya tidak hanya mutlak berada di hilir sungai, namun juga berada pada hulu dan tengah sungai. Perlu dilaksanakan pengelolaan dan pengendalian banjir di Kota Medan yang berbasis DAS. Pemerintah Kota Medan telah mempersiapkan studi kelayakan untuk pembangunan kolam retensi pada 5 kecamatan yaitu Kecamatan Medan Johor, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal, dan Medan



Tuntangan. Pembangunan kolam retensi ini dimaksudkan untuk menurunkan debit banjir pada sungai. Kolam retensi dimaksudkan untuk dapat menampung banjir pada saat hujan dan setelah hujan berhenti air kembali disalurkan ke sungai. Namun studi kelayakan yang sudah disusun belum ditindaklanjuti dikarenakan permasalahan pengadaaan lahan yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Diharapkan pada masa RPJMD yang akan datang, Pemerintah Kota Medan bisa secara bertahap memprioritaskan pembangunan kolam retensi ini.

Prinsip pengendalian banjir di Kota Medan adalah dengan memanen/menampung air hujan sebanyak-banyaknya yang turun ke bumi. Di Kota Medan perlu disiapkan waduk-waduk, kolam retensi, sumur serapan, lubang biopori, dan wadah penampung air lainnya, agar air hujan yang turun tidak langsung menuju drainase/sungai sehingga drainase/sungai tidak meluap

2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Secara umum rumusan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak dalam Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Medan adalah :

- a. Sumber air baku untuk pelayanan air minum Kota Medan semakin terbatas, selain karena kapasitas pengambilan sudah semakin terbatas, juga karena debit andalan sungai juga semakin berkurang
- b. Belum meratanya air bersih ke seluruh bagian wilayah dengan pelayanan utama melalui jaringan pipa distribusi air minum baik dalam hal kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya.
- c. Mempertahankan keseimbangan kebutuhan air bersih antara kapasitas air bersih dengan jumlah konsumen.
- d. Kelembagaan pengelola air minum di Kota Medan bukan berada pada kewenangan Pemerintah Kota Medan, melainkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sedikitnya menyulitkan bagi Pemerintah Kota Medan untuk melakukan percepatan peningkatan pelayanan air minum melalui pemberian dukungan finansial langsung kepada PDAM Tirtanadi.

3. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan

Adapun permasalahan dalam pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan adalah belum terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 UU 18/2008 merumuskan definisi pengelolaan sampah yaitu kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah Kota Medan, telah menerbitkan Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan menetapkan target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan



sampah sebesar 70% dari potensi sampah pada tahun 2025. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah diminta untuk menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Demikian juga halnya, masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. Penanganan Sampah dilaksanakan mengacu pada Pasal 22 ayat (1) UU No. 18/2008 meliputi:

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Pemilahan, belum terlaksana terkait dengan sistem pewadahan yang memisahkan sampah berdasarkan jenis belum optimal. Hal ini disebabkan belum adanya kesadaran pemilahan sampah di tingkat masyarakat sehingga belum berjalan dengan baik, khususnya inisiasi program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), walaupun wadah sampahnya telah dibuat terpisah serta belum adanya sistem pengumpulan sampah yang terpisah di Kota Medan. Peran Bank Sampah dan TPS3R dimasyarakat perludioptimalkan agar pemilahan sampah dari sumbernya dapat terlaksana dengan baik.
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Jumlah TPS belum memenuhi persyaratan, saat ini hanya ada 82 TPS yang aktif di Kota Medan sementara kebutuhan TPS di Kota Medan sebanyak 151 TPS.
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Jumlah armada truk angkutan sampah yang ada belum mampu mengakomodasi pengangkutan timbulan sampah yang ada di Kota Medan. Perlu perencanaan pengadaan truk yang dikombinasikan dengan kegiatan 3R untuk mengurangi timbunan sampah yang ada di Kota Medan.
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam pengolahan sampah melalui kemitraan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum serta penerapan teknologi tepat guna penanganan sampah perlu segera dilaksanakan pemerintah Kota Medan



5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Permasalahan pemrosesan akhir adalah kapasitas daya tampung Tempat Prosesan Akhir (TPA) yang ada saat ini. Perlu segera melaksanakan pengadaan lahan di sebelah TPA Terjun seluas 3,5 Ha untuk menangani kapasitas tampung sampah yang ada saat ini. Selain itu juga tetap mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membangun TPA regional Mebidang sebagai solusi terhadap penampungan sampah yang lebih permanen.
4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Permasalahan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah sebagai berikut:
 - a. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana
 - Masih terdapat 22.792 KK yang melakukan membuang air besar sembarangan (BABS).
 - Tidak standarnya bangunan tangki septic masyarakat dimana hampir semua tangki septic tidak kedap dan effluennya disalurkan langsung ke selokan/ saluran drainase tersier/ tanah maupun badan air lainnya sementara itu bidang resapan juga kurang maksimal.
 - Terbatasnya APBD Kota Medan dimana persentase pembiayaan sanitasi layak dan aman tahun 2014 – 2019 rata-rata hanya 40.22 %.
 - Masih rendahnya sanitasi aman Kota Medan yakni 4.85 % di tahun 2020.
 - b. Aspek non-Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi.
 - Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan IPAL Komunal dan Kawasan serta penyusunan dan legalisasi Perda dokumen Masterplan Air Limbah sebagai acuan dalam pembangunan sub sektor air limbah domestik.
 - Belum optimalnya Pemerintah Kota untuk “mengajak” pihak swasta dan masyarakat untuk pembangunan dan pengembangan pengelolaan air limbah domestik.
 - Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Walikota mengenai kewajiban setiap rumah tangga untuk menyambung pada sistem pengelolaan air limbah perkotaan.
 - Masih rendahnya kesadaran swasta khususnya developer perumahan untuk membangun IPAL di lingkungan perumahan.



5. **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**
Permasalahan terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di Kota Medan adalah sebagai berikut :
 - a. Kapasitas saluran drainase dan gorong-gorong yang sudah tidak memadai
 - b. Integrasi dan konsistensi sistem jaringan drainase yang belum memadai.
 - c. Adanya saluran-saluran drainase yang terputus.
 - d. Minimnya lubang inlet pada jalur trotoar maupun pada saluran drainase terbuka yang ditutup bagian atasnya, mengakibatkan limpasan air permukaan pada badan jalan kesulitan untuk masuk ke saluran drainase.
 - e. Sangat terbatasnya upaya pembangunan dan operasi dan pemeliharaan.
 - f. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait dengan optimalisasi fungsi saluran/sistem drainase.
 - g. Adanya bangunan yang berdiri diatas saluran drainase yang menyebabkan penyempitan alur drainase.
 - h. Kondisi parit/ saluran drainase yang tersumbat/ penuh dengan sedimen/ sampah menyebabkan drainase tidak mengalir.
 - i. Perlunya data/ identifikasi seluruh permasalahan drainase, mengukur elevasi saluran drainase agar air dapat mengalir jika elevasi sudah baik.
 - j. Menghubungkan seluruh saluran drainase tertier, sekunder, primer, MMUDP, MUDP sungai agar terintegrasi dengan baik. Sehingga ketika hujan deras turun agar mengalir dengan baik. Dengan mengaktifkan kembali saluran MUDP, MMUDP, Saluran Belanda
6. **Pengembangan Jasa Konstruksi**
Adapun permasalahan dalam pengembangan jasa konstruksi adalah sebagai berikut:
 - a. Masih terbatasnya penyedia jasa dan Sumber Daya Manusia di bidang konstruksi yang mempunyai kompetensi teknis berikut dengan sertifikasi keahlian yang memadai. Sehingga perlu memperbanyak pelatihan dibidang jasa konstruksi untuk meningkatkan kompetensi.
 - b. Masih minimnya jumlah pelaku jasa konstruksi yang memahami peraturan terkait teknis, administrasi dan keuangan. Sehingga Pemko Medan intens untuk melakukan sosialisasi peraturan jasa konstruksi.
7. **Penyelenggaraan Jalan**
Adapun permasalahan dalam penyelenggaraan jalan antara lain:
 - a. Bentuk geometri pada beberapa persimpangan jalan strategis yang tidak ideal untuk dapat memberikan ruang bagi arus menerus lalu lintas.
 - b. Pelebaran jembatan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah dan kelancaran lalu lintas, serta untuk keperluan normalisasi sungai



- c. Pola hirarki kelas dan fungsi jalan belum tertata dengan baik;
 - d. Penataan jaringan utilitas telekomunikasi, listrik, air, dan gas secara lebih terpadu dan memenuhi kaidah estetika ruang kota yang baik.
 - e. Masih banyaknya jalan berlubang yang perlu segera diperbaharui dengan memperbaiki kualitas jalan.
 - f. Pembuatan jalan dan jalan tembus di Utara Kota Medan
8. Penataan Ruang

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 penataan ruang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang. Hasil evaluasi RTRW Kota Medan masih menunjukkan masih adanya penyimpangan terhadap rencana struktur ruang dan pola ruang Kota Medan diakibatkan oleh dinamika pembangunan.

Kondisi Struktur ruang yang menjadi perhatian :

- Tingkat kemacetan di Kota Medan mulai meningkat sehingga perlu dipikirkan untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Medan agar dapat mengurangi beban transportasi di Kota Medan. Selain itu, perlu meningkatkan aktifitas jalur kereta api (jalur barat-timur dan jalur utara-selatan) untuk melayani angkutan barang dan *commuter* pekerja yang ada di Kota Medan.
- Perlu memikirkan dan melaksanakan konsep TOD (*Transit Oriented Development*) dan pembangunan jalan baru di Utara Kota Medan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat

Kondisi pola ruang yang menjadi perhatian diantaranya :

- Adanya ketimpangan pembangunan kawasan budidaya antara bagian utara Kota Medan dan bagian selatan Kota Medan sehingga perlu dipertimbangkan untuk melaksanakan pembangunan yang agresif pada bagian utara Kota Medan terutama untuk fasilitas ekonomi serta sarana dan prasarana perkotaan.
- Ketersediaan lahan untuk pembangunan kawasan budidaya di Kota Medan sudah semakin terbatas, perlu diambil kebijakan untuk mulai melaksanakan pembangunan kawasan terbangun dengan pendekatan pembangunan vertikal untuk perumahan, perkantoran serta perdagangan dan jasa agar pemanfaatan lahan di Kota Medan dapat dioptimalkan.
- Permasalahan kawasan lindung di Kota Medan adalah pencapaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum mencapai 30 % (20% public dan 10% private), perlu di pertimbangkan melaksanakan pembelian lahan tiap tahun untuk penyediaan RTH agar RTH yang dipersyaratkan dapat tercapai.



D. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Lahan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terbatas dan nilai lahan yang relatif tinggi di Kota Medan perlu mendapatkan perhatian dengan membuat kebijakan dengan pembatasan pembangunan perumahan serta memprioritaskan penyediaan rumah susun dan apartemen untuk memenuhi penyediaan tempat tinggal di Kota Medan.
2. Tingginya pertumbuhan kawasan perumahan formal di Kota Medan tidak diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana peyediaan perumahan yang memadai pada kawasan perumahan formal tersebut, hal ini perlu mendapat perhatian dengan lebih memperketat perijinan pembangunan kawasan perumahan formal di Kota Medan.
3. Perlu adanya prioritas penanganan terhadap tingginya rumah tidak sehat/tidak layak huni di Kota Medan yakni 45,493 unit di tahun 2018 khususnya penanganan kawasan permukiman daerah pesisir yang ada di Kota Medan.
4. Terjadinya peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh sebelumnya di tahun 2018 seluas 200,219 Ha tuntas di tahun 2019, dan pada tahun 2020 dilakukan updating sehingga diperoleh peningkatan area kumuh seluas 819,80 Ha.

E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Optimalisasi pelaksanaan urusan wajib ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sangat diperlukan untuk terlaksananya pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Stabilitas keamanan, sosial, dan politik yang stabil dapat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan investasi di daerah. Iklim daerah yang kondusif dan stabil perlu dibangun dan diwujudkan diantaranya melalui pembinaan terhadap instansi penegak keamanan, organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya. Pembinaan terhadap organisasi masyarakat tersebut perlu dilakukan, agar tumbuh kesadaran di masyarakat akan pentingnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Pembinaan politik daerah, pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP perlu lebih diefektifkan. Pelaksanaan program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal melalui penanganan terhadap pelanggaran perda Kota Medan yang realisasinya relatif rendah agar ditingkatkan. Disamping itu program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan yang belum direalisasi perlu menjadi fokus perhatian pemerintah daerah untuk dilaksanakan.

F. Urusan Sosial

1. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar 0.165 persen untuk tahun 2015-2019. Peningkatan jumlah penduduk kota



disebabkan adanya peningkatan fertilitas (pertumbuhan penduduk alami). Walaupun demikian, dengan jumlah penduduk yang masih relatif besar yang diperkirakan mencapai 2.507.124 jiwa pada tahun 2019, maka secara demografis Kota Medan masih memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar sehingga menjadi daya tarik (*full factors*) untuk mencari pekerjaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan kota. Apalagi banyaknya penduduk yang pindah tempat tinggal ke luar Kota Medan, sebahagian besar masih bekerja di Kota Medan. Hal yang paling penting dalam dimensi kependudukan ini adalah bagaimana Kota Medan dapat memanfaatkan periode bonus demografi secara optimal pada masa datang dengan meningkatkan produktifitas penduduk muda melalui berbagai program pelatihan kerja dan pembukaan lapangan kerja baru formal dan informal, khususnya pada sektor industri kecil dan UMKM.

2. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional, yang fenomenanya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, lokasi, gender dan kondisi lingkungan. Secara umum kondisi kemiskinan ditandai oleh kerentanan, rendahnya akses terhadap pelayanan publik, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya, hal inilah yang merupakan salah satu tantangan pembangunan kota saat ini dan saat mendatang. Jumlah penduduk miskin di Kota Medan terus mengalami penurunan, oleh karena itu perlu adanya strategi baru untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di antaranya Program PNPM Perkotaan, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Jaminan Pelayanan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) yang diintegrasikan dengan JKN, Pemberian Makanan Tambahan untuk Gizi Buruk dan Gizi Kurang, Program Peningkatan Keterampilan untuk UMKM, Program Pendidikan bagi Panti Asuhan di PAUD, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pembangunan MCK, Penyediaan Air Bersih dan Sistem Sambungan dan Air program sanitasi, dan lain-lain.

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota

4.1.2.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Urusan tenaga Kerja

Adapun permasalahan pada Urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:



1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Medan dalam 5 Tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan trend yang menurun. Meski begitu, antisipasi terhadap kelompok penduduk yang masuk (migrasi in) harus dapat diantisipasi. Angka TPT pada tahun 2020 yang mencapai 10,74 % dan ini menjadi yang tertinggi di Sumatera Utara.
2. Sepanjang tahun 2015-2019 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja, dari 912.037 menjadi 1.104.418 pada tahun 2019 dan meningkat lagi mencapai 1.134.643 pada tahun 2020. Di sisi yang lain, jumlah pengangguran di Kota Medan sepanjang 2015-2020 mengalami fluktuasi, sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu 91.753 dan naik kembali menjadi 94.165 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 121.823.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

a. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Medan sampai dengan 2019 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini diduga ada kaitannya dengan upaya untuk meningkatnya suasana keamanan dan ketertiban kota yang kondusif yang belum efektif dan belum dilaksanakannya Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

b. Perlindungan Perempuan dan Anak

Di Kota Medan masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sebanyak 21 kasus dengan 82 korban anak. Kasus-kasus tersebut meliputi kegiatan mediasi dan pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak dalam rumah tangga.

c. Pemberdayaan Perempuan

Bentuk pemberdayaan perempuan selama periode 2016-2020 dilaksanakan melalui kegiatan PKK dan Posyandu yang ada di Kota Medan pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pendidikan anak usia dini dan pelestarian lingkungan. Di sisi lain, aspek pemberdayaan perempuan pada bidang ekonomi dirasa masih kurang



dilaksanakan, sehingga kelompok masyarakat yang kurang mampu belum bisa mendapatkan akses sumber daya ekonomi secara lebih memadai.

C. Urusan Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan adalah:

1. Keterbatasan infrastruktur pendukung, terjadinya alih fungsi lahan dan masih minimnya pelaksanaan terhadap program-program diversifikasi pangan.
2. Masih terdapatnya Kelurahan yang tergolong daerah rawan pangan yang ditandai dengan masih adanya anak penderita gizi buruk dan gizi kurang dan stunting.
3. Masih tingginya konsumsi beras perkapita sehingga penggunaan bahan pangan lokal sebagai sumber karbohidrat masih rendah begitu juga dengan sayur dan buah buahan.
4. Masih belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya (pestisida, borax, formalin dll) pada pangan segar asal tumbuhan dan pangan siap jadi.
5. Belum optimalnya upaya dalam menstabilkan pasokan bahan pangan pokok sehingga terjadi kenaikan harga bahan pangan pokok terutama pada hari-hari besar keagamaan nasional.

D. Urusan Pertanahan

1. Permasalahan Pertanahan yang ada di Kota Medan tidak lepas permasalahan sengketa tanah antara masyarakat dengan institusi pemerintah atau institusi swasta.
2. Perlunya Bank Tanah dan Kontrolisasi lahan di Kota Medan

E. Urusan lingkungan Hidup

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan, harus dilaksanakan dengan baik dan benar, agar terciptanya iklim lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, merupakan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat perlu lebih ditingkatkan. Penegakan hukum lingkungan mengalami penurunan sejak tahun 2015-2019 yakni 100 persen, turun menjadi 36 persen pada tahun 2019 perlu lebih diefektifkan. Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebesar 86.05 perlu ditingkatkan. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dalam



kaitan pengelolaan sampah berdasarkan Perwali Kota Medan No. 26 Tahun 2019 target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% dari potensi sampah pada tahun 2025 menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Medan untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sejuk dan indah. Pengurangan sampah melalui kegiatan Pembatasan, Pendaauran Ulang, Pemanfaatan Kembali. Penanganan sampah melalui kegiatan Pemilahan sampah dari sumbernya, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Pemrosesan Akhir. Penanganan sampah dari sumbernya akan mengurangi volume yang akan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara signifikan.

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

1. Pada tahun 2018 terjadinya penurunan jumlah penduduk Kota Medan yang sudah memiliki KPT-el menurun menjadi angka 86,1% dari jumlah wajib KTP-el. Penurunan ini terjadi karena adanya faktor, bertambahnya jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP, dan kesulitan blanko KTP.
2. Pada tahun 2019, jumlah kepemilikan E-KTP kembali naik menjadi 93,53 persen. Namun jumlah persentasi ini tidak mencapai target kepemilikan E-KTP sebesar 99,35% pada tahun 2019 sebagaimana yang telah ditargetkan pada RPJMD 2016-2021.
3. Untuk kepemilikan akta kelahiran di Kota Medan pada tahun tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 844/1000 penduduk. Sementara pada tahun 2018, terjadi penurunan dimana hanya 390/1000 penduduk, padahal dalam matriks pembangunan prioritas Kota Medan tahun 2018 sasaran capaian kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk adalah 80%. Pada tahun 2019 pencapaian akte kelahiran dihitung, mereka yang berusia di bawah 18 tahun mencapai 75,20% dari seluruh penduduk Kota Medan yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan layanan atas kepemilikan akta kelahiran pada seluruh masyarakat Kota Medan mengalami penurunan dari tahun 2016 dan 2018. Dengan demikian pencapaian target RPJMD 2016-2021 untuk tahun 2018 di mana diharapkan kepemilikan akte kelahiran penduduk adalah sebesar 62,98 % tidak tercapai
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen-dokumen kependudukan.

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:



1. Masih terdapat program-program pemberdayaan masyarakat yang kurang terkoordinasi, terintegrasi dan komperhensif.
2. Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan KB adalah:

1. Peserta KB aktif sampai tahun 2020 sudah mencapai 64,80% dan masih ada 35% peserta kebutuhan KB yang belum terpenuhi.
2. Belum maksimal pelaksanaan KB menyebabkan terjadinya laju pertumbuhan penduduk sepanjang priode tahun 2016-2020. Di mana pada tahun 2020 terakhir terjadi laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,20%. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah kepadatan penduduk yaitu dari 9.438 jiwa/km² pada tahun 2018 menjadi 9.457 jiwa/km².
3. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2020 adalah Kecamatan Medan Perjuangan yaitu 23.714,18. Di susul dengan Kecamatan Medan Area 18.163,41.
4. Berdasarkan umurnya, proposisi penduduk Kota Medan pada tahun 2018 yang terbanyak berada pada kelompok umur 35-39 tahun dengan jumlah 9%. Di susul dengan kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah 8,7%. Gambaran proposisi penduduk Kota Medan berdasarkan kelompok umur ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah untuk dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan kepentingan setiap kelompok umur. Sebab bagaimanapun setiap kelompok umur mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

I. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perhubungan di Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Tingginya pemanfaatan jalan di luar aktifitas lalu lintas (pedagang asongan dan PKL) yang meningkatkan gangguan samping pada jalur jalan.
2. Kurangnya rencana kegiatan berupa panduan dan pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Medan untuk menata kondisi transportasi di Kota Medan.
3. Perlunya ditetapkan regulasi berupa peraturan sebagai payung hukum pelaksanaan perhubungan di Kota Medan.



4. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan berupa marka jalan, traffic light dengan teknologi LED, Rambu Lalu Lintas, Halte dan RPPJ serta pagar pengaman jalan yang akan digunakan oleh pengguna jalan.
5. Belum optimalnya tenaga pengatur dan pengawas lalu lintas di lapangan sehingga menjamin terlaksananya sistem lalu lintas
6. Rendahnya disiplin pengemudi angkutan umum di Kota Medan sehingga diperlukan pembinaan dengan tingkat kepatuhan pengguna jalan hanya + 40 %.
7. Perlunya pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Medan sedangkan sampai dengan tahun ini sudah terpasang di 83 (delapan puluh tiga) persimpangan dengan realisasi (93.98 %).
8. Belum tersedianya Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM) yang biasanya menggunakan angkutan umum dengan kapasitas besar dan mendapat prioritas. Perlu dipertimbangkan untuk mulai secara bertahap mengganti angkutan umum dengan skala kecil yang ada saat ini dengan angkutan umum skala sedang dan bahkan dengan angkutan umum skala besar.
9. Perlunya persediaan lahan parkir/ gedung parkir meminimalisir kemacetan lalu lintas akibat hambatan samping.
10. Penerapan sistem parkir digital/ e-parkir untuk meminimalisir kebocoran retribusi parkir. Sehingga dapat mengoptimalkan PAD Kota Medan dari retribusi parkir

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Komunikasi dan Informatika yang ada di Kota Medan adalah:

1. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintahan Kota Medan, perlu adanya penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) sehingga dalam penerapan SPBE dapat berjalan dengan baik.
2. Masih kurangnya kesadaran Teknologi Informasi (IT Aware) pada ASN dan Masyarakat, di mana perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat sehingga perlu adanya kesiapan sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangan Teknologi Informasi setiap waktu.
3. Perlunya untuk mewujudkan Medan Satu Data dan Medan Satu Peta untuk itu perlu transformasi data digital bagi seluruh OPD/ Stakeholder

K. Urusan Koperasi dan UKM

Permasalahan pada urusan Koperasi dan UKM yang ada di Kota Medan adalah:

1. Walaupun program-program pembinaan terhadap koperasi dan UMKM terus dilakukan, namun harus diakui masih belum optimal, mengingat jumlah koperasi dan UMKM yang ada cenderung cukup besar sehingga memerlukan



- berbagai program fasilitasi dan pembinaan yang lebih luas dan berkelanjutan, khususnya terhadap kebutuhan prasarana dan sarana pasar (pusat-pusat penjualan) bagi produk-produk UMKM guna meningkatkan akses pasarnya, akses terhadap permodalan usaha dan termasuk juga promosi terpadu.
2. Masih rendahnya akses terhadap permodalan koperasi UKM dan penggunaan teknologi yang relatif sederhana sehingga produk yang dihasilkan belum dapat bersaing
 3. Masih rendahnya pengetahuan pelaku Koperasi UKM terkait management usaha
 4. Masih rendahnya kemampuan koperasi dan UKM dalam menjalin kerjasama dengan mitra, dan terbatasnya kemampuan dalam menciptakan serta memanfaatkan peluang pasar.

L. Urusan Penanaman Modal

Adapun permasalahan pada urusan penanaman modal di Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan
2. Dinamika perubahan pada berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga memberikan dampak pada urusan penanaman modal di Kota Medan
3. Belum adanya regulasi terkait kemudahan berinvestasi di Kota Medan yang mendukung perbaikan iklim usaha dan iklim investasi.
4. Pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal belum optimal.

M. Urusan Pemuda dan Olahraga

Permasalahan dan kendala yang dihadapi Urusan Pemuda dan Olahraga adalah:

1. Masih minimnya prestasi yang dihasilkan oleh anak-anak muda di Kota Medan baik pada Level Nasional dan Internasional
2. Pada bidang olahraga, prestasi atlet Kota Medan juga tidak terlalu baik. Target prestasi yang atlet yang ditetapkan pada tahun 2018 sebesar 41,4% hanya tercapai 2,55%.
3. Pembinaan terhadap kelompok pemuda lainnya juga tidak menunjukkan sesuatu yang menggembirakan. Seperti aktifitas pemuda yang menjadi Kader Anti Kenakalan Remaja, sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 tidak mengalami perkembangan atau perubahan, yaitu tetap berjumlah 40 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kegiatan dalam membentuk Kader Anti Kenakalan Remaja pada tahun 2017 dan 2018.



4. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif juga penting untuk disediakan oleh Pemerintah Kota Medan. Setidaknya sarana dan prasarana yang dibutuhkan berupa; gelanggang dan balai remaja, balai kesenian dan lapangan olahraga. Khusus untuk ketersediaan lapangan olahraga misalnya, di Kota Medan saat ini tercatat sebanyak 24 unit atau sama dengan 0,009 per-seribu penduduk.

N. Urusan Statistik

Permasalahan statistik yang terjadi di Kota Medan adalah masih belum adanya pengelolaan data yang terintegrasi antar instansi, masih kurangnya sumber daya manusia pengelola data dan masih rendahnya tingkat kesadaran aparatur tentang pentingnya pengelolaan data yang terintegrasi.

O. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Kebudayaan adalah;

1. Belum adanya Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota yang mengatur tentang syarat dan kriteria untuk menetapkan sebuah kawasan atau bangunan menjadi Cagar Budaya, sehingga Pemerintah Kota Medan kesulitan untuk mengeluarkan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota yang menetapkan lokasi atau bangunan bersejarah menjadi cagar budaya ataupun Heritage.
2. Pemeliharaan benda situs dan cagar budaya seperti bangunan-bangunan tua yang berlanggam arsitektur *art deco* juga belum maksimal dilakukan. Masih terdapat bangunan-bangunan bersejarah yang tidak terawat dan rusak.
3. Belum adanya event-event kebudayaan lokal Kota Medan yang mampu menarik minat dan gairah para pelaku budaya dan kesenian untuk lebih aktif dan meningkatkan kualitasnya.
4. Selain itu, belum adanya sarana atau lokasi pertunjukan seni-budaya yang representatif. Hal ini dapat dilihat dari masih seringnya lapangan Istana Maimun dijadikan lokasi konser musik atau pertunjukan seni musik kontemporer

P. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi pada bidang perpustakaan adalah:

1. Masih terbatasnya ruang perpustakaan untuk menampung pengunjung perpustakaan.
2. Jumlah buku perpustakaan di Kota Medan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah buku sebanyak 34,22% dari total populasi yang dilayani. Sedangkan pada tahun 2019 menjadi 24,81% dari total populasi yang dilayani.



Q. Urusan Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi pada bidang kearsipan adalah:

1. Belum tersedianya secara maksimal SDM pengelola kearsipan yang handal dan profesional. Sehingga perlu ditingkatkan jumlahnya agar arsip dapat terjamin pengelolaannya baik secara informasi maupun fisik.
2. Di sini yang lain, terjadi penurunan jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Medan, di mana pada tahun 2018 terdapat 4 kali kegiatan pelatihan dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 3 kali kegiatan.
3. Penggabungan OPD pada tahun 2017 mengakibatkan kondisi gedung kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip menjadi semakin tidak representatif, karena lokasi gedung kantor perpustakaan yang terpisah cukup jauh dengan gedung kantor Arsip.

4.1.2.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Urusan Pilihan

A. Bidang Pertanian, Perternakan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Medan pada Bidang Pertanian, Perternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya masyarakat memelihara ternak/unggas maupun ternak kaki empat (babi) di pemukiman sebagai usaha sampingan sehingga berpotensi menyebarkan penyakit zoonosis maupun pencemaran lingkungan.
2. Kebutuhan akan produk pertanian/peternakan dan perikanan masih dipenuhi dari luar Kota Medan sehingga memerlukan pengawasan yang intensif terhadap persyaratan pemasukan produk pertanian/peternakan dan perikanan
3. Terjadinya alih fungsi lahan, ketergantungan terhadap bibit import (luar Kota Medan) dan keterbatasan akses permodalan menjadi kendala pada pengembangan agribisnis di Kota Medan
4. Petani, peternak dan nelayan masih belum sepenuhnya mampu melakukan teknologi budidaya dalam usahanya dan alih usaha yang lebih baik dan prospek pemasaran yang lebih baik.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan tidur/pekarangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun untuk usaha dalam menambah penghasilan keluarga.
6. Rendahnya pengelolaan dan pemasaran produk hasil-hasil pertanian.



B. Bidang Perindustrian

1. Terbatasnya Sumber Daya Industri seperti Laboratorium untuk standarisasi
2. Masih rendahnya tingkat akurasi database dan validitas IKM, dalam arti masih perlu dilakukan sinkronisasi dan verifikasi database berdasarkan nama, alamat, maupun jenis industri.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan IKM. Seperti peralatan, mesin, workshop.
4. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM (sumber daya manusia) yang memiliki kompetensi untuk menangani IKM.
5. Tebatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja, pada industri kecil dan industri kreatif
6. Terbatasnya penguasaan teknologi, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong
7. Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk
8. Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan pemahaman green industri, kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong pada industri kreatif
9. Manajemen operasi yang tidak sesuai dengan capaian/sasaran mutu industri
10. Belum maksimalnya Pendayagunaan UPT sentra IKM sebagai ruang pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kreativitas SDM sektor industri

C. Bidang Perdagangan

Penyelenggaraan bidang perdagangan di Kota Medan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan
2. Relatif masih kurangnya daya saing produk terutama kualitas packaging produk agar lebih menarik untuk dipasarkan
3. Relatif masih kurangnya akses pasar, teknologi dan modal kerja bagi UKM
4. Standarisasi kualitas produk yang akan diekspor belum sesuai dengan permintaan pasar ekspor.

D. Bidang Pariwisata

Permasalahan dan kendala pada bidang pariwisata adalah:

1. Kontribusi Pariwisata yang terus mengalami penurunan terhadap PDRB. Rendahnya kontribusi pariwisata sangat terkait dengan belum efektifnya pelaksanaan program terkait dengan upaya mendorong kegiatan kepariwisataan khususnya program-program pengembangan destinasi pariwisata,



- pengembangan kemitraan, pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya serta program pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya, belum direalisasikan.
2. Belum maksimalnya program pengembangan pemasaran pariwisata,.
 3. Masih belum tertatanya objek-objek wisata yang layak dilestarikan sebagai kota tujuan wisata terbaik di Kota Medan.
 4. Pelayanan pada wisatawan perlu di tingkatkan dengan menyediakan bus wisata.

4.1.2.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kota Medan Berdasarkan Urusan Penunjang

A. Bidang Administrasi Pemerintahan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan bidang pemerintahan adalah:

1. SOTK yang belum sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 sehingga ada tumpang tindih penyelenggaraan urusan di beberapa OPD
2. Hasil evaluasi kinerja akuntabilitas Pemerintahan Kota Medan masih rendah sedangkan nilai ELPPD pada tahun 2020 sudah dalam kategori Tinggi
3. Kinerja BUMD Pemerintah Kota Medan belum optimal dalam meningkatkan PAD

B. Bidang Perencanaan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perencanaan adalah:

1. Koordinasi yang belum optimal dengan perangkat daerah sehingga penyusunan dokumen perencanaan kurang maksimal.
2. Data untuk kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan belum terdokumentasikan dengan baik oleh OPD penyelenggara urusan.
3. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran yang belum selaras sehingga kurang optimal dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan.
4. Terbatasnya SDM Fungsional Perencana.

C. Bidang Keuangan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keuangan adalah:

1. Belum optimalnya pencapaian target PAD dari beberapa sektor pendapatan daerah
2. Hasil Opini BPK sudah meraih WTP dan harus dipertahankan pada masa yang akan datang



3. Pengelolaan Aset yang belum optimal

D. Bidang Kepengawasan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pengawasan adalah:

1. Belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan dalam penyelenggaraan program kegiatan pemerintah daerah
2. Belum optimalnya peranan Inspektorat dalam melakukan pembinaan terhadap OPD
3. Perlunya peningkatan kompetensi auditor di Lingkungan Inspektorat Kota Medan

E. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan adalah:

1. Relatif masih belum optimalnya koordinasi di bidang kelitbangan, sehingga hal ini mendorong munculnya program/kegiatan yang adakalanya kurang perencanaan karena belum dilakukan kajian mendalam.
2. Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga ketepatan waktu yang terbatas dalam pengkajian terhadap program dan kegiatan tahun berjalan.
3. Penelitian yang belum berorientasi kepada permasalahan pembangunan pemerintahan kota sehingga hasil penelitian tidak dapat diimplementasikan baik oleh pemerintah kota dan juga stake holder lainnya.
4. Minimnya Inovasi Pemerintah Daerah Kota Medan dalam penyelenggaraan Pemerintahan disebabkan kurangnya dukungan dari OPD lainnya.

F. Bidang Kepegawaian

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian adalah:

1. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait seperti:
 - Belum tuntasnya penataan organisasi dan PNS. Data analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Medan belum disinergikan dengan data Bazetting yang dimiliki oleh organisasi.
 - Integrasi data Simpeg yang dimiliki organisasi dengan data kepegawaian pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara baru dalam tahapan penjjakan.



2. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi yang dimiliki oleh organisasi sehingga belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang pelayanan administrasi kepegawaian
3. Penyelenggaraan pelatihan belum memenuhi target kerana keterbatasan prasarana dan sarana yang memadai. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga belum memiliki SDM ASN Fungsional Widyaiswara.
4. Manajemen SDM yang belum optimal
5. Kompetensi ASN yang masih rendah dan Pemerintah Kota Medan terkendala dalam pendanaan untuk mendorong ASN inpassing ke fungsional tertentu.
6. Serta Penempatan PNS yang belum sesuai dengan agenda reformasi birokrasi.

4.1.3 Aspek Daya Saing

1. Infrastruktur Dasar Perkotaan (Sampah, Jalan dan Drainase)

Kota Medan saat ini memiliki satu TPA, yaitu TPA Terjun dan saat ini mampu mengolah sampah sekitar 77,80 % dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota (Kategori Baik) yaitu sebesar 66,47 %. Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia ditunjang dengan fasilitas jalan sepanjang 3.279,34 Km, dimana kondisi jalan mantap (sedang/baik) sepanjang 3.246,60 Km atau sebesar 99 %. Selain sarana/prasarana jalan yang telah tersedia dengan baik, masyarakat Kota Medan juga telah terfasilitasi saluran drainase diseluruh Kecamatan dan Kelurahan, hanya saja fungsi drainase yang ada saat ini harus ditingkatkan pemanfaatannya.

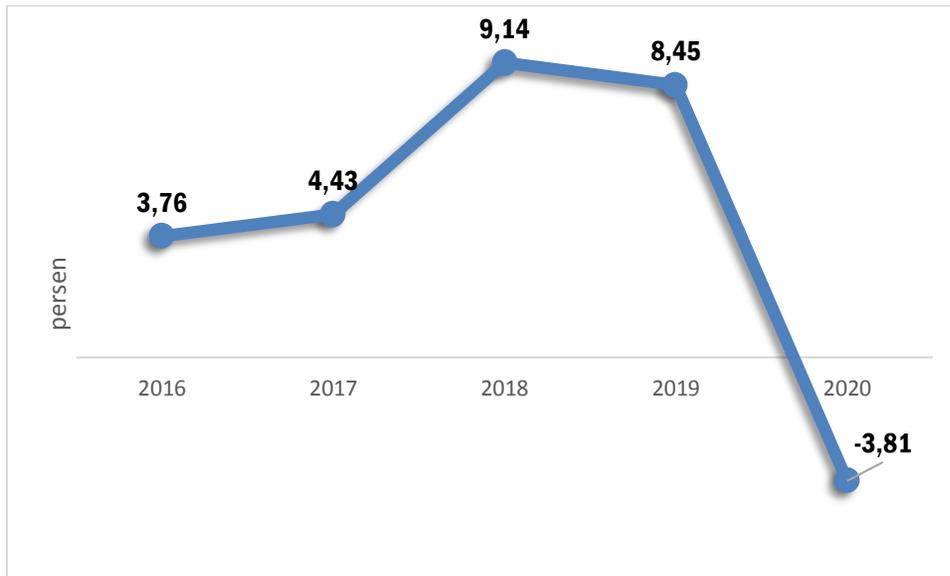
2. Perlambatan Investasi di Kota Medan

Realisasi investasi di Kota Medan mengalami tren yang menurun, khususnya tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, Nilai Investasi (PMA/PMDN) Kota Medan mencapai Rp 47,23 triliun dan pada tahun 2020 menurun sebesar 90,75 persen menjadi Rp 4,37 triliun. Capaian realisasi investasi pada tahun 2020, jauh di bawah target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Medan sebesar Rp 8,21 triliun.

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan investasi di Kota Medan adalah indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PTMB). Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2018, laju pertumbuhan PTMB Kota Medan mencapai puncaknya sebesar 9,14%. Namun pada tahun 2019, laju pertumbuhan PMTB Kota Medan menurun menjadi 8,45% dan terus menurun pada tahun 2020 menjadi 3,81%.

Gambar 4.1

Laju Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2016 - 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurunnya laju pertumbuhan investasi di Kota Medan memberikan gambaran bahwa daya saing Kota Medan menjadi semakin menurun. Salah satu indikator yang menunjukkan daya saing investasi adalah indikator *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. Indikator ICOR menunjukkan besaran tambahan modal yang diperlukan untuk menambah 1 satuan output. Semakin besar angka ICOR berarti biaya investasi yang diperlukan bertambah besar. Dengan kata lain, investasi di wilayah tersebut tidak efisien. Ketidakefisienan dalam investasi yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemahalan harga tanah, biaya konstruksi, ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang terbatas, layanan publik yang belum optimal, tata Kelola pemerintahan yang belum baik, ketidakterediaan peraturan terkait kemudahan dan insentif bagi penanaman modal, ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia serta masalah keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan usaha.

Tabel 4.1
Perkembangan ICOR Kota Medan Tahun 2015 - 2019

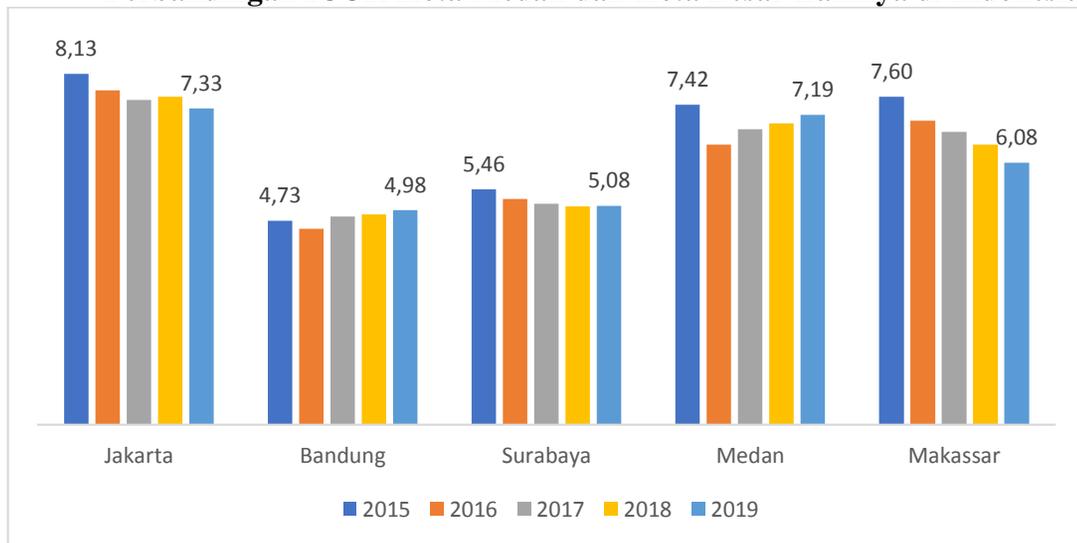
No	Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	48.031,55	49.836,43	52.044,07	56.918,62	62.145,51
2	Perubahan Inventori	2.020,55	803,87	580,74	867,68	918,26
3	Produk Domestik Regional Bruto ADHK	124.269,93	132.062,86	139.739,21	148.006,41	156.780,58
4	Perubahan PDRB	6.744,87	7.792,93	7.676,35	8.267,20	8.774,17
5	ICOR (5) = (1+2)/(4)	7,42	6,50	6,86	6,99	7,19

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)



Nilai ICOR Kota Medan selama beberapa tahun terakhir mengalami tren meningkat. Pada tahun 2016, ICOR Kota Medan mencapai 6,50 dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 menjadi 7,19. Capaian nilai ICOR Kota Medan selama periode 2016 – 2020, tercatat relatif lebih tinggi dibandingkan nilai ICOR kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Surabaya dan Makassar. ICOR Kota Medan hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Jakarta. Tingginya harga tanah di Jakarta menjadi salah satu faktor utama tinggi ICOR.

Gambar 4.2
Perbandingan ICOR Kota Medan dan Kota Besar Lainnya di Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Tingginya nilai ICOR ini telah menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Medan untuk berbenah memperbaiki efisiensi investasi. Perbaikan sejumlah permasalahan yang memberikan pengaruh dalam pembentukan ICOR yang tinggi, akan terus dibenahi pada masa yang akan datang. Dengan demikian, Kota Medan akan menjadi kota yang lebih berdaya saing, dan menjadi salah satu kota tujuan investasi.

3. Angka Kriminal yang masih tinggi

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar khususnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Medan masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Sepanjang tahun 2020 telah terjadi kasus tindak pidana sejumlah 7.726 kasus. Jumlah ini bertambah 466 kasus dibandingkan dengan tahun 2019 sejumlah 7.260 kasus. Dari jumlah laporan tindak pidana tersebut, sebanyak 5.209 kasus dapat terselesaikan. Jumlah ini juga lebih tinggi dibandingkan capaian penyelesaian pada tahun 2019 sebesar 5.158 kasus.

Salah satu faktor pendorong meningkatnya angka kriminalitas tahun 2020 adalah karena meningkatnya kasus penipuan. Demikian halnya dengan Narkoba. Situasi pandemi justru meningkatkan angka peredaran narkoba. Menurut data BNN, provinsi Sumatera Utara berada pada peringkat pertama secara Nasional dalam hal penyalahgunaan narkoba tahun 2019 dan 2020. Kota Medan sebagai Ibukota provinsi merupakan pangsa pasar yang



besar dari peredaran narkoba. Peristiwa penyalahgunaan narkoba tidak terkonsentrasi pada beberapa kawasan kelurahan saja, tapi sudah terjadi di seluruh kelurahan. Penyalahgunaan narkoba juga telah menjadi pemicu terjadinya tindak kriminal lainnya seperti pencurian, perampokan dan penjambretan/begal.

Ketertiban umum masyarakat juga terganggu oleh perilaku berlalulintas warga yang semakin mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2019 menurut BPS, telah terjadi sebanyak 1334 peristiwa kecelakaan lalu lintas di Kota Medan dengan jumlah korban meninggal sebanyak 211 orang. Angka ini tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Utara. Dalam catatan PT Jasa Raharja, lebih 70 persen korban meninggal berada pada usia produktif 16-50 tahun dengan jenis kelamin pria. Budaya berlalu lintas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di samping pentingnya kolaborasi dalam hal penegakan hukum di jalan raya.

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Penelaahan Terhadap TPB dan KLHS

Indonesia telah mengadopsi kesepakatan internasional tentang agenda *Sustainable Development Goal's (SDG's)*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diterbitkan pada 4 Juli 2017. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda TPB ke dalam program pembangunan nasional. Perpres tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah termasuk Pemerintah Daerah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda TPB.

Gambar 4.3
. Sustainable Development Goals (SDG's)



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disebutkan bahwa Tujuan



Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan TPB ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) TPB dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan serta keberlangsungan lingkungan. Indikator TPB berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya



14. Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Dari 17 tujuan SDGs tersebut dikelompokkan menjadi empat pilar, yaitu pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan dokumen KLHS Kabupaten Medan memiliki kepentingan dan komitmen yang kuat untuk turut berpartisipasi dalam pencapaian SDG's, mengingat berdasarkan permasalahan di atas, masih terdapat tujuan pembangunan yang memang masih harus dituntaskan oleh Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, Kota Medan hanya melaksanakan 16 tujuan dengan 218 indikator TPB yang menjadi wewenang kota. Dari 218 indikator yang ditetapkan dalam TPB, hanya 111 (58.24%) indikator yang memiliki data sedangkan sebanyak 107 (41,76%) indikator tidak tersedia data.

Tabel 4.2
Capaian Indikator TPB di Kota Medan

No TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sudah Mencapai Target Nasional	Belum Mencapai Target Nasional	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target atau tidak memiliki data	Jumlah Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	6	7	12	25
2	Tanpa Kelaparan	3	3	5	11
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	7	11	16	34
4	Pendidikan Berkualitas	2	7	4	13
5	Kesetaraan Gender	5	2	7	14
6	Air Bersih	0	0	18	18
7	Akses Energi			2	2
8	Pertumbuhan Ekonomi	7	6	6	19



9	Inovasi Industri Infrastruktur	5	2	4	11
10	Berkurangnya Kesenjangan	2	0	4	6
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	6	7	5	18
12	Produksi Berkelanjutan	0	0	5	5
13	Perubahan Iklim	1	0	1	2
14	Ekosistem Kelautan				0
15	Ekosistem Daratan	0	0	4	4
16	Perdamaian dan Keadilan	8	4	9	21
17	Kemitraan Berkelanjutan	6	4	5	15
18	Total	58	53	107	218

Tabel 4.3
Persentase Capaian TPB Kota Medan

No	Persentase Capaian TPB Kota Medan	Jumlah Capaian	%
1	Kategori A	58	27
2	Kategori B	53	24
3	Kategori C-D	107	49
	Jumlah	218	100

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah diidentifikasi isu strategis Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Prevalensi Penyakit Penduduk Perkotaan
3. Cakupan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
4. Pendidikan wajib sekolah 12 tahun
5. Perbaikan Kualitas Lingkungan Kawasan Kumuh
6. Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Air Bersih
7. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik
8. Pengelolaan Sampah dan Limbah
9. Pelayanan Angkutan Umum
10. Pencegahan, Perlindungan dan Respon terhadap Bencana Alam dan Bencana Kebakaran
11. Keamanan dan Ketertiban dalam Kehidupan Masyarakat



12. Pengembangan Ekonomi Kota dan Kesempatan Kerja

13. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik

Dari pilar pembangunan manusia menjadi suatu isu penting untuk pemerintah daerah, yang di mana perlu adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada pencapaian pilar ekonomi perlu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja guna menekan angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong penanaman modal, pengembangan ekonomi kreatif dan berdampak pada stabilitas keamanan dan kenyamanan. Kemudian, capaian pada pilar lingkungan hidup berperan dalam memerangi perubahan iklim dan dampaknya, pencegahan, perlindungan dan respon terhadap bencana alam dan kebakaran dan mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan dalam bidang *governance*, mewujudkan organisasi/tata kelola pemerintah daerah dan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel.

4.2.2 Isu Strategis Kota Medan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena akan memberi dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. Permasalahan pembangunan Kota Medan.
2. Dinamika internasional, Nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Medan.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kota Medan.
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Kota Medan yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kota Medan.
5. KLHS RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Dari penelaahan yang telah dilakukan dapat dirumuskan isu strategis Kota Medan dan ditetapkan sebanyak 7 isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kota Medan, yaitu :

1. Kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya

Masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi permasalahan yang serius dan harus segera diatasi oleh Pemerintah Kota Medan. Persoalan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti terbatasnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan upah yang layak. Hal ini juga didorong rendahnya kemampuan kewirausahaan dan keterampilan sumber daya



manusia. Sehingga penyelesaian masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus secara komprehensif dan membutuhkan dukungan dari segala pihak. Dampak serius dari kemiskinan ini akan meningkatkan permasalahan sosial lainnya seperti meningkatnya PMKS.

2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan

Peningkatan kualitas layanan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan kesehatan diwujudkan dengan peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tata kelola yang meliputi antar lain peningkatan kualitas sarana/prasarana kesehatan, kuantitas dan kualitas tenaga medis dan para medis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Medan termasuk masyarakat miskin dan kelompok berkebutuhan khusus.

Sedangkan peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat harus dengan mengedepankan perbaikan sarana dan prasarana, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dan perbaikan pada majemen pendidikan.

3. Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Penataan kawasan budaya serta heritage Kota Medan

Adanya ketimpangan pembangunan kawasan budidaya antara bagian utara Kota Medan dan bagian selatan Kota Medan perlu dipertimbangkan untuk melaksanakan pembangunan yang agresif pada bagian utara Kota Medan terutama untuk fasilitas ekonomi serta sarana dan prasarana perkotaan. Selain itu potensi kawasan Medan Utara harus dikembangkan untuk menunjang aktivitas perekonomian Kota sehingga mendorong pergerakan orang, barang dan jasa sehingga menjadi pertumbuhan ekonomi baru.

Kota Medan secara historis adalah kota peninggalan Belanda dan hal ini dapat kita lihat dari bangunan peninggalan Belanda seperti Kantor Pos, Bangunan Gedung di kawasan Kesawan dan juga Mesjid Raya dan banyaknya . Situs heritage ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang dikunjungi oleh wisatawan. Kota Medan juga memiliki situs-situs budaya yang belum di tata secara optimal untuk dipromosikan sebagai destinasi wisata budaya.

4. Layanan infrastruktur dasar perkotaan (jalan, drainase, sampah dan air minum)

Saat ini yang menjadi permasalahan pokok yang dialami Kota Medan dalam layanan infrastruktur adalah masalah sampah, air minum, drainase dan jalan. Dalam hal permasalahan sampah ini, salah satunya adalah dikarenakan minimnya usaha pengelolaan persampahan yang menerapkan sistem 3R (reduce, reuse, recycle) ditambah lagi minimnya pengetahuan masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga yang menerapkan prinsip 3R tersebut. Drainase yang ada di Kota Medan pada umumnya sudah baik, hanya saja belum berfungsi secara optimal dari sisi konektivitas juga keterbatasan dalam



pemeliharaannya, sehingga hal ini menyebabkan masalah serius pada saat hujan. Sehingga hujan turun aliran air tidak mengalir lancar ke drainase serta daya tampung drainase yang terbatas menyebabkan munculnya genangan air di jalan. Hal ini tentunya membawa dampak buruk bagi kondisi jalan di Kota Medan, sehingga banyak jalan yang rusak dan berlubang. Untuk itu urusan drainase dan jalan ini harus dikerjakan secara bersamaan agar mendapatkan hasil maksimal.

Kota Medan memiliki 21 kecamatan dan 151 kelurahan dan sudah hampir terfasilitasi ketersediaan air minum seluruhnya. Capaian rumah tangga pengguna air bersih sampai tahun 2020 baru mencapai 87,52 %. Disamping itu persoalan lainnya adalah kualitas dan kuantitas air minum tersebut, seperti air yang kurang jernih (kurang layak digunakan) dan debit air yang kurang. Untuk itu kedepannya, kualitas dan kuantitas ini harus diperhatikan agar kebutuhan air minum/air bersih tercukupi dengan baik. Jika persoalan ini terfasilitasi, tentunya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara tidak langsung.

5. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kesempatan Kerja

Konsep Ekonomi Kreatif merupakan sebuah bagian dari era ekonomi baru yang memberdayakan informasi, kreativitas dan teknologi dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) sekarang menjadi berbasis SDM, dari era pertanian ke era industri dan informasi. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif dan produktif, kunci sukses ekonomi semakin bergantung pada faktor kreatifitas, inovasi dan keterampilan.

Ekonomi kreatif diharapkan dapat menjawab permasalahan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dihadapi Kota Medan saat ini. Namun, konsep pengembangan ekonomi kreatif ini tidak dapat berkembang secara mandiri dan terpisah dari sektor ekonomi lainnya. Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi, banyak pelaku usaha baru khususnya anak muda menggeluti usaha baru yang kreatif. Munculnya wirausaha baru di Kota Medan berbasis desain, souvenir, kuliner, fashion sampai bahan kerajinan umumnya dipasarkan melalui internet, media sosial, hingga dari mulut ke mulut. Namun, Kota Medan saat ini belum memiliki sentra industri kreatif, baik dari lokasi, kegiatan produksi maupun pemasaran. Sentra industri kreatif dirasakan penting sebagai jembatan yang mempermudah pelaku usaha, pemerintah, maupun pemodal untuk berkolaborasi, sehingga akan mempermudah proses pertemuan antara pelaku usaha, konsumen dan pemodal.

Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB Kota Medan secara akurat masih belum tersedia, menyebabkan kesulitan untuk menganalisa kontribusinya terhadap



pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Terkait dengan hal tersebut, dengan perlambatan ekonomi Kota Medan yang terjadi akibat Pandemi Covid-19, sulit untuk melakukan identifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dari sub sektor ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat, kontribusi sektor ekonomi kreatif belum dirasakan dampaknya, dilihat dari pelaku usaha ekonomi kreatif baru yang bermunculan. Dengan semakin banyaknya pelaku ekonomi kreatif akan berdampak bagi penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

6. Menjaga ketertiban dan ketentraman umum

Rasa aman dan nyaman merupakan satu faktor penting yang harus dapat diwujudkan ditengah kemajemukan masyarakat Kota Medan, baik dari segi suku etnis dan agama. Disamping sebagai modal pembangunan kemajemukan masyarakat Kota Medan dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Oleh Karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan penegakan peraturan-peraturan daerah untuk melindungi masyarakat sehingga muncul rasa aman dan tentram dalam lingkungan masyarakat.

7. Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Layanan Teknologi Informasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan tuntutan perubahan menuju kinerja pemerintahan yang lebih baik dengan melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama pada tata kelola sumber daya aparatur dan keuangan daerah. Poin penting reformasi birokrasi meliputi kurangnya profesionalitas aparatur, sarana dan prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik dan penataan sistem manajemen SDM.

Dalam hal pelayanan publik salah satu poin penting pengembangan adalah memberikan pelayanan yang mudah, murah dan dapat menjangkau seluruh khalayak. Oleh Karena itu memanfaatkan teknologi Komunikasi Informasi merupakan salah satu solusi menghadirkan layanan yang berkualitas tidak hanya untuk pelayanan publik tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.



Tabel 4.4
MATRIKS HUBUNGAN ISU ISU STRATEGIS NASIONAL, PROPINSI, KOTA DAN KLHS

NO	NASIONAL	PROPSU	RPJMD KOTA MEDAN	KLHS KOTA MEDAN
1	Pembangunan Infrastruktur	Infrastruktur	Layanan infrastruktur dasar perkotaan (sampah, air minum, drainase dan jalan)	Penanganan Kawasan Kumuh Belum Optimal
				Pengelolaan persampahan belum optimal
				Cakupan pelayanan angkutan transportasi umum masih rendah
		Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Penataan kawasan budaya serta heritage Kota Medan	Cakupan pelayanan angkutan transportasi umum masih rendah
				Kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau dan kurangnya kualitas pelayanan ruang publik dan lingkungan bantaran sungai
2	Pengembangan SDM	Kemiskinan pengangguran dan masalah sosial	Kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya	Kejahatan dan kekerasan dirasakan masyarakat
			Menjaga ketertiban dan ketentraman umum	Dampak kerugian ekonomi dari bencana alam
		Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan	Pola hidup sehat ibu dan kesehatan bayi dan anak
				Kekurangan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan tenaga medis dan jaminan kesehatan
			Partisipasi sekolah usia dini dan dasar masih belum maksimal	
3	Mendorong Investasi	Ketimpangan Pendapatan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kesempatan Kerja	Melambatnya pertumbuhan ekonomi, peran sektor pariwisata, manufaktur, dan UMKM
4	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Layanan Teknologi Informasi	Kemampuan pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah
5	Penggunaan APBN			



4.3 Penelaahan terhadap RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.5
Kebijakan Terkait RPJMD Propinsi dan Deli Serdang

No	Kab/Kota	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kabupaten Deli Serdang	2019-2024	Kerjasama Penanganan PMKS	<ul style="list-style-type: none">• MOU dengan Dinas Sosial Propinsi Sumut untuk pengembalian PMKS diluar Kota Medan• Penampungan PMKS di Panti Rehabilitasi Sosial Propinsi Sumut
			Kebijakan pelayanan terkait pelayanan dasar khususnya di daerah perbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang	Pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat domisili Kota Medan dengan administrasi kependudukan diluar Kota Medan
			Kebijakan terkait infrastruktur pelayanan dasar	pembangunan infrastruktur dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan, salah satunya ditandai dengan kemacetan lalu lintas pada segmen-segmen jalan yang berbatasan dengan Kota Medan, kerjasama penanganan sampah Kota Medan dan Deli Serdang



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Medan periode 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi misi dari Kepala Daerah terpilih dan akan menjadi pedoman dalam merumuskan program prioritas pembangunan Kota Medan. Disamping itu pernyataan visi juga akan menjadi pedoman arah pembangunan yang akan berdampak pada pilihan arah strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya di tahun 2026. Visi pembangunan Kota Medan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu-isu strategis dan dengan mempedomani pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global

Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Medan menjadi Kota yang Berkah,

Medan Kota yang Berkah adalah kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, baik lahir dan batin, juga menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu sebagai bagian dari kepedulian dan pengokohan sosial. Disamping itu menuju kota sejahtera yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan, kota yang bebas dari korupsi dan narkoba. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat untuk terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

2. Medan menjadi Kota yang Maju,

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Medan menjadi Kota yang Kondusif

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi



masyarakat, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong royong dalam pembangunan.

Kota Medan adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Tentu hal ini adalah satu berkah yang harus kita syukuri dan hal ini merupakan karunia Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa dan mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada manusia. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya dan beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan.

Tujuan pembangunan melibatkan seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas manusia dalam mencapai kesejahteraan umum. Fokus akhir dari pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan adalah pemerataan pembangunan dalam berbagai aspek pelayanan untuk terciptanya Medan yang Kondusif.

Pemerintahan kolaborasi sejauh ini dianggap sebagai model yang terbaik mengingat beban pemerintahan yang semakin kompleks utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publiknya, sehingga dibutuhkan kerjasama dan dukungan warga, dukungan politik dan dukungan pendanaan.

5.2. Misi

Dalam mewujudkan Visi “**Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif**” maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2021-2026

Misi 1 : Medan Berkah

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

Misi 2 : Medan Maju

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.



Misi 3 : Medan Bersih

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

Misi 4 : Medan Membangun

Melalui Misi Medan adalah membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Misi 5 : Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Misi 6 : Medan Inovatif

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, *teknologi digital* dan sosial budaya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

Untuk menjamin Konsistensi Perencanaan yang berkelanjutan maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan misi RPJPD dan misi RPJMD dapat dilihat dari bagan di bawah ini :

Tabel 5.1
Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Medan dan
Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

No	MISI RPJPD 2005-2025	No	MISI RPJMD 2021-2026
1	Mewujudkan kota yang aman, nyaman dan religius melalui pembangunan kota yang berkeadilan	1	Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
		5	Mewujudkan kenyamanan dan iklim Kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat



		7	Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air
2	Mewujudkan masyarakat kota yang berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, beriman dan bertaqwa serta mandiri	3	Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
		6	Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya
3	Mewujudkan prasarana dan sarana kota modern, handal, dan berwawasan lingkungan	2	Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua
4	Mewujudkan perekonomian kota yang tangguh dan dinamis	4	Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM

Untuk menjamin Konsistensi Perencanaan yang berkelanjutan maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 dan misi RPJMD dapat dilihat dari bagan di bawah ini :

Tabel 5.2
Keselarasn Misi Pada RPJMD Propinsi Sumatera Utara 2019-2023
dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026

No	MISI RPJMD Propinsi Sumatera Utara 2018-2023	No	MISI RPJMD Kota Medan 2021-2026
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga - harga yang terjangkau.	1	Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
		4	Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM



2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai	3	Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata
		7	Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri	2	Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.	5	Mewujudkan kenyamanan dan iklim Kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.	6	Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya

5.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan dan menjadi landasan dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai, visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peranan penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini :



- 1. Misi 1 Medan Berkah : Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat,**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.1. Meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah	Gini Rasio	1.1.1. Meningkatkan Pendapatan	1.1.1.1 Pendapatan perkapita
		1.1.2. Menurunnya Penduduk Miskin	1.1.2.1 Angka kemiskinan

Pencapaian Misi Medan Berkah telah diterjemaahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Medan Berkah adalah meningkatkan kepedulian sosial dalam menjalankan kehidupan yang berkah yang akan diukur dari pencapaian Indeks Gini Ratio

B. Sasaran

1. Meningkatkan Pendapatan.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran meningkatkan pendapatan adalah pendapatan perkapita.

2. Menurunnya Penduduk Miskin

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran menurunnya penduduk miskin adalah persentase angka kemiskinan.

- 2. Misi 2 Medan Maju : Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua.**



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
2. Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	2.1. Indeks Pembangunan Manusia	2.1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1.1.1 Indeks Pendidikan
		2.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.2.1 Indeks Kesehatan
		2.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	2.1.3.1 Pengeluaran per kapita

Pencapaian Misi Medan Maju telah diterjemaahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Medan Maju adalah Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan yang akan diukur dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

B. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Meningkatkan kualitas pendidikan adalah salah satu poin penting penyelenggaran pemerintahan daerah. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan adalah Indeks Pendidikan yang disusun dari komponen Rata Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Medan

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diukur dari pencapaian kinerja Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup)

3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Adapun inikator yang menggambarkan capaian dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah pengeluaran perkapita.

3. **Misi 3 Medan Bersih : Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.**



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	3.1. Indeks Reformasi Birokrasi	3.1.1 Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	3.1.1.1 Indeks Pelayanan Publik
			3.1.1.2 Indeks Transformasi Data Digital
		3.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	3.1.2.1 Opini BPK (-)
			3.1.2.2 Nilai Sakip (-)

Pencapaian Misi Medan Bersih telah diterjemaahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Medan Bersih adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel yang akan diukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kerjanya.

B. Sasaran

1. Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi.

Pemerintah Kota Medan berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan serta memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat Kota Medan. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian sasaran meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi adalah Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Transformasi Data Digital

2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pemerintah Kota Medan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah yang indikator capaian kinerja diukur dari Opini BPK dan Nilai Sakip.

4. **Misi 4 Medan Membangun : membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.**



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
4.1 Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni	4.1 Persentase Kawasan permukiman layak huni	4.1.1 Meningkatnya luas Kawasan permukiman layak huni	4.1.1.1 Luas Kawasan permukiman layak huni
4.2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	4.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	4.2.1 Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	4.2.2.1 Persentase luas RTH

Pencapaian Misi Medan Membangun telah diterjemaahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Medan Membangun adalah Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni yang akan diukur dengan persentase kawasan permukiman layak huni sebagai indikator kinerjanya.
2. Tujuan lain dari Misi Medan Membangun adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang akan diukur dari pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai indikator kinerjanya.

B. Sasaran

1. Meningkatnya Luas Kawasan Permukiman layak Huni. Untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran tersebut akan diukur dari luas kawasan permukiman layak huni.
2. Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau adalah prioritas pembangunan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. Untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran meningkatnya luasan ruang terbuka hijau diukur dari Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai indikator kinerjanya.

5. Misi 5 Medan Kondusif : Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
5 Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif	5.1 Persentase penurunan gangguan ketertiban umum	5.1.1 Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	5.1.1.1 Jumlah Gangguan ketertiban Umum



Pencapaian Misi Medan Kondusif telah diterjemaahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi Medan Kondusif adalah Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif. Untuk menggambarkan capaian terhadap tujuan maka diukur dari indikator kinerja persentase penurunan gangguan ketertiban umum.

B. Sasaran

1. Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang Kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat. Untuk menggambarkan capaian kinerja meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang Kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat adalah jumlah gangguan ketertiban umum sebagai indikator kerjanya.
6. Misi 6 Medan Inovatif : Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, *teknologi digital* dan sosial budaya.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi	6.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	6.1.1 Meningkatnya realisasi investasi	6.1.1.1 Nilai Investasi PMDN
			6.1.1.2 Nilai Investasi PMA
		6.1.2 Meningkatnya Inovasi Daerah	6.1.2.1 Indeks Inovasi Daerah

Pencapaian Misi Medan Inovatif telah diterjemaahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi Medan Inovatif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi. Untuk menggambarkan pencapaian tujuan ini maka diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebagai indikator kerjanya.

B. Sasaran

1. Meningkatnya realisasi investasi PMDN. Untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran adalah nilai investasi PMDN dan nilai investasi PMA sebagai indikator kerjanya.



2. Meningkatnya Inovasi Daerah. Untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran meningkatnya inovasi daerah. Maka diukur dari pencapaian Indeks Inovasi Daerah sebagai indikator kerjanya.

7. Misi 7 Medan Beridentitas : Mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
7.1 Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	7.1.1 Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya Kota Medan	7.1.1.1 Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda/perwal
			7.1.1.2 Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi (Kawasan)

Pencapaian Misi Medan Beridentitas telah diterjemaahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam Misi Medan Beridentitas adalah menciptakan Kota Medan sebagai kota pariwisata yang beridentitas dan berbudaya. Untuk menggambarkan pencapaian tujuan ini maka diukur dari Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata sebagai indikator kerjanya.

2. Sasaran

1. Meningkatnya kelestarian budaya Kota Medan. Untuk menggambarkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kelestarian budaya Kota Medan diukur dari jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda/Perwal dan jumlah kawasan cagar budaya yang direvitalisasi (kawasan) sebagai indikator kerjanya

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	MEDAN BERKAH	Meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah	Meningkatkan Pendapatan
			Menurunnya Penduduk Miskin
2	MEDAN BERKAH	Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	Meningkatnya kualitas pendidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat



			Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
3	MEDAN BERSIH	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi
			Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah
4	MEDAN MEMBANGUN	Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni	Meningkatnya luas kawasan permukiman layak huni
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau
5	MEDAN KONDUSIF	Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif	Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat
6	MEDAN INOVATIF	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi	meningkatnya realisasi investasi
			Meningkatnya Inovasi Daerah
7	MEDAN BERIDENTITAS	Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya	Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya Kota Medan

Untuk mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan didukung oleh modal dasar pembangunan yaitu :

- a) Posisi Kota Medan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara menjadikan Kota Medan memiliki nilai yang tinggi untuk pengembangan jasa khususnya di bidang perdagangan, industri dan jasa-jasa lainnya.
- b) Karakteristik masyarakat Kota Medan yang keras tetapi lebih menghargai kerukunan ditengah ragam adat budaya yang berbeda. Mengedepankan sikap bermusyawarah, bergotong royong dan memiliki nilai sosial yang tinggi serta empati dalam kehidupan bermasyarakat.
- c) Keanekaragaman budaya dan nilai sejarah Kota Medan yang merupakan Kota warisan Kolonial merupakan aspek yang harus tetap dijaga dan dilestarikan untuk memberikan kemakmuran bagi Masyarakat Kota Medan.



- d) Sumber daya manusia produktif sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Untuk Mencapai target Misi Medan Berkah diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut :



Untuk Mencapai target Misi Medan Maju diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut :





Untuk Mencapai target Misi Medan Bersih diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut :

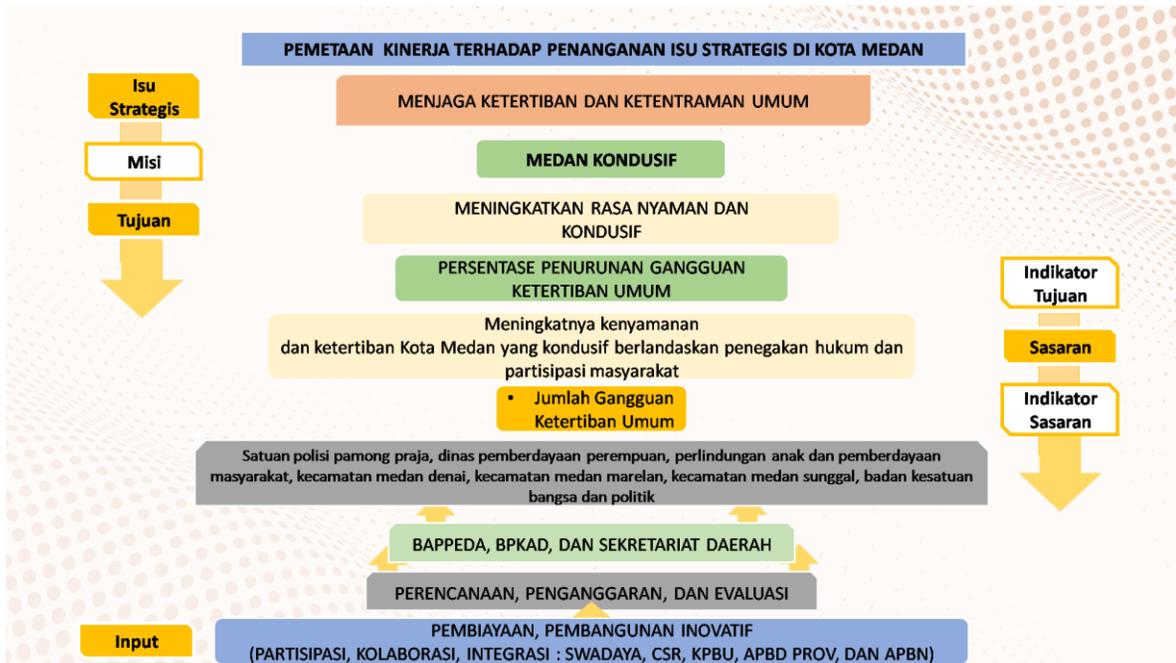


Untuk Mencapai target Misi Medan Membangun diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut :





Untuk Mencapai target Misi Medan Kondusif diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut :



Untuk Mencapai target Misi Medan Inovatif diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut :





Untuk Mencapai target Misi Medan Beridentitas diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut :





**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah
Kota Medan Tahun 2021 - 2026**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif											
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Medan Berkah											
	1.1. Meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah		Gini Rasio (Indeks)	0,35	0,326	0,322	0,319	0,315	0,312	0,308	0,308
		1.1.1. Meningkatkan Pendapatan	Pendapatan perkapita (Rupiah)	67.400.000	68.200.000	68.500.000	68.900.000	70.500.000	71.500.000	71.700.000	71.700.000
		1.1.2. Menurunnya Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan (%)	8,01	7,98	7,82	7,65	7,50	7,34	7,19	7,19
2. Medan Maju											
	2.1. Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	80,98	81,61	82,04	82,46	82,89	83,32	83,75	83,75
		2.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (Indeks)	11,39	11,4	11,41	11,42	11,42	11,43	11,44	11,44
		2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Indeks)	73,14	74	74,10	74,25	74,30	74,50	75,7	75,7
		2.1.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rupiah)	14.890.000	15.035.000	15.181.000	15.328.000	15.477.000	15.627.000	15.779.000	15.779.000
3. Medan Bersih											
	3.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Cc	Cc	B	B	BB	BB	A	A
		3.1.1. Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	N/A	B	B	B	A	A	A	A
			Indeks Transformasi Data Digital (Indeks)	N/A	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,95	0,95
		3.1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Opini BPK (-)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Sakip (Kategori/nilai)	Cc	B	BB	BB	BB	A	A	A
4. Medan Membangun											
	4.1. Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni-		Persentase kawasan permukiman layak huni, (%)	96,9	96,9	97,9	98,4	98,9	99,4	100	100
		4.1.1. Meningkatnya luas kawasan permukiman layak huni	Luas kawasan permukiman layak huni, (Ha)	25690,2	25690,2	25857,56	26021,52	26185,48	26349,08	26510	26510
	4.2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup,		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	57,60	57,60	57,82	58,05	58,27	58,5	58,72	58,72
		4.2.1. Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	Persentase luas RTH (%)	10	12	12,5	13	13,5	14	14,5	14,5
5. Medan Kondusif											
	5.1. Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif		Persentase penurunan gangguan ketertiban umum (%)	N/A	70	70	75	75	80	85	85
		5.1.1. Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum (Kasus)	29.146	26.000	23.000	20.000	18.000	16.000	14.000	14000
6. Medan Inovatif											
	6.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,98	3	4,13	5,69	5,76	5,88	5,98	5,98



Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif											
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		6.1.1. meningkatnya realisasi investasi	Nilai investasi PMDN- (Rp Juta)	4.127.638,60	4.334.020,53	4.550.21,56	4.778257,63	5.017.170,52	5.268.029,04	5.531.430,49	5.531.430,49
			Nilai investasi PMA, (US \$)	40.258,5	42.271,43	44.385,00	46.604,25	48.934,46	51381,18	53.950,24	53.950,24
		6.1.2. Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	57,14	57,14	62,5	75	77,7	88	94,17	94,17
7. Medan Beridentitas											
	7.1. Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya		Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (%)	2,72	2,86	3	3,07	3,15	3,23	3,31	72,5
		7.1.1. Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya Kota Medan	Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda / perwal (unit)	N/A	122	132	145	155	165	175	175
			Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi (Kawasan)	N/A	3	4	5	8	8	12	40



BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi menjabarkan rangkaian tahapan ataupun langkah langkah sistematis perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan melalui program prioritas indikatif yang selanjutnya diperjelas dengan kebijakan umum.

Untuk mendapatkan gambaran nyata bagaimana langkah-langkah strategi dilakukan dari waktu ke waktu. Arah kebijakan untuk membedah indikator capaian masing-masing sasaran. Sekaligus memandu rentang waktu penggunaan strategi dijalankan dalam kurun waktu 2021-2026 dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk itu diperlukan strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur.

Rumusan strategi yang disusun akan menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas dan kualitas akan terwujud jika perencanaan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan mengacu kepada misi pembangunan kota tahun 2021-2026 dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kota Medan. Strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Medan antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);



4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Medan disajikan seperti seperti berikut :



**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kota Medan Tahun 2021 - 2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan						
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif											
Misi 1 : Medan Berkah											
1	Meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah	1	Gini Rasio	1	Meningkatkan Pendapatan	1	Pendapatan perkapita	1	Meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kapasitas pelaku UMKM melalui pembentukan koperasi umat, pemberian bantuan fasilitas berdagang dan juga pemberian pelatihan gratis	1	Fasilitasi Pembuatan Akte Pendirian 50 unit koperasi Rumah Ibadah ke Notaris
										2	Melaksanakan Bimbingan Teknis Tentang Pembentukan dan Pendirian Koperasi serta penerbitan izin usaha KSP/USP
										3	Peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bantuan alat berjualan dan Pelatihan gratis (hard skill) bagi masyarakat
										4	Sosialisasi Sistem Online Single Submission (OSS) terkait Izin Usaha KSP/USP di 21 Kecamatan seta pelatihan gratis masyarakat di tingkat Kelurahan
			2	Menurunnya Penduduk Miskin	1	Angka Kemiskinan	1	Menurunkan Angka Kemiskinan	1	Fasilitasi Pembinaan dan Bantuan Pembuatan Akte Pendirian 50 unit koperasi Rumah Ibadah	
										2	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan
										3	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui koperasi umat (Koperasi Simpan Pinjam) dan juga melaksanakan pelatihan bagi masyarakat dimulai dari tingkat Kelurahan.
								2	Meningkatkan kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	1	Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu
										2	Meningkatkan pelaksanaan pembinaan, pemberian bantuan kesejahteraan sosial, dan kemandirian sosial ekonomi bagi penduduk miskin dan orang kurang mampu
										3	Meningkatkan pembinaan petugas kesejahteraan sosial dan fasilitasi bantuan kesejahteraan sosial
										4	Meningkatkan penyaluran jasa pelayanan masyarakat dan bantuan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
										5	Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan terhadap PMKS
										6	Pembangunan sistem pemuktahiran data fakir miskin dan orang tidak mampu



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				3 Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta tanggap darurat bencana alam dan sosial	1 Memitigasi bencana dan memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat
					2 Meningkatkan pembinaan dan kesiapsiagaan petugas tanggap bencana dan dalam penanganan korban bencana
					3 Meningkatkan penyediaan layanan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat yang termasuk dalam kelompok rentan
					4 Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan korban bencana selama tanggap darurat
					5 Optimalisasi penanganan korban pada saat tanggap darurat dan bantuan sosial kepada korban bencana
					6 Penguatan lintas sektor dan penanganan korban bencana selama tanggap darurat
Misi 2 : Medan Maju					
1 Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	1 Indeks Pembangunan Manusia	1 Meningkatnya kualitas pendidikan	1 Indeks Pendidikan	1 Meningkatkan Mutu Infrastruktur, sarana dan prasarana Pendidikan	1 Mewujudkan akses pelayanan pendidikan yang merata, modern dan berkualitas melalui penyediaan infrastruktur PAUD di kecamatan
					2 Mewujudkan infrastruktur sekolah dasar negeri kota Medan yang berkualitas melalui rehabilitasi ruang kelas.
					3 Mewujudkan infrastruktur sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan sekolah.
					4 Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP negeri kota Medan berkualitas melalui penyediaan mobiler ruang kelas yang kreatif serta modern.
					5 Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar negeri kota Medan berkualitas melalui penyediaan alat peraga pembelajaran yang kreatif serta modern.
					6 Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui penyediaan peralatan laboratorium komputer dan kimia yang modern
				2 Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	1 Mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan layanan pendidikan berbasis media digital yang efektif dan modern
					2 Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberian apresiasi bagi kepala sekolah, guru dan siswa berprestasi
					3 Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru bersertifikat dalam menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran
					4 Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi kurikulum dan asesmen nasional bagi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat sekolah dasar di kota Medan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					5 Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah.
					6 Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi pendidik dan peningkatan kesejahteraan bagi siswa miskin tingkat SD dan SMP di kota Medan
		2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Indeks Kesehatan	1 Meningkatkan akses layanan kesehatan rujukan	1 Mewujudkan pembangunan dan rehabilitasi Rumah sakit Umum Daerah
					2 Optimalisasi layanan rujukan di masyarakat
					3 Pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah
					4 Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
					5 Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine
					6 Pengembangan layanan dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
				2 Mendorong pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan keluarga berkualitas	1 Memperkuat pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
					2 Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi
					3 Meningkatkan advokasi dan penggerakan program Bangga Kencana
					4 Meningkatkan advokasi pada stakeholder dan komitmen lintas sektor pengendalian penduduk
					5 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di setiap wilayah
					6 Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi serta pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
				3 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	1 Mendorong efektivitas penanganan kejadian luar biasa dan pandemi bagi yang masyarakat
					2 Mendorongnya penurunan angka kesakitan dan kematian disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular
					3 Optimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan
					4 Pencegahan dan pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan pandemi
					5 Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit
					6 Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				4 Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan jaminan kesehatan semesta	1 Mewujudkan jaminan kesehatan semesta/universal health coverage
					2 Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan termasuk kerjasama pemerintah dan swasta
					3 Pengintergrasian pendataan dan pembiayaan jaminan kesehatan dari lintas sektor
					4 Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat
					5 Peningkatan pembiayaan kesehatan publik dan peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian universal health coverage (UHC)
					6 Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi pencapaian Universal health coverage (UHC)
				5 Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	1 Optimalisasi upaya peningkatan gizi masyarakat
					2 Penguatan lintas sektor dalam intervensi sensitif dan spesifik dalam penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat
					3 Peningkatan akses dan mutu layanan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, dan peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat
					4 Peningkatan pencegahan dan penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat
					5 Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan dan gizi masyarakat
					6 Peningkatan surveilans gizi dan pemantauan tumbuh kembang
				6 Meningkatkan mutu layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan yang terstandarisasi dan didukung dengan sistem informasi teknologi	1 Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan sesuai dengan standar yang ada
					2 Pengembangan digitalisasi layanan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan
					3 Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mulai dari fasilitas layanan primer hingga rujukan, pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer.
					4 Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi kesehatan
					5 Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi
					6 Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi pendidikan, dan pelatihan seluruh jenis tenaga kesehatan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1 Pengeluaran per kapita	1 Meningkatkan pemberdayaan kelompok produktif di masyarakat	1 Mendorong peningkatan keberdayaan usaha kelompok produktif di masyarakat (PKK, LPM, dan Karang Taruna)
					2 Meningkatkan fasilitasi pengembangan kelompok produktif di masyarakat
					3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan
					4 Meningkatkan pembinaan kelompok produktif di masyarakat (PKK, LPM, dan Karang Taruna)
					5 Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat
Misi 3 : Medan Bersih					
1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	1 Indeks Reformasi Birokrasi	1 Meningkatkan layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan.	1 " Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) "
					2 Meningkatkan inovasi untuk dapat mendukung pelayanan terpadu satu pintu
					3 Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima
					4 Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan
					5 Pembinaan terhadap industri yang menerapkan pemberlakuan standarisasi industri
					6 Pengembangan Kompetensi dan Kapabilitas ASN Bidang Perizinan, Industri
				2 Meningkatkan akses dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	1 Kolaborasi dan integrasi sharing database kependudukan dengan lembaga pelayanan publik yang bersifat horizontal
					2 Memperluas jaringan pelayanan administrasi kependudukan ditingkat kelurahan
					3 Mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan secara online dan anjungan dukcapil mandiri serta pengembangan aplikasi
					4 Pembangunan zona integritas pelayanan publik administrasi kependudukan
					5 Pengembangan digitalisasi layanan administrasi kependudukan
					6 Penyediaan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik dan rehabilitasi mobil pelayanan keliling adminstrasi kependudukan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				3 Pembangunan transformasi data digital di Kota Medan untuk dapat berbagi pakai data digital dalam rangka mewujudkan Medan Satu Data	1 identifikasi dan membuat daftar data dan daftar data prioritas dari masing-masing OPD dan stakeholder di Kota Medan terkait 3 jenis data utama yaitu; data geospasial/keruangan, data keuangan, dan data statistik yang akan di transformasi menjadi data digital
					2 menyiapkan flatform berbagi pakai data yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak
					3 menyiapkan SOP pengumpulan data dari masing-masing OPD dan stakeholder terkait di Kota Medan
					4 pemanfaatan data digital antar instansi pemerintah di Kota Medan
					5 penyebaran data digital melalui portal satu data Kota Medan
					6 penyimpanan dan pengamanan data digital (data geospasial, statistik, dan keuangan)
		2 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	1 Nilai Sakip	1 Pemanfaatan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai perwujudan standar tata kelola pemerintah yang lebih baik, bersih, dan transparan	1 Mendorong peningkatan kapasitas APIP
					2 Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
					3 Mendorong terciptanya Zona Integritas WBK menuju WBM
					4 Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah
					5 Meningkatkan pencapaian kinerja dalam percepatan pembangunan
				2 Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	1 Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah
					2 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
					3 Pendampingan kepada OPD terhadap penyusunan laporan keuangan Pemda
					4 Peningkatan Kompetensi ASN Bimbingan Teknis kepada Pengurus Barang
					5 Peningkatan Kompetensi ASN dengan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan
					6 Peningkatan Koordinasi Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah

Misi 4 : Medan Membangun



Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
1	Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni-	1	Persentase kawasan permukiman layak huni,	1	Meningkatnya luas kawasan permukiman layak huni	1	Luas kawasan permukiman layak huni,	1	kolaborasi dan sinergitas program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan stakeholders terkait lainnya	1	identifikasi baseline dan anggaran terhadap indikator yang mempengaruhi kawasan layak huni di Kota Medan
										2	kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya
										3	menyiapkan perencanaan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan
										4	Optimalisasi kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat,Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya
										5	penuntasan indikator-indikator penentu agar tercapainya Kota Medan menjadi Kota Layak Huni dan perhitungan baseline akhir terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi
										6	percepatan peningkatan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kawasan layak huni 100% di kota medan
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup,	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	1	Persentase luas RTH	1	meningkatkan kuantitas RTH private melalui penerapan SOP imlementasi peraturan IMB dan pembebasan lahan masyarakat untuk meningkatkan kuantitas RTH Publik	1	melengkapi spesifikasi peraturan dalam rangka implementasi peraturan IMB dan pembebasan tanah masyarakat untuk dikonversi menjadi RTH
										2	mengoptimalkan lahan SPBU menjadi RTH Taman Kota dan membebaskan lahan masyarakat
										3	meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, optimalisasi kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, danau dan KA) untuk dimanfaatkan sebagai RTH dan pembebasan tanah milik masyarakat
										4	meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, penanaman pohon pada jalur hijau dan pembebasan tanah milik masyarakat
										5	Peningkatan kepatuhan dan jumlah pengembang perumahan dalam mengimplementasikan peraturan IMB dan menyerahterimakan PSU untuk dikelola oleh Pemerintah Kota Medan

Misi 5 : Medan Kondusif



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif	1 Persentase penurunan gangguan ketertiban umum	1 Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	1 Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	1 Meningkatkan Komunikasi dan kolaborasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	1 Mewujudkan Kota yang nyaman, tertib dan kondusif serta menurunnya angka kriminalitas
					2 Peningkatan kerjasama 3 pilar dimulai dari tingkat kelurahan
					3 Peningkatan kerjasama forkopimda dengan komunitas dalam menekan angka kriminalitas
					4 Peningkatan komunikasi dan koordinasi intensitas gangguan keamanan, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya
					5 Peningkatan komunikasi dan koordinasi stabilitas daerah
				2 Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban kota yang kondusif berlandaskan hukum	1 Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)
					2 Mendorong penertiban yang Persuasif dan Humanis
					3 Mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan akan gangguan ketertiban dan ketentraman
					4 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan
					5 Peningkatan sosialisasi peraturan daerah
				3 Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Kota Medan sebagai Warga Negara Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	1 Mendorong kerjasama masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba
					2 Mendorong percepatan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
					3 Mendorong tumbuh kembangnya pemuda melalui peningkatan aktivitas produktif
					4 Mengidentifikasi kelurahan-kelurahan rawan narkoba
					5 Meningkatkan kerjasama dengan komunitas-komunitas kreatif dalam membangun kelurahan bebas narkoba



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
					6 meningkatkan kerjasama kelompok produktif dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan rawan narkoba
Misi 6 : Medan Inovatif					
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	1 meningkatnya realisasi investasi	1 Nilai investasi PMDN-	1 Meningkatkan pelayanan perizinan melalui kemudahan berinvestasi dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, pemberian fasilitas bagi industri kecil serta mendorong peningkatan ekonomi kreatif masyarakat melalui kebijakan dan program pariwisata yang berkualitas	1 " Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) sekaligus Pengembangan Produk Unggulan Kota Medan "
					2 Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (HAKI)
					3 Meningkatkan Iklim Berinvestasi di Kota Medan
					4 Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN terkait Perizinan dan Industri dan Pariwisata
					5 Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan IKM, serta meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisata
					6 Pengembangan Sentra IKM dan Penguatan komunitas kreatif kota medan sebagai stakeholder kepariwisataan
			2 Nilai investasi PMA,	2 Meningkatkan promosi investasi yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan potensi dan peluang investasi.	1 " Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan"
					2 "Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Medan melalui berbagai media "
					3 Meningkatkan daya saing dan akses pasar
					4 Meningkatkan penanaman modal dibidang usaha yang menyerap tenaga kerja
					5 Meningkatkan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor
					6 Meningkatkan produktivitas penanaman modal



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2 Meningkatkan Inovasi Daerah	1 Indeks Inovasi Daerah	1 Meningkatkan jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga penelitian kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga-lembaga litbang di Kota Medan dan masyarakat disertai dengan pemberian penghargaan terhadap hasil-hasil penelitian	1 Meningkatkan koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan
					2 Meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan
				2 Meningkatkan kompetensi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah, sdm litbang dan dukungan sarana dan prasarana	1 Meningkatkan kemampuan dalam penyediaan database informasi dan data statistik lainnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai
					2 Meningkatkan ketersediaan aparatur dan tenaga peneliti yang handal dan profesional
					3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dengan akses publikasi yang cukup mudah dan cepat bagi semua stakeholders
					4 Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan
Misi 7 : Medan Beridentitas					
1 Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya	1 Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	1 Meningkatkan pariwisata yang berbasis budaya Kota Medan	1 Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda / perwal	1 Meningkatkan cakupan cagar budaya dan kebudayaan yang dilindungi, dipelihara dan dibina	1 Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas
					2 Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebagai warisan budaya nasional
					3 Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Watisan Cagar Budaya
					4 Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Cagar Budaya
					5 Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penyediaan tempat / wadah kesenian



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2 Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi	2 menyusun kebijakan umum untuk perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan alam dengan mengintegrasikan perlindungan cagar budaya tersebut ke program perencanaan yang komprehensif	1 melakukan langkah-langkah hukum, ilmiah, teknis, administrasi dan keuangan yang memadai yang diperlukan untuk identifikasi, perlindungan, pelestarian, presentasi dan rehabilitasi cagar budaya.
					2 melakukan pembentukan atau mengembangkan pusat-pusat kajian ilmiah lokal untuk pelatihan dalam perlindungan, pelestarian dan penyajian cagar budaya agar mampu mendorong penelitian ilmiah di bidang cagar budaya
					3 melakukan sinergitas bersama pemerintah pusat, provinsi dan lembaga penelitian untuk melakukan usaha bersama dalam melakukan dokumentasi benda cagar budaya
					4 mengembangkan studi ilmiah dan teknis, penelitian dan melakukan usaha maksimal sehingga mampu mengantisipasi potensi bahaya yang mengancam cagar budaya
					5 mengoptimalkan peranan TACB dalam melakukan sidang-sidang komite benda cagar budaya
					6 tersusunnya peraturan daerah, pedoman umum dan petunjuk teknis serta indikasi program yang melekat pada renstra dan renja OPD.
				3 Menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat	1 Implementasi fisik dalam rangka merevitalisasi kawasan cagar budaya
					2 Lanjutan revitalisasi kawasan cagar budaya Kota Medan
					3 menyusun delinasi kawasan cagar budaya dan memberikan perlindungan yang tepat pada kawasan cagar budaya melalui penyediaan zona penyangga atau (buffer zones)
					4 menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan terhadap masing-masing kawasan cagar budaya yang berpayung hukum (perwal)
					5 Pengintegrasian revitalisasi kawasan cagar budaya dan pengembangan kepariwisataan Kota Medan (city branding, calender event, dll)
					6 sinergitas bersama OPD dan Badan Usaha melalui kegiatan yang berkesinambungan sebagaimana indikasi program yang ditetapkan pada Perwal RTB:



Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan, dapat dirumuskan tema/fokus tahunan pembangunan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagai landasan penyusunan RKPD tahunan selama periode 2021-2026:

TEMA PEMBANGUNAN RPJMD KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026				
2022	2023	2024	2025	2026
AKSELERASI PEMULIHAN EKONOMI KOTA MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, PELAYANAN DASAR DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENUJU MEDAN BERKAH, MAJU, DAN KONDUSIF	MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, UNTUK MENUJU MEDAN BERKAH YANG MAJU, DAN KONDUSIF	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL MENUJU MEDAN BERKAH YANG MAJU DAN KONDUSIF	PEMANTAPAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIC DAN PEREKONOMIAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MENUJU MEDAN BERKAH YANG MAJU DAN KONDUSIF	MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH MAJU DAN KONDUSIF



**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kota Medan Tahun 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif								
Misi 1 : Medan Berkah								
1.1. Meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah	1.1.1. Meningkatkan Pendapatan	1.1.1.1. Meningkatkan pendapatan rumah tangga dan kapasitas pelaku UMKM melalui pembentukan koperasi umat, pemberian bantuan fasilitas berdagang dan juga pemberian pelatihan gratis	Sosialisasi Sistem Online Single Submission (OSS) terkait Izin Usaha KSP/USP di 21 Kecamatan seta pelatihan gratis masyarakat di tingkat Kelurahan	Melaksanakan Bimbingan Teknis Tentang Pembentukan dan Pendirian Koperasi serta penerbitan izin usaha KSP/USP	Fasilitasi Pembuatan Akte Pendirian 50 unit koperasi Rumah Ibadah ke Notaris	Peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bantuan alat berjualan dan Pelatihan gratis (hard skill) bagi masyarakat	Peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bantuan alat berjualan dan Pelatihan gratis (hard skill) bagi masyarakat	Peningkatan pendapatan rumah tangga dengan bantuan alat berjualan dan Pelatihan gratis (hard skill) bagi masyarakat
	1.1.2. Menurunnya Penduduk Miskin	1.1.2.1. Meningkatkan kesejahteraan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Mengoptimalkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin dan orang tidak mampu	Meningkatkan penyaluran jasa pelayanan masyarakat dan bantuan kesejahteraan sosial bagi masyarakat	Pembangunan sistem pemuktahiran data fakir miskin dan orang tidak mampu	Meningkatkan pembinaan petugas kesejahteraan sosial dan fasilitasi bantuan kesejahteraan sosial	Meningkatkan pelaksanaan pembinaan, pemberian bantuan kesejahteraan sosial, dan kemandirian sosial ekonomi bagi penduduk miskin dan orang kurang mampu	Optimalisasi pembinaan dan pemberdayaan terhadap PMKS
		1.1.2.2. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta tanggap darurat bencana alam dan sosial	Memitigasi bencana dan memberikan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat	Meningkatkan pembinaan dan kesiapsiagaan petugas tanggap bencana dan dalam penanganan korban bencana	Meningkatkan penyediaan layanan bantuan sosial kepada korban bencana selama tanggap darurat yang termasuk dalam kelompok rentan	Penguatan lintas sektor dan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	Meningkatkan sarana dan prasarana penanganan korban bencana selama tanggap darurat	Optimalisasi penanganan korban pada saat tanggap darurat dan bantuan sosial kepada korban bencana



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		1.1.2.3. Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui koperasi umat (Koperasi Simpan Pinjam) dan juga melaksanakan pelatihan bagi masyarakat dimulai dari tingkat Kelurahan.	Fasilitasi Pembinaan dan Bantuan Pembuatan Akte Pendirian 50 unit koperasi Rumah Ibadah	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan	Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan bantuan alat berjualan
Misi 2 : Medan Maju								
2.1. Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	2.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan	2.1.1.1. Meningkatkan Mutu Infrastruktur, sarana dan prasarana Pendidikan	Mewujudkan infrastruktur sekolah dasar negeri kota Medan yang berkualitas melalui rehabilitasi ruang kelas.	Mewujudkan infrastruktur sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan sekolah.	Mewujudkan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama negeri kota Medan yang berkualitas, melalui penyediaan peralatan laboratorium komputer dan kimia yang modern	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP negeri kota Medan berkualitas melalui penyediaan mobiler ruang kelas yang kreatif serta modern.	Mewujudkan akses pelayanan pendidikan yang merata, modern dan berkualitas melalui penyediaan infrastruktur PAUD di kecamatan	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar negeri kota Medan berkualitas melalui penyediaan alat peraga pembelajaran yang kreatif serta modern.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		2.1.1.2. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi pendidik dan peningkatan kesejahteraan bagi siswa miskin tingkat SD dan SMP di kota Medan	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi manajerial kepala sekolah.	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru bersertifikat dalam menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi kurikulum dan asesmen nasional bagi pendidik dan tenaga kependidikan tingkat sekolah dasar di kota Medan	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan layanan pendidikan berbasis media digital yang efektif dan modern	Mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberian apresiasi bagi kepala sekolah, guru dan siswa berprestasi
	2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.2.1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan yang terstandarisasi dan didukung dengan sistem informasi teknologi	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mulai dari fasilitas layanan primer hingga rujukan, pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer.	Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi kesehatan	Peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi pendidikan, dan pelatihan seluruh jenis tenaga kesehatan	Mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan sesuai dengan standar yang ada	Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi	Pengembangan digitalisasi layanan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan
		2.1.2.2. Meningkatkan akses layanan kesehatan rujukan	Mewujudkan pembangunan dan rehabilitasi Rumah sakit Umum Daerah	Pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, telemedicine	Pengembangan layanan dan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	Optimalisasi layanan rujukan di masyarakat



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		2.1.2.3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat	Peningkatan surveilans gizi dan pemantauan tumbuh kembang	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat	Peningkatan akses dan mutu layanan berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, dan peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat	Peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan dan gizi masyarakat	Penguatan lintas sektor dalam intervensi sensitif dan spesifik dalam penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat	Optimalisasi upaya peningkatan gizi masyarakat
		2.1.2.4. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit	Pencegahan dan pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan pandemi	Mendorong efektivitas penanganan kejadian luar biasa dan pandemi bagi yang masyarakat	Mendorongnya penurunan angka kesakitan dan kematian disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit	Optimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan
		2.1.2.5. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan jaminan kesehatan semesta	Peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat	Pengintergrasian pendataan dan pembiayaan jaminan kesehatan dari lintas sektor	Peningkatan pembiayaan kesehatan publik dan peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian universal health coverage (UHC)	Pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan termasuk kerjasama pemerintah dan swasta	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi pencapaian Universal health coverage (UHC)	Mewujudkan jaminan kesehatan semesta/universal health coverage
		2.1.2.6. Mendorong pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan keluarga berkualitas	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) di setiap wilayah	Meningkatkan advokasi dan penggerakan program Bangsa Kencana	Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi	Memperkuat paduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi serta pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan advokasi pada stakeholder dan komitmen lintas sektor pengendalian penduduk



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	2.1.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2.1.3.1. Meningkatkan pemberdayaan kelompok produktif di masyarakat	Meningkatkan pembinaan kelompok produktif di masyarakat (PKK, LPM, dan Karang Taruna)	Meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Meningkatkan fasilitasi pengembangan kelompok produktif di masyarakat	Mendorong peningkatan keberdayaan usaha kelompok produktif di masyarakat (PKK, LPM, dan Karang Taruna)
Misi 3 : Medan Bersih								
3.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	3.1.1. Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	3.1.1.1. Meningkatkan akses dan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi	Mendorong peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan secara online dan anjungan dukcapil mandiri serta pengembangan aplikasi	Pembangunan zona integritas pelayanan publik administrasi kependudukan	Memperluas jaringan pelayanan administrasi kependudukan ditingkat kelurahan	Penyediaan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik dan rehabilitasi mobil pelayanan keliling administrasi kependudukan	Kolaborasi dan integrasi sharing database kependudukan dengan lembaga pelayanan publik yang bersifat horizontal	Pengembangan digitalisasi layanan administrasi kependudukan
		3.1.1.2. Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan.	Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Kemudahan Berinvestasi dan Penyederhanaan Proses Perizinan	" Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) "	Pembinaan terhadap industri yang menerapkan pemberlakuan standarisasi industri	Pengembangan Kompetensi dan Kapabilitas ASN Bidang Perizinan, Industri	Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima	Meningkatkan inovasi untuk dapat mendukung pelayanan terpadu satu pintu



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3.1.1.3. Pembangunan transformasi data digital di Kota Medan untuk dapat berbagi pakai data digital dalam rangka mewujudkan Medan Satu Data	identifikasi dan membuat daftar data dan daftar data prioritas dari masing-masing OPD dan stakeholder di Kota Medan terkait 3 jenis data utama yaitu; data geospasial/keruangan, data keuangan, dan data statistik yang akan di transformasi menjadi data digital	menyiapkan SOP pengumpulan data dari masing-masing OPD dan stakeholder terkait di Kota Medan	penyimpanan dan pengamanan data digital (data geospasial, statistik, dan keuangan)	menyiapkan platform berbagi pakai data yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak	penyebarluasan data digital melalui portal satu data Kota Medan	pemanfaatan data digital antar instansi pemerintah di Kota Medan
	3.1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	3.1.2.1. Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja	Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Koordinasi Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kompetensi ASN dengan Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan	Peningkatan Kompetensi ASN Bimbingan Teknis kepada Pengurus Barang	Pendampingan kepada OPD terhadap penyusunan laporan keuangan Pemda
		3.1.2.2. Pemanfaatan digitalisasi tata kelola pemerintahan sebagai perwujudan standar tata kelola pemerintah yang lebih baik, bersih, dan transparan	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah	Mendorong peningkatan kapasitas APIP	Mendorong terciptanya Zona Integritas WBK menuju WBM	Meningkatkan pencapaian kinerja dalam percepatan pembangunan	Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Mendorong terciptanya akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
Misi 4 : Medan Membangun								



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
4.1. Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni-	4.1.1. Meningkatnya luas kawasan permukiman layak huni	4.1.1.1. kolaborasi dan sinergitas program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders terkait lainnya	identifikasi baseline dan anggaran terhadap indikator yang mempengaruhi kawasan layak huni di Kota Medan	menyiapkan perencanaan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan	kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya	Optimalisasi kolaborasi program dan kegiatan peningkatan kawasan layak huni di Kota Medan bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan stakeholders lainnya	percepatan peningkatan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kawasan layak huni 100% di kota medan	penuntasan indikator-indikator penentu agar tercapainya Kota Medan menjadi Kota Layak Huni dan perhitungan baseline akhir terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi
4.2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup,	4.2.1. Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	4.2.1.1. meningkatkan kuantitas RTH private melalui penerapan SOP implementasi peraturan IMB dan pembebasan lahan masyarakat untuk meningkatkan kuantitas RTH Publik	melengkapi spesifikasi peraturan dalam rangka implementasi peraturan IMB dan pembebasan tanah masyarakat untuk dikonversi menjadi RTH	meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, penanaman pohon pada jalur hijau dan pembebasan tanah milik masyarakat	meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, optimalisasi kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, danau dan KA) untuk dimanfaatkan sebagai RTH dan pembebasan tanah milik masyarakat	meningkatkan pengawasan masyarakat atas kepatuhan dalam implementasi peraturan IMB, optimalisasi kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, danau dan KA) untuk dimanfaatkan sebagai RTH dan pembebasan tanah milik masyarakat	mengoptimalkan lahan SPBU menjadi RTH Taman Kota dan membebaskan lahan masyarakat	Peningkatan kepatuhan dan jumlah pengembang perumahan dalam mengimplementasikan peraturan IMB dan menyerahtherimakan PSU untuk dikelola oleh Pemerintah Kota Medan
Misi 5 : Medan Kondusif								
5.1. Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif	5.1.1. Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	5.1.1.1. Meningkatkan kenyamanan dan ketertiban kota yang kondusif berlandaskan hukum	Mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan akan gangguan ketertiban dan ketentraman	Mendorong penertiban yang Persuasif dan Humanis	Peningkatan sosialisasi peraturan daerah	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam Teknik pencegahan Kejahatan	Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	Mendorong penegakan peraturan daerah dan penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		5.1.1.2. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Kota Medan sebagai Warga Negara Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Mengidentifikasi kelurahan-kelurahan rawan narkoba	Mendorong kerjasama masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba	Meningkatkan kerjasama dengan komunitas-komunitas kreatif dalam membangun kelurahan bebas narkoba	meningkatkan kerjasama kelompok produktif dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan rawan narkoba	Mendorong tumbuh kembangnya pemuda melalui peningkatan aktivitas produktif	Mendorong percepatan pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
		5.1.1.3. Meningkatkan Komunikasi dan kolaborasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Peningkatan kerjasama forkopimda dengan komunitas dalam menekan angka kriminalitas	Peningkatan kerjasama 3 pilar dimulai dari tingkat kelurahan	Peningkatan kerjasama 3 pilar dimulai dari tingkat kelurahan	Peningkatan komunikasi dan koordinasi stabilitas daerah	Peningkatan komunikasi dan koordinasi intensitas gangguan keamanan, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya	Mewujudkan Kota yang nyaman, tertib dan kondusif serta menurunnya angka kriminalitas
Misi 6 : Medan Inovatif								
6.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi	6.1.1. meningkatnya realisasi investasi	6.1.1.1. Meningkatkan pelayanan perizinan melalui kemudahan berinvestasi dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan, pemberian fasilitas bagi industri kecil serta mendorong peningkatan ekonomi kreatif masyarakat melalui kebijakan dan program pariwisata yang berkualitas	Meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas ASN terkait Perizinan dan Industri dan Pariwisata	" Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS) sekaligus Pengembangan Produk Unggulan Kota Medan "	Mengembangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (HAKI)	Pengembangan Sentra IKM dan Penguatan komunitas kreatif kota medan sebagai stakeholder kepariwisataan	Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pembinaan IKM, serta meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM Kepariwisataa	Meningkatkan Iklim Berinvestasi di Kota Medan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		6.1.1.2. Meningkatkan promosi investasi yang lebih efisien dan efektif serta mengembangkan potensi dan peluang investasi.	"Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Kota Medan melalui berbagai media "	" Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan"	Meningkatkan penanaman modal dibidang usaha yang menyerap tenaga kerja	Meningkatkan produktivitas penanaman modal	Meningkatkan daya saing dan akses pasar	Meningkatkan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor
	6.1.2. Meningkatnya Inovasi Daerah	6.1.2.1. Meningkatkan kompetensi kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah, sdm litbang dan dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya ketersediaan aparatur dan tenaga peneliti yang handal dan profesional	Meningkatnya kemampuan dalam penyediaan database informasi dan data statistik lainnya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dengan akses publikasi yang cukup mudah dan cepat bagi semua stakeholders	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan termutakhir dan Balitbang berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan Pemko Medan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		6.1.2.2. Meningkatkan jaringan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga penelitian kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga-lembaga litbang di Kota Medan dan masyarakat disertai dengan pemberian penghargaan terhadap hasil-hasil penelitian	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemko Medan terutama yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan serta meningkatnya mutu penelitian dan pengembangan	Meningkatnya koordinasi antar lembaga-lembaga penelitian di Kota Medan maupun diluar Daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan
Misi 7 : Medan Beridentitas								
7.1. Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya	7.1.1. Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya Kota Medan	7.1.1.1. Meningkatkan cakupan cagar budaya dan kebudayaan yang dilindungi, dipelihara dan dibina	Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas	Meningkatkan cakupan cagar budaya yang dilindungi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap sanggar budaya untuk menciptakan kelompok-kelompok penggiat kebudayaan yang berkualitas dan mampu menjadi wadah penyalur kreativitas	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penediaan tempat / wadah kesenian	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sebagai warisan budaya nasional	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Cagar Budaya	Meningkatkan pelestarian budaya kota Medan dengan penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan Wawasan Cagar Budaya



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		7.1.1.2. menyusun kebijakan umum untuk perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan alam dengan mengintegrasikan perlindungan cagar budaya tersebut ke program perencanaan yang komprehensif	mengembangkan studi ilmiah dan teknis, penelitian dan melakukan usaha maksimal sehingga mampu mengantisipasi potensi bahaya yang mengancam cagar budaya	melakukan langkah-langkah hukum, ilmiah, teknis, administrasi dan keuangan yang memadai yang diperlukan untuk identifikasi, perlindungan, pelestarian, presentasi dan rehabilitasi cagar budaya.	melakukan pembentukan atau mengembangkan pusat-pusat kajian ilmiah lokal untuk pelatihan dalam perlindungan, pelestarian dan penyajian cagar budaya agar mampu mendorong penelitian ilmiah di bidang cagar budaya	melakukan sinergitas bersama pemerintah pusat, provinsi dan lembaga penelitian untuk melakukan usaha bersama dalam melakukan dokumentasi benda cagar budaya	mengoptimalkan peranan TACB dalam melakukan sidang-sidang komite benda cagar budaya	tersusunnya peraturan daerah, pedoman umum dan petunjuk teknis serta indikasi program yang melekat pada renstra dan renja OPD.
		7.1.1.3. Menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat	menyusun delinasi kawasan cagar budaya dan memberikan perlindungan yang tepat pada kawasan cagar budaya melalui penyediaan zona penyangga atau (buffer zones)	menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan terhadap masing-masing kawasan cagar budaya yang berpayung hukum (perwal)	sinergitas bersama OPD dan Badan Usaha melalui kegiatan yang berkesinambungan sebagaimana indikasi program yang ditetapkan pada Perwal RTB:	Implementasi fisik dalam rangka merevitalisasi kawasan cagar budaya	Pengintegrasian revitalisasi kawasan cagar budaya dan pengembangan kepariwisataan Kota Medan (city branding, calender event, dll)	Lanjutan revitalisasi kawasan cagar budaya Kota Medan



6.2 Program Pembangunan Daerah

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah serta strategi dan arah kebijakannya. Program Pembangunan Daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam implementasinya program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun yang menjadi program prioritas pembangunan daerah 2021-2026 adalah untuk menjawab isu strategis :

1. Kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya
2. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan
3. Layanan infrastruktur dasar perkotaan (jalan,sampah, air minumdan drainase)
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kesempatan Kerja
5. Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Layanan Teknologi Informasi
6. Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Penataan kawasan budaya serta heritage Kota Medan
7. Menjaga ketertiban dan ketentraman umum

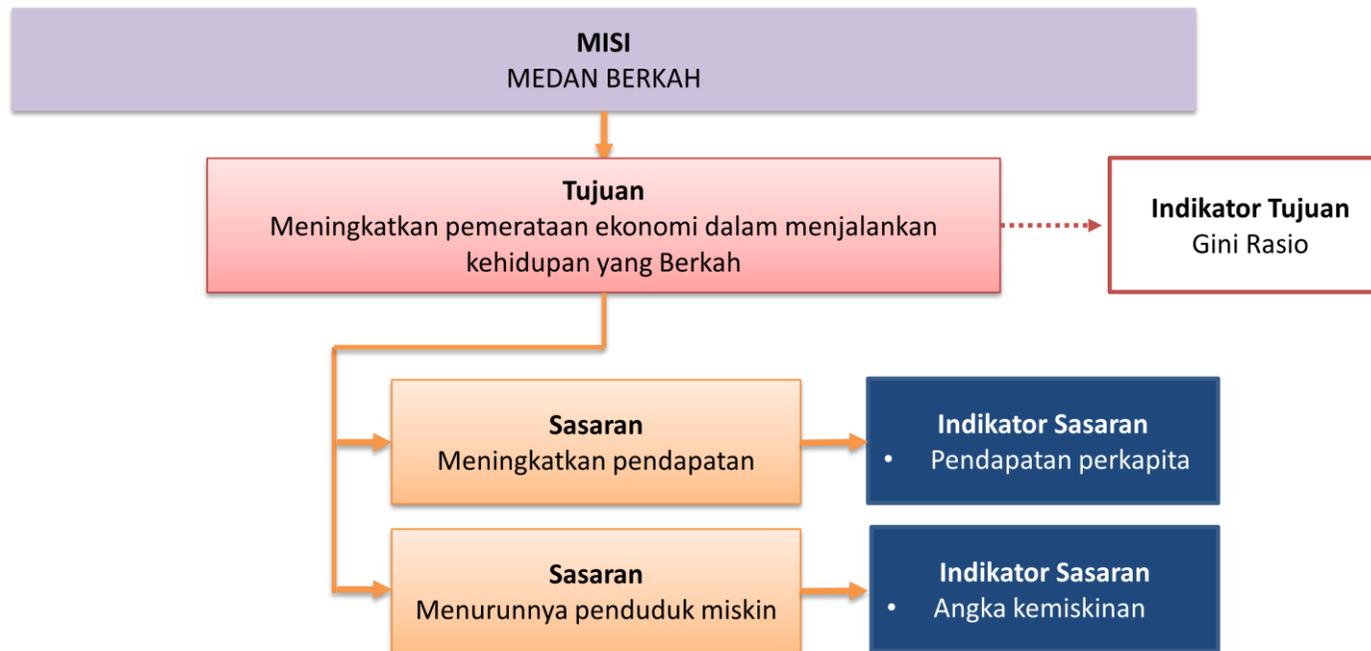
Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang diturunkan kedalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Adapun program prioritas pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :



Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi I

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan

Tahun
2021-2026



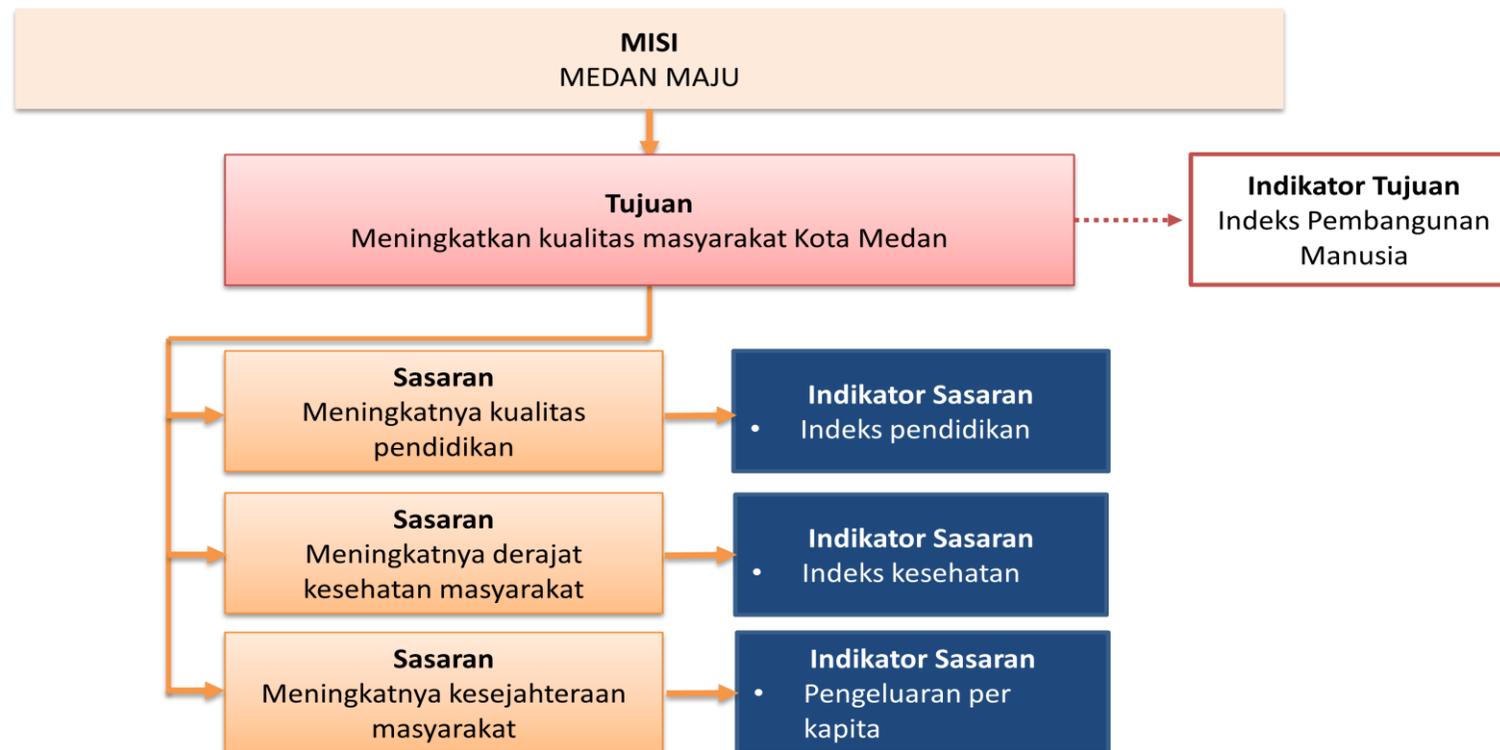




Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi II

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan

Tahun
2021-2026





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan

Tahun
2021-2026

Indikator Sasaran
• Indeks pendidikan

Dinas Pendidikan

- Program pengelolaan Pendidikan
- Program pengembangan kurikulum
- Program pendidik dan tenaga kependidikan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- Program pembinaan perpustakaan
- Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno

Indikator Sasaran
• Indeks kesehatan

Dinas Kesehatan

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Dinas Ketahanan Pangan

- Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
- Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
- Program penanganan kerawanan pangan
- Program pengawasan keamanan pangan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Program pengendalian penduduk
- Program pembinaan keluarga berencana (KB)
- Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
- Program pemerintah dan kesejahteraan rakyat

Indikator Sasaran
• Pengeluaran per kapita

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

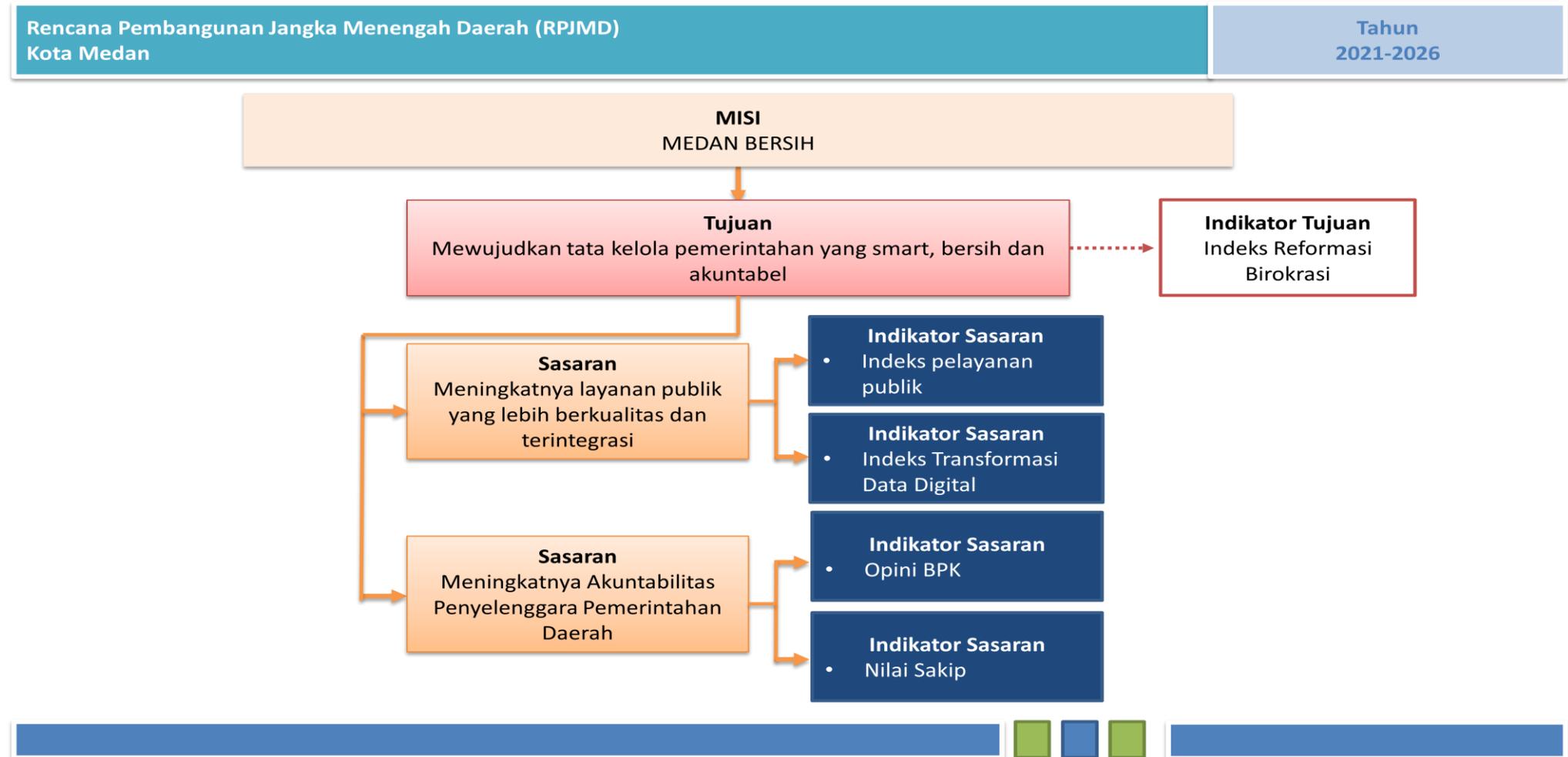
- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

Dinas Perdagangan

- Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting



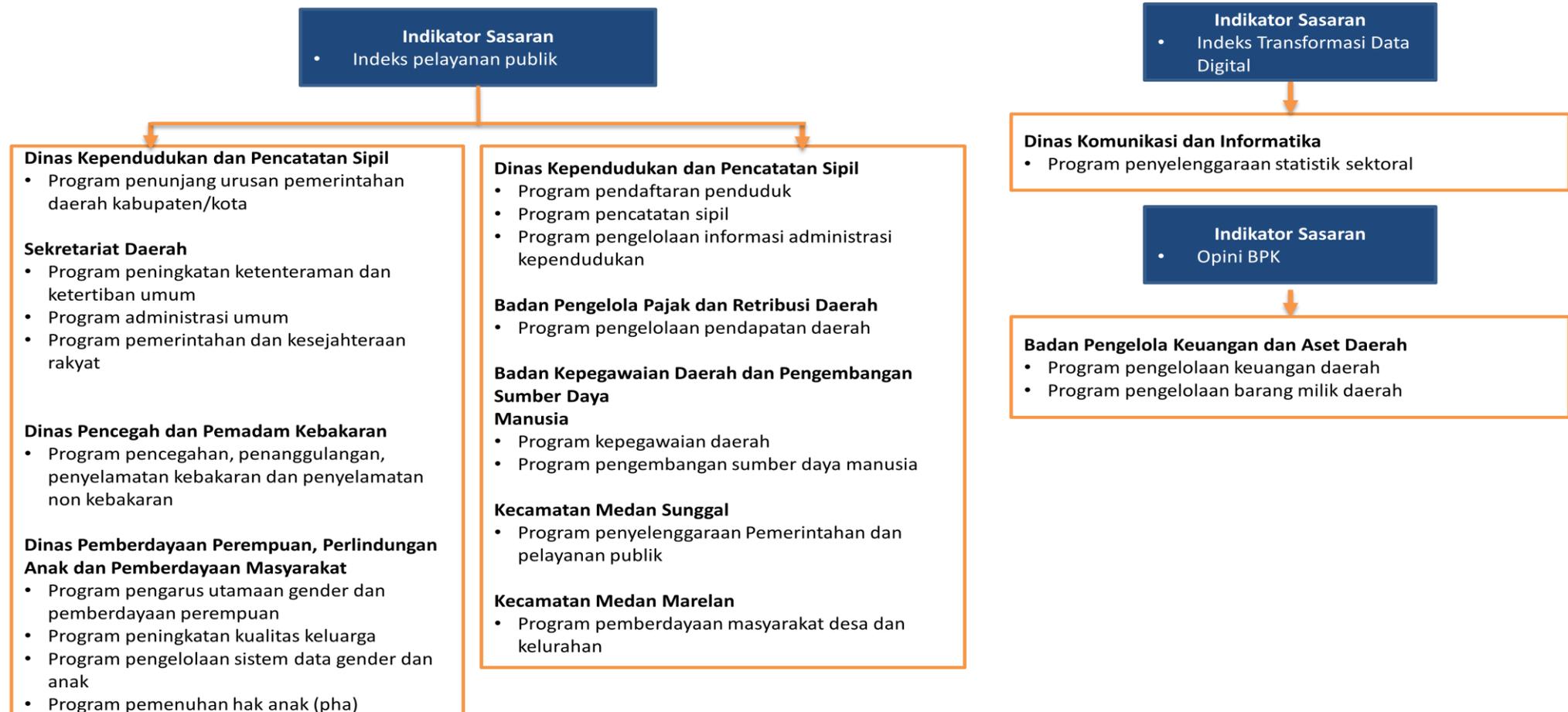
Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi III





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan

Tahun
2021-2026

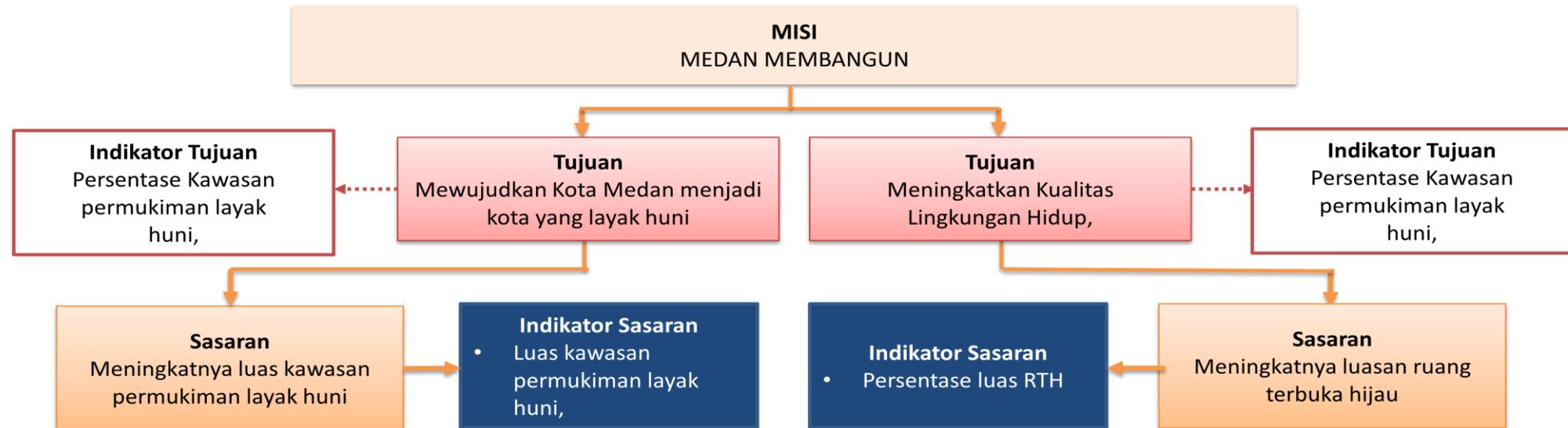




Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi IV

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan

Tahun
2021-2026





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan

Tahun
2021-2026

Indikator Sasaran

- Luas kawasan permukiman layak huni

Indikator Sasaran

- Persentase Luas RTH

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional

Dinas Pekerjaan Umum

- Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
- Program pengembangan permukiman
- Program penyelenggaraan jalan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Program penanggulangan bencana

Dinas Lingkungan Hidup

- Program perencanaan lingkungan hidup
- Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
- Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
- Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)
- Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh
- Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- Program penanganan pengaduan lingkungan hidup

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- Program pengelolaan persampahan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)

Sekretariat Daerah

- Program administrasi umum
- Program perekonomian dan pembangunan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)

Dinas Lingkungan Hidup

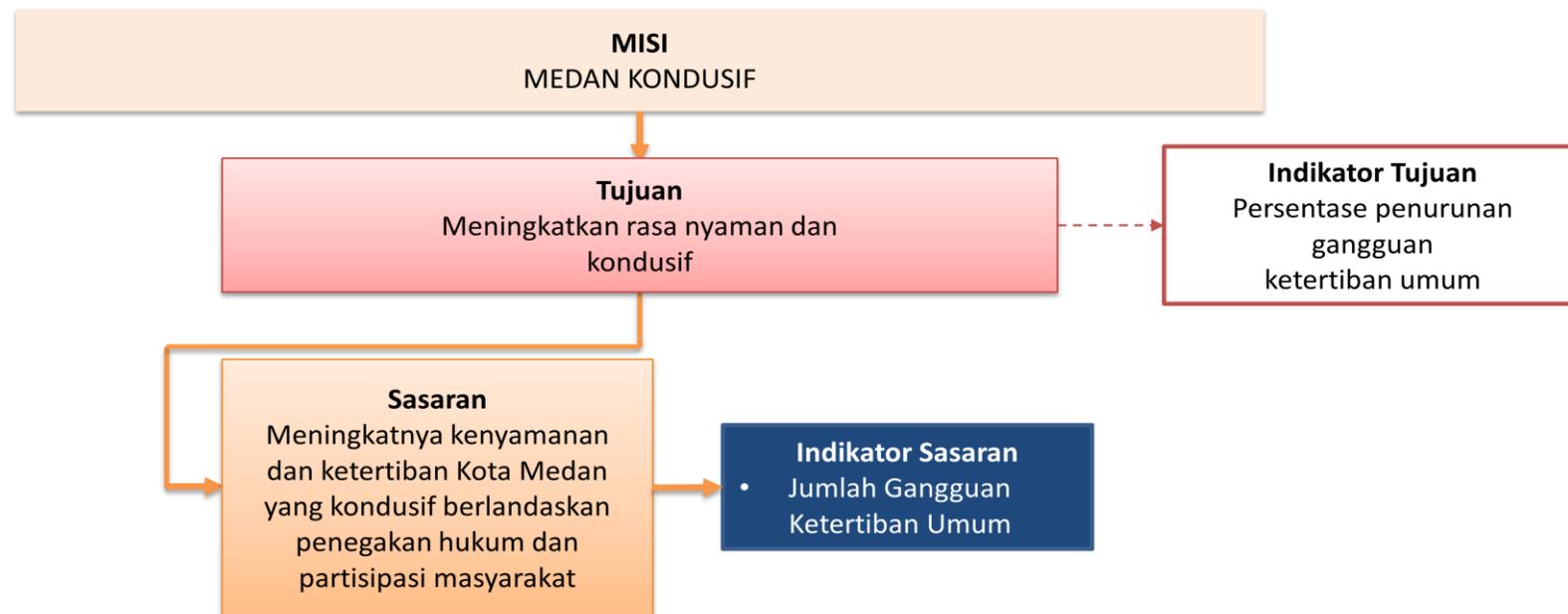
- Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

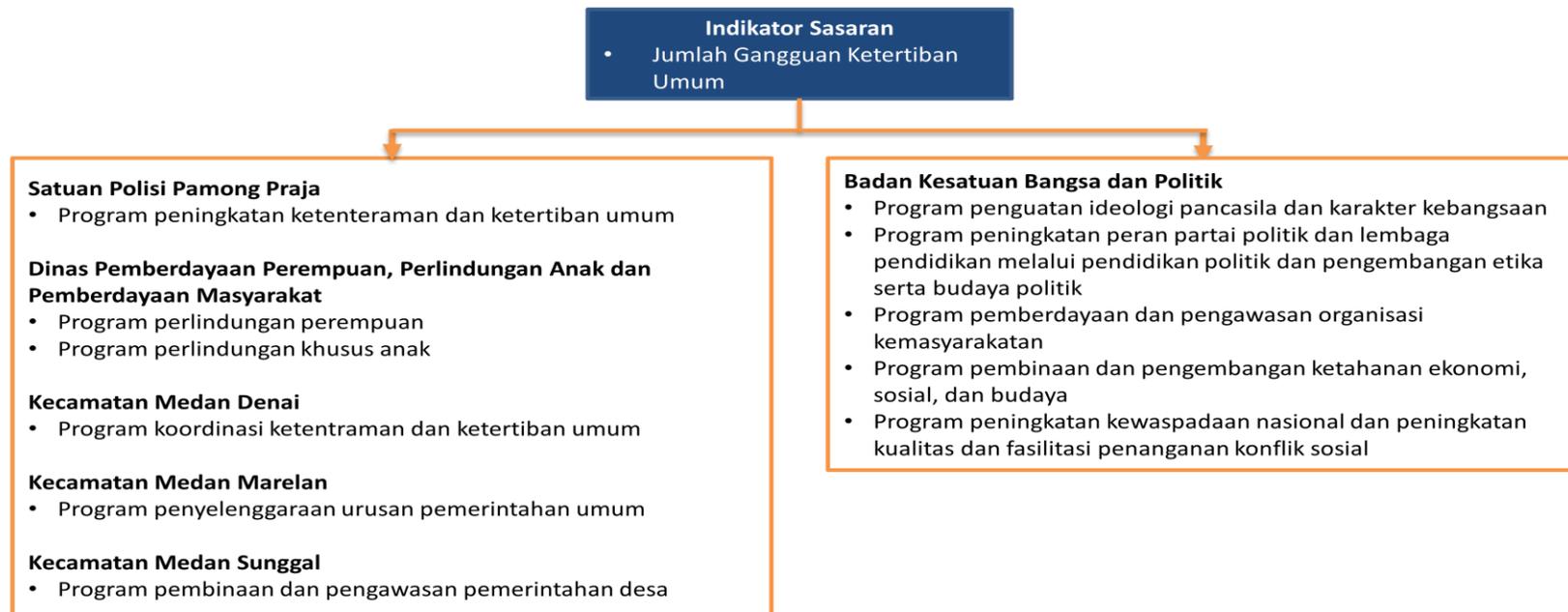


Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi V

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan

Tahun
2021-2026



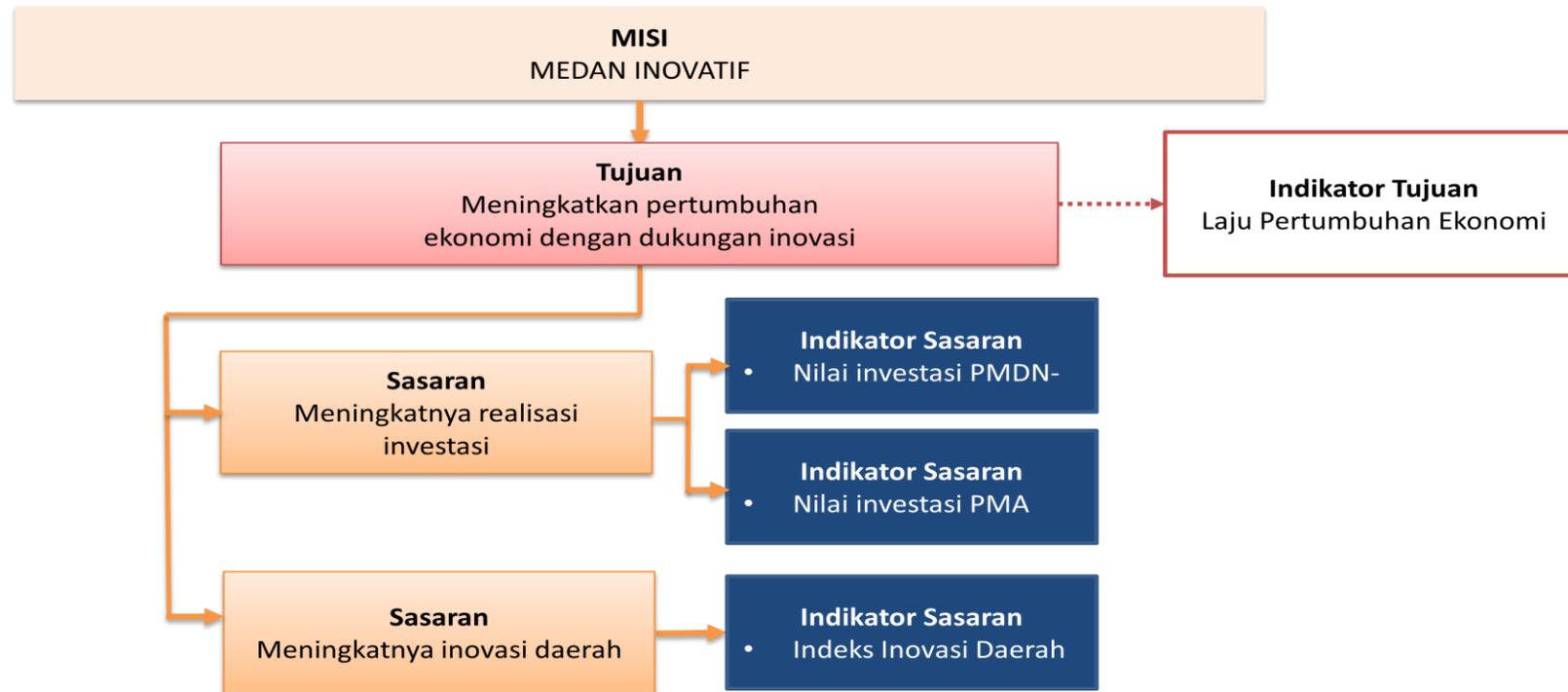


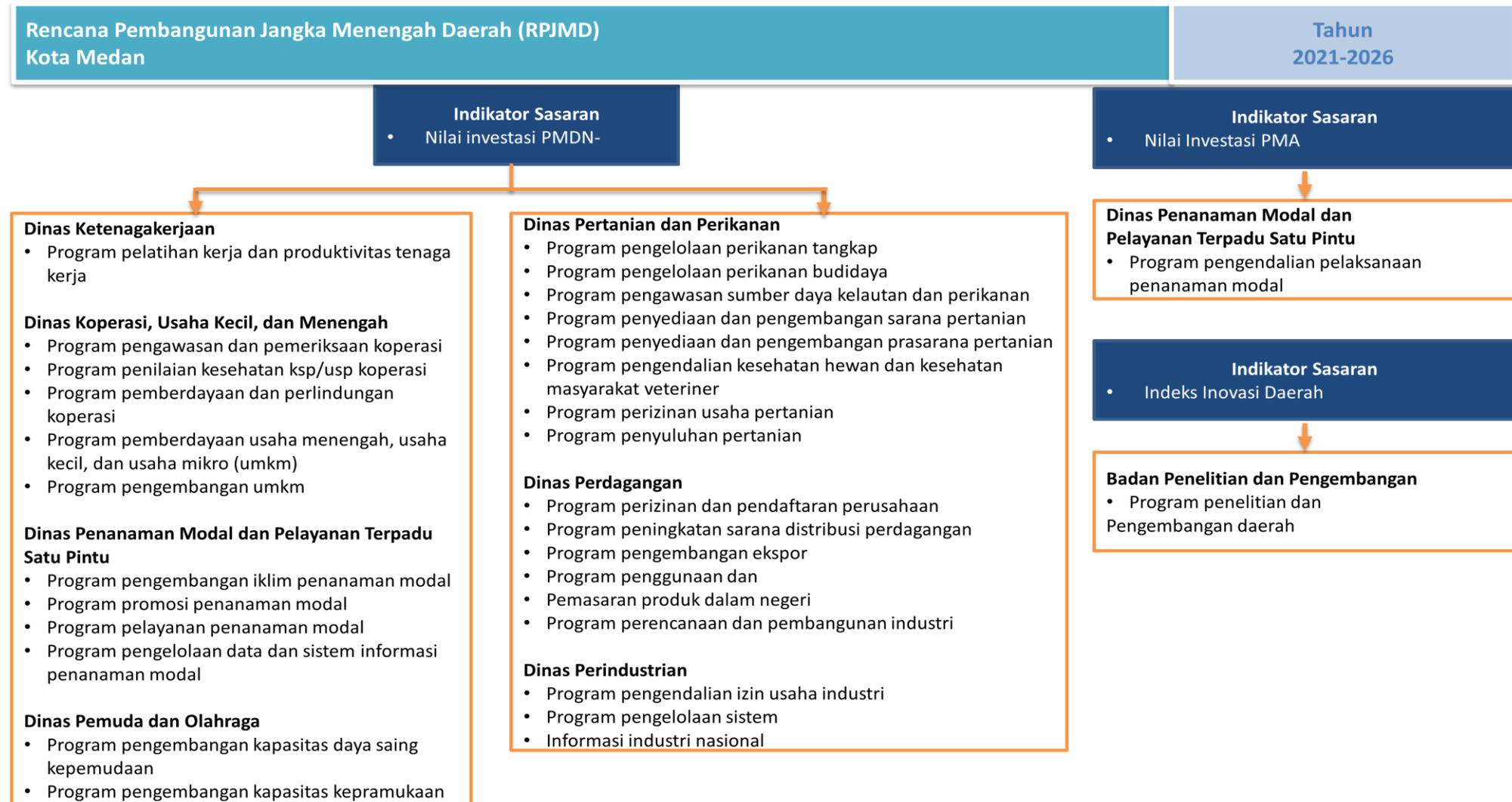


Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi VI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan

Tahun
2021-2026



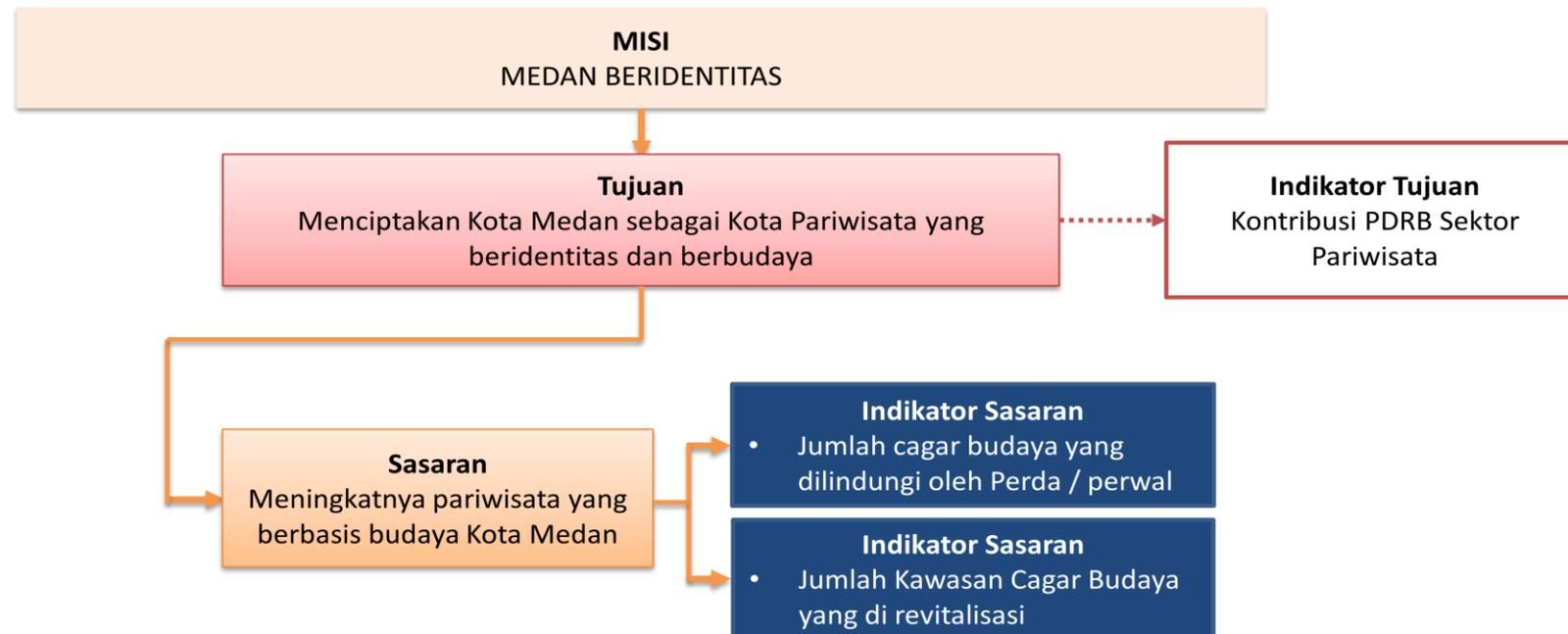




Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi VII

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan

Tahun
2021-2026





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan

Tahun
2021-2026

Indikator Sasaran

- Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda / perwal



Dinas Kebudayaan

- Program pengembangan kebudayaan
- Program pengembangan kesenian tradisional
- Program pembinaan sejarah
- Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
- Program pengelolaan permuseuman

Indikator Sasaran

- Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi



Dinas Pariwisata

- Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- Program pemasaran pariwisata



6.3 Arah Kebijakan Kewilayahan

Sesuai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031. Kota Medan merupakan Kawasan Strategis Nasional yang terdapat dalam wilayah Kawasan Perkotaan Medan Binjai Deli Serdang dan Karo. Kawasan strategis nasional ini diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan geo strategic Nasional yang terdapat di wilayah Kota Medan yaitu Lanal Belawan di Medan Belawan dan Kodam di Kecamatan Medan Helvetia.

Kawasan strategis kota merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup wilayah terhadap ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kawasan strategis Kota Medan terdiri atas :

- a. Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota. Kawasan startegis bidang pertumbuhan ekonomi ditetapkan di Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Amplas, Pusat Kota (CBD Polonia) yang menjadi pusat kegiatan primer kota.
- b. Kawasan strategis bidang sosial budaya adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan sosial budaya. Kawasan strategis bidang sosial budaya ditetapkan di kawasan Polonia, kawasan Kota Lama Labuhan Deli (Toapekong Labuhan), Rumah-rumah Toko Pekong, Rumah-rumah Melayu, Mesjid Raya Labuhan, bangunan yang semula Bea Cukai dan Stasiun Kereta Api Belawan, Kawasan Perumahan dan Pergudangan yang semula DSM di Pulo Brayan, Kawasan Istana Maimun, Kawasan Kampung Keling dan Kawasan Kesawan.
- c. Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis bidang fungsi dan daya lingkungan hidup ditetapkan kawasan agrobisnis di Kecamatan Medan Marelan; kawasan hutan mangroove dan rawa di Kecamatan Medan Belawan; kawasan wisata berupa Theme Park dan Natural Park di Kecamatan Medan Marelan; dan kawasan rencana pengembangan waduk-waduk buatan yang menyebar di Kecamatan.

6.4 Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Startegis Kota

Dari sisi arah kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Medan akan diarahkan kepada kawasan yang akan memberi nilai tambah dalam mendukung pertumbuhan Kota Medan. Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan tersebut adalah:

1. pengembangan kawasan metropolitan khususnya pada kawasan pusat kota di Lapangan Merdeka dan Labuhan, Kawasan peruntukan industri di bagian utara, kawasan tertinggal (kumuh), serta kawasan perdagangan dan pelabuhan internasional di Kota Medan dalam rangka mendukung fungsi Kota Medan sebagai



- bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo) ;
2. Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah utara Kota Medan, strategi yang dilakukan adalah:
 - a. Mengarahkan pembangunan industri wilayah utara Kota Medan dengan konsep produksi bersih dan berwawasan lingkungan;
 - b. Menyediakan kebutuhan ruang terbuka hijau seoptimal mungkin melalui pengaturan KDB dan KDH yang berfungsi sebagai green belt;
 - c. Mewajibkan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri; dan
 - d. Mengembangkan kegiatan industry kreatif
 3. Perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia; dan perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem;
 4. Perlindungan terhadap kawasan yang memiliki peran ekologis dan penyelamatan lingkungan serta antisipasi terhadap terjadinya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan ekosistem, dilakukan melalui:
 - a. Melakukan konservasi terhadap kawasan rimbakota;
 - b. Mendorong pembangunan kawasan eko-wisata; dan
 - c. Mendorong pembangunan rencana pengembangan sistem polder.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kota Medan Tahun 2021 - 2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Misi : Medan Berkah																			
1 1	Tujuan : Meningkatkan pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah	Gini Rasio	Indeks	0,35	0,326	0,322		0,319		0,315		0,312		0,308		0,308				
1 1 1	Sasaran : Meningkatkan Pendapatan	Pendapatan perkapita	Rupiah	67.400.000	68.200.000	68.500.000		68.900.000		70.500.000		71.500.000		71.700.000		71.700.000				
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	0	0	0	100	120.000.000	0	0	0	100	260.000.000	100	380.000.000		Dinas Ketenagakerjaan		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pemenuhan Lowongan pekerjaan	%	48	929.061.300	50	996.966.950	52	1.793.058.317	55	2.046.551.782	58	1.991.929.656	60	2.257.098.938	60	10.014.666.943		Dinas Ketenagakerjaan	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Peningkatan lembaga hubungan industrial di perusahaan	%	10	113.784.900	10	250.500.000	10	263.025.000	10	276.175.000	10	289.984.000	10	304.483.000	10	1.497.951.900		Dinas Ketenagakerjaan	
		Persentase perselisihan /konflik yang diselesaikan	%	88	2.423.260.000	90	1.755.366.000	92	1.843.133.000	93	1.935.290.000	94	2.032.054.000	95	2.133.656.000	95	12.122.759.000		Dinas Ketenagakerjaan	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan Izin Usaha	Koperasi	0	0	52	245.326.400	52	257.592.720	52	270.472.356	52	283.995.598	52	298.195.774	260	1.355.582.848		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikasi (IKK)	orang	0	140	390.304.000	316	981.458.000	316	1.030.530.900	316	1.082.057.445	316	1.136.160.317	316	1.192.968.333	1720	5.813.478.995		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1 1 2	Sasaran : Menurunnya Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	%	8,01	7,98	7,82		7,65		7,50		7,34		7,19		7,19				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan pemberdayaan sosial	%	100	100	73.969.167.335	100	80.210.920.535	100	80.289.051.735	100	80.285.999.767	100	80.323.456.239	100	80.341.436.405	100	475.420.032.016		Dinas Sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyelenggaraan rehabilitasi sosial	%	0	0	4.284.966.460	100	3.791.215.260	100	3.982.691.810	100	4.147.219.822	100	4.142.519.834	100	4.218.128.847	100	24.422.328.086		Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	8.302.613.684	100	4.837.714.184	100	5.276.630.000	100	5.281.489.600	100	5.411.955.388	100	5.762.254.149	100	34.829.516.457		Dinas Sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana	%	100	100	150.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	2.150.000.000		Dinas Sosial
		Persentase peningkatan kualitas penanganan bencana	%	0	100	5.386.120.000	100	6.054.466.600	100	6.186.000.000	100	6.267.180.000	100	6.398.545.400	1pp	6.435.101.762	100	36.727.413.762		Dinas Sosial
2	Misi : Medan Maju																			
2 1	Tujuan : Meningkatkan kualitas masyarakat Kota Medan	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,98	81,61		82,04		82,46		82,89		83,32		83,75		83,75			
2 1 1	Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	11,39	11,4		11,41		11,42		11,42		11,43		11,44		11,44			
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PAUD	Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	%	79,57	80,65	22.649.109.100	82,68	25.277.087.590	83,45	25.050.081.565	84,87	25.784.554.584	85,90	25.071.114.184	86,89	25.622.508.543	86,89	149.141.944.428		Dinas Pendidikan
		Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	%	0	84,56	8.828.283.300	85,38	10.238.286.660	86,39	10.302.184.406	87,59	10.341.634.306	88,03	10.375.556.329	88,56	9.420.944.723	88,56	59.506.889.724		Dinas Pendidikan
		Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD dan SMP	%	0,09	0,08	54.162.548.074	0,08	60.778.810.774	0,07	61.023.740.015	0,06	60.929.911.399	0,05	60.899.292.349	0,04	62.836.437.388	0,04	360.630.739.999		Dinas Pendidikan
		Persentase ketersediaan Sekolah Kondisi Baik	%	0	84,52	110.600.453.330	85,55	114.880.584.652	85,87	118.375.022.146	86,01	109.834.884.085	86,48	112.216.131.387	87,13	116.092.660.506	87,13	681.999.736.106		Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase pengembangan kurikulum	%	0	0	0	75,94	287.895.600	76,34	961.187.600	77,90	1.061.187.600	78,32	1.061.187.600	79,56	961.187.600	79,56	4.332.646.000		Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan	%	0	78,56	60.290.800.400	79,56	70.060.374.963	80,05	69.908.740.222	80,69	68.047.740.222	84,85	64.927.740.222	85,87	62.818.740.222	85,87	396.054.136.251		Dinas Pendidikan
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pembinaan perpustakaan	%	0,88	10,81	982.837.100	16,79	1.179.671.620	21,19	1.515.061.769	24,56	1.560.513.622	27,23	1.607.329.031	29,38	1.655.548.901	29,38	8.500.962.043		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	18.802	19.366	294.592.028	19,946	188.752.028	20.544	194.414.589	21.160	200.247.027	21.794	206.254.437	22.447	212.442.070	22.447	1.296.702.179		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah koleksi perpustakaan	Exemplar	91.702	93.673	876.468.000	95,673	660.910.000	97,673	680.737.300	99,673	701.159.419	101,673	722.194.202	103,673	743.860.027	103,673	4.385.328.948		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	4	8	57.453.000	8	157.453.000	9	162.176.590	9	167.041.888	10	172.053.144	10	177.214.739	10	893.392.361		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	%	0.20	0.40	105.874.400	0.60	150.874.400	0.80	440.400.632	1.00	453.612.651	1.20	467.221.030	1.40	481.237.661	1.40	2.099.220.774	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	1	2	Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	73.14	74	74.10	74.25	74.30	74.50	75.7	75.7						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	100	100	161.234.469.711	100	159.975.787.000	100	159.975.787.000	100	159.975.787.000	100	159.975.787.000	100	159.975.787.000	100	961.113.404.711	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	468.408.324.423	100	406.728.952.240	100	455.467.363.414	100	477.351.715.817	100	502.241.240.322	100	544.173.020.344	100	17.269.200.000	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	72	72	1.670.540.000	75	142.640.000	78	857.422.500	80	1.098.637.500	82	1.158.759.000	85	964.146.300	85	5.892.145.300	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	%	96	96	228.791.000	97	8.100.000	98	195.610.000	100	188.820.000	100	197.180.000	100	200.180.000	100	1.018.681.000	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96	96	527.347.800	100	663.417.300	100	807.359.600	100	811.649.600	100	825.249.600	100	728.712.300	100	4.363.736.200	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase daerah rentan Rawan Pangan	%	4,34	8,69	608.040.000	13,04	828.710.100	13,04	830.000.000	17,39	850.000.000	21,75	900.000.000	26,09	940.000.000	100	4.956.750.100	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92	88	1.105.979.440	89	1.418.005.100	89,5	1.448.955.100	90	1.453.000.000	90,5	1.465.000.000	90,5	1.477.000.000	90,5	8.367.939.640	Dinas Ketahanan Pangan
		Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83,12	83,5	1.005.875.900	84	1.768.309.808	84,5	1.944.000.000	85	1.956.000.000	85,5	1.968.000.000	86	1.980.000.000	86	10.622.185.708	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Kelurahan Rawan Pangan yang Tertangani	%	4,76	9,5	2.879.463.200	14	2.465.013.404	14	2.500.000.000	19	2.581.000.000	19	2.582.000.000	24	2.633.000.000	99,5	15.640.476.604	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan dan Pangan Siap saji	%	92	93	3.278.706.000	94	2.608.041.696	95	2.660.000.000	96	2.721.000.000	97	2.792.000.000	98	2.853.000.000	92	16.912.747.696	Dinas Ketahanan Pangan
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pengendalian penduduk	%	2.7	8.3	0	0	0	16.6	200.000.000	19.4	112.200.000	27.7	114.444.000	33.3	116.732.000	33.3	543.376.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pengendalian penduduk	%	2.7	8.3	301.645.500	11.1	317.653.400	16.6	954.004.000	19.4	778.084.000	27.7	852.444.700	33.3	827.093.000	33.3	4.030.924.600	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Keluarga Berencana (KB)	%	100	100	724.800.000	100	750.000.000	100	765.000.000	100	780.300.000	100	795.906.000	100	811.824.000	100	4.627.830.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pembinaan Keluarga Berencana (KB)	%	69.68	70.18	5.366.474.300	70.68	5.122.967.500	71.18	5.974.804.080	71.68	6.085.570.700	72.18	6.198.177.540	72.68	6.312.659.700	72.68	7.308.627.400	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pembinaan Keluarga Berencana (KB)	%	69.98	70.18	698.915.300	70.68	596.135.600	71.18	608.058.300	71.68	620.218.000	72.18	632.621.400	72.68	645.273.300	72.68	3.801.221.900	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	100	100	1.376.958.900	100	1.046.939.700	100	1.187.878.000	100	1.211.634.000	100	1.235.848.000	100	1.260.525.000	100	7.319.783.600	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	4.75	4.75	60.772.300	4.75	65.578.600	9.52	126.890.000	9.52	129.427.000	14.2	132.016.000	14.2	134.656.000	100	649.339.900	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	50	50	487.264.000	60	0	70	0	80	0	90	0	100	0	100	487.264.000	Sekretariat Daerah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
2	1	3	Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rupiah	14.890.000	15.035.000	15.181.000	15.328.000	15.477.000	15.627.000	15.779.000	15.779.000								
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	7.674.043.000	100	7.899.306.600	100	7.568.340.000	100	7.573.340.000	100	7.590.340.000	100	7.646.340.000	100	45.951.709.600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Inflasi Kota Medan	%	3.34	3.34	8.598.160.800	3.25	8.631.253.338	3.20	8.740.000.000	3.15	8.805.000.000	3.1	9.012.500.000	3.1	9.160.000.000	3.34	52.946.914.138	Dinas Perdagangan
3			Misi : Medan Bersih																		
3	1		Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Cc	Cc	B	B	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	A		
3	1	1	Sasaran : Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	1	1	12.926.885.000	2	12.950.563.424	3	14.770.000.000	4	15.288.000.000	5	16.306.000.000	5	17.136.434.950	5	89.377.883.374	Kecamatan Medan Sunggal
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	50	50	1.067.576.675	60	1.357.666.376	70	1.305.000.000	80	1.425.000.000	90	1.540.000.000	100	1.640.000.000	100	8.335.243.051	Kecamatan Medan Sunggal
				Persentase prasarana dan sarana kantor yang tersedia dan berfungsi	%	0	91	3.994.104.600	92	3.567.755.244	93	3.902.430.000	94	4.010.678.000	95	3.963.000.000	96	4.103.060.000	96	23.541.027.844	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	%	100	100	40.571.598.073	100	39.223.664.431	100	35.843.034.131	100	36.661.301.803	100	37.500.026.164	100	38.359.718.635	100	228.033.756.062	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	843.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	843.800.000	Sekretariat Daerah
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya pengawasan peralatan pemadam pada bangunan	titik	0	0	0	12	0	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	60	800.000.000	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran
				Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	orang	0	0	0	420	196.100.000	420	850.000.000	420	880.000.000	420	900.000.000	420	920.000.000	2100	3.746.100.000	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran
				Meningkatnya waktu tanggap kebakaran	Menit	15	15	7.030.896.400	15	10.538.251.580	15	17.139.729.600	15	21.253.659.535	15	21.310.205.917	15	21.188.214.153	15	98.460.957.185	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran
			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	63,89	63,93	72.538.000	63,97	184.600.300	64,01	396.000.000	64,05	319.000.000	64,09	342.000.000	64,13	365.000.000	64,13	1.679.138.300	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan pengembangan kegiatan masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga	%	100	100	249.856.200	100	64.484.000	100	275.000.000	100	286.000.000	100	297.000.000	100	338.000.000	100	1.510.340.200	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data terpilah	%	100	100	206.968.900	100	232.071.500	100	234.000.000	100	246.000.000	100	258.000.000	100	270.000.000	100	1.447.040.400	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian indikator pemenuhan hak anak	%	100	100	548.276.000	100	528.156.000	100	574.000.000	100	621.500.000	100	669.000.000	100	716.500.000	100	3.657.432.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan pendaftaran penduduk : KK, KTP, KIA	%	100	100	1.084.769.300	100	1.380.527.900	100	1.457.786.700	100	1.477.597.798	100	1.497.904.172	100	1.518.718.207	100	8.417.304.077	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Pencatatan Sipil : Akte Kelahiran, Akte Perkawinan	%	76,25	76,25	236.871.800	78,25	236.871.800	80,25	241.871.800	85,25	246.996.800	88,25	252.249.925	90	257.634.378	90	1.472.496.503	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	%	100	100	3.744.494.063	100	2.189.069.000	100	2.217.252.500	100	2.217.252.500	100	2.217.252.500	100	2.217.252.500	100	14.802.573.063	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	%	77,96	79,83	26.935.733.600	82,15	13.169.120.017	82,15	13.960.587.615	82,15	14.187.405.244	82,15	14.866.427.402	82,15	15.082.020.218	82,15	98.201.294.096	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Aplikasi	4	4	2.510.730.757	4	2.371.957.600	4	2.350.000.000	4	2.350.000.000	4	2.350.000.000	4	2.350.000.000	4	14.282.688.357	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur	buah	0	10	2.089.140.000	12	3.068.065.000	12	3.182.570.000	12	3.436.721.400	12	3.550.000.000	12	3.800.000.000	70	19.126.496.400	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	Orang /Kegiatan	0	621	4.381.060.000	588	3.642.260.000	597	4.240.000.000	603	4.650.000.000	609	5.000.000.000	615	5.270.000.000	3633	27.183.320.000	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	Orang /Kegiatan	0	703	3.640.704.000	828	3.942.781.200	870	5.170.000.000	930	5.205.000.000	930	5.240.000.000	980	5.275.000.000	5241	28.473.485.200	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	50	50	4.636.064.200	60	5.142.667.912	70	5.531.000.000	80	5.917.500.000	90	6.303.000.000	100	6.688.000.000	100	34.218.232.112	Kecamatan Medan Sunggal
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0	100	4.722.951.500	100	9.495.268.266	100	8.977.787.208	100	8.977.787.208	100	8.977.787.208	100	8.977.787.208	100	50.129.368.598	Kecamatan Medan Denai
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0	75	8.425.577.200	80	23.331.387.053	85	23.666.474.027	90	56.011.334.909	95	24.994.392.528	100	25.589.348.855	100	75.640.869.483	Kecamatan Medan Marelan
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	8.083.128.500	100	17.519.523.988	100	19.469.999.549	100	20.419.999.549	100	21.019.999.549	100	21.919.999.549	100	86.972.651.586	Kecamatan Medan Kota
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	50	50	13.339.400	60	3.371.916.028	70	3.375.876.628	80	3.377.876.628	90	3.379.876.628	100	3.381.876.628	100	16.900.761.940	Kecamatan Medan Polonia
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	11.866.019.500	75	21.079.544.352	80	22.110.857.743	85	23.282.556.985	90	24.520.447.873	100	25.884.331.225	100	64.608.894.856	Kecamatan Medan Belawan
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	5.236.000.000	75	9.678.353.556	80	9.968.704.161	85	10.401.299.680	87	10.575.798.245	90	10.893.072.191	90	56.753.227.833	Kecamatan Medan Deli
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	5.412.495.300	76	7.829.156.748	82	7.858.045.268	88	7.943.571.840	94	8.001.842.869	100	8.040.741.332	100	45.085.853.357	Kecamatan Medan Labuhan
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	75	9.205.129.400	80	17.851.431.136	85	18.144.563.912	90	18.428.387.230	95	18.713.818.953	100	69.018.317.094	100	102.031.923.849	Kecamatan Medan Amplas



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	70	5.085.072.500	75	9.197.981.972	80	9.495.921.432	85	9.780.799.074	90	10.074.223.046	100	10.376.449.737	100	54.010.447.761	Kecamatan Medan Tuntungan	
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	34.829.741.072	80	63.208.800.015	85	66.163.806.321	90	70.113.788.259	95	74.402.232.620	100	79.066.691.852	100	85.896.167.243	Kecamatan Medan Perjuangan	
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	3.580.001.000	80	9.488.792.132	85	9.883.628.370	90	10.318.202.331	95	10.796.100.589	100	11.321.788.673	80	55.388.513.095	Kecamatan Medan Tembung	
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	N/A	70	5.339.179.200	80	11.935.037.564	85	12.293.088.691	90	12.661.881.352	95	13.041.737.792	100	13.432.989.926	100	68.703.914.525	Kecamatan Medan Barat	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	75	39.877.926.002	80	40.006.385.583	85	49.146.895.519	90	49.790.803.253	95	50.449.876.109	100	51.133.692.790	100	52.357.360.963	Kecamatan Medan Marelan	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	12	12	20.175.238.536	12	20.780.495.692	12	21.403.910.562	12	22.046.027.880	12	22.707.408.716	12	23.388.630.977	12	130.501.712.363	Kecamatan Medan Area	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	50	50	8.659.001.020	60	8.525.178.901	70	9.094.000.000	80	9.802.000.000	90	10.513.000.000	100	11.221.000.000	100	57.814.179.921	Kecamatan Medan Polonia	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	60	70	10.322.799.900	80	10.308.999.240	85	10.309.165.540	90	10.310.165.540	95	10.310.165.540	100	10.311.165.540	100	61.872.461.300	Kecamatan Medan Johor	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	48.299.576.499	75	47.934.511.112	80	51.529.419.366	85	53.958.881.748	90	56.549.585.979	95	59.315.205.118	100	97.346.024.252	Kecamatan Medan Tuntungan	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	10.346.274.000	76	10.312.665.748	82	10.659.837.420	88	10.983.125.263	94	11.316.461.012	100	11.660.181.034	100	65.278.544.477	Kecamatan Medan Labuhan	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	75	34.532.865.000	80	34.264.194.452	85	37.411.201.507	90	39.413.624.632	95	41.564.129.160	100	43.875.958.403	100	76.099.362.061	Kecamatan Medan Amplas	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	56.743.969.500	80	56.474.156.477	85	62.333.729.783	90	67.604.536.078	95	73.471.191.505	100	79.888.698.851	100	108.761.317.390	Kecamatan Medan Perjuangan	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	11.871.748.000	80	11.995.703.960	85	13.195.274.356	90	14.514.801.791	95	15.966.281.970	100	17.562.910.167	80	85.106.720.244	Kecamatan Medan Tembung	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	N/A	70	10.334.933.268	80	10.222.316.653	85	10.528.986.153	90	10.844.855.737	95	11.170.201.408	100	11.505.307.451	100	64.606.600.670	Kecamatan Medan Barat	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	NA	70	20.597.014.464	75	20.571.331.632	80	30.035.106.600	90	25.810.762.256	100	25.810.762.256	100	25.810.762.256	100	159.705.204.601	Kecamatan Medan Kota	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	80	39.877.926.002	80	40.006.385.583	90	49.146.895.519	90	49.790.803.253	100	50.449.876.109	100	51.133.692.790	100	97.316.564.816	Kecamatan Medan Denai	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	70	39.877.926.002	80	40.006.385.583	85	49.146.895.519	90	49.790.803.253	95	50.449.876.109	100	51.133.692.790	100	65.544.325.720	Kecamatan Medan Deli	
		Indeks Transformasi Data Digital	Indeks	N/A	0,91		0,92		0,93		0,93		0,94		0,95		0,95			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai	%	100	100	126.000.000	100	495.300.000	100	1.420.000.000	100	1.297.000.000	100	1.476.200.000	100	1.331.200.000	100	6.145.700.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	1	2	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Opini BPK	-	WTP	WTP													
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	tepat waktu	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	74.197.590.983	TEPAT WAKTU	72.986.006.120	TEPAT WAKTU	76.149.900.000	TEPAT WAKTU	75.650.000.000	TEPAT WAKTU	76.350.000.000	TEPAT WAKTU	76.650.000.000	TEPAT WAKTU	451.983.497.103	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan barang milik daerah terhadap PAD	%	0	100	5.295.787.500	100	8.900.000.000	100	5.750.000.000	100	6.150.000.000	100	6.400.000.000	100	6.550.000.000	100	39.045.787.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	%	-	100	2.016.729.000	100	2.022.609.000	100	2.812.804.103	100	3.206.524.718	100	3.659.303.426	100	4.179.998.939	-	17.897.969.186	Inspektorat
			Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	%	-	100	4.274.912.863	100	4.278.777.863	100	6.414.146.145	100	6.463.503.067	100	6.486.453.527	100	6.512.846.556	100	34.430.640.021	Inspektorat
			Persentase peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal dengan tujuan tertentu	%	-	100	1.890.401.000	100	2.056.361.000	100	2.504.411.573	100	2.610.873.308	100	2.627.504.305	100	2.646.629.950	-	14.336.181.136	Inspektorat
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	%	-	100	2.390.543.600	100	2.479.629.400	100	2.983.221.000	100	3.127.382.050	100	3.278.751.154	100	3.467.037.370	-	478.810.800	Inspektorat
			Nilai Sakip	Kategori/nilai	Cc	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	A		
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pengelolaan arsip	%	3.89	9.40	584.179.100	12.97	571.135.700	16.21	588.269.771	19.46	605.917.865	22.70	624.095.400	25.94	642.818.262	25.94	3.616.416.098	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Jumlah dokumen/arsip yang dikelola	Dokumen	36.548	154.494	155.682.000	160.673	58.257.000	173.526	210.004.710	194.349	211.804.852	225.444	213.658.997	270.532	215.568.766	270.523	1.064.976.325	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	%	6,7	10	279.639.300	15	269.897.750	20	407.994.682	25	720.234.523	30	938.841.559	35	967.006.806	35	3.583.614.620	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase ketersediaan perizinan penggunaan arsip	%	0	0	0	10	117.455.000	20	170.978.650	30	176.108.010	40	181.391.250	50	186.832.987	50	832.765.897	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	100	100	24.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	24.450.000	Sekretariat Daerah
		Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	10.534.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	10.534.250	Sekretariat Daerah
		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	3.053.039.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	3.053.039.304	Sekretariat Daerah
		Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	%	0	100	143.338.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	143.338.700	Sekretariat Daerah
		Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	100	100	33.993.866.856	100	50.271.178.800	100	55.367.970.680	100	60.900.433.072	100	66.981.807.029	100	73.666.983.706	100	341.182.240.143	Sekretariat Daerah
		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	Cc	Cc	2.309.270.900	B	2.791.447.740	Bb	3.066.000.000	Bb	3.248.500.000	Bb	3.427.000.000	A	3.505.500.000	Bb	18.347.718.640	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintah, kewilayahan dan otonomi daerah	%	0	100	467.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	467.600.000	Sekretariat Daerah
		Persentase Terlaksananya kegiatan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	1.801.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1.801.075.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang dilaksanakan	%	0	17	381.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	381.250.000	Sekretariat Daerah
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	60	62	4.539.876.504	66	3.664.978.808	69	3.771.263.195	72	3.880.629.825	76	3.993.168.093	81	4.108.969.964	81	23.958.886.389	Sekretariat DPRD
		Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	Poin	2.668	2.70	119.214.163.991	2.74	89.062.829.226	2.78	91.645.651.273	2.82	94.303.375.157	2.86	97.038.173.039	3.07	99.852.280.060	3.07	591.116.472.746	Sekretariat DPRD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai	2,668 (C)	2,70 (C)	76.610.314.848	2,74 (C)	114.697.100.610	2,78 (C)	117.998.344.402	2,82 (C)	121.920.296.389	2,86 (C)	125.441.484.988	3,07 (B)	128.564.788.052	3,07 (B)	685.232.329.289	Sekretariat DPRD
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Poin	19,09	22	4.861.893.900	23	3.789.850.175	24	4.079.647.191	25	4.467.611.906	26	4.914.373.094	27	6.155.810.400	27	28.269.186.666	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	Poin	10,13	15	813.108.000	16	603.338.000	17	863.671.800	18	950.038.980	19	1.047.042.878	20	1.151.747.165	20	5.428.946.823	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	NA	90	3.237.955.000	92	4.052.730.000	94	4.458.003.000	96	4.903.803.300	98	5.394.183.630	100	5.933.601.993	90	27.980.276.923	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	NA	80	1.114.617.400	81	1.531.210.000	82	1.684.331.000	83	1.852.764.100	84	2.038.040.510	85	2.241.844.559	85	10.462.807.569	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	%	NA	90	2.060.930.040	92	3.199.900.400	94	3.081.840.440	96	3.417.524.484	98	3.656.776.932	100	3.899.954.625	100	19.316.926.921	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	%	-	100	2.016.729.000	100	2.022.609.000	100	2.812.804.103	100	3.206.524.718	100	3.659.303.426	100	4.179.998.939	-	17.897.969.186	Inspektorat
		Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	%	-	100	4.274.912.863	100	4.278.777.863	100	6.414.146.145	100	6.463.503.067	100	6.486.453.527	100	6.512.846.556	100	34.430.640.021	Inspektorat



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Persentase peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal dengan tujuan tertentu	%	-	100	1.890.401.000	100	2.056.361.000	100	2.504.411.573	100	2.610.873.308	100	2.627.504.305	100	2.646.629.950	-	14.336.181.136	Inspektorat
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	%	-	100	2.390.543.600	100	2.479.629.400	100	2.983.221.000	100	3.127.382.050	100	3.278.751.154	100	3.467.037.370	-	478.810.800	Inspektorat
4	Misi : Medan Membangun																		
4	1	Tujuan : Mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak huni-	%	96,9	96,9		97,9		98,4		98,9		99,4		100		100		
4	1	1	Sasaran : Meningkatkan luas kawasan permukiman layak huni	Ha	25690,2	25690,2		25857,56		26021,52		26185,48		26349,08		26510		26510	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan	%	50	50	3.720.010.000	55	15.582.499.249	60	7.640.000.000	65	10.520.000.000	70	9.340.000.000	75	14.090.000.000	75	60.892.509.249	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem jaringan drainase yang dikelola dengan dengan baik	%	90	92	124.300.461.786	95	646.105.249.800	98	585.540.000.000	100	278.910.000.000	100	153.631.000.000	100	170.948.100.000	100	1.116.180.014.786	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase lokasi ruas jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	%	75	75	32.125.875.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	32.125.875.400	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kematapan jalan kota	%	89	91	226.708.887.364	95	388.633.221.588	98	196.139.323.747	100	221.269.256.121	100	233.036.181.734	100	254.295.799.907	100	1.257.968.670.461	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase pengembangan kapasitas jalan	%	0	0,02	46.820.640.000	5,25	76.848.000.000	7,43	66.636.000.000	8,30	77.619.600.000	9,17	193.381.560.000	10,04	199.076.588.000	10,04	660.382.388.000	Dinas Pekerjaan Umum
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana	%	0	100	7.351.277.410	100	7.766.991.340	100	8.055.000.000	100	8.540.000.000	100	9.035.000.000	100	9.520.000.000	100	40.358.461.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	%	50	50	472.382.200	60	1.301.950.000	70	1.650.000.000	80	1.700.000.000	90	2.040.000.000	100	1.935.000.000	100	9.099.332.200	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca	%	24,8	24,9	2.063.986.444	25	5.953.638.200	25,1	7.207.000.000	25,2	3.575.000.000	25,3	3.602.000.000	25,4	4.135.000.000	25,4	26.536.624.644	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	28,26	28,26	0	28,93	134.396.300	29,60	355.000.000	30,27	585.000.000	30,94	611.000.000	31,61	715.000.000	31,61	2.400.396.300	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara limbah B3	%	50	50	43.351.000	60	148.648.000	70	250.000.000	80	290.000.000	90	340.000.000	100	380.000.000	100	1.451.999.000	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	%	50	50	260.175.200	60	334.871.000	70	470.000.000	80	530.000.000	90	575.000.000	100	645.000.000	100	2.815.046.200	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup	%	50	50	429.610.824	60	209.457.000	70	500.000.000	80	550.000.000	90	600.000.000	100	650.000.000	100	2.939.067.824	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	%	100	100	100.900.000	100	51.000.000	100	165.000.000	100	65.000.000	100	200.000.000	100	65.000.000	100	646.900.000	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	%	80	76	101.968.222.144	75	22.613.711.780	74	20.315.178.230	72	21.785.311.563	70	23.103.978.230	70	28.473.859.030	70	186.942.937.633	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Persentase kebijakan/regulasi/strategi pengelolaan persampahan yang tersedia	%	0	0	0	80	223.265.496	80	275.000.000	85	300.000.000	90	350.000.000	100	375.000.000	100	1.523.265.496	Dinas Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase lokasi ruas jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	%	75	0	0	76	31.048.312.736	77	29.331.001.976	78	30.331.001.976	79	29.831.001.976	80	36.380.971.976	80	156.922.290.640	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
4	2	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup,	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	57,60	57,60		57,82		58,05		58,27		58,5		58,72		58,72	
4	2	1	Sasaran : Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau	%	10	12		12,5		13		13,5		14		14,5		14,5	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi RTH publik yang dikelola dengan baik	%	70	70	33.104.000.000	75	40.308.439.036	80	41.527.419.844	82	42.352.419.844	84	56.974.894.644	87	73.623.379.644	87	287.890.553.012	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	85	85	184.420.000	90	574.686.500	90	1.090.000.000	95	1.250.000.000	95	1.360.000.000	100	1.470.000.000	100	5.929.106.500	Dinas Lingkungan Hidup
5	Misi : Medan Kondusif																		
5	1	Tujuan : Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum	%	N/A	70	70		75		75		80		85		85		
5	1	1	Sasaran : Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	29.146	26.000	23.000	20.000		18.000		16.000		14.000		14000		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	Persen	95	100	4.057.933.786	100	2.810.827.470	100	3.550.843.668	100	4.475.011.409	100	4.886.252.321	100	5.223.192.507	100	25.004.061.161	Satuan Polisi Pamong Praja
		Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	99	100	30.936.089.298	100	31.965.638.514	100	36.442.423.401	100	39.173.690.489	100	42.113.123.731	100	45.394.280.191	100	226.025.245.624	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	316.293.000	100	282.631.900	100	362.960.000	100	362.960.000	100	362.960.000	100	362.960.000	100	2.050.764.900	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	726.098.500	100	659.558.000	100	562.960.000	100	562.960.000	100	562.960.000	100	562.960.000	100	3.637.496.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	0	0	0	0	0	85	259.655.000	90	267.445.000	95	275.468.000	100	283.732.000	100	1.086.300.000	Kecamatan Medan Selayang
		Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	0	80	361.634.300	80	175.514.000	90	232.500.000	90	232.500.000	100	232.500.000	100	232.500.000	100	1.467.148.300	Kecamatan Medan Denai
		Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	50	50	2.920.770.000	60	3.241.400.724	70	3.100.000.000	80	3.200.000.000	90	3.300.000.000	100	3.400.000.000	100	19.162.170.724	Kecamatan Medan Polonia
		Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	19.740.000	80	19.740.000	85	21.714.000	90	23.885.400	95	26.273.940	100	28.901.334	100	140.254.674	Kecamatan Medan Maimun
		Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	80	0	0	0	0	85	194.726.650	90	200.568.450	95	206.585.503	100	212.783.068	100	814.663.671	Kecamatan Medan Petisah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	0	75	2.248.326.200	80	1.230.275.600	85	2.721.584.000	90	2.738.407.000	95	2.755.735.000	100	2.773.583.000	100	2.072.353.600	Kecamatan Medan Marelan
		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	50	50	368.696.800	60	355.357.600	70	495.000.000	80	560.000.000	90	625.000.000	100	690.000.000	100	3.094.054.400	Kecamatan Medan Polonia
		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	60	60	523.296.000	70	511.368.800	80	526.709.864	90	542.511.160	95	558.786.494	100	1.690.991.507	100	4.353.663.825	Kecamatan Medan Helvetia
		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	70	688.503.300	75	624.341.800	80	744.901.074	85	766.633.347	90	793.954.121	95	817.772.744	95	4.436.106.386	Kecamatan Medan Tuntungan
		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	70	684.956.800	76	453.830.600	82	467.445.518	88	560.000.000	94	820.492.600	100	906.026.123	100	3.892.751.641	Kecamatan Medan Labuhan
		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	75	3.960.697.200	80	3.356.964.300	85	1.761.653.657	90	1.885.954.445	95	2.007.345.397	100	2.125.971.220	100	3.315.953.050	Kecamatan Medan Amplas
		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	75	2.207.523.500	80	2.422.940.064	85	2.670.495.838	90	2.792.733.310	95	2.976.925.008	100	3.173.025.521	100	3.173.097.200	Kecamatan Medan Perjuangan
		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	75	487.129.296	80	416.964.296	85	431.649.296	90	447.802.796	95	465.571.646	100	485.117.381	80	2.734.234.711	Kecamatan Medan Tembung
		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	80	80	673.610.000	81	745.939.000	83	788.880.000	84	800.880.000	85	847.880.000	86	887.880.000	85	4.745.069.000	Kecamatan Medan Kota
		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	80	85	444.368.200	86	408.562.400	87	420.819.272	88	433.443.849	89	446.447.164	100	459.840.579	90	2.613.481.464	Kecamatan Medan Deli



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	N/A	70	1.027.427.500	80	464.582.500	85	674.794.715	90	695.038.557	95	715.889.713	100	737.366.405	100	4.329.311.722	Kecamatan Medan Barat
		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	0	80	2.248.326.200	80	1.230.275.600	90	2.721.584.000	90	2.738.407.000	100	2.755.735.000	100	2.773.583.000	100	8.864.521.200	Kecamatan Medan Denai
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	155.982.000	100	156.824.100	100	159.985.800	100	162.485.800	100	182.700.000	100	185.200.000	100	1.003.177.700	Kecamatan Medan Sunggal
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	0	75	367.431.200	80	394.904.400	85	150.000.000	90	150.000.000	95	150.000.000	100	150.000.000	100	874.927.000	Kecamatan Medan Marelan
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	50	50	124.376.600	60	167.509.600	70	150.000.000	80	162.500.000	90	175.000.000	100	187.500.000	100	966.886.200	Kecamatan Medan Polonia
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	65	65	238.940.000	70	279.620.000	75	260.000.000	80	270.000.000	85	275.000.000	90	280.000.000	70	1.603.560.000	Kecamatan Medan Kota
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	70	172.584.000	75	148.640.000	80	208.826.640	85	229.709.304	90	252.680.234	100	277.948.257	100	1.290.388.435	Kecamatan Medan Belawan
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	70	100.800.000	76	127.600.000	82	131.324.000	88	137.188.720	94	143.421.882	100	150.053.788	100	790.388.390	Kecamatan Medan Labuhan
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	70	582.217.700	80	531.679.500	85	553.076.415	90	581.073.261	95	611.050.468	100	648.860.175	100	1.197.766.070	Kecamatan Medan Helvetia
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	75	206.624.000	80	205.393.040	0	0	0	0	0	0	0	0	80	412.017.040	Kecamatan Medan Petisah
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	823.904.900	80	864.233.111	85	890.649.884	90	936.065.597	95	984.713.403	100	1.036.877.226	100	1.728.154.121	Kecamatan Medan Timur
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	370.193.600	80	378.196.900	0	419.888.000	0	461.877.200	0	508.063.920	0	558.870.312	80	1.493.471.300	Kecamatan Medan Perjuangan
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	80	80	135.160.000	83	133.800.000	84	137.814.000	85	141.948.420	87	146.206.872	100	150.593.078	90	845.522.370	Kecamatan Medan Deli
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	N/A	70	255.179.600	80	179.101.000	85	184.474.030	90	190.008.251	95	195.708.498	100	201.579.753	100	1.206.051.132	Kecamatan Medan Barat
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	NA	80	19.254.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	19.254.000	Kecamatan Medan Denai	
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	0	75	367.431.200	80	394.904.400	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	100	487.408.600	Kecamatan Medan Selayang
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	70	651.831.200	80	613.069.000	80	692.531.040	90	741.254.390	90	794.234.182	100	857.556.265	100	1.071.933.182	Kecamatan Medan Johor
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	370.193.600	80	378.196.900	85	419.888.000	90	461.877.200	95	508.063.920	100	558.870.312	80	1.203.618.632	Kecamatan Medan Tembung
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	75	582.217.700	80	531.679.500	85	553.076.415	90	581.073.261	95	611.050.468	100	648.860.175	100	1.238.258.267	Kecamatan Medan Amplas
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	75	75	147.691.400	80	151.400.400	85	164.180.400	90	178.507.680	95	195.960.620	100	215.556.682	100	1.053.297.182	Kecamatan Medan Maimun
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan masyarakat yang sadar dan paham Pancasila dalam mewujudkan Medan Bersih Narkoba	Kelurahan	20	20	1.411.023.810	20	1.447.669.000	19	1.708.000.000	18	1.803.500.000	17	1.846.000.000	17	1.845.000.000	17	10.061.192.810	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Capaian tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Medan sebagai warga negara	%	50	50	381.747.000	55	489.551.000	60	903.600.000	70	1.077.000.000	80	569.500.000	80	528.000.000	80	3.949.398.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam sinergitas Medan Bersih Narkoba	Kelurahan	20	20	116.862.000	20	367.696.000	19	535.000.000	18	560.000.000	17	535.000.000	17	498.000.000	17	2.612.558.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan masyarakat yang sadar dan peduli Medan Bersih Narkoba	Kelurahan	20	20	540.700.500	20	858.642.000	19	1.095.000.000	18	1.220.000.000	17	1.055.000.000	17	930.500.000	17	5.699.842.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik di Kota Medan yang ditindaklanjuti	%	70	70	1.154.118.600	75	1.493.719.000	80	1.895.000.000	80	1.945.000.000	90	1.695.000.000	90	1.571.000.000	90	9.753.837.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Misi : Medan Inovatif																		
6	1 Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,98	3		4,13		5,69		5,76		5,88		5,98		5,98		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
6	1	1	Sasaran : meningkatnya realisasi investasi	Nilai investasi PMDN-	Rp juta	4.127.638,60	4.334.020,53	4.550.21,56	4.778257,63	5.017.170,52	5.268.029,04	5.531.430,49	5.531.430,49								
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	%	14	14	1.155.335.900	15	2.034.311.200	17	2.545.998.550	18	2.673.298.480	19	2.806.959.814	20	2.947.307.734	20	14.163.211.678	Dinas Ketenagakerjaan
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	%	5	5	397.990.800	10	264.885.600	15	748.103.260	20	811.336.643	25	880.314.517	30	955.582.389	30	4.058.213.209	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat	%	0	2	375.306.800	4	323.321.600	6	339.487.680	8	356.462.064	10	374.285.168	12	392.999.425	12	2.161.862.737	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang mandiri	Koperasi	0	0	339.090.800	1	65.390.800	1	368.660.340	1	387.093.357	1	406.448.025	1	426.770.426	5	1.993.453.748	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah usaha mikro	Pelaku usaha	0	575	1.672.585.500	1385	1.456.057.400	1385	1.595.947.070	1385	1.662.619.206	1385	1.767.307.940	1385	2.029.616.421	7500	10.184.133.537	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	Pelaku usaha	0	575	1.184.999.400	1385	1.356.798.956	1385	1.077.934.935	1385	1.099.493.634	1385	1.110.488.570	1385	1.121.593.456	7500	6.951.308.951	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%	0	0	0	5	806.981.376	5	560.212.500	5	588.223.125	5	617.634.279	5	648.515.994	25	1.073.855.758	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Peningkatan Investasi	%	5	0	0	5	268.993.792	5	186.737.500	5	196.074.375	5	205.878.093	5	216.171.998	30	1.073.855.758	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi di Kota Medan	Rupiah	4.334.020.530.000	4.334.020.530.000	111.197.500	4.550.721.560.000	250.245.500	4.778.257.630.000	600.496.125	5.017.170.520.000	551.845.931	5.268.029.040.000	579.434.477	5.531.430.490.000	657.355.889	29.479.629.770.000	2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Nilai Investasi di Kota Medan	Rupiah	4.334.020.530.000	4.334.020.530.000	111.197.500	4.550.721.560.000	250.245.500	4.778.257.630.000	600.496.125	5.017.170.520.000	551.845.931	5.268.029.040.000	579.434.477	5.531.430.490.000	657.355.889	5.531.430.490.000	2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Nilai Investasi Asing di Kota Medan	US \$	42.271,43	42.271,43	222.395.000	44.385,00	500.491.000	46.604,25	1.200.992.250	48.934,45	1.103.691.862	51.381,18	1.158.868.954	53.950,24	1.314.711.778	53.950,24	2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82	82	543.000.000	83	625.667.232	84	756.950.594	85	794.798.124	86	834.538.030	87	876.264.932	87	2.215.609.456	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Penanaman Modal	%	100	100	148.534.400	100	475.150.110	100	648.907.616	100	681.402.996	100	715.420.646	100	751.191.678	100	1.710.303.723	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi	1	1	452.520.000	1	452.520.000	1	497.772.000	1	547.549.200	1	602.304.120	1	662.534.532	1	3.215.199.852	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	0	10	1.239.241.920	8	1.115.120.750	12	1.698.574.310	13	1.749.531.580	14	1.802.017.545	15	1.856.078.027	72	9.460.564.132	Dinas Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	%	0	12	343.094.500	10	280.204.800	40	1.083.610.940	42	1.116.119.265	80	2.643.088.580	40	1.184.090.925	40	6.650.209.010	Dinas Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	2	2	1.616.977.964	2	2.353.616.892	2	2.430.272.730	2	2.527.761.117	2	2.576.672.673	2	2.681.672.357	10	14.186.973.733	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%	2	2	2.321.186.750	2	2.975.343.492	2	2.928.763.352	2	3.054.329.078	2	3.186.758.094	2	3.330.246.113	10	17.796.626.879	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	2	2	91.847.200	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10	91.847.200	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Produksi Peternakan	%	1	1	2.502.272.700	1.2	2.834.593.798	1.2	2.956.706.750	1.2	3.033.026.588	1.2	3.109.913.917	1.2	3.187.559.611	6	17.624.073.364	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	%	1	1	75.130.600	2	581.441.060	2	501.441.060	2	511.469.000	2	521.699.000	2	532.133.000	10	2.723.313.720	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80.5	80.5	1.788.294.652	80.5	1.460.968.324	80.5	1.471.514.326	80.5	1.518.509.993	80.5	1.566.554.792	80.5	1.615.697.082	80.5	9.421.539.169	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan izin usaha tani	%	2	2	0	2	184.340.000	2	201.450.000	2	206.855.000	2	212.282.000	2	217.730.000	10	1.022.657.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	2	2	1.536.375.500	2	508.777.462	2	526.160.000	2	544.896.000	2	563.786.000	2	582.940.000	10	4.262.934.962	Dinas Pertanian dan Perikanan
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUT/SIUP Toko Swalayan)	%	70	70	853.738.550	75	795.448.070	80	840.000.000	85	867.000.000	90	895.000.000	90	995.000.000	90	5.246.186.620	Dinas Perdagangan
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	buah	60 %	60 %	735.468.282	65 %	548.068.282	70 %	2.600.000.000	75 %	700.000.000	80 %	2.750.000.000	80 %	795.000.000	80 %	8.128.536.564	Dinas Perdagangan
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Kota Medan	US \$	3.153.000	3.153.000	2.563.859.040	3.468.300	2.252.963.535	3.815.130	3.152.000.000	4.196.645	4.200.000.000	4.589.000	4.370.000.000	4.589.000	4.900.000.000	4.589.000	21.438.822.575	Dinas Perdagangan
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan PDRB Kota Medan dari Sektor Perdagangan	%	24	24	300.000.000	24,5	1.730.274.968	25	1.480.000.000	25,5	2.620.000.000	26	2.760.000.000	26	3.100.000.000	26	5.261.274.968	Dinas Perdagangan
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	3,73	4,50	3.426.278.350	4,73	2.672.914.000	5,34	3.014.059.700	5,50	3.164.762.685	5,57	3.323.000.819	5,61	3.489.150.813	5,61	19.090.166.367	Dinas Perindustrian
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Kepatuhan Industri yang Diawasi Terhadap Regulasi	%	30	70	179.060.000	72	218.860.000	75	229.803.000	77	241.293.150	79	253.357.800	81	266.025.600	81	1.388.399.550	Dinas Perindustrian
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	12,32	0	0	15	137.270.000	17	144.133.500	19	151.340.175	21	158.907.176	23	166.852.530	23	758.503.381	Dinas Perindustrian
		Nilai investasi PMA,	US \$	40.258,5	42.271,43		44.385,00		46.604,25		48.934,46		51381,18		53.950,24		53.950,24		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%	0	0	0	5	806.981.376	5	560.212.500	5	588.223.125	5	617.634.279	5	648.515.994	25	1.073.855.758	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Peningkatan Investasi	%	5	0	0	5	268.993.792	5	186.737.500	5	196.074.375	5	205.878.093	5	216.171.998	30	1.073.855.758	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi di Kota Medan	Rupiah	4.334.020.530.000	4.334.020.530.000	111.197.500	4.550.721.560.000	250.245.500	4.778.257.630.000	600.496.125	5.017.170.520.000	551.845.931	5.268.029.040.000	579.434.477	5.531.430.490.000	657.355.889	29.479.629.770.000	2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai Investasi di Kota Medan	Rupiah	4.334.020.530.000	4.334.020.530.000	111.197.500	4.550.721.560.000	250.245.500	4.778.257.630.000	600.496.125	5.017.170.520.000	551.845.931	5.268.029.040.000	579.434.477	5.531.430.490.000	657.355.889	5.531.430.490.000	2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		Nilai Investasi Asing di Kota Medan	US \$	42.271,43	42.271,43	222.395.000	44.385,00	500.491.000	46.604,25	1.200.992.250	48.934,45	1.103.691.862	51.381,18	1.158.868.954	53.950,24	1.314.711.778	53.950,24	2.750.575.422	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82	82	543.000.000	83	625.667.232	84	756.950.594	85	794.798.124	86	834.538.030	87	876.264.932	87	2.215.609.456	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Penanaman Modal	%	100	100	148.534.400	100	475.150.110	100	648.907.616	100	681.402.996	100	715.420.646	100	751.191.678	100	1.710.303.723	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
6	1	2	Sasaran : Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	57,14	57,14	62,5	75	77,7	88	94,17	94,17							
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0	0	77	1.100.000.000	79	1.100.000.000	81	1.100.000.000	83	1.100.000.000	85	1.100.000.000	85	5.500.000.000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Persentase Kualitas Hasil Penelitian yang dilakukan	%	1	1	1	1.795.212.000	1	3.120.000.000	1	3.725.000.000	1	3.955.000.000	1	4.390.000.000	5	18.619.307.700	Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Persentase Kualitas Hasil Penelitian yang dilakukan	%	3	3	3	501.333.000	3	3.315.000.000	3	2.895.000.000	3	3.130.000.000	3	2.995.000.000	15	13.408.495.300	Badan Penelitian dan Pengembangan	
7			Misi : Medan Beridentitas																	
7	1		Tujuan : Menciptakan Kota Medan sebagai Kota Pariwisata yang beridentitas dan berbudaya	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	%	2,72	2,86	3	3,07	3,15	3,23	3,31	72,5							
7	1	1	Sasaran : Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya Kota Medan	Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda / perwal	unit	N/A	122	132	145	155	165	175	175							
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah pengembangan kebudayaan	Jumlah	0	5	10.506.757.400	10	3.036.235.000	12	3.727.322.050	15	3.839.141.711	15	3.954.315.962	20	4.072.945.440	20	29.136.717.563	Dinas Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah	%	0	5	729.272.000	10	3.467.500.000	12	3.671.525.000	15	3.781.670.750	15	3.895.120.872	20	4.011.974.498	20	19.557.063.120	Dinas Kebudayaan
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah	%	0	3	1.000.000.000	5	910.288.000	10	1.037.596.640	12	1.068.724.539	15	1.100.786.275	15	1.133.809.863	15	6.251.205.317	Dinas Kebudayaan
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	0	32,07	493.764.811	32,54	3.690.000.000	33,02	4.100.700.000	33,49	4.223.721.000	33,97	4.458.940.421	33,97	4.592.708.644	33,97	21.559.834.876	Dinas Kebudayaan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase permuseuman yang dikelola	%	0	3	300.000.000	5	60.000.000	10	461.800.000	12	475.654.000	15	489.923.620	15	504.621.328	15	2.291.998.948	Dinas Kebudayaan
			Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi	Kawasan	N/A	3	4	5	8	8	8	12	40							
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kegiatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kegiatan	0	4	665.910.000	4	186.260.000	4	0	4	450.000.000	4	350.000.000	4	500.000.000	24	2.152.170.000	Dinas Pariwisata
			Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB	%	2,73	2,74	402.802.500	2,75	820.820.000	2,76	2.515.000.000	2,78	1.995.000.000	2,79	2.125.000.000	2,80	2.300.000.000	2,80	10.158.622.500	Dinas Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	236025	243106	3.139.710.000	250399	2.616.410.000	262919	2.500.000.000	276065	2.400.000.000	289868	2.800.000.000	304361	3.200.000.000	1626718	16.656.120.000	Dinas Pariwisata
			Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB	%	2,73	2,73	2.269.220.000	2,74	6.526.090.000	2,77	4.897.500.000	2,78	5.188.000.000	2,79	5.735.000.000	2,80	6.185.000.000	2,80	30.800.810.000	Dinas Pariwisata



BAB VII KERANGKA PENDANAAN

Pemerintah Kota Medan dalam menyelenggarakan pembangunan akan mempedomani prioritas pembangunan berdasarkan permasalahan dan isu strategis serta situasi dan kondisi pada periode masa jabatan kepala daerah. Program-program yang akan diselenggarakan didukung dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja perangkat daerah berdasarkan target kinerja yang harus diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap perangkat daerah beberapa tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola belanja yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan daerah sebagai berikut :

1. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
2. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Walikota dan wakil Walikota.
3. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Alokasi anggaran prioritas III diperuntukkan untuk mendanai program-program perangkat daerah yang tidak termasuk dalam kategori Prioritas I dan Prioritas II.



**Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Medan Tahun 2021 - 2026**

Uraian	Proyeksi					
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Kapasitas Keuangan Daerah	Rp 5.590.441.983.921	Rp 6.811.602.673.492	Rp 6.940.332.872.214	Rp 6.973.538.256.604	Rp 7.169.036.555.050	Rp 7.543.857.247.444
Prioritas I	Rp 2.726.677.854.311	Rp 2.782.044.827.610	Rp 3.013.197.697.465	Rp 3.088.798.746.560	Rp 3.222.092.081.936	Rp 3.355.465.024.536
Prioritas II	Rp 2.512.062.334.334	Rp 3.250.024.336.756	Rp 3.124.098.331.079	Rp 2.946.750.917.095	Rp 3.009.098.142.341	Rp 3.233.392.087.058
Prioritas III	Rp 351.701.795.276	Rp 779.533.509.126	Rp 803.036.843.670	Rp 937.988.592.949	Rp 937.846.330.773	Rp 955.000.135.850



VII. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi, misi, dan prioritas pembangunan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
2. Penerapan pelayanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
5. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, termasuk percepatan penanganan pandemi COVID-19.
6. Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Medan.

Program perangkat daerah Kota Medan merupakan pelaksanaan dari urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Medan serta unsur penunjang dan unsur kewilayahan.

Program Perangkat daerah merupakan program yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Medan Tahun 2021 - 2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 01	Pendidikan																
	Dinas Pendidikan					1.096.097.109.894		1.093.791.656.183		1.121.279.344.894		1.107.525.444.738		1.097.078.635.548		1.089.933.021.093	
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	839.565.915.690	100	812.268.615.944	100	835.658.388.940	10	831.525.532.542	100	822.527.613.477	100	812.180.542.111	100
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	%	79.57	80.65	22.649.109.100	82.68	25.277.087.590	83.45	25.050.081.565	84.87	25.784.554.584	85.90	25.071.114.184	86.89	25.622.508.543	86.89
		Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	%	0	84.56	8.828.283.300	85.38	10.238.286.660	86.39	10.302.184.406	87.59	10.341.634.306	88.03	10.375.556.329	88.56	9.420.944.723	88.56
		Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD dan SMP	%	0,09	0,08	54.162.548.074	0,08	60.778.810.774	0,07	61.023.740.015	0,06	60.929.911.399	0,05	60.899.292.349	0,04	62.836.437.388	0,04
		Persentase ketersediaan Sekolah Kondisi Baik	%	0	84.52	110.600.453.330	85.55	114.880.584.652	85.87	118.375.022.146	86.01	109.834.884.085	86.48	112.216.131.387	87.13	116.092.660.506	87.13
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase pengembangan kurikulum	%	0	0	75.94	287.895.600	76.34	961.187.600	77.90	1.061.187.600	78.32	1.061.187.600	79.56	961.187.600	79.56	
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan	%	0	78.56	60.290.800.400	79.56	70.060.374.963	80.05	69.908.740.222	80.69	68.047.740.222	84.85	64.927.740.222	85.87	62.818.740.222	85.87
1 02	Kesehatan																
	Dinas Kesehatan					1.028.788.903.683		983.647.105.338		1.009.038.631.393		1.055.224.696.603		1.092.091.113.970		1.170.350.310.565	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	100	100	396.719.430.749	100	416.128.208.798	100	391.735.088.879	100	415.798.086.686	100	427.692.898.048	100	464.308.464.621	100
		Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	100	100	161.234.469.711	100	159.975.787.000	100	159.975.787.000	100	159.975.787.000	100	159.975.787.000	100	159.975.787.000	100
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	468.408.324.423	100	406.728.952.240	100	455.467.363.414	100	477.351.715.817	100	502.241.240.322	100	544.173.020.344	100
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	72	72	1.670.540.000	75	142.640.000	78	857.422.500	80	1.098.637.500	82	1.158.759.000	85	964.146.300	85
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	%	96	96	228.791.000	97	8.100.000	98	195.610.000	100	188.820.000	100	197.180.000	100	200.180.000	100
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96	96	527.347.800	100	663.417.300	100	807.359.600	100	811.649.600	100	825.249.600	100	728.712.300	100
1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	Dinas Pekerjaan Umum					478.552.297.235		1.200.000.000.000		944.469.343.747		679.205.878.121		685.865.365.934		736.157.974.527	
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	78.522.308.085	100	82.992.018.612	100	90.244.020.000	100	95.687.022.000	100	101.086.624.200	100	107.097.486.620	100
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase perwujudan SPAM	%	87	90.25	0	93.50	1.000.000.000	96.75	700.000.000	98	0	100	0	100	0	100
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	4.85	5.30	0	5.80	0	6.71	500.000.000	8.11	1.000.000.000	10.03	0	10.03	0	10.03
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem jaringan drainase yang terkelola dengan dengan baik	%	90	92	124.300.461.786	95	646.105.249.800	98	585.540.000.000	100	278.910.000.000	100	153.631.000.000	100	170.948.100.000	100
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	%	89	91	226.708.887.364	95	388.633.221.588	98	196.139.323.747	100	221.269.256.121	100	233.036.181.734	100	254.295.799.907	100
		Persentase pengembangan kapasitas jalan	%	0	0.02	46.820.640.000	5.25	76.848.000.000	7.43	66.636.000.000	8.30	77.619.600.000	9.17	193.381.560.000	10.04	199.076.588.000	10.04
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi	%	65	68	2.200.000.000	71	4.421.510.000	74	4.710.000.000	77	4.720.000.000	80	4.730.000.000	83	4.740.000.000	83



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang					116.698.150.760		243.681.723.920		308.430.000.000		424.760.000.000		414.540.000.000		419.520.000.000	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	%	87	90,25	7.500.000.000	93,5	9.185.000.000	96,75	19.800.000.000	98	34.800.000.000	100	34.800.000.000	100	49.800.000.000	100
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan TPA/TPST terfasilitasi yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan	%	0	0	16.000.000.000	20	4.000.000.000	20	12.000.000.000	20	12.000.000.000	20	12.000.000.000	20	12.000.000.000	100
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	%	4,85	5,3	4.000.000.000	5,8	10.704.000.000	6,71	32.800.000.000	8,11	32.800.000.000	10,03	32.800.000.000	10,03	32.800.000.000	10,03
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	65	65	82.473.150.760	70	200.492.723.920	75	232.050.000.000	80	334.700.000.000	85	325.400.000.000	90	315.900.000.000	90
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis yang ditata	%	0	10	6.425.000.000	20	8.000.000.000	40	7.080.000.000	60	7.360.000.000	80	7.640.000.000	100	7.920.000.000	100
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	%	65	65	300.000.000	70	11.300.000.000	70	4.700.000.000	70	3.100.000.000	70	1.900.000.000	70	1.100.000.000	70
	Dinas Kebersihan dan Pertamanan					41.360.885.400		15.582.499.249		7.640.000.000		10.520.000.000		9.340.000.000		14.090.000.000	
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan	%	50	50	3.720.010.000	55	15.582.499.249	60	7.640.000.000	65	10.520.000.000	70	9.340.000.000	75	14.090.000.000	75
1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase lokasi ruas jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	%	75	75	32.125.875.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase unit gedung pemerintah dalam kondisi baik	%	85	90	5.515.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang					63.250.797.246		82.955.823.093		87.429.019.700		91.204.819.000		95.025.819.000		98.746.819.000	
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	70	70	42.766.794.426	75	38.567.320.549	80	39.231.019.700	85	39.773.819.000	90	40.361.819.000	100	40.849.819.000	100
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase cakupan penyelenggaraan pengembangan perumahan yang berkeadilan, tertib dan terkendali	%	65	65	3.625.000.000	75	6.168.502.544	80	5.650.000.000	85	6.650.000.000	90	7.650.000.000	100	8.650.000.000	100
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	96,9	96,9	16.859.002.820	97,9	20.220.000.000	98,4	23.548.000.000	98,9	24.781.000.000	99,4	26.014.000.000	100	27.247.000.000	100
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pencegahan kawasan permukiman kumuh	%	97,4	97,4	0	97,9	18.000.000.000	98,4	19.000.000.000	98,9	20.000.000.000	99,4	21.000.000.000	100	22.000.000.000	100
1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																
	Satuan Polisi Pamong Praja					52.289.642.548		52.446.120.610		60.960.483.807		65.709.554.624		70.253.023.533		75.144.994.368	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	80	100	17.295.619.464	100	17.669.654.626	100	20.967.216.738	100	22.060.852.726	100	23.253.647.481	100	24.527.521.670	85
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	Persen	95	100	4.057.933.786	100	2.810.827.470	100	3.550.843.668	100	4.475.011.409	100	4.886.252.321	100	5.223.192.507	100
		Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	99	100	30.936.089.298	100	31.965.638.514	100	36.442.423.401	100	39.173.690.489	100	42.113.123.731	100	45.394.280.191	100
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					17.283.393.410		17.661.770.276		18.780.382.643		20.011.177.236		21.051.586.038		22.298.489.490	
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	100	100	9.932.116.000	100	9.894.778.936	100	10.725.382.643	100	11.471.177.236	100	12.016.586.038	100	12.778.489.490	100
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana	%	0	100	7.351.277.410	100	7.766.991.340	100	8.055.000.000	100	8.540.000.000	100	9.035.000.000	100	9.520.000.000	100
	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran					36.738.580.331		46.072.090.828		119.256.279.950		59.108.197.808		60.816.801.740		65.254.072.211	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	75	75	29.707.683.931	75	35.337.739.248	75	101.016.550.350	80	36.674.538.273	80	38.306.595.823	80	42.845.858.058	80
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Penanggulangan Kebakaran	%	0	25	0	30	0	35	50.000.000	40	100.000.000	45	100.000.000	50	100.000.000	25
		Meningkatnya pengawasan peralatan pemadam pada bangunan	titik	0	0	0	12	0	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	60
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	orang	0	0	0	420	0	420	850.000.000	420	880.000.000	420	900.000.000	420	920.000.000	2100
		Meningkatnya waktu tanggap kebakaran	Menit	15	15	7.030.896.400	15	10.538.251.580	15	17.139.729.600	15	21.253.659.535	15	21.310.205.917	15	21.188.214.153	15
		Bagian Pembangunan				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Perekonomian				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Hubungan Kerjasama Antar Kota, Daerah dan Lembaga				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Keagamaan				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Pemerintahan				843.800.000		0		0		0		0		0	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	843.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		Bagian Umum				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Hubungan Masyarakat				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Hukum				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Organisasi dan Tatalaksana				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Sosial, Pendidikan				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Kesejahteraan Rakyat				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Administrasi Pembangunan				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Kerja Sama				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Tata Pemerintahan				3.005.800.000		0		0		0		0		0	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	3.005.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		Bagian Organisasi				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Sumber Daya Alam				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				0		0		0		0		0		0	
		Bagian Perencanaan dan Keuangan				0		0		0		0		0		0	
1 06	Sosial																
	Dinas Sosial					107.091.921.194		110.854.357.058		112.237.112.424		112.809.628.068		114.249.215.840		114.603.292.323	
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	14.914.053.715	100	14.620.040.479	100	14.802.738.879	100	14.727.738.879	100	14.872.738.979	100	14.746.371.160	100
		Jumlah armada operasional lapangan penertiban PMKS	unit	0	0	0	5	740.000.000	5	1.000.000.000	5	1.500.000.000	5	2.500.000.000	5	2.500.000.000	25
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	85.000.000	100	200.000.000	100	300.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan pemberdayaan sosial	%	100	100	73.969.167.335	100	80.210.920.535	100	80.289.051.735	100	80.285.999.767	100	80.323.456.239	100	80.341.436.405	100
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyelenggaraan rehabilitasi sosial	%	0	0	4.284.966.460	100	3.791.215.260	100	3.982.691.810	100	4.147.219.822	100	4.142.519.834	100	4.218.128.847	100
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	8.302.613.684	100	4.837.714.184	100	5.276.630.000	100	5.281.489.600	100	5.411.955.388	100	5.762.254.149	100
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana	%	100	100	150.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase peningkatan kualitas penanganan bencana	%	0	100	5.386.120.000	100	6.054.466.600	100	6.186.000.000	100	6.267.180.000	100	6.398.545.400	1pp	6.435.101.762	100
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 07		Tenaga Kerja															
		Dinas Ketenagakerjaan				17.121.748.248		18.141.063.210		21.164.103.280		22.239.473.095		23.181.593.195		24.765.669.684	
2 07 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	100	12.500.306.148	100	13.103.919.060	100	14.598.888.413	100	15.308.157.833	100	16.060.665.725	100	16.863.124.012	100
2 07 02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	%	0	0	0	0	0	100	120.000.000	0	0	0	0	100	260.000.000	100
2 07 03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	%	14	14	1.155.335.900	15	2.034.311.200	17	2.545.998.550	18	2.673.298.480	19	2.806.959.814	20	2.947.307.734	20
2 07 04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	%	48	48	929.061.300	50	996.966.950	52	1.793.058.317	55	2.046.551.782	58	1.991.929.656	60	2.257.098.938	60
2 07 05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	%	10	10	113.784.900	10	250.500.000	10	263.025.000	10	276.175.000	10	289.984.000	10	304.483.000	10
		Persentase perselisihan /konflik yang diselesaikan	%	88	88	2.423.260.000	90	1.755.366.000	92	1.843.133.000	93	1.935.290.000	94	2.032.054.000	95	2.133.656.000	95
2 08		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat				12.859.036.504		12.644.113.856		13.586.920.000		13.899.420.000		14.155.920.000		14.441.420.000	
2 08 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100	100	10.739.005.904	100	10.692.612.156	100	11.182.000.000	100	11.501.000.000	100	11.664.000.000	100	11.826.000.000	100
2 08 02		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Skor	63,89	63,93	72.538.000	63,97	184.600.300	64,01	396.000.000	64,05	319.000.000	64,09	342.000.000	64,13	365.000.000	64,13
2 08 03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	%	100	100	316.293.000	100	282.631.900	100	362.960.000	100	362.960.000	100	362.960.000	100	362.960.000	100
2 08 04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	%	100	100	249.856.200	100	64.484.000	100	275.000.000	100	286.000.000	100	297.000.000	100	338.000.000	100
2 08 05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	%	100	100	206.968.900	100	232.071.500	100	234.000.000	100	246.000.000	100	258.000.000	100	270.000.000	100
2 08 06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	%	100	100	548.276.000	100	528.156.000	100	574.000.000	100	621.500.000	100	669.000.000	100	716.500.000	100
2 08 07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	%	100	100	726.098.500	100	659.558.000	100	562.960.000	100	562.960.000	100	562.960.000	100	562.960.000	100
2 09		Pangan															
		Dinas Ketahanan Pangan				19.176.177.500		19.375.137.600		20.046.597.600		20.284.109.125		20.493.399.081		20.736.553.536	
2 09 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	0	90	10.298.112.960	92	10.287.057.492	93	10.663.642.500	94	10.723.109.125	96	10.786.399.081	100	10.853.553.536	0
2 09 02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	%	4,34	8,69	608.040.000	13,04	828.710.100	13,04	830.000.000	17,39	850.000.000	21,75	900.000.000	26,09	940.000.000	100
2 09 03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor	92	88	1.105.979.440	89	1.418.005.100	89,5	1.448.955.100	90	1.453.000.000	90,5	1.465.000.000	90,5	1.477.000.000	90,5
		Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83,12	83,5	1.005.875.900	84	1.768.309.808	84,5	1.944.000.000	85	1.956.000.000	85,5	1.968.000.000	86	1.980.000.000	86
2 09 04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	%	4,76	9,5	2.879.463.200	14	2.465.013.404	14	2.500.000.000	19	2.581.000.000	19	2.582.000.000	24	2.633.000.000	99,5



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan dan Pangan Siap saji	%	92	93	3.278.706.000	94	2.608.041.696	95	2.660.000.000	96	2.721.000.000	97	2.792.000.000	98	2.853.000.000	92
2 10	Pertanahan																
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang					53.223.036.482		331.289.582.095		200.000.000.000		200.000.000.000		200.000.000.000		200.000.000.000	
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	100	70	53.223.036.482	70	331.289.582.095	70	200.000.000.000	70	200.000.000.000	70	200.000.000.000	70	200.000.000.000	70
2 11	Lingkungan Hidup																
	Dinas Lingkungan Hidup					17.955.728.070		23.127.424.129		28.440.100.000		26.605.800.000		28.589.600.000		30.323.000.000	
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	14.400.902.402	100	14.195.511.633	100	16.478.100.000	100	17.760.800.000	100	18.911.600.000	100	19.953.000.000	100
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	%	50	50	472.382.200	60	1.301.950.000	70	1.650.000.000	80	1.700.000.000	90	2.040.000.000	100	1.935.000.000	100
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca	%	24,8	24,9	2.063.986.444	25	5.953.638.200	25,1	7.207.000.000	25,2	3.575.000.000	25,3	3.602.000.000	25,4	4.135.000.000	25,4
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	28,26	28,26	0	28,93	134.396.300	29,60	355.000.000	30,27	585.000.000	30,94	611.000.000	31,61	715.000.000	31,61
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara limbah B3	%	50	50	43.351.000	60	148.648.000	70	250.000.000	80	290.000.000	90	340.000.000	100	380.000.000	100
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	%	50	50	260.175.200	60	334.871.000	70	470.000.000	80	530.000.000	90	575.000.000	100	645.000.000	100
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	85	85	184.420.000	90	574.686.500	90	1.090.000.000	95	1.250.000.000	95	1.360.000.000	100	1.470.000.000	100
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup	%	50	50	429.610.824	60	209.457.000	70	500.000.000	80	550.000.000	90	600.000.000	100	650.000.000	100
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	%	100	100	100.900.000	100	51.000.000	100	165.000.000	100	65.000.000	100	200.000.000	100	65.000.000	100
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase kebijakan/regulasi/strategi pengelolaan persampahan yang tersedia	%	0	0	0	80	223.265.496	80	275.000.000	85	300.000.000	90	350.000.000	100	375.000.000	100
	Dinas Kebersihan dan Pertamanan					518.502.598.874		450.280.412.128		509.644.690.265		560.433.567.207		622.217.837.316		661.585.764.037	
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	75	75	383.430.376.730	80	387.358.261.312	82	447.802.092.191	84	496.295.835.800	86	542.138.964.442	90	559.488.525.363	90
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi RTH publik yang dikelola dengan baik	%	70	70	33.104.000.000	75	40.308.439.036	80	41.527.419.844	82	42.352.419.844	84	56.974.894.644	87	73.623.379.644	87
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	%	80	76	101.968.222.144	75	22.613.711.780	74	20.315.178.230	72	21.785.311.563	70	23.103.978.230	70	28.473.859.030	70
2 12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					45.637.733.236		43.030.133.131		39.759.945.131		40.603.148.901		41.467.432.761		42.353.323.720	
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	%	100	100	40.571.598.073	100	39.223.664.431	100	35.843.034.131	100	36.661.301.803	100	37.500.026.164	100	38.359.718.635	100
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan pendaftaran penduduk : KK, KTP, KIA	%	100	100	1.084.769.300	100	1.380.527.900	100	1.457.786.700	100	1.477.597.798	100	1.497.904.172	100	1.518.718.207	100
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Pencatatan Sipil : Akte Kelahiran, Akte Perkawinan	%	76,25	76,25	236.871.800	78,25	236.871.800	80,25	241.871.800	85,25	246.996.800	88,25	252.249.925	90	257.634.378	90



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	%	100	100	3.744.494.063	100	2.189.069.000	100	2.217.252.500	100	2.217.252.500	100	2.217.252.500	100	2.217.252.500	100
2 13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					7.674.043.000		7.899.306.600		7.568.340.000		7.573.340.000		7.590.340.000		7.646.340.000	
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	7.674.043.000	100	7.899.306.600	100	7.568.340.000	100	7.573.340.000	100	7.590.340.000	100	7.646.340.000	100
2 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					20.150.648.243		19.650.648.243		21.819.875.380		22.004.446.700		22.505.323.540		22.853.737.000	
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	0	100	81.361.800	100	18.154.700	100	29.517.000	100	30.100.000	100	30.709.900	100	31.324.000	100
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	79.05	100	9.376.808.000	100	9.474.998.000	100	9.611.153.000	100	9.813.376.000	100	9.915.644.000	100	10.017.957.000	100
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	100	0	100	187.680.000	100	191.433.000	100	195.262.000	100	199.167.000	100	203.150.000	100
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	57.99	100	709.109.571	100	460.507.871	100	469.087.000	100	446.381.000	100	488.033.000	100	464.406.000	100
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	52.06	100	11.323.300	100	299.841.600	100	305.837.000	100	311.953.000	100	318.192.000	100	324.555.000	100
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	73.86	100	1.069.567.272	100	888.751.272	100	966.346.000	100	1.051.475.000	100	1.144.886.000	100	1.247.404.000	100
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	83.15	100	372.912.000	100	421.440.000	100	429.868.000	100	438.466.000	100	447.234.000	100	456.178.000	100
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pengendalian penduduk	%	2.7	8.3	0	0	0	16.6	200.000.000	19.4	112.200.000	27.7	114.444.000	33.3	116.732.000	33.3
		Persentase pengendalian penduduk	%	2.7	8.3	301.645.500	11.1	317.653.400	16.6	954.004.000	19.4	778.084.000	27.7	852.444.700	33.3	827.093.000	33.3
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Keluarga Berencana (KB)	%	100	100	724.800.000	100	750.000.000	100	765.000.000	100	780.300.000	100	795.906.000	100	811.824.000	100
		Persentase pembinaan Keluarga Berencana (KB)	%	69.68	70.18	5.366.474.300	70.68	5.122.967.500	71.18	5.974.804.080	71.68	6.085.570.700	72.18	6.198.177.540	72.68	6.312.659.700	72.68
		Persentase pembinaan Keluarga Berencana (KB)	%	69.98	70.18	698.915.300	70.68	596.135.600	71.18	608.058.300	71.68	620.218.000	72.18	632.621.400	72.68	645.273.300	72.68
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	100	100	1.376.958.900	100	1.046.939.700	100	1.187.878.000	100	1.211.634.000	100	1.235.848.000	100	1.260.525.000	100
		Persentase pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	4.75	4.75	60.772.300	4.75	65.578.600	9.52	126.890.000	9.52	129.427.000	14.2	132.016.000	14.2	134.656.000	100
2 15	Perhubungan																
	Dinas Kebersihan dan Pertamanan					0		31.048.312.736		29.331.001.976		30.331.001.976		29.831.001.976		36.380.971.976	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase lokasi ruas jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	%	75	0	0	76	31.048.312.736	77	29.331.001.976	78	30.331.001.976	79	29.831.001.976	80	36.380.971.976	80
	Dinas Perhubungan					129.851.923.600		110.102.406.714		153.887.213.800		154.375.791.056		154.881.891.524		156.288.200.424	
2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	10	10	60.559.490.992	20	63.271.625.044	40	68.939.003.744	60	65.627.581.000	80	66.039.990.368	100	66.239.990.368	100
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase efektifitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	%	10	10	32.050.000	020	30.000.000	040	330.000.000	060	2.330.000.000	080	330.000.000	0100	530.000.000	100
		Persentase efektifitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	%	10	100	0	100	0	100	1.250.000.000	100	1.050.000.000	100	1.050.000.000	100	1.450.000.000	100
		Persentase efektifitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	%	10	20	0	30	0	40	10.650.000.000	60	10.200.000.000	80	11.150.000.000	100	10.850.000.000	100
		Persentase efektifitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	%	10	5	30.225.562.608	5	30.800.350.056	5	33.400.350.056	5	33.600.350.056	5	33.150.350.056	5	33.150.350.056	5



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase efektifitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	%	100	100	2.253.083.600	100	2.259.820.000	100	6.405.680.000	100	6.455.680.000	100	6.355.680.000	100	6.555.680.000	100
		Persentase efektifitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	%	50	50	0	60	0	70	400.000.000	80	600.000.000	90	600.000.000	100	400.000.000	100
		Persentase efektifitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	%	60	100	36.781.736.400	100	13.740.611.614	100	32.512.180.000	100	34.512.180.000	100	36.205.871.100	100	37.112.180.000	100
2 16	Komunikasi dan Informatika																
	Dinas Komunikasi dan Informatika					36.782.450.580		43.878.486.556		88.138.850.892		93.199.654.437		97.882.017.536		101.853.118.144	
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	12.044.149.804	100	16.790.599.116	100	19.756.609.200	100	21.024.748.120	100	22.739.125.132	100	24.125.467.645	100
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	%	66	67	10.887.900.776	93	14.279.510.000	94	26.844.986.252	96	29.366.345.877	98	32.084.846.464	100	34.400.670.509	100
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	100	13.850.400.000	100	12.808.377.440	100	41.537.255.440	100	42.808.560.440	100	43.058.045.940	100	43.326.979.990	100
2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					13.861.187.652		15.252.142.452		16.341.560.031		16.813.150.392		16.922.734.966		18.101.802.152	
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	9.500.910.352	100	10.558.903.696	100	10.923.303.126	100	11.143.615.687	100	10.963.734.831	100	11.684.075.928	100
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan Izin Usaha	Koperasi	0	0	0	52	245.326.400	52	257.592.720	52	270.472.356	52	283.995.598	52	298.195.774	260
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif	%	5	5	397.990.800	10	264.885.600	15	748.103.260	20	811.336.643	25	880.314.517	30	955.582.389	30
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat	%	0	2	375.306.800	4	323.321.600	6	339.487.680	8	356.462.064	10	374.285.168	12	392.999.425	12
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikasi (IKK)	orang	0	140	390.304.000	316	981.458.000	316	1.030.530.900	316	1.082.057.445	316	1.136.160.317	316	1.192.968.333	1720
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang mandiri	Koperasi	0	0	339.090.800	1	65.390.800	1	368.660.340	1	387.093.357	1	406.448.025	1	426.770.426	5
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah usaha mikro	Pelaku usaha	0	575	1.672.585.500	1385	1.456.057.400	1385	1.595.947.070	1385	1.662.619.206	1385	1.767.307.940	1385	2.029.616.421	7500
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	Pelaku usaha	0	575	1.184.999.400	1385	1.356.798.956	1385	1.077.934.935	1385	1.099.493.634	1385	1.110.488.570	1385	1.121.593.456	7500
2 18	Penanaman Modal																
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					26.723.507.790		32.043.287.932		36.382.701.312		37.958.574.978		39.933.063.670		42.208.005.824	
2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	25.134.663.390	100	28.412.993.422	100	31.330.136.602	100	32.943.143.434	100	34.639.550.594	100	36.423.903.134	100
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	%	0	0	0	5	806.981.376	5	560.212.500	5	588.223.125	5	617.634.279	5	648.515.994	25
		Persentase Peningkatan Investasi	%	5	0	0	5	268.993.792	5	186.737.500	5	196.074.375	5	205.878.093	5	216.171.998	30
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi di Kota Medan	Rupiah	4.334.020.530.000	4.334.020.530.000	111.197.500	4.550.721.560.000	250.245.500	4.778.257.630.000	600.496.125	5.017.170.520.000	551.845.931	5.268.029.040.000	579.434.477	5.531.430.490.000	657.355.889	29.479.629.770.000
		Nilai Investasi di Kota Medan	Rupiah	4.334.020.530.000	4.334.020.530.000	111.197.500	4.550.721.560.000	250.245.500	4.778.257.630.000	600.496.125	5.017.170.520.000	551.845.931	5.268.029.040.000	579.434.477	5.531.430.490.000	657.355.889	5.531.430.490.000
		Nilai Investasi Asing di Kota Medan	US \$	42.271,43	42.271,43	222.395.000	44.385,00	500.491.000	46.604,25	1.200.992.250	48.934,45	1.103.691.862	51.381,18	1.158.868.954	53.950,24	1.314.711.778	53.950,24
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82	82	543.000.000	83	625.667.232	84	756.950.594	85	794.798.124	86	834.538.030	87	876.264.932	87
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Penanaman Modal	%	100	100	148.534.400	100	475.150.110	100	648.907.616	100	681.402.996	100	715.420.646	100	751.191.678	100
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi	1	1	452.520.000	1	452.520.000	1	497.772.000	1	547.549.200	1	602.304.120	1	662.534.532	1
2 19	Kepemudaan dan Olahraga																
	Dinas Pemuda dan Olahraga					38.494.892.605		43.988.633.830		37.616.616.745		38.745.114.285		42.323.790.260		40.113.230.212	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	0	100	27.522.723.154	100	27.644.677.575	100	28.690.093.890	100	29.550.795.710	100	31.360.156.375	100	31.358.977.680	100
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	0	10	1.239.241.920	8	1.115.120.750	12	1.698.574.310	13	1.749.531.580	14	1.802.017.545	15	1.856.078.027	72
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	%	0	33,33	9.389.833.031	33,33	14.948.630.705	45	6.144.337.605	47	6.328.667.730	50	6.518.527.760	42	5.714.083.580	42
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	%	0	12	343.094.500	10	280.204.800	40	1.083.610.940	42	1.116.119.265	80	2.643.088.580	40	1.184.090.925	40
2 20	Statistik																
	Dinas Komunikasi dan Informatika					126.000.000		495.300.000		1.420.000.000		1.297.000.000		1.476.200.000		1.331.200.000	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai	%	100	100	126.000.000	100	495.300.000	100	1.420.000.000	100	1.297.000.000	100	1.476.200.000	100	1.331.200.000	100
2 21	Persandian																
	Dinas Komunikasi dan Informatika					533.200.000		589.000.000		2.089.500.000		2.159.075.000		2.303.466.000		2.298.616.000	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	%	42	42	533.200.000	55	589.000.000	61	2.089.500.000	71	2.159.075.000	87	2.303.466.000	97	2.298.616.000	97
2 22	Kebudayaan																
	Dinas Kebudayaan					27.973.861.711		27.124.280.446		29.758.008.858		30.650.749.120		31.678.779.381		32.519.870.062	
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam rangka menunjang penyelenggaraan administrasi umum	Persen	100	100	14.944.067.500	100	15.960.257.446	100	16.759.065.168	100	17.261.837.120	100	17.779.692.231	100	18.203.810.289	100
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah pengembangan kebudayaan	Jumlah	0	5	10.506.757.400	10	3.036.235.000	12	3.727.322.050	15	3.839.141.711	15	3.954.315.962	20	4.072.945.440	20
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah	%	0	5	729.272.000	10	3.467.500.000	12	3.671.525.000	15	3.781.670.750	15	3.895.120.872	20	4.011.974.498	20
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah	%	0	3	1.000.000.000	5	910.288.000	10	1.037.596.640	12	1.068.724.539	15	1.100.786.275	15	1.133.809.863	15
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	0	32,07	493.764.811	32,54	3.690.000.000	33,02	4.100.700.000	33,49	4.223.721.000	33,97	4.458.940.421	33,97	4.592.708.644	33,97
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase permuseuman yang dikelola	%	0	3	300.000.000	5	60.000.000	10	461.800.000	12	475.654.000	15	489.923.620	15	504.621.328	15
2 23	Perpustakaan																
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					15.874.284.823		15.958.135.296		17.538.577.892		18.221.542.306		18.842.625.341		19.586.036.320	
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	100	100	13.557.060.295	100	13.620.474.248	100	14.545.787.012	100	15.138.967.699	100	15.667.573.497	100	16.315.732.922	100
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pembinaan perpustakaan	%	0,88	10,81	982.837.100	16,79	1.179.671.620	21,19	1.515.061.769	24,56	1.560.513.622	27,23	1.607.329.031	29,38	1.655.548.901	29,38
		Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	18.802	19.366	294.592.028	19.946	188.752.028	20.544	194.414.589	21.160	200.247.027	21.794	206.254.437	22.447	212.442.070	22.447
		Jumlah koleksi perpustakaan	Exemplar	91.702	93.673	876.468.000	95.673	660.910.000	97.673	680.737.300	99.673	701.159.419	101.673	722.194.202	103.673	743.860.027	103.673
		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	4	8	57.453.000	8	157.453.000	9	162.176.590	9	167.041.888	10	172.053.144	10	177.214.739	10
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	%	0,20	0,40	105.874.400	0,60	150.874.400	0,80	440.400.632	1,00	453.612.651	1,20	467.221.030	1,40	481.237.661	1,40
2 24	Kearsipan																
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					1.019.500.400		1.016.745.450		1.377.247.813		1.714.065.250		1.957.987.206		2.012.226.821	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pengelolaan arsip	%	3,89	9,40	584.179.100	12,97	571.135.700	16,21	588.269.771	19,46	605.917.865	22,70	624.095.400	25,94	642.818.262	25,94
		Jumlah dokumen/arsip yang dikelola	Dokumen	36.548	154.494	155.682.000	160.673	58.257.000	173.526	210.004.710	194.349	211.804.852	225.444	213.658.997	270.532	215.568.766	270.523
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	%	6,7	10	279.639.300	15	269.897.750	20	407.994.682	25	720.234.523	30	938.841.559	35	967.006.806	35
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase ketersediaan perizinan penggunaan arsip	%	0	0	0	10	117.455.000	20	170.978.650	30	176.108.010	40	181.391.250	50	186.832.987	50
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3 25	Kelautan dan Perikanan																
	Dinas Pertanian dan Perikanan					4.380.370.464		6.183.293.834		6.232.213.082		6.475.045.195		6.675.513.767		6.944.421.470	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	2	2	1.616.977.964	2	2.353.616.892	2	2.430.272.730	2	2.527.761.117	2	2.576.672.673	2	2.681.672.357	10



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%	2	2	2.321.186.750	2	2.975.343.492	2	2.928.763.352	2	3.054.329.078	2	3.186.758.094	2	3.330.246.113	10
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	2	2	91.847.200	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	10
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan	%	2	2	350.358.550	2	854.333.450	2	873.177.000	2	892.955.000	2	912.083.000	2	932.503.000	10
3 26	Pariwisata																
	Dinas Pariwisata					24.195.708.000		30.206.023.850		33.196.626.235		36.486.288.860		40.104.917.744		44.085.409.519	
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	%	78	100	16.737.793.500	100	18.387.818.100	100	18.777.526.235	100	19.910.000.000	100	20.923.000.000	100	21.730.000.000	100
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kegiatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kegiatan	0	4	665.910.000	4	186.260.000	4	0	4	450.000.000	4	350.000.000	4	500.000.000	24
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB	%	2.73	2.74	402.802.500	2.75	820.820.000	2.76	2.515.000.000	2.78	1.995.000.000	2.79	2.125.000.000	2.80	2.300.000.000	2.80
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	236025	243106	3.139.710.000	250399	2.616.410.000	262919	2.500.000.000	276065	2.400.000.000	289868	2.800.000.000	304361	3.200.000.000	1626718
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB	%	2.73	2.73	2.269.220.000	2.74	6.526.090.000	2.77	4.897.500.000	2.78	5.188.000.000	2.79	5.735.000.000	2.80	6.185.000.000	2.80
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	%	0	0	0	2	584.040.000	2	1.865.000.000	2	2.305.788.860	2	4.211.917.744	2	5.182.590.481	10
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	Pelaku usaha	0	0	0	50	0	50	500.000.000	50	525.000.000	50	670.000.000	50	714.819.038	250
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	0	0	980.272.000	3	1.084.585.750	3	2.141.600.000	3	3.712.500.000	3	3.290.000.000	3	4.273.000.000	15
3 27	Pertanian																
	Dinas Pertanian dan Perikanan					27.180.821.548		26.343.891.150		26.477.748.136		26.688.579.581		27.209.945.709		27.194.023.693	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	21.278.748.096	100	20.773.770.506	100	20.820.476.000	100	20.873.823.000	100	21.235.710.000	100	21.057.964.000	100
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Produksi Peternakan	%	1	1	2.502.272.700	1.2	2.834.593.798	1.2	2.956.706.750	1.2	3.033.026.588	1.2	3.109.913.917	1.2	3.187.559.611	6
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	%	1	1	75.130.600	2	581.441.060	2	501.441.060	2	511.469.000	2	521.699.000	2	532.133.000	10
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80.5	80.5	1.788.294.652	80.5	1.460.968.324	80.5	1.471.514.326	80.5	1.518.509.993	80.5	1.566.554.792	80.5	1.615.697.082	80.5
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan izin usaha tani	%	2	2	0	2	184.340.000	2	201.450.000	2	206.855.000	2	212.282.000	2	217.730.000	10
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	2	2	1.536.375.500	2	508.777.462	2	526.160.000	2	544.896.000	2	563.786.000	2	582.940.000	10
3 30	Perdagangan																
	Dinas Perdagangan					27.667.426.407		28.698.194.409		31.846.076.000		32.794.500.000		35.801.500.000		35.896.460.000	
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	75	75	13.042.954.660	80	13.412.214.246	85	13.634.076.000	90	14.047.500.000	95	14.379.000.000	95	14.681.460.000	95
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTJ/SIUP Toko Swalayan	%	70	70	853.738.550	75	795.448.070	80	840.000.000	85	867.000.000	90	895.000.000	90	995.000.000	90
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	buah	60 %	60 %	735.468.282	65 %	548.068.282	70 %	2.600.000.000	75 %	700.000.000	80 %	2.750.000.000	80 %	795.000.000	80 %
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Inflasi Kota Medan	%	3.34	3.34	8.598.160.800	3.25	8.631.253.338	3.20	8.740.000.000	3.15	8.805.000.000	3.1	9.012.500.000	3.1	9.160.000.000	3.34
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Kota Medan	US \$	3.153.000	3.153.000	2.563.859.040	3.468.300	2.252.963.535	3.815.130	3.152.000.000	4.196.645	4.200.000.000	4.589.000	4.370.000.000	4.589.000	4.900.000.000	4.589.000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	80	80	1.573.245.075	885	1.327.971.970	90	1.400.000.000	90	1.555.000.000	95	1.635.000.000	95	2.265.000.000	95
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan PDRB Kota Medan dari Sektor Perdagangan	%	24	24	300.000.000	24,5	1.730.274.968	25	1.480.000.000	25,5	2.620.000.000	26	2.760.000.000	26	3.100.000.000	26
3 31	Perindustrian																
	Dinas Perindustrian					15.580.761.373		14.772.100.519		15.371.213.485		15.692.172.100		16.029.178.575		16.383.035.278	
3 31 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	70	72	11.975.423.023	75	11.743.056.519	77	11.983.217.285	79	12.134.776.090	82	12.293.912.780	85	12.461.006.335	85
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	3,73	4,50	3.426.278.350	4,73	2.672.914.000	5,34	3.014.059.700	5,50	3.164.762.685	5,57	3.323.000.819	5,61	3.489.150.813	5,61
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Kepatuhan Industri yang Diawasi Terhadap Regulasi	%	30	70	179.060.000	72	218.860.000	75	229.803.000	77	241.293.150	79	253.357.800	81	266.025.600	81
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	12,32	0	0	15	137.270.000	17	144.133.500	19	151.340.175	21	158.907.176	23	166.852.530	23
4	UNSUR PENDUKUNG																
4 01	Sekretariat Daerah																
	Bagian Pembangunan					381.250.000		0		0		0		0		0	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang dilaksanakan	%	0	17	381.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
	Bagian Perekonomian					1.014.866.800		1.014.863.200		1.199.500.000		1.573.000.000		1.235.500.000		1.373.000.000	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	100	100	214.266.800	100	310.383.200	100	440.500.000	100	491.000.000	100	548.000.000	100	593.000.000	100
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat inflasi	%	3,5	3,5	800.600.000	3,5	704.480.000	3,5	759.000.000	3,5	1.082.000.000	3,5	687.500.000	3,5	780.000.000	3,5
	Bagian Hubungan Kerjasama Antar Kota, Daerah dan Lembaga					29.850.000		0		0		0		0		0	
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	61,48	100	29.850.000	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	Bagian Keagamaan					1.811.609.250		0		0		0		0		0	
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	10.534.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terlaksananya kegiatan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	1.801.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Bagian Pemerintahan					467.600.000		0		0		0		0		0	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintah, kewilayahan dan otonomi daerah	%	0	100	467.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Bagian Umum					108.016.160.452		81.887.267.222		114.820.844.270		125.183.728.696		138.843.251.852		152.826.543.724	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	100	100	20.784.369.470	100	16.653.539.370	100	18.318.893.307	100	20.150.782.638	100	22.165.860.902	100	24.382.446.992	100
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	100	100	87.231.790.982	100	65.233.727.852	100	96.501.950.963	100	105.032.946.058	100	116.677.390.950	100	128.444.096.732	100
	Bagian Hubungan Masyarakat					867.941.400		0		0		0		0		0	
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	1	1	6.110.000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0	0	861.831.400	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
	Bagian Hukum					2.665.608.400		3.346.608.400		3.468.000.000		3.788.000.000		4.009.000.000		4.130.000.000	
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	53	53	234.647.300	55	438.458.500	57	668.000.000	59	788.000.000	61	809.000.000	63	830.000.000	63
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase keterisian indikator kinerja kunci (IKK)	%	100	100	2.430.961.100	100	2.908.149.900	100	2.800.000.000	100	3.000.000.000	100	3.200.000.000	100	3.300.000.000	100
	Bagian Organisasi dan Tatalaksana					143.338.700		0		0		0		0		0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	%	0	100	143.338.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan					3.077.489.304		0									
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	100	100	24.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	3.053.039.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Bagian Sosial, Pendidikan					578.068.300		0									
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	%	100	100	90.804.300	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	50	50	487.264.000	60	0	70	0	80	0	90	0	100	0	100
	Bagian Kesejahteraan Rakyat					4.641.243.952		8.307.749.570		8.556.982.057		8.556.982.057		8.556.982.057		8.556.982.057	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	a	a	304.475.400	a	348.653.250	a	359.112.847	a	359.112.847	a	359.112.847	a	359.112.847	a
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase keterisian indikator kinerja kunci (IKK)	%	100	100	4.336.768.552	100	7.959.096.320	100	8.197.869.210	100	8.197.869.210	100	8.197.869.210	100	8.197.869.210	100
	Bagian Administrasi Pembangunan					1.518.512.840		2.622.462.840		2.757.329.982		2.899.314.782		3.048.810.698		3.206.234.491	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	0	100	432.900.840	100	1.116.140.000	100	1.273.466.300	100	1.358.773.515	100	1.429.039.621	100	1.534.296.603	100
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase keterisian indikator kinerja kunci (IKK)	%	0	0	0	100	115.896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	100	240.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		Tingkat inflasi	%	0	100	845.612.000	100	1.390.426.840	100	1.483.863.682	100	1.540.541.267	100	1.619.771.077	100	1.671.937.888	100
	Bagian Kerja Sama					2.139.604.388		2.630.212.290		3.050.106.742		3.352.117.416		3.678.829.157		4.038.212.074	
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	0	0	560.953.900	0	692.729.070	0	918.875.200	0	1.007.762.720	0	1.100.038.991	0	1.201.542.892	0
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan kerja sama dalam/ luar negeri	%	75	75	1.578.650.488	75	1.937.483.220	80	2.131.231.542	80	2.344.354.696	85	2.578.790.166	85	2.836.669.182	85
	Bagian Tata Pemerintahan					4.838.880.000		10.169.198.600		16.766.000.000		19.077.000.000		19.128.000.000		20.139.000.000	
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	53	55	1.237.995.000	57	436.253.600	59	956.000.000	61	1.037.000.000	63	1.098.000.000	65	1.159.000.000	65
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase keterisian indikator kinerja kunci (IKK)	%	100	100	3.600.885.000	100	9.732.945.000	100	15.810.000.000	100	18.040.000.000	100	18.030.000.000	100	18.980.000.000	100
	Bagian Organisasi					2.309.270.900		2.791.447.740		3.066.000.000		3.248.500.000		3.427.000.000		3.505.500.000	
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	Cc	Cc	2.309.270.900	B	2.791.447.740	Bb	3.066.000.000	Bb	3.248.500.000	Bb	3.427.000.000	A	3.505.500.000	Bb
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					7.375.073.424		6.766.950.840		7.354.229.200		7.841.519.600		8.262.322.000		8.729.645.400	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	1	1	3.491.764.424	1	2.019.890.840	1	2.195.739.000	1	2.354.133.600	1	2.522.368.000	1	2.718.495.400	6
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase keterisian indikator kinerja kunci (IKK)	%	100	100	0	100	185.200.000	100	0	100	0	100	0	100	0	600
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	100	3.883.309.000	100	4.561.860.000	100	5.158.490.200	100	5.487.386.000	100	5.739.954.000	100	6.011.150.000	600
	Bagian Sumber Daya Alam					498.255.315		1.898.096.544		2.049.521.898		2.203.474.088		2.333.821.497		2.400.678.228	
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	100	100	293.495.315	100	581.383.544	100	639.521.898	100	703.474.088	100	773.821.497	100	770.678.228	100
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase keterisian indikator kinerja kunci (IKK)	%	100	100	204.760.000	100	1.316.713.000	100	1.410.000.000	100	1.500.000.000	100	1.560.000.000	100	1.630.000.000	100
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan					3.798.272.497		10.839.365.004		11.898.301.505		13.088.131.655		14.396.944.822		15.836.639.303	
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	1	1	885.221.538	1	3.487.450.308	1	3.811.195.339	1	4.192.314.873	1	4.611.546.361	1	5.072.700.997	1
		Persentase informasi tentang kegiatan KDH yang dipublikasikan	%	100	100	2.573.335.345	100	6.996.914.696	100	7.696.606.166	100	8.466.266.782	100	9.312.893.461	100	10.244.182.806	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan kerja sama dalam/ luar negeri	%	1	0	339.715.614	1	355.000.000	1	390.500.000	1	429.550.000	1	472.505.000	1	519.755.500	1
	Bagian Perencanaan dan Keuangan					33.993.866.856		50.271.178.800		55.367.970.680		60.900.433.072		66.981.807.029		73.666.983.706	
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	100	100	33.993.866.856	100	50.271.178.800	100	55.367.970.680	100	60.900.433.072	100	66.981.807.029	100	73.666.983.706	100
4 02	Sekretariat DPRD																
	Sekretariat DPRD					200.364.355.343		207.424.908.644		213.415.258.870		220.104.301.371		226.472.826.120		232.526.038.076	
4 02 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	60	62	4.539.876.504	66	3.664.978.808	69	3.771.263.195	72	3.880.629.825	76	3.993.168.093	81	4.108.969.964	81
		Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	Poin	2.668	2.70	119.214.163.991	2.74	89.062.829.226	2.78	91.645.651.273	2.82	94.303.375.157	2.86	97.038.173.039	3.07	99.852.280.060	3.07
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai	2,668 (C)	2,70 (C)	76.610.314.848	2,74 (C)	114.697.100.610	2,78 (C)	117.998.344.402	2,82 (C)	121.920.296.389	2,86 (C)	125.441.484.988	3,07 (B)	128.564.788.052	3,07 (B)
5	UNSUR PENUNJANG																
5 01	Perencanaan																
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					24.292.278.919		26.802.077.838		28.319.658.915		30.934.097.590		33.740.718.043		37.497.335.352	
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	100	100	12.203.774.579	100	13.625.049.263	100	14.152.165.484	100	15.342.354.820	100	16.690.300.999	100	18.114.376.610	100
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	Poin	19,09	22	4.861.893.900	23	3.789.850.175	24	4.079.647.191	25	4.467.611.906	26	4.914.373.094	27	6.155.810.400	27
		Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	Poin	10,13	15	813.108.000	16	603.338.000	17	863.671.800	18	950.038.980	19	1.047.042.878	20	1.151.747.165	20
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	NA	90	3.237.955.000	92	4.052.730.000	94	4.458.003.000	96	4.903.803.300	98	5.394.183.630	100	5.933.601.993	90
		Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	NA	80	1.114.617.400	81	1.531.210.000	82	1.684.331.000	83	1.852.764.100	84	2.038.040.510	85	2.241.844.559	85
		Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	%	NA	90	2.060.930.040	92	3.199.900.400	94	3.081.840.440	96	3.417.524.484	98	3.656.776.932	100	3.899.954.625	100
5 02	Keuangan																
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah					180.069.994.370		208.450.589.802		230.988.756.719		260.859.420.024		292.393.663.674		327.945.594.664	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	153.134.260.770	100	195.281.469.785	100	217.028.169.104	100	246.672.014.780	100	277.527.236.272	100	312.863.574.446	100
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	%	77,96	79,83	26.935.733.600	82,15	13.169.120.017	82,15	13.960.587.615	82,15	14.187.405.244	82,15	14.866.427.402	82,15	15.082.020.218	82,15
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah					99.192.211.883		100.750.500.000		101.468.900.000		101.655.000.000		102.725.000.000		103.630.000.000	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100%	100%	19.698.833.400	100%	18.864.493.880	100%	19.569.000.000	100%	19.855.000.000	100%	19.975.000.000	100%	20.430.000.000	100%
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu	tepat waktu	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	74.197.590.983	TEPAT WAKTU	72.986.006.120	TEPAT WAKTU	76.149.900.000	TEPAT WAKTU	75.650.000.000	TEPAT WAKTU	76.350.000.000	TEPAT WAKTU	76.650.000.000	TEPAT WAKTU
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan barang milik daerah terhadap PAD	%	0	100	5.295.787.500	100	8.900.000.000	100	5.750.000.000	100	6.150.000.000	100	6.400.000.000	100	6.550.000.000	100
5 03	Kepegawaian																
	Bagian Pembangunan					0		0		0		0		0		0	
	Bagian Perekonomian					0		0		0		0		0		0	
	Bagian Hubungan Kerjasama Antar Kota, Daerah dan Lembaga					0		0		0		0		0		0	
	Bagian Keagamaan					0		0		0		0		0		0	
	Bagian Pemerintahan					0		0		0		0		0		0	
	Bagian Umum					0		0		0		0		0		0	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Bagian Hubungan Masyarakat					0		0		0		0		0		0		0
	Bagian Hukum					0		0		0		0		0		0		0
	Bagian Organisasi dan Tatalaksana					0		0		0		0		0		0		0
	Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan					0		0		0		0		0		0		0
	Bagian Sosial, Pendidikan					0		0		0		0		0		0		0
	Bagian Kesejahteraan Rakyat					0		0		0		0		0		0		0
	Bagian Administrasi Pembangunan					114.290.000		0		0		0		0		0		0
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan program kepegawaian daerah yang menunjang kompetensi ASN	%	0	100	114.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Bagian Kerja Sama					0		0		0		0		0		0		0
	Bagian Tata Pemerintahan					0		0		0		0		0		0		0
	Bagian Organisasi					0		0		0		0		0		0		0
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa					0		0		0		0		0		0		0
	Bagian Sumber Daya Alam					0		0		0		0		0		0		0
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan					0		0		0		0		0		0		0
	Bagian Perencanaan dan Keuangan					0		0		0		0		0		0		0
	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					25.798.364.357		25.496.286.844		26.830.000.000		27.862.499.400		28.760.000.000		29.725.000.000		
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang tersusun	Dokumen	0	4	12.823.329.000	3	12.846.249.000	3	13.155.000.000	3	13.415.100.000	3	13.897.000.000	4	14.201.940.000	20	
		Persentase prasarana dan sarana kantor yang tersedia dan berfungsi	%	0	91	3.994.104.600	92	3.567.755.244	93	3.902.430.000	94	4.010.678.000	95	3.963.000.000	96	4.103.060.000	96	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Aplikasi	4	4	2.510.730.757	4	2.371.957.600	4	2.350.000.000	4	2.350.000.000	4	2.350.000.000	4	2.350.000.000	4	
		Jumlah pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur	buah	0	10	2.089.140.000	12	3.068.065.000	12	3.182.570.000	12	3.436.721.400	12	3.550.000.000	12	3.800.000.000	70	
		Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	Orang /Kegiatan	0	621	4.381.060.000	588	3.642.260.000	597	4.240.000.000	603	4.650.000.000	609	5.000.000.000	615	5.270.000.000	3633	
5 04	Pendidikan dan Pelatihan																	
	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					3.640.704.000		3.942.781.200		5.170.000.000		5.205.000.000		5.240.000.000		5.275.000.000		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	Orang /Kegiatan	0	703	3.640.704.000	828	3.942.781.200	870	5.170.000.000	930	5.205.000.000	930	5.240.000.000	980	5.275.000.000	5241	
5 05	Penelitian dan Pengembangan																	
	Badan Penelitian dan Pengembangan					9.879.239.850		10.677.906.816		15.297.750.000		15.708.682.500		16.229.382.980		16.716.264.470		
5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	6.543.287.400	100	6.404.750.000	100	6.454.750.000	100	6.474.750.000	100	6.489.750.000	100	6.654.750.000	100	
		Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	Orang /Kegiatan	0	0	0	0	0	30	150.000.000	30	170.000.000	30	170.000.000	30	180.000.000	120	
		Persentase Pegawai yang disiplin Dalam Berpakaian	%	100	100	39.290.000	100	34.595.600	100	45.000.000	100	48.000.000	100	48.000.000	100	50.000.000	100	
		Persentase pelaksanaan Fungsi-fungsi Penatausahaan Kantor	%	100	100	1.090.404.450	100	842.016.216	100	1.113.000.000	100	1.295.932.500	100	1.336.632.980	100	1.346.514.470	100	
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0	0	0	77	1.100.000.000	79	1.100.000.000	81	1.100.000.000	83	1.100.000.000	85	1.100.000.000	85	
		Persentase Kualitas Hasil Penelitian yang dilakukan	%	1	1	1.634.095.700	1	1.795.212.000	1	3.120.000.000	1	3.725.000.000	1	3.955.000.000	1	4.390.000.000	5	
		Persentase Kualitas Hasil Penelitian yang dilakukan	%	3	3	572.162.300	3	501.333.000	3	3.315.000.000	3	2.895.000.000	3	3.130.000.000	3	2.995.000.000	15	
6	UNSUR PENGAWASAN																	
6 01	Inspektorat																	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inspektorat					31.883.893.063		32.466.039.443		37.151.580.126		38.227.298.179		39.187.069.951		40.282.093.708	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	-	1	21.311.306.600	1	21.628.662.180	1	22.436.997.305	1	22.819.015.036	1	23.135.057.539	1	23.475.580.893	100
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	%	-	100	2.016.729.000	100	2.022.609.000	100	2.812.804.103	100	3.206.524.718	100	3.659.303.426	100	4.179.998.939	-
		Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	%	-	100	4.274.912.863	100	4.278.777.863	100	6.414.146.145	100	6.463.503.067	100	6.486.453.527	100	6.512.846.556	100
		Persentase peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal dengan tujuan tertentu	%	-	100	1.890.401.000	100	2.056.361.000	100	2.504.411.573	100	2.610.873.308	100	2.627.504.305	100	2.646.629.950	-
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	%	-	100	2.390.543.600	100	2.479.629.400	100	2.983.221.000	100	3.127.382.050	100	3.278.751.154	100	3.467.037.370	-
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01	Kecamatan																
	Kecamatan Medan Belawan					26.117.759.700		31.377.865.094		34.283.047.148		37.454.869.155		40.915.681.008		44.759.023.631	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	70	70	8.131.425.200	75	8.642.768.797	80	10.128.050.967	85	11.121.183.941	90	12.212.437.858	100	13.422.266.748	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	6.822.513.500	75	9.949.364.768	80	10.646.772.771	85	11.474.639.464	90	12.358.292.826	100	13.357.311.527	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	10.390.638.500	80	10.149.117.829	85	12.572.672.585	90	13.829.939.843	95	15.212.933.827	100	16.734.227.210	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	70	600.598.500	80	2.487.973.700	85	726.724.185	90	799.396.603	95	879.336.263	100	967.269.889	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	70	172.584.000	75	148.640.000	80	208.826.640	85	229.709.304	90	252.680.234	100	277.948.257	100
	Kecamatan Medan Labuhan					26.274.724.264		28.757.458.173		29.609.509.395		30.497.199.816		31.407.808.238		32.271.734.060	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	70	70	9.730.198.164	76	10.034.205.077	82	10.492.857.189	88	10.873.313.993	94	11.125.589.875	100	11.514.731.783	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	5.412.495.300	76	7.829.156.748	82	7.858.045.268	88	7.943.571.840	94	8.001.842.869	100	8.040.741.332	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	10.346.274.000	76	10.312.665.748	82	10.659.837.420	88	10.983.125.263	94	11.316.461.012	100	11.660.181.034	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	70	684.956.800	76	453.830.600	82	467.445.518	88	560.000.000	94	820.492.600	100	906.026.123	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	70	100.800.000	76	127.600.000	82	131.324.000	88	137.188.720	94	143.421.882	100	150.053.788	100
	Kecamatan Medan Kota					46.055.200.865		58.109.340.469		69.947.149.149		68.830.804.805		70.583.804.805		73.074.804.805	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	80	80	16.462.507.901	82	18.992.925.849	84	19.393.163.000	86	21.529.163.000	88	22.630.163.000	90	24.176.163.000	90
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	8.083.128.500	100	17.519.523.988	100	19.469.999.549	100	20.419.999.549	100	21.019.999.549	100	21.919.999.549	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	NA	70	20.597.014.464	75	20.571.331.632	80	30.035.106.600	90	25.810.762.256	100	25.810.762.256	100	25.810.762.256	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	80	80	673.610.000	81	745.939.000	83	788.880.000	84	800.880.000	85	847.880.000	86	887.880.000	85
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	65	65	238.940.000	70	279.620.000	75	260.000.000	80	270.000.000	85	275.000.000	90	280.000.000	70
	Kecamatan Medan Timur					42.097.991.996		52.711.117.054		58.239.776.361		63.062.981.589		68.421.656.363		74.307.200.724	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75	75	14.743.878.624	80	15.394.786.424	85	17.774.494.232	90	19.551.943.655	95	21.507.138.022	100	23.657.851.823	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	7.864.317.972	80	17.736.036.742	85	18.262.153.270	90	19.140.746.120	95	20.107.198.255	100	21.170.296.803	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	18.896.141.000	80	18.832.317.888	85	21.325.352.059	90	23.457.887.264	95	25.803.675.981	100	28.375.043.580	100



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	75	363.893.400	80	489.142.000	85	610.688.000	90	618.606.870	95	680.466.657	100	748.513.325	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	229.761.000	80	258.834.000	85	267.088.800	90	293.797.680	95	323.177.448	100	355.495.193	100
	Kecamatan Medan Helvetia					30.559.800.941		38.046.112.471		39.187.495.847		40.363.030.722		41.573.689.766		43.942.020.507	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75	75	12.719.045.741	80	14.163.171.539	85	14.588.066.686	90	15.025.708.687	95	15.476.248.071	100	15.940.535.514	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	5.043.506.000	75	11.130.179.584	80	11.464.084.972	85	11.807.917.521	90	12.162.155.047	100	12.527.019.698	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	12.058.428.200	80	12.057.452.548	85	12.419.176.125	90	12.791.751.408	95	13.175.503.950	100	13.570.769.068	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	60	60	523.296.000	70	511.368.800	80	526.709.864	90	542.511.160	95	558.786.494	100	1.690.991.507	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	70	215.525.000	80	183.940.000	85	189.458.200	90	195.141.946	95	200.996.204	100	212.704.720	100
	Kecamatan Medan Marelan					23.392.039.228		26.141.311.327		26.246.577.516		58.002.277.516		26.354.577.516		26.552.577.516	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	0	75	9.305.387.028	80	9.200.096.849	85	9.187.091.424	90	9.287.091.424	95	9.287.091.424	100	9.477.091.424	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0	75	4.475.852.200	80	7.866.382.515	85	7.910.483.692	90	39.561.183.692	95	7.912.483.692	100	7.914.483.692	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	75	8.715.960.400	80	8.702.390.963	85	8.729.002.400	90	8.734.002.400	95	8.735.002.400	100	8.741.002.400	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	0	75	741.504.000	80	250.849.600	85	270.000.000	90	270.000.000	95	270.000.000	100	270.000.000	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	0	75	153.335.600	80	121.591.400	85	150.000.000	90	150.000.000	95	150.000.000	100	150.000.000	100
	Kecamatan Medan Denai					30.425.339.838		34.937.985.174		44.551.437.208		44.551.437.208		44.556.437.208		44.556.437.208	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	0	80	14.033.654.838	90	14.421.162.092	90	14.329.350.000	100	14.329.350.000	100	14.334.350.000	100	14.334.350.000	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0	100	4.722.951.500	100	9.495.268.266	100	8.977.787.208	100	8.977.787.208	100	8.977.787.208	100	8.977.787.208	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	80	10.421.499.000	80	10.411.065.816	90	19.121.000.000	90	19.121.000.000	100	19.121.000.000	100	19.121.000.000	100
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	0	80	361.634.300	80	175.514.000	90	232.500.000	90	232.500.000	100	232.500.000	100	232.500.000	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	0	80	866.346.200	80	434.975.000	90	1.890.800.000	90	1.890.800.000	100	1.890.800.000	100	1.890.800.000	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	NA	80	19.254.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	
	Kecamatan Medan Area					48.978.071.036		51.887.413.167		53.444.035.562		55.047.356.629		56.698.777.327		58.399.740.647	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75	75	16.106.207.000	80	17.589.393.210	85	18.117.075.008	90	18.660.587.256	95	19.220.404.873	100	19.797.017.021	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	11.888.173.000	80	12.684.818.190	85	13.065.362.736	90	13.457.323.618	95	13.861.043.326	100	14.276.874.625	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	12	12	20.175.238.536	12	20.780.495.692	12	21.403.910.562	12	22.046.027.880	12	22.707.408.716	12	23.388.630.977	12
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	75	433.278.800	80	446.277.164	85	459.665.478	90	473.455.443	95	487.659.107	100	502.288.880	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	375.173.700	80	386.428.911	85	398.021.778	90	409.962.432	95	422.261.305	100	434.929.144	100
	Kecamatan Medan Baru					25.968.682.622		31.918.341.081		33.497.189.096		34.920.496.221		36.529.596.035		38.213.350.831	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	20	20	11.311.700.600	40	12.208.114.179	60	12.615.866.413	70	13.126.707.408	85	13.781.942.779	100	14.469.914.915	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	3.818.582.250	100	8.871.798.464	100	8.885.486.932	100	9.198.986.276	100	9.523.510.592	100	9.858.586.121	100



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	6	6	10.343.584.672	6	10.356.081.738	6	11.450.302.101	6	12.021.992.206	6	12.622.691.816	6	13.253.326.407	6
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	7	7	340.018.100	7	319.575.700	7	374.869.957	7	393.613.454	7	413.294.127	7	433.958.831	7
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	100	154.797.000	100	162.771.000	100	170.663.693	100	179.196.877	100	188.156.721	100	197.564.557	100
	Kecamatan Medan Polonia					21.150.867.940		25.490.533.209		25.909.876.628		27.104.876.628		28.302.876.628		29.497.876.628	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	100	100	9.064.684.120	100	9.829.170.356	100	9.695.000.000	100	10.002.500.000	100	10.310.000.000	100	10.617.500.000	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	50	50	13.339.400	60	3.371.916.028	70	3.375.876.628	80	3.377.876.628	90	3.379.876.628	100	3.381.876.628	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	50	50	8.659.001.020	60	8.525.178.901	70	9.094.000.000	80	9.802.000.000	90	10.513.000.000	100	11.221.000.000	100
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	50	50	2.920.770.000	60	3.241.400.724	70	3.100.000.000	80	3.200.000.000	90	3.300.000.000	100	3.400.000.000	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	50	50	368.696.800	60	355.357.600	70	495.000.000	80	560.000.000	90	625.000.000	100	690.000.000	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	50	50	124.376.600	60	167.509.600	70	150.000.000	80	162.500.000	90	175.000.000	100	187.500.000	100
	Kecamatan Medan Tembung					32.392.416.761		39.474.782.525		41.625.051.119		43.950.270.926		46.470.328.137		49.203.713.041	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75	75	16.274.010.265	80	17.408.522.137	85	17.929.347.097	90	18.465.796.808	95	19.018.340.012	100	19.587.459.508	80
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	3.580.001.000	80	9.488.792.132	85	9.883.628.370	90	10.318.202.331	95	10.796.100.589	100	11.321.788.673	80
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	11.871.748.000	80	11.995.703.960	85	13.195.274.356	90	14.514.801.791	95	15.966.281.970	100	17.562.910.167	80
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	75	487.129.296	80	416.964.296	85	431.649.296	90	447.802.796	95	465.571.646	100	485.117.381	80
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	179.528.200	80	164.800.000	85	185.152.000	90	203.667.200	95	224.033.920	100	246.437.312	80
	Kecamatan Medan Perjuangan					36.231.377.180		43.993.781.016		48.403.413.000		53.244.197.000		58.564.414.000		64.413.419.000	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75	75	13.413.548.580	80	15.087.881.483	85	16.596.662.000	90	18.256.331.000	93	20.081.964.000	100	22.090.161.000	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	6.760.069.100	80	12.963.572.143	85	14.256.793.000	90	15.685.482.000	95	17.252.899.000	100	18.977.352.000	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	15.466.943.000	80	15.281.384.390	85	16.809.522.000	90	18.490.474.000	95	20.339.521.000	100	22.373.473.000	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	75	400.151.100	80	447.546.100	85	505.700.000	90	553.700.000	95	606.000.000	100	660.000.000	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	190.665.400	80	213.396.900	0	234.736.000	0	258.210.000	0	284.030.000	0	312.433.000	80
	Kecamatan Medan Barat					28.070.187.886		34.640.679.014		35.876.174.124		36.952.459.350		38.060.060.510		39.202.864.122	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	N/A	70	11.113.468.318	80	11.839.641.297	85	12.194.830.535	90	12.560.675.453	95	12.936.523.099	100	13.325.620.587	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	N/A	70	5.339.179.200	80	11.935.037.564	85	12.293.088.691	90	12.661.881.352	95	13.041.737.792	100	13.432.989.926	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	N/A	70	10.334.933.268	80	10.222.316.653	85	10.528.986.153	90	10.844.855.737	95	11.170.201.408	100	11.505.307.451	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	N/A	70	1.027.427.500	80	464.582.500	85	674.794.715	90	695.038.557	95	715.889.713	100	737.366.405	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	N/A	70	255.179.600	80	179.101.000	85	184.474.030	90	190.008.251	95	195.708.498	100	201.579.753	100
	Kecamatan Medan Tuntungan					37.722.458.251		42.286.882.133		43.810.216.403		45.139.465.292		46.515.083.890		47.944.302.222	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75	75	16.225.676.452	80	16.830.313.174	85	17.466.121.355	90	18.005.662.152	95	18.562.944.883	100	19.153.599.046	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	70	5.085.072.500	75	9.197.981.972	80	9.495.921.432	85	9.780.799.074	90	10.074.223.046	100	10.376.449.737	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	70	15.504.235.799	75	15.415.274.987	80	15.877.733.236	85	16.354.065.234	90	16.844.687.190	95	17.350.027.806	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	70	688.503.300	75	624.341.800	80	744.901.074	85	766.633.347	90	793.954.121	95	817.772.744	95
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	218.970.200	80	218.970.200	85	225.539.306	90	232.305.485	95	239.274.650	100	246.452.889	100
	Kecamatan Medan Selayang					27.505.848.050		32.884.439.911		33.975.706.347		34.994.976.517		36.044.824.372		37.126.167.524	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	0	75	12.364.309.850	80	12.764.359.204	85	13.252.028.000	90	13.649.585.200	95	14.059.073.836	100	14.480.844.361	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	0	75	3.949.725.000	80	8.971.051.550	85	9.262.037.347	90	9.539.900.317	95	9.826.096.536	100	10.120.879.163	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	75	10.337.241.600	80	10.331.265.157	85	10.641.202.000	90	10.960.439.000	95	11.289.251.000	100	11.627.929.000	100
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban di kecamatan	Persen	0	0	0	0	0	85	259.655.000	90	267.445.000	95	275.468.000	100	283.732.000	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	0	75	640.476.000	80	544.451.000	85	560.784.000	90	577.607.000	95	594.935.000	100	612.783.000	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban di kecamatan	Persen	0	75	214.095.600	80	273.313.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100
	Kecamatan Medan Petisah					29.221.799.212		36.858.296.841		38.141.402.277		39.311.570.637		40.519.436.673		41.766.390.589	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75	75	12.076.028.812	80	12.953.359.432	85	13.519.316.747	90	13.950.822.539	95	14.397.866.135	100	14.861.172.931	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	4.297.978.700	80	11.044.219.184	85	11.392.373.940	90	11.734.145.159	95	12.086.169.512	100	12.448.754.600	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	12.041.146.300	80	12.035.573.185	85	12.396.640.380	90	12.768.539.592	95	13.151.595.779	100	13.546.143.653	100
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban di kecamatan	Persen	80	0	0	0	0	85	194.726.650	90	200.568.450	95	206.585.503	100	212.783.068	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	75	600.021.400	80	619.752.000	85	638.344.560	90	657.494.897	95	677.219.744	100	697.536.337	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	75	206.624.000	80	205.393.040	0	0	0	0	0	0	0	0	80
	Kecamatan Medan Johor					29.651.067.100		32.563.213.156		33.253.320.237		33.365.433.145		33.472.671.981		33.530.876.253	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	80	80	11.908.358.500	85	12.806.097.240	90	13.309.688.994	95	13.360.296.492	100	13.422.706.521	100	13.433.981.738	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	4.519.834.800	80	8.933.477.076	85	8.959.071.231	90	8.967.329.768	95	8.968.929.768	100	8.981.081.233	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	60	70	10.322.799.900	80	10.308.999.240	85	10.309.165.540	90	10.310.165.540	95	10.310.165.540	100	10.311.165.540	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	70	2.737.151.700	80	361.750.600	85	512.472.272	90	548.426.925	95	573.734.290	100	587.798.242	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	70	162.922.200	80	152.889.000	80	162.922.200	90	179.214.420	90	197.135.862	100	216.849.500	100
	Kecamatan Medan Maimun					25.536.140.738		30.277.709.749		32.981.429.661		36.160.704.381		40.623.475.321		44.661.371.362	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	75	75	10.599.589.038	80	10.581.311.779	85	11.350.098.742	90	12.485.108.617	95	14.604.339.989	100	16.064.773.925	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	75	75	4.019.202.300	80	8.780.153.756	85	9.187.123.375	90	10.096.091.362	95	11.094.922.527	100	12.193.413.824	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	75	75	10.339.739.200	80	10.324.881.014	85	11.802.215.344	90	12.887.635.222	95	14.176.398.745	100	15.594.038.618	100
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentrangan dan ketertiban di kecamatan	Persen	75	75	19.740.000	80	19.740.000	85	21.714.000	90	23.885.400	95	26.273.940	100	28.901.334	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	75	75	410.178.800	80	420.222.800	85	456.097.800	90	489.476.100	95	525.579.500	100	564.686.979	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	75	75	147.691.400	80	151.400.400	85	164.180.400	90	178.507.680	95	195.960.620	100	215.556.682	100
	Kecamatan Medan Deli					26.423.464.086		32.073.019.911		32.678.942.811		33.974.661.088		34.667.092.501		35.895.908.696	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	0	70	10.204.710.884	80	11.290.640.308	85	11.495.914.259	90	12.022.607.286	95	12.194.017.511	100	12.748.641.458	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	70	5.236.000.000	75	9.678.353.556	80	9.968.704.161	85	10.401.299.680	87	10.575.798.245	90	10.893.072.191	90
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	0	70	10.403.225.002	80	10.561.663.647	85	10.655.691.119	90	10.975.361.853	95	11.304.622.709	100	11.643.761.390	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	80	85	444.368.200	86	408.562.400	87	420.819.272	88	433.443.849	89	446.447.164	100	459.840.579	90
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	80	80	135.160.000	83	133.800.000	84	137.814.000	85	141.948.420	87	146.206.872	100	150.593.078	90
	Kecamatan Medan Amplas					32.782.166.500		37.653.121.459		38.805.966.102		39.970.145.087		41.169.249.440		42.404.326.926	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	%	70	75	15.186.356.100	80	15.975.452.824	85	16.477.967.409	90	16.972.306.432	95	17.481.475.626	100	18.005.919.896	100
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	70	75	4.685.294.600	80	8.917.954.060	85	9.185.492.681	90	9.461.057.462	95	9.744.889.185	100	60.037.235.861	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	70	75	12.083.798.300	80	12.057.624.075	85	12.419.352.797	90	12.791.933.381	95	13.175.691.383	100	13.570.962.125	100
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	70	75	622.947.000	80	507.240.000	85	522.457.200	90	538.130.917	95	554.274.844	100	570.903.089	100
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	70	75	203.770.500	80	194.850.500	85	200.696.015	90	206.716.895	95	212.918.402	100	219.305.955	100
	Kecamatan Medan Sunggal					29.472.137.273		36.669.157.200		41.342.438.788		43.863.236.700		47.040.012.300		49.119.466.450	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	%	1	1	12.926.885.000	2	12.950.563.424	3	14.770.000.000	4	15.288.000.000	5	16.306.000.000	5	17.136.434.950	5
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	50	50	1.067.576.675	60	1.357.666.376	70	1.305.000.000	80	1.425.000.000	90	1.540.000.000	100	1.640.000.000	100
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan	6	6	10.240.338.398	6	10.185.209.400	6	12.532.500.000	6	13.535.000.000	6	14.787.500.000	6	15.215.845.500	6
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	30	30	445.291.000	60	382.273.000	90	550.000.000	120	625.000.000	150	665.000.000	195	700.000.000	195
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	%	100	100	155.982.000	100	156.824.100	100	159.985.800	100	162.485.800	100	182.700.000	100	185.200.000	100
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8 01	Kesatuan Bangsa dan Politik																
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					34.462.419.080		34.462.419.000		36.969.700.000		37.182.300.000		37.526.450.000		37.005.520.000	
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah	%	90	90	30.857.967.170	90	29.805.142.000	100	30.833.100.000	100	30.576.800.000	100	31.825.950.000	100	31.633.020.000	100
8 01 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan masyarakat yang sadar dan paham Pancasila dalam mewujudkan Medan Bersih Narkoba	Kelurahan	20	20	1.411.023.810	20	1.447.669.000	19	1.708.000.000	18	1.803.500.000	17	1.846.000.000	17	1.845.000.000	17
8 01 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Capaian tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Medan sebagai warga negara	%	50	50	381.747.000	55	489.551.000	60	903.600.000	70	1.077.000.000	80	569.500.000	80	528.000.000	80
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam sinergitas Medan Bersih Narkoba	Kelurahan	20	20	116.862.000	20	367.696.000	19	535.000.000	18	560.000.000	17	535.000.000	17	498.000.000	17



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan masyarakat yang sadar dan peduli Medan Bersih Narkoba	Kelurahan	20	20	540.700.500	20	858.642.000	19	1.095.000.000	18	1.220.000.000	17	1.055.000.000	17	930.500.000	17
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik di Kota Medan yang ditindaklanjuti	%	70	70	1.154.118.600	75	1.493.719.000	80	1.895.000.000	80	1.945.000.000	90	1.695.000.000	90	1.571.000.000	90
Total :						5.590.441.983.921		6.811.602.673.492		6.940.332.872.214		6.973.538.256.604		7.169.036.555.050		7.543.857.247.444	



Kerangka Pendanaan Lainnya

Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah guna membiayai kegiatan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, membawa konsekuensi yaitu Pemerintah Daerah dituntut lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan sesuai potensi daerah yang ada, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kota Medan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan memiliki beberapa program pembangunan diantaranya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2024, Program penanganan banjir (normalisasi Daerah Aliran Sungai), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah berbasis *Sanitary Landfill*. Oleh Karena besarnya kebutuhan fiskal dalam perencanaan pembangunan Kota Medan, maka Kota Medan harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai dari pemerintah pusat dan CSR sebagai rekan pembangunan.

Kondisi ini terjadi dalam konteks pembiayaan yang diharapkan dapat dijalankan pemerintah daerah, Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan.

Keselarasan dengan Pembangunan Propinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Kota Medan dalam penyelenggaraan program pembangunan harus memperhatikan dan mempedomani arahan dan prioritas pembangunan Propinsi Sumatera Utara khususnya untuk menangani permasalahan dan isu strategis yang sama. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama khususnya dalam menangani permasalahan dan isu-siu strategis dalam lingkup Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan seperti isu pelayanan infrastruktur dasar, jalan, persampahan dan air minum. Disamping itu ada isu dan permasalahan stunting yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Sebagai bentuk keselaran tersebut disajikan dalam matriks keselaran program pembangunan Kota Medan dalam mendukung Program Prioritas Propinsi Sumatera Utara.



Tabel 7.3
Keselarasan Program Pembangunan Kota Medan dalam Mendukung Program Prioritas Propinsi Sumatera Utara

NO	Prioritas Pembangunan Sumatera Utara	Rincian Prioritas Pembangunan Kota Medan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Kompetensi SDM Unggul		5.011.145.000	6.510.707.500	8.802.215.000	9.816.848.650	10.426.633.613	10.769.465.293
		Medan Zona Bebas Korupsi	2.665.919.100	3.147.017.400	3.392.215.000	3.516.848.650	3.506.633.613	3.639.465.293
		Penerapan Merit System pada Manajemen SDM	1.189.890.000	1.399.890.000	1.750.000.000	2.000.000.000	2.250.000.000	2.500.000.000
		Pelatihan Gratis Untuk Calon Tenaga kerja	1.155.335.900	1.963.800.100	3.660.000.000	4.300.000.000	4.670.000.000	4.630.000.000
2	Perluasan Akses Pendidikan Menengah		70.577.660.554	84.257.828.946	102.959.997.022	104.419.724.172	104.585.984.172	104.703.120.172
		Beasiswa bagi Siswa kurang mampu tingkat SD-SMP	5.103.740.000	5.108.202.120	5.100.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000
		Pemberian Insentif & Beasiswa Pendidikan utk Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Pesantren/Madrasah, Guru Mengaji dan Guru Agama	63.215.956.590	67.278.654.546	68.781.742.522	68.714.369.672	68.706.869.672	68.697.869.672
		Digitalisasi Sistem Pembelajaran dengan perpaduan konten lokal	2.257.963.964	11.870.972.280	29.078.254.500	30.605.354.500	30.779.114.500	30.905.250.500
3	Konektivitas Antar Pusat Pertumbuhan Wilayah Dan Pusat Produktivitas		831.628.501.980	912.379.084.206	1.128.845.146.882	1.360.896.047.488	1.487.419.665.065	1.547.082.711.864
		Medan BERCABANG (Kebersihan dan Persampahan)	139.302.172.344	161.323.062.907	199.505.073.386	215.345.400.349	224.310.886.931	216.810.643.162
		Revitalisasi halte Transportasi	0	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000



		Massal						
		Medan Gercep	109.369.812.900	129.826.145.588	150.210.384.451	194.773.137.699	172.369.458.636	183.128.125.367
		Transportasi Massal berbasis Transit Oriented Development (antar moda langsung terkoneksi)	300.000.000	10.800.000.000	13.100.000.000	15.300.000.000	14.100.000.000	13.300.000.000
		Pembangunan Pusat Ekonomi dan Keagamaan Wilayah Utara Kota Medan	48.363.450.000	137.819.140.000	142.000.000.000	264.000.000.000	264.000.000.000	264.000.000.000
		Medan BERCABANG (Infrastruktur)	534.293.066.736	472.610.735.711	622.829.689.045	670.277.509.440	811.439.319.498	868.643.943.335
4	Peningkatan Jangkauan Layanan Kesehatan		625.738.862.301	1.090.538.555.959	1.069.195.034.344	1.198.319.512.396	1.234.419.552.062	1.285.304.598.424
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	625.738.862.301	1.090.538.555.959	1.069.195.034.344	1.198.319.512.396	1.234.419.552.062	1.285.304.598.424
5	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Agraris Dan Pariwisata Yang Berkelanjutan		99.860.507.511	282.707.079.756	292.620.860.275	537.231.990.241	537.626.715.007	538.800.961.715
		Medan Pusat Kuliner Asia Tenggara (memperkuat Branding Medan The Kitchen of Asia)	50.186.145.011	143.247.849.756	147.468.360.275	270.143.990.241	270.426.715.007	271.215.961.715
		Pembangunan Destinasi Wisata terintegrasi	49.674.362.500	139.459.230.000	145.152.500.000	267.088.000.000	267.200.000.000	267.585.000.000



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Indikator adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Sementara Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

8.1. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Medan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberigambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode masa jabatan. Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Daerah Kota Medan menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Gini Ratio.

Proyeksi indikator kinerja makro mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Medan 2021-2026

INDIKATOR MAKRO	Kondisi Awal	PROYEKSI					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LPE	-1,98	3,50	6,00	6,07	6,10	6,12	6,15
GINI RATIO	0,35	0,326	0,322	0,319	0,315	0,312	0,308
TPT	10,73	8,87	8,71	8,55	8,40	8,25	8,10
ANGKA KEMISKINAN	8,01	7,98	7,82	7,65	7,50	7,34	7,19
IPM	80,98	81,61	82,04	82,46	82,89	83,32	83,75
INFLASI	2,00	2,50	3,00	3,00	2,50	2,00	2,00



Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian perekonomian global yang kemudian memberikan dampak bagi perekonomian nasional, dan perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Perekonomian Kota Medan yang menjadi bagian dari perekonomian Sumatera Utara, menghadapi tantangan yang cukup berat, mengingat kontribusi perekonomian Kota Medan yang cukup besar dalam memberikan pengaruh bagi dinamika perekonomian di Provinsi Sumatera Utara.

Pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 melambat disebabkan dari dua sisi ekonomi yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Pada sisi penawaran atau produksi, adanya pembatasan pemerintah untuk melakukan aktivitas secara fisik di tempat produksi, telah menyebabkan tingkat produksi barang dan jasa pada hampir semua sektor ekonomi mengalami penurunan. Dari 17 lapangan usaha dalam PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), hanya 2 sektor yang diproyeksikan tidak mengalami perlambatan yaitu lapangan usaha informasi dan komunikasi dan lapangan usaha jasa kesehatan dan sosial.

Instruksi pemerintah untuk jaga jarak sosial (*Social Distancing*) dan menjalankan pekerjaan dari rumah (*Work From Home*) serta tetap berada di rumah (*Stay at Home*) memberikan dampak pengurangan aktivitas produktif bagi masyarakat Kota Medan. Secara umum, lapangan usaha yang paling parah terkena dampak pandemi Covid-19 antara lain adalah pariwisata (akomodasi, restoran, jasa perjalanan wisata), transportasi, perdagangan, dan industri. Sebagai kota yang mengandalkan sektor jasa dalam perekonomiannya, lapangan usaha tersebut merupakan bagian terpenting bagi perekonomian Kota Medan.

Dari sisi permintaan, penyebaran Covid-19 memberi dampak terhadap pengurangan konsumsi rumah tangga, investasi pemerintah dan swasta. Antisipasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Medan melalui *refocusing* anggaran dengan memberikan stimulus fiskal dan fokus pada sektor kesehatan dan vaksinasi, telah membuat perekonomian menurun tidak terlalu tajam. Ancaman yang cukup besar terjadi melalui penurunan konsumsi rumah tangga akibat pendapatan masyarakat yang berkurang. Konsumsinya, daya beli masyarakat menjadi menurun dan menyebabkan terhentinya sebagian aktivitas ekonomi terutama kegiatan bisnis UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Kondisi tersebut membawa dampak yang besar bagi pengurangan pendapatan mereka. Padahal, sebagian besar roda perekonomian di Kota Medan telah digerakkan oleh UMKM. Kondisi ini tentunya akan sangat berimbas kepada pengangguran, kemiskinan, ketahanan pangan rumah tangga, dan kerawanan sosial/kriminalitas.

Prakiraan terhadap perkembangan indikator makro Kota Medan dilakukan melalui penelaahan terhadap proyeksi perkembangan ekonomi internasional yang mempengaruhi Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara. Di samping itu, proyeksi juga dipengaruhi oleh asumsi keberlanjutan dan keberhasilan program vaksinasi di Kota Medan menuju



kekebalan komunal (herd immunity) pada Maret 2022. Adapun proyeksi perkembangan indikator makro Kota Medan adalah sebagai berikut:

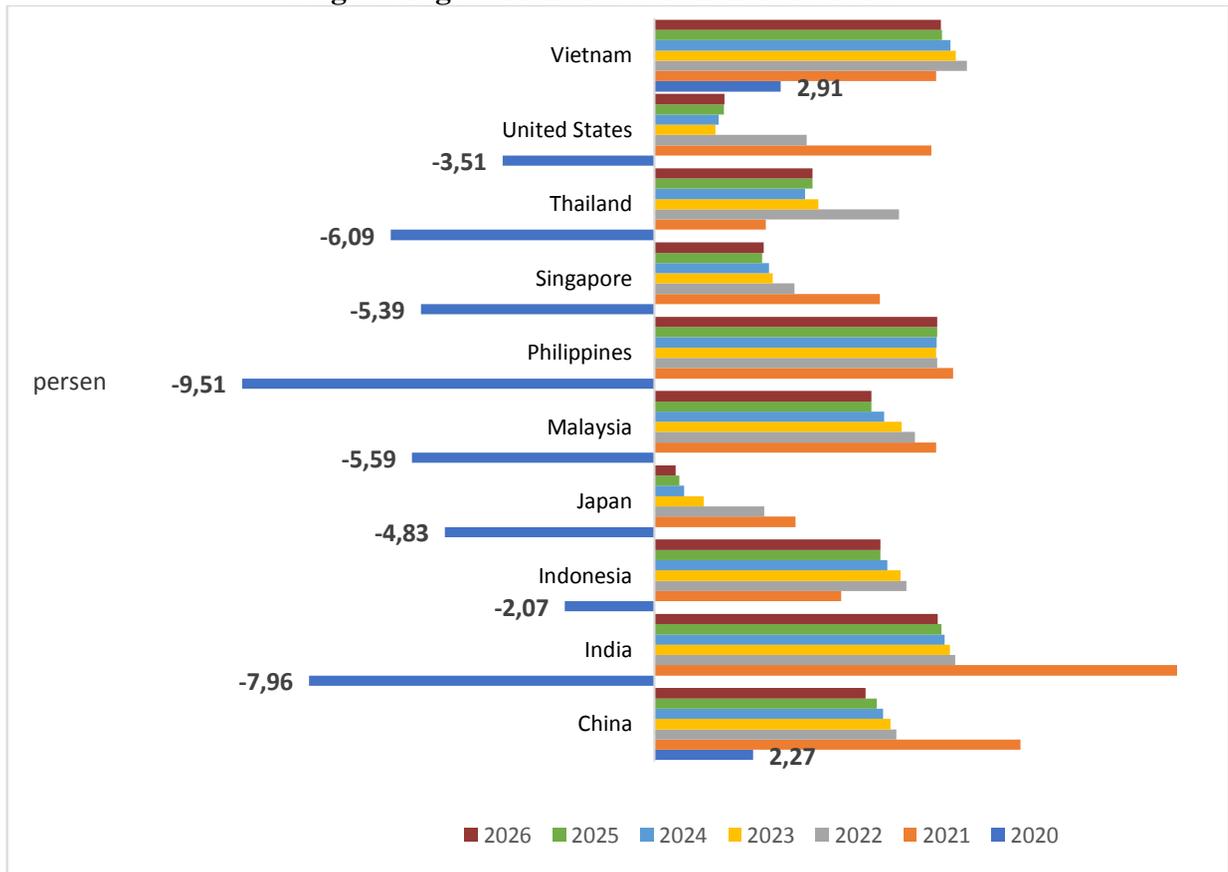
1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Global mengalami perlambatan Ketika terjadi Perang Dagang antara Amerika Serikat dan China pada tahun 2018. Kebijakan proteksi perdagangan oleh Amerika Serikat menyebabkan pertumbuhan ekonomi China mengalami perlambatan yang selanjutnya mengurangi permintaan atas bahan baku/barang pembantu yang diimpor khususnya dari negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Dampaknya, perekonomian Indonesia juga mengalami perlambatan tahun 2019. Memasuki awal tahun 2020 optimisme peningkatan ekonomi global sudah mulai terlihat Ketika kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan China sudah semakin mencapai beberapa kesepakatan. Namun, optimisme tersebut memudar dengan cepat seiring dengan merebaknya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi pada awal 2020, menjadi krisis perekonomian yang memengaruhi kehidupan sosial, kesejahteraan, dan finansial.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia menurun hingga 3,3%. Pernurunan tertinggi terjadi di Negara Maju dan Amerika Latin. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat menurun 3,5%, Kawasan Eropa menurun hingga 6,6% dan Amerika Latin anjlok hingga 7,0%. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar di Amerika Latin disebabkan dampak Pandemi Covid-19 yang telah menghancurkan perekonomian negara-negara di Amerika Latin dan menyebabkan terjadinya pengangguran yang sangat besar. ILO (International Labor Organization) mencatat sekitar 30,1 juta orang menganggur di Kawasan Amerika Latin yang kondisi tersebut memperparah perekonomian. Sementara itu, di Kawasan Negara Emerging, pertumbuhan ekonomi hanya menurun sekitar 1,0% pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi yang menurun juga terjadi di negara-negara ASEAN.



Gambar 8.1
Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Negara-negara ASEAN++ Tahun 2020-2026



Sumber: IMF

Pada tahun 2020, hampir seluruh negara ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun. Namun capaian Indonesia masih lebih baik dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 menurun 2,07%. Sementara itu, penurunan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Philipina, sebesar 9,51%. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga terjadi di Thailand dan Malaysia serta Singapura. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah negara tersebut untuk melakukan pembatasan ketat atas kegiatan ekonomi (*lockdown*) dan pembatasan pergerakan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang tajam. Sementara itu, keberhasilan pemerintah Vietnam dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 memberikan hasil yang cukup signifikan yaitu pertumbuhan ekonomi Vietnam yang masih dapat tumbuh sebesar 2,91%.

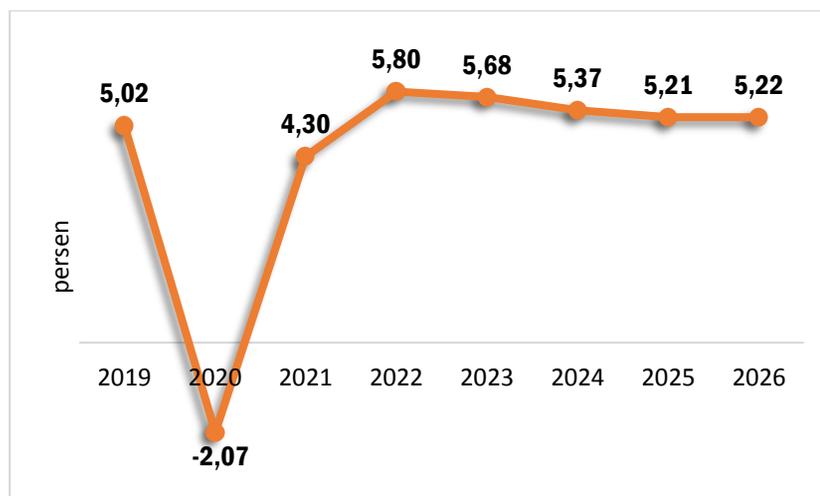
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 diproyeksikan tumbuh 4,30%. Belum normalnya pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 disebabkan masih belum selesainya permasalahan kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Tahapan vaksinasi terhadap 75,0% warga negara Indonesia untuk mencapai kondisi immunity herds memerlukan waktu yang cukup lama. Angka vaksinasi COVID-19 saat ini di Indonesia rata-rata 58.772 dosis per hari (Bloomberg, 2021). Dengan asumsi tersebut, dibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk mencapai kekebalan kelompok, yang



mencakup 75 persen populasi penduduk Indonesia dengan penyuntikkan dua dosis vaksin Covid-19.

Berdasarkan rencana yang telah disusun, pemberian Vaksin Covid-19 secara bertahap di Indonesia akan selesai pada Maret 2022. Indonesia akan mencapai kondisi immunity herds pada waktu tersebut, sehingga perekonomian dapat kembali tumbuh dengan cukup tinggi. Proyeksi IMF, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,81% dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi berlanjut pada tahun 2023 yakni sebesar 5,68%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia baru kembali menurun mencapai kondisi normal yaitu tumbuh sekitar 5,20% hingga 5,30% pada tahun 2024 hingga 2026.

Gambar 8.2.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020 – 2026



Sumber: IMF

Perkembangan ekonomi global yang mempengaruhi perekonomian nasional selanjutnya memberikan kontribusi terhadap dinamika perekonomian Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan secara khusus. Selaras dengan dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Kota Medan diperkirakan akan mulai tumbuh mulai tahun 2021. Setelah mengalami penurunan hingga 1,98% pada tahun 2020. Bangkitnya perekonomian secara perlahan khususnya di sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi serta akomodasi, makan minum dan transportasi diproyeksikan memberikan dampak pertumbuhan bagi perekonomian Kota Medan menjadi 3,50% pada tahun 2021. Keberhasilan program vaksinasi di Kota Medan memberikan dampak bagi peningkatan kembali aktivitas perekonomian di Kota Medan. Namun, pada triwulan III 2020, terjadi peningkatan pada kasus baru Pandemi Covid-19 yang mencapai 50.000 jiwa perhari menyebabkan pemerintah secara cepat memberlakukan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV di Kota Medan. Hasilnya terjadi pengurangan kegiatan aktivitas ekonomi masyarakat yang berdampak terhadap tidak optimalnya



pertumbuhan ekonomi Kota Medan. Pada tahun 2021, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Medan mencapai 3,5%.

Fokus Pemerintah Kota Medan dalam menjalankan PPKM dan program vaksinasi menyebabkan jumlah kasus baru Pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Kota Medan akan semakin membaik pada tahun 2022 dan tumbuh sebesar 6,00%. Tingginya capaian pertumbuhan ekonomi Kota Medan tahun 2002 disebabkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan selesainya tahapan vaksinasi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi semakin menguat pada tahun berikutnya mengingat masyarakat sudah dapat beraktivitas normal yang berdampak terhadap kembalinya perekonomian Kota Medan dapat mencapai batas normal yaitu tumbuh sebesar 6,07%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Medan kembali meningkat seiring dengan selesainya pembangunan jalan tol Sumatera dari arah Kisaran menuju Rantau Prapat. Kondisi tersebut meningkatkan akselerasi pergerakan barang dan jasa dan memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian Kota Medan. Secara bertahap pertumbuhan ekonomi Kota Medan tumbuh sebesar 6,81% (2024), kemudian meningkat lagi pada periode berikutnya yaitu 6,12% (2025) dan 6,15% (2026). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Medan menandakan telah pulihnya perekonomian daerah dan berjalannya proyek pemerintah pusat di Kota Medan seperti pembangunan infrastruktur yang semakin baik dan kepercayaan masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah semenjak Pandemi Covid-19 pertama kali dideteksi pada Maret 2020.

2. Proyeksi Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Ketimpangan pendapatan (indeks gini) Kota Medan tergolong rendah dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks gini Kota Medan mencapai 0,35.. Peningkatan ketimpangan tersebut disebabkan semakin meningkatnya perbedaan pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan berpenghasilan tinggi di Kota Medan. Pada tahun 2021 diproyeksikan ketimpangan pendapatan masih sekitar 0,326 disebabkan pemulihan ekonomi masih belum berjalan secara optimal dan mulai tahun 2022 hingga tahun 2026 ketimpangan pendapatan akan semakin menurun. Diproyeksikan pada tahun 2026, ketimpangan pendapatan di Kota Medan dapat menurun menjadi 0,308. Capaian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Medan dalam kelompok rendah.

3. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan ekonomi akan berdampak baik terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat menekan TPT, demikian pula sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan tahun 2020 yang menurun



sebesar 1,98% memberikan dampak terhadap peningkatan TPT dari 8,53% tahun 2019 menjadi 10,73% tahun 2020.

Seiring dengan pulihnya ekonomi Kota Medan tahun 2021, maka diproyeksikan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Medan akan menurun menjadi 8,87%. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi pada tahun-tahun berikutnya diharapkan memberi dampak bagi penciptaan lapangan kerja yang semakin besar bagi Angkatan Kerja Kota Medan sehingga tingkat pengangguran akan semakin menurun. Diproyeksikan pada tahun 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Medan menurun menjadi 8,10%.

4. Proyeksi Persentase Penduduk Miskin

Pertumbuhan ekonomi memberi dampak terhadap peningkatan kesempatan kerja, dan pada tahap berikutnya meningkatkan pendapatan perkapita dan mengurangi penduduk miskin di suatu wilayah. Sebaliknya, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang menurun menyebabkan tingkat pengangguran meningkat yang selanjutnya meningkatkan penduduk miskin. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Medan menurun dari 5,93% tahun 2019 menjadi -1,98% pada tahun 2020. Kondisi tersebut berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin di Kota Medan. Berkurangnya pendapatan masyarakat menyebabkan persentase penduduk miskin di Kota Medan meningkat. Namun, pemerintah dapat melakukan antisipasi dengan memberikan subsidi dan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat serta menjaga kestabilan harga pasar sehingga dapat berdampak terhadap pengurangan persentase penduduk miskin. Kesigapan pemerintah Kota Medan dalam memberikan bantuan bagi masyarakat miskin ketika terjadi Pandemi Covid-19 berdampak terhadap pengurangan persentase penduduk miskin sebesar 7 poin atau menurun dari 8,08% (2020) menjadi 8,01% (2022).

Pemulihan ekonomi Kota Medan pada tahun 2021 diproyeksikan memberikan dampak terhadap penurunan persentase penduduk miskin. Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0% pada tahun 2021, diharapkan dapat menurunkan kemiskinan menjadi 7,82% tahun 2022. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya diproyeksikan akan membawa dampak terhadap penurunan persentase kemiskinan hingga mencapai 7,19% pada tahun 2026.

5. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perencanaan pembangunan yang baik diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut tercermin dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau



level pembangunan suatu wilayah. IPM dibentuk oleh tiga dimensi kebutuhan dasar manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

Selama periode 2016 – 2020, kualitas pembangunan manusia di Kota Medan mengalami peningkatan yang cukup berarti. Berdasarkan capaian, IPM yang dimiliki Kota Medan telah berada pada kategori sangat tinggi. Pada tahun 2016, IPM Kota Medan sebesar 79,34 dan terus mengalami pertumbuhan hingga tahun 2020 mencapai 80,98 (kategori sangat tinggi). Perkembangan IPM Kota Medan tidak terlepas dari perkembangan masing-masing indikator pembentuknya, seperti Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Medan telah mengalami perkembangan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, usia harapan hidup (UHH) Kota Medan sebesar 72,34 tahun dan kemudian meningkat menjadi 73,14 tahun pada tahun 2020. Meningkatnya fasilitas kesehatan, teknologi kesehatan dan jumlah tenaga medis yang terus bertambah telah memberikan dorongan bagi peningkatan harapan hidup masyarakat Kota Medan. Demikian pula Harapan Lama Sekolah yang menjadi salah satu faktor yang cukup penting di dalam peningkatan IPM. Dengan kebijakan pemerintah daerah yang menggratiskan pembayaran SPP dan dana BOS serta pembagian Kartu Indonesia Pintar dari pemerintah pusat, mendorong peningkatan harapan masyarakat untuk dapat lebih lama lagi mendapatkan pendidikan. Harapan Lama Sekolah Kota Medan secara konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, Harapan Lama Sekolah Kota Medan mencapai 14,06 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 14,74 tahun. Indikator ketiga yang mempengaruhi IPM adalah Rata-rata Lama Sekolah. Indikator ini menunjukkan bagaimana rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Medan juga telah mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2016, Rata-rata Lama Sekolah di Kota Medan mencapai 11,18 tahun dan kemudian meningkat menjadi 11,39 tahun pada tahun 2020. Untuk indikator pengeluaran perkapita masyarakat Kota Medan, secara umum telah terjadi peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya pendapatan per Kapita telah memberikan kemampuan riil konsumsi masyarakat yang diwujudkan dengan pengeluaran perkapita yang juga semakin tinggi. Pada tahun 2016, pengeluaran perkapita masyarakat Kota Medan mencapai Rp14,39 juta dan kemudian meningkat menjadi Rp14,89 juta pada tahun 2020. Meningkatnya seluruh komponen yang membentuk IPM juga berdampak terhadap peningkatan Kota Medan. Pada tahun 2016, IPM Kota Medan mencapai 79,34 poin lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 80,98 poin. Peningkatan IPM sedikit melambat dari tahun 2019 ke tahun 2020 disebabkan Pandemi Covid-19. Namun mulai tahun 2021 hingga 2026 terjadi lagi akselerasi peningkatan IPM Kota Medan. Pada tahun 2026 diproyeksikan IPM Kota Medan mencapai 83,75 poin.



6. Proyeksi Inflasi Kota Medan Tahun 2021 - 2026

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang (kontinu). Pada umumnya, inflasi terjadi karena adanya kenaikan permintaan dan biaya produksi yang tinggi serta berlangsung secara terus menerus. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak bagi permintaan barang dan jasa oleh masyarakat di Kota Medan. Menurunnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, telah memberikan dampak terhadap penurunan pada daya beli masyarakat yang selanjutnya menyebabkan menurunnya permintaan barang dan jasa. Akibatnya, inflasi Kota Medan mengalami penurunan dari 2,43% tahun 2019 menjadi 2,0% tahun 2020.

Pada tahun 2021, inflasi di Kota Medan diperkirakan akan sedikit meningkat seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonominya. Inflasi diproyeksikan tumbuh menjadi 2,50%. Pada tahun 2022, inflasi di Kota Medan diperkirakan akan mengikut kepada inflasi di Indonesia. Kementerian Keuangan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023, dan 2024. Target sasaran inflasi yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) memutuskan sasaran inflasi yang disepakati adalah sebesar $3\% \pm 1\%$ untuk 2022, $3\% \pm 1\%$ untuk 2023 dan $2,5\% \pm 1\%$ untuk 2024. Penetapan inflasi tersebut juga memberikan pengaruh inflasi di Kota Medan. Diproyeksikan inflasi Kota Medan akan meningkat pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 3,0%, dan kemudian akan menurun menjadi 2,5% pada tahun 2024. Perekonomian Kota Medan yang tumbuh dengan stabil dan kelancaran produksi serta distribusi barang yang semakin membaik seiring dengan pembangunan sarana dan prasarana yang semakin lengkap di Kota Medan menyebabkan inflasi Kota Medan menurun kembali di tahun 2025 dan 2026 menjadi sebesar 2,0%.



Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Medan Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi Akhir RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	57.60	57.60	57.82	58.05	58.27	58.5	58.72	58.72
2	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum	%	N/A	70	70	75	75	80	85	85
3	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	%	2,72	2,86	3	3,07	3,15	3,23	3,31	72.5
4	Persentase kawasan permukiman layak huni,	%	96,9	96,9	97,9	98,4	98,9	99,4	100	100
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Cc	Cc	B	B	BB	BB	A	A
6	Gini Rasio	Indeks	0,35	0,326	0,322	0,319	0,315	0,312	0,308	0,308
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,98	81,61	82,04	82,46	82,89	83,32	83,75	83,75
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,98	3	4,13	5,69	5,76	5,88	5,98	5,98
9	Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda / perwal	unit	N/A	122	132	145	155	165	175	175
10	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi	Kawasan	N/A	3	4	5	8	8	12	40
11	Indeks Pendidikan	Indeks	11.39	11.4	11.41	11.42	11.42	11.43	11.44	11.44
12	Indeks Kesehatan	Indeks	73.14	74	74.10	74.25	74.30	74.50	75.7	75.7
13	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	29.146	26.000	23.000	20.000	18.000	16.000	14.000	14000
14	Persentase luas RTH	%	10	12	12.5	13	13.5	14	14.5	14.5
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	B	B	B	A	A	A	A
16	Indeks Transformasi Data Digital	Indeks	N/A	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,95	0,95
17	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Nilai Sakip	Kategori/nilai	Cc	B	BB	BB	BB	A	A	A
19	Pendapatan perkapita	Rupiah	67.400.000	68.200.000	68.500.000	68.900.000	70.500.000	71.500.000	71.700.000	71.700.000
20	Pengeluaran per kapita	Rupiah	14.890.000	15.035.000	15.181.000	15.328.000	15.477.000	15.627.000	15.779.000	15.779.000
21	Luas kawasan permukiman layak huni,	Ha	25690,2	25690,2	25857,56	26021,52	26185,48	26349,08	26510	26510
22	Nilai investasi PMDN-	Rp Juta	4.127.638,60	4.334.020,53	4.550.21,56	4.778257,63	5.017.170,52	5.268.029,04	5.531.430,49	5.531.430,49
23	Nilai investasi PMA,	US \$	40.258,5	42.271,43	44.385,00	46.604,25	48.934,46	51381,18	53.950,24	53.950,24
24	Angka Kemiskinan	%	8,01	7,98	7,82	7,65	7,50	7,34	7,19	7,19



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kondisi Akhir RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25	Indeks Inovasi Daerah	Poin	57,14	57,14	62,5	75	77,7	88	94,17	94,17



**Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact
Kota Medan Tahun 2021 - 2026**

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	%	2,72	2,86	3	3,07	3,15	3,23	3,31	72.5	IKU Kepala Daerah
2	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	80,98	81,61	82,04	82,46	82,89	83,32	83,75	83,75	IKU Kepala Daerah Indikator Makro
3	Gini Rasio	Indeks	0,35	0,326	0,322	0,319	0,315	0,312	0,308	0,308	IKU Kepala Daerah Indikator Makro
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,98	3	4,13	5,69	5,76	5,88	5,98	5,98	IKU Kepala Daerah Indikator Makro
5	Indeks Pendidikan	Indeks	11.39	11.4	11.41	11.42	11.42	11.43	11.44	11.44	IKU Kepala Daerah
6	Indeks Kesehatan	Indeks	73.14	74	74.10	74.25	74.30	74.50	75.7	75.7	IKU Kepala Daerah
7	Pendapatan perkapita	Rupiah	67.400.000	68.200.000	68.500.000	68.900.000	70.500.000	71.500.000	71.700.000	71.700.000	IKU Kepala Daerah
8	Luas kawasan permukiman layak huni,	Ha	25690,2	25690,2	25857,56	26021,52	26185,48	26349,08	26510	26510	IKU Kepala Daerah
9	Angka Kemiskinan	%	8,01	7,98	7,82	7,65	7,50	7,34	7,19	7,19	IKU Kepala Daerah Indikator Makro
10	Persentase Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	70,79	75	77	79	82.5	83	84	84	IKU Dinas Pendidikan
11	Jumlah koperasi aktif	unit	360	364	368	372	376	340	344	344	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12	Persentase Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang putus sekolah dan berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	78,86	80.03	81.65	82.98	83.05	83.90	84.79	84.79	IKU Dinas Pendidikan
13	Persentase kelulusan peserta didik SD dan SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pendidikan
14	Persentase Penduduk Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi + SMP/MTs)	%	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	IKU Dinas Pendidikan



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	persentase cakupan layanan jaminan kesehatan semesta/ universal health coverage (UHC)	%	80	80	85	88	90	95	98	98	IKU Dinas Kesehatan
16	Persentase pencapaian pelayanan kesehatan rujukan	%	54,69	62	64	65	67	68	70	70	IKU Dinas Kesehatan
17	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	95	95	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Kesehatan
18	Persentase PMKS memperoleh bantuan sosial	%	87,60	92	97	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
19	Total Fertility Rate (TFR)	Poin	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	89,04	89,47	89,87	90,24	90,58	90,9	91,21	91,21	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
21	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Tingkat	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2. ASPEK PELAYANAN UMUM											
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Cc	Cc	B	B	BB	BB	A	A	IKU Kepala Daerah
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	N/A	B	B	B	A	A	A	A	IKU Kepala Daerah
3	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Kepala Daerah
4	Nilai Sakip	Kategori/nilai	Cc	B	BB	BB	BB	A	A	A	IKU Kepala Daerah
5	Persentase luas RTH	%	10	12	12.5	13	13.5	14	14.5	14.5	IKU Kepala Daerah
6	Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda / perwal	unit	N/A	122	132	145	155	165	175	175	IKU Kepala Daerah
7	Jumlah infrastruktur pengelolaan persampahan terfasilitasi yang dibangun	unit	0	0	1	1	1	1	1	6	IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
8	Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktur permukiman yang memadai	%	0	0	75	80	85	90	95	95	IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	65	65	70	75	80	85	90	90	IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
10	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	%	65	65	70	70	70	70	70	70	IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
11	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
12	Persentase rumah tinggal bersantitas aman	%	4,85	5,3	5,8	6,71	8,11	10,03	10,03	10,03	IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
13	Jumlah unit hunian rumah tangga berpenghasilan rendah yang terfasilitasi	unit	70	70	75	80	85	90	95	95	IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
14	Persentase Rasio rumah layak huni	%	85	85	88,75	92,5	96,25	100	100	100	IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
15	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan)	%	95	95	95	96	96	97	98	99	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
16	Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	%	95	95	95	96	96	97	98	99	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
17	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	0	100	100	100	100	100	100	100	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	9,038	100	100	100	100	100	100	100	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19	Nilai survei kepuasan publik	%	0	78	80	85	89	90	92	92	IKU Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran
20	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	82,11	85	90	95	100	100	100	100	IKU Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran
21	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	%	0	25	30	35	40	45	50	25	IKU Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	%	25,18	25	35	45	55	65	75	75	IKU Dinas Sosial
23	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Sosial
24	Persentase tenaga kerja yang memperoleh sertifikasi keahlian	%	90	90	90	92	93	94	95	95	IKU Dinas Ketenagakerjaan
25	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan	%	35	35	40	42	45	48	50	50	IKU Dinas Ketenagakerjaan
26	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	68	68	70	72	74	76	78	78	IKU Dinas Ketenagakerjaan
27	Predikat Kota Layak Anak	Tingkat	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
28	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	%	54,36	55	56	57	58	59	60	60	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
29	Cakupan PUS Yang Ingin Ber - KB tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	16.01	8.11	8.10	8.9	8.8	8.7	8.6	8.6	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
30	Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	%	69.68	70.18	70.68	71.18	71.68	72.18	72.68	72.68	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	4.75	4.75	4.75	9.52	9.52	14.2	14.2	14.2	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
33	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan	%	85	85	90	90	95	95	100	100	IKU Dinas Perhubungan
34	Tingkat keterangkutan (okupansi) angkutan umum perkotaan	%	44.95	44.95	55.95	66.95	77.95	88.95	100	100	IKU Dinas Perhubungan
35	Persentase ketersediaan terminal tipe C yang dikelola dengan baik	%	46.54	46.54	46.54	46.54	46.54	46.54	46.54	46.54	IKU Dinas Perhubungan
36	Persentase ketersediaan angkutan orang	%	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	IKU Dinas Perhubungan



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
37	Persentase Tingkat keterjangkauan tarif	%	33.46	34.18	34.90	35.62	36.34	37.06	37.78	37.78	IKU Dinas Perhubungan
38	Intensitas kemacetan pada jam sibuk	%	64	59	54	49	44	39	34	34	IKU Dinas Perhubungan
39	Angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	1585	1505	1425	1345	1265	1185	1105	1105	IKU Dinas Perhubungan
40	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
41	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	%	42	42	55	61	71	87	97	97	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
42	Jumlah media massa, media pemerintah, mitra strategis dan komunitas informasi dan komunikasi publik yang tersedia	Lembaga	170	185	259	260	266	272	278	278	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
43	Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan Pemuda Kader	%	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
44	Persentase Cakupan Pembinaan Atlit Muda	%	0	10	10	10	10	10	10	60	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
45	Rasio perpustakaan per seribu penduduk	Poin	0.361	0.440	0.520	0.599	0.678	0.758	0.837	0.837	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
46	Rasio koleksi perpustakaan per satuan penduduk	Poin	1 : 27	1 : 27	1 : 26	1 : 25	1 : 24	1 : 23	1 : 22	1 : 22	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
47	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	28.36	29.85	31.34	32.84	34.33	35.82	37.31	37.31	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
48	Persentase dokumen/arsip yang dikelola dengan baik dan benar	%	24,21	24,21	34,21	44,21	54,21	64,21	74,21	74,21	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
49	Meningkatnya Penyelenggaraan Kebijakan tentang Pelayanan Publik	Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
50	Persentase kecamatan dan kelurahan dengan kinerja sangat baik	%	71	76	81	86	90	95	100	100	IKU Sekretariat Daerah
51	Persentase OPD yang menyampaikan LPPD sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
52	Persentase Informasi tentang Kegiatan KDH yang Ditayangkan pada Situs Internet, Media Sosial, Majalah dan Album Galeri Photo	%	0	0	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
53	Jumlah Pertemuan KDH, Juru Bicara Tatap Muka maupun Daring dengan Forkopimdo, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	%	0	0	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
54	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	IKU Sekretariat Daerah
55	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Kategori/nilai	0	0	0	0	0	0	0	0	IKU Sekretariat Daerah
56	Nilai LPPD	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Sekretariat Daerah
57	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	-18,56	30,16	47,36	5,00	5,00	5,00	5,00	163,88	IKU Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
58	Meningkatkan belanja daerah yang efisien	Dokumen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKU Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
59	Persentase PNS jabatan fungsional	%	55	55	56	57	58	59	60	60	IKU Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
60	Persentase Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	15	15	16	17	18	19	20	20	IKU Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
61	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	57,14	57,14	62,5	75	77,7	88,23	88,88	88,88	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan
62	Indeks Inovasi Daerah	Skor	15	31	40	48	55	61	65	65	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan
63	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	9,25	9,25	21,42	29,7	35,7	41,6	47,61	47,61	IKU Badan Penelitian dan Pengembangan
64	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dengan status selesai	%	76	76	77	79	81	83	85	85	IKU Inspektorat
65	Persentase PD yang memiliki Nilai SAKIP Minimal B	%	7	50	55	60	65	70	75	75	IKU Inspektorat
66	Indeks/Level Maturitas SPIP	Level	2	3	3	3	3	3	3	3	IKU Inspektorat
67	Level Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	3	3	3	IKU Inspektorat



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
68	Persentase Fasilitas Pendidikan dengan Kondisi Baik	%	83,82	84.56	85.38	86.39	87.59	88.03	89.56	89.56	IKU Dinas Pendidikan
69	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	80	82	84	86	89	93	95	95	IKU Dinas Pendidikan
70	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku usaha	0	0	0	10	10	10	10	10	IKU Dinas Pariwisata
71	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Pelaku usaha	0	0	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pariwisata
72	Jumlah Investor PMA	investor	2	2	2	2	2	2	2	12	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
73	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	%	75	75	78	80	82	85	88	88	IKU Dinas Kesehatan
74	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	10,81	21,62	21,62	24,32	24,32	27,03	27,03	27,03	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
75	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,75	0,77	0,79	0,82	0,84	0,86	0,89	0,89	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
76	Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
77	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan Aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	42.8	51.4	57.1	62.8	68.5	74.2	80	90	IKU Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1	Persentase kawasan permukiman layak huni,	%	96,9	96,9	97,9	98,4	98,9	99,4	100	100	IKU Kepala Daerah
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	57.60	57.60	57.82	58.05	58.27	58.5	58.72	58.72	IKU Kepala Daerah
3	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum	%	N/A	70	70	75	75	80	85	85	IKU Kepala Daerah
4	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum	Kasus	29.146	26.000	23.000	20.000	18.000	16.000	14.000	14000	IKU Kepala Daerah
5	Nilai investasi PMDN-	Rp Juta	4.127.638,60	4.334.020,53	4.550.21,56	4.778257,63	5.017.170,52	5.268.029,04	5.531.430,49	5.531.430,49	IKU Kepala Daerah



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang di revitalisasi	Kawasan	N/A	3	4	5	8	8	12	40	IKU Kepala Daerah
7	Nilai investasi PMA,	US \$	40.258,5	42.271,43	44.385,00	46.604,25	48.934,46	51381,18	53.950,24	53.950,24	IKU Kepala Daerah
8	Indeks Transformasi Data Digital	Indeks	N/A	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,95	0,95	IKU Kepala Daerah
9	Pengeluaran per kapita	Rupiah	14.890.000	15.035.000	15.181.000	15.328.000	15.477.000	15.627.000	15.779.000	15.779.000	IKU Kepala Daerah
10	Indeks Inovasi Daerah	Poin	57,14	57,14	62,5	75	77,7	88	94,17	94,17	IKU Kepala Daerah
11	Persentase Keamanan Pangan di Kota Medan	%	90	91	92	93	94	95	96	91	IKU Dinas Ketahanan Pangan
12	Persentase Skala Pola Pangan Harapan	%	90	88	89	89,5	90	90,5	90,5	90,5	IKU Dinas Ketahanan Pangan
13	Persentase Ketersediaan Pangan Energi dan Protein	%	90	92	93	94	95	96	98	98	IKU Dinas Ketahanan Pangan
14	Persentase Kelurahan Rawan Pangan yang Tertangani	%	0	9,5	14	14	19	19	24	99,5	IKU Dinas Ketahanan Pangan
15	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	%	50	50	60	70	80	90	100	100	IKU Dinas Lingkungan Hidup
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	57,60	57.60	57.82	58.05	58.27	58.5	58.72	58.72	IKU Dinas Lingkungan Hidup
17	Persentase Rekomendasi perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup	%	20	20	40	60	80	90	100	100	IKU Dinas Lingkungan Hidup
18	Persentase gerakan kampanye lingkungan hidup yang terlaksana	%	1	1	1	1	1	1	1	6	IKU Dinas Lingkungan Hidup
19	Persentase peningkatan penilaian kinerja lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	3	3	4	5	5	5	8	8	IKU Dinas Lingkungan Hidup
20	Persentase kinerja penanganan persampahan	%	82	85	86	88	89	90	95	95	IKU Dinas Kebersihan dan Pertamanan
21	Persentase pengurangan sampah	%	24	24	26	27	28	30	30	30	IKU Dinas Kebersihan dan Pertamanan
22	Persentase ketersediaan lampu PJU dalam kondisi baik dan memadai	%	75	75	76	77	78	79	80	80	IKU Dinas Kebersihan dan Pertamanan
23	Cakupan pengelolaan RTH publik	%	70	70	75	80	82	84	87	87	IKU Dinas Kebersihan dan Pertamanan



No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Keterangan
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	Jumlah koperasi terdaftar	Koperasi	1277	1282	1287	1292	1297	1302	1307	1307	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
25	Jumlah usaha mikro	orang	2	10	10	10	10	10	10	62	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
26	Persentase UMKM yang Berkembang Melalui Ekonomi Kreatif	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5	IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
27	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	Jumlah	0	30	3	3	3	3	3	45	IKU Dinas Kebudayaan
28	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	2	2	2	2	2	2	2	10	IKU Dinas Pertanian dan Perikanan
29	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kota	ton	132588	135209	146145	153452	161124	169181	177639	942750	IKU Dinas Pertanian dan Perikanan
30	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Pertanian, Perikanan dan Peternakan	%	25	25	20	20	20	20	20	100	IKU Dinas Pertanian dan Perikanan
31	Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar Di Dinas Perdagangan	perusahaan	25.55	25.55	25.65	25.75	25.85	25.95	26.05	26.05	IKU Dinas Perdagangan
32	Nilai Ekspor Kota Medan	Rupiah	25	25	27.5	30	35	40	45	45	IKU Dinas Perdagangan
33	Persentase Peningkatan PAD dari Retribusi Jasa Tera/Tera Ulang	%	100	100	105	110	115	120	125	125	IKU Dinas Perdagangan
34	Laju Inflasi	Nilai	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	IKU Dinas Perdagangan
35	Jumlah warisan budaya tak benda yang ditetapkan dan dilestarikan	Jumlah	0	5	1	1	1	1	1	10	IKU Dinas Kebudayaan
36	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	236025	243106	250399	262919	276065	289868	304361	304361	IKU Dinas Pariwisata
37	Nilai Pertumbuhan Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas PMDN	Rp Juta	115.645,2	116.645,1	117.500,2	119.400,2	120.231,4	121.243,3	123.400,9	123.400,9	IKU Dinas Perindustrian
38	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	151	151	151	151	151	151	151	151	IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat



Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome
Kota Medan Tahun 2021 - 2026

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Kesehatan										
1	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	72	72	75	78	80	82	85	85	Dinas Kesehatan
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Indeks Pemberdayaan Gender	Skor	63,89	63,93	63,97	64,01	64,05	64,09	64,13	64,13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2. ASPEK PELAYANAN UMUM											



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pendidikan										
1	Persentase ketersediaan Pengelolaan PAUD	%	79.57	80.65	82.68	83.45	84.87	85.90	86.89	86.89	Dinas Pendidikan
2	Persentase ketersediaan Pengelolaan Pendidikan SD dan SMP	%	0,09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	Dinas Pendidikan
3	persentase pengembangan kurikulum	%	0	0	75.94	76.34	77.90	78.32	79.56	79.56	Dinas Pendidikan
4	Persentase ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan	%	0	78.56	79.56	80.05	80.69	84.85	85.87	85.87	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan										
1	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	96	96	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
1	Persentase perwujudan SPAM	%	87	90.25	93.50	96.75	98	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
2	Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	%	87	90,25	93,5	96,75	98	100	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
3	Cakupan ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan	%	50	50	55	60	65	70	75	75	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
4	Cakupan TPA/TPST terfasilitasi yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan	%	0	0	20	20	20	20	20	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	4.85	5.30	5.80	6.71	8.11	10.03	10.03	10.03	Dinas Pekerjaan Umum
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	%	4,85	5,3	5,8	6,71	8,11	10,03	10,03	10,03	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
7	Persentase sistem jaringan drainase yang terkelola dengan dengan baik	%	90	92	95	98	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
8	Persentase sistem jaringan drainase yang terkelola dengan dengan baik	%	90	92	95	98	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
9	Persentase sistem jaringan drainase yang terkelola dengan dengan baik	%	90	92	95	98	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
10	Persentase lokasi ruas jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	%	75	75	0	0	0	0	0	75	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
11	Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni	%	65	65	70	75	80	85	90	90	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
12	Persentase kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis yang ditata	%	0	10	20	40	60	80	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
13	Persentase pengembangan kapasitas jalan	%	0	0.02	5.25	7.43	8.30	9.17	10.04	10.04	Dinas Pekerjaan Umum
14	Tingkat kemantapan jalan kota	%	89	91	95	98	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum
15	Cakupan penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi	%	65	68	71	74	77	80	83	83	Dinas Pekerjaan Umum
16	Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif	%	65	65	70	70	70	70	70	70	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase cakupan penyelenggaraan pengembangan perumahan yang berkeadilan, tertib dan terkendali	%	65	65	75	80	85	90	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
2	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	96,9	96,9	97,9	98,4	98,9	99,4	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
3	Persentase pencegahan kawasan permukiman kumuh	%	97,4	97,4	97,9	98,4	98,9	99,4	100	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	99	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Capaian target penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	Persen	95	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Persentase penanggulangan bencana	%	0	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Persentase penanggulangan bencana	%	0	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Meningkatnya pengawasan peralatan pemadam pada bangunan	titik	0	0	12	12	12	12	12	60	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	orang	0	0	420	420	420	420	420	2100	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran
7	Meningkatnya waktu tanggap kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15	15	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran
8	Meningkatnya Penanggulangan Kebakaran	%	0	25	30	35	40	45	50	25	Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Sosial										
1	Persentase peningkatan pemberdayaan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2	Persentase penyelenggaraan rehabilitasi sosial	%	0	0	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
3	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
4	Persentase penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
5	Persentase peningkatan kualitas penanganan bencana	%	0	100	100	100	100	100	1pp	100	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja										
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	0	0	100	0	0	100	100	Dinas Ketenagakerjaan
2	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	%	14	14	15	17	18	19	20	20	Dinas Ketenagakerjaan
3	Persentase pemenuhan Lowongan pekerjaan	%	48	48	50	52	55	58	60	60	Dinas Ketenagakerjaan
4	Persentase Peningkatan lembaga hubungan industrial di perusahaan	%	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Ketenagakerjaan
5	Persentase perselisihan /konflik yang diselesaikan	%	88	88	90	92	93	94	95	95	Dinas Ketenagakerjaan
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Cakupan pengembangan kegiatan masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Persentase OPD yang memiliki data terpilah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Persentase capaian indikator pemenuhan hak anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
9	Pangan										
1	Persentase daerah rentan Rawan Pangan	%	4,34	8,69	13,04	13,04	17,39	21,75	26,09	100	Dinas Ketahanan Pangan
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92	88	89	89,5	90	90,5	90,5	90,5	Dinas Ketahanan Pangan
3	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83,12	83,5	84	84,5	85	85,5	86	86	Dinas Ketahanan Pangan
4	Persentase Kelurahan Rawan Pangan yang Tertangani	%	4,76	9,5	14	14	19	19	24	99,5	Dinas Ketahanan Pangan
5	Persentase Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan dan Pangan Siap saji	%	92	93	94	95	96	97	98	92	Dinas Ketahanan Pangan
10	Pertanahan										
1	Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota	%	100	70	70	70	70	70	70	70	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang
11	Lingkungan Hidup										
1	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	%	50	50	60	70	80	90	100	100	Dinas Lingkungan Hidup



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Persentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca	%	24,8	24,9	25	25,1	25,2	25,3	25,4	25,4	Dinas Lingkungan Hidup
3	Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	28,26	28.26	28.93	29.60	30.27	30.94	31.61	31.61	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase lokasi RTH publik yang terkelola dengan baik	%	70	70	75	80	82	84	87	87	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
5	Tingkat kepatuhan usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara limbah B3	%	50	50	60	70	80	90	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	%	50	50	60	70	80	90	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	85	85	90	90	95	95	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
8	Capaian penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup	%	50	50	60	70	80	90	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
9	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
10	Persentase kebijakan/regulasi/strategi pengelolaan persampahan yang tersedia	%	0	0	80	80	85	90	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
11	Persentase volume sampah yang terkelola	%	80	76	75	74	72	70	70	70	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
12	Persentase volume sampah yang terkelola	%	80	76	75	74	72	70	70	70	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil										



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Cakupan pendaftaran penduduk : KK, KTP, KIA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Cakupan Pencatatan Sipil : Akte Kelahiran, Akte Perkawinan	%	76,25	76,25	78,25	80,25	85,25	88,25	90	90	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
1	Persentase pengendalian penduduk	%	2.7	8.3	11.1	16.6	19.4	27.7	33.3	33.3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase pembinaan Keluarga Berencana (KB)	%	69.98	70.18	70.68	71.18	71.68	72.18	72.68	72.68	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Persentase pembinaan Keluarga Berencana (KB)	%	69.68	70.18	70.68	71.18	71.68	72.18	72.68	72.68	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Persentase pembinaan Keluarga Berencana (KB)	%	69.68	70.18	70.68	71.18	71.68	72.18	72.68	72.68	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Persentase pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Perhubungan										
1	Persentase efektifitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	%	60	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
2	Persentase efektifitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
3	Persentase lokasi ruas jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	%	75	0	76	77	78	79	80	80	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
15	Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	%	66	67	93	94	96	98	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
1	Jumlah koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan Izin Usaha	Koperasi	0	0	52	52	52	52	52	260	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2	Persentase koperasi yang aktif	%	5	5	10	15	20	25	30	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
3	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikasi (IKK)	orang	0	140	316	316	316	316	316	1720	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
4	Jumlah koperasi yang mandiri	Koperasi	0	0	1	1	1	1	1	5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
5	Jumlah usaha mikro	Pelaku usaha	0	575	1385	1385	1385	1385	1385	7500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
6	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	Pelaku usaha	0	575	1385	1385	1385	1385	1385	7500	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Penanaman Modal										
1	Persentase Peningkatan Investasi	%	0	0	5	5	5	5	5	25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Nilai Investasi di Kota Medan	Rupiah	4.334.020.530.000	4.334.020.530.000	4.550.721.560.000	4.778.257.630.000	5.017.170.520.000	5.268.029.040.000	5.531.430.490.000	29.479.629.770.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	82	82	83	84	85	86	87	87	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Persentase Realisasi Penanaman Modal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	Aplikasi	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Kepemudaan dan Olahraga										
1	persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	0	10	8	12	13	14	15	72	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	%	0	33,33	33,33	45	47	50	42	42	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	%	0	12	10	40	42	80	40	40	Dinas Pemuda dan Olahraga
19	Statistik										



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Persandian										
1	Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	%	42	42	55	61	71	87	97	97	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Kebudayaan										
1	Jumlah pengembangan kebudayaan	Jumlah	0	5	10	12	15	15	20	20	Dinas Kebudayaan
2	Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah	%	0	5	10	12	15	15	20	20	Dinas Kebudayaan
3	Persentase pembinaan sejarah	%	0	3	5	10	12	15	15	15	Dinas Kebudayaan
4	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan	%	0	32.07	32.54	33.02	33.49	33.97	33.97	33.97	Dinas Kebudayaan
5	Persentase permuseuman yang dikelola	%	0	3	5	10	12	15	15	15	Dinas Kebudayaan
22	Perpustakaan										
1	Persentase pembinaan perpustakaan	%	0.88	10.81	16.79	21.19	24.56	27.23	29.38	29.38	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah koleksi perpustakaan	Exemplar	91.702	93.673	95.673	97.673	99.673	101.673	103.673	103.673	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	18.802	19.366	19.946	20.544	21.160	21.794	22.447	22.447	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	4	8	8	9	9	10	10	10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	%	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.40	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	Kearsipan										
1	Persentase pengelolaan arsip	%	3.89	9.40	12.97	16.21	19.46	22.70	25.94	25.94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Jumlah dokumen/arsip yang dikelola	Dokumen	36.548	154.494	160.673	173.526	194.349	225.444	270.532	270.523	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	%	6,7	10	15	20	25	30	35	35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Persentase ketersediaan perizinan penggunaan arsip	%	0	0	10	20	30	40	50	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kelautan dan Perikanan										
1	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	2	2	2	2	2	2	2	10	Dinas Pertanian dan Perikanan
2	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%	2	2	2	2	2	2	2	10	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%	2	2	2	2	2	2	2	10	Dinas Pertanian dan Perikanan
4	Persentase Pertumbuhan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan	%	2	2	2	2	2	2	2	10	Dinas Pertanian dan Perikanan
25	Pariwisata										
1	Jumlah kegiatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kegiatan	0	4	4	4	4	4	4	24	Dinas Pariwisata
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB	%	2.73	2.74	2.75	2.76	2.78	2.79	2.80	2.80	Dinas Pariwisata
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	236025	243106	250399	262919	276065	289868	304361	1626718	Dinas Pariwisata
4	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB	%	2.73	2.73	2.74	2.77	2.78	2.79	2.80	2.80	Dinas Pariwisata



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	%	0	0	2	2	2	2	2	10	Dinas Pariwisata
6	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	Pelaku usaha	0	0	50	50	50	50	50	250	Dinas Pariwisata
7	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	0	0	3	3	3	3	3	15	Dinas Pariwisata
26	Pertanian										
1	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Produksi Peternakan	%	1	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	6	Dinas Pertanian dan Perikanan
2	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	%	1	1	2	2	2	2	2	10	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	Dinas Pertanian dan Perikanan
4	Persentase Pertumbuhan izin usaha tani	%	2	2	2	2	2	2	2	10	Dinas Pertanian dan Perikanan
5	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	2	2	2	2	2	2	2	10	Dinas Pertanian dan Perikanan
27	Perindustrian										
1	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	3,73	4,50	4,73	5,34	5,50	5,57	5,61	5,61	Dinas Perindustrian
2	Persentase Kepatuhan Industri yang Diawasi Terhadap Regulasi	%	30	70	72	75	77	79	81	81	Dinas Perindustrian
3	Persentase Industri yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	12,32	0	15	17	19	21	23	23	Dinas Perindustrian
28	Keuangan										
1	Penetapan APBD dan P.APD yang tepat waktu	tepat waktu	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	Kontribusi pemanfaatan barang milik daerah terhadap PAD	%	0	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan	%	77,96	79,83	82,15	82,15	82,15	82,15	82,15	82,15	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
29	Kepegawaian										
1	Jumlah sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi	Aplikasi	4	4	4	4	4	4	4	4	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Jumlah pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur	buah	0	10	12	12	12	12	12	70	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	Orang /Kegiatan	0	621	588	597	603	609	615	3633	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30	Pendidikan dan Pelatihan										
1	Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya	Orang /Kegiatan	0	703	828	870	930	930	980	5241	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31	Penelitian dan Pengembangan										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0	0	77	79	81	83	85	85	Badan Penelitian dan Pengembangan
2	Persentase Kualitas Hasil Penelitian yang dilakukan	%	1	1	1	1	1	1	1	5	Badan Penelitian dan Pengembangan



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
32	Inspektorat										
1	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal	%	-	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat
2	Persentase peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal dengan tujuan tertentu	%	-	100	100	100	100	100	100	-	Inspektorat
3	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	%	-	100	100	100	100	100	100	-	Inspektorat
4	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	%	-	100	100	100	100	100	100	-	Inspektorat
5	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	%	-	100	100	100	100	100	100	-	Inspektorat
33	Kesatuan Bangsa dan Politik										
1	Cakupan masyarakat yang sadar dan paham Pancasila dalam mewujudkan Medan Bersih Narkoba	Kelurahan	20	20	20	19	18	17	17	17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Capaian tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Medan sebagai warga negara	%	50	50	55	60	70	80	80	80	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Cakupan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam sinergitas Medan Bersih Narkoba	Kelurahan	20	20	20	19	18	17	17	17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Cakupan masyarakat yang sadar dan peduli Medan Bersih Narkoba	Kelurahan	20	20	20	19	18	17	17	17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	Persentase penanganan konflik di Kota Medan yang ditindaklanjuti	%	70	70	75	80	80	90	90	90	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
34	NON URUSAN										



No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3. ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat



Keselarasan Program Prioritas RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026 dengan Program Prioritas RPJMN 2020-2024

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	PN	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS							Tenaga Kerja; Pangan; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; Perindustrian;							
	PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94,0	95,2	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (%)	2	2	2	2	2	2
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Kelurahan Rawan Pangan yang Tertangani (%)	9,5	14	14	19	19	24
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase daerah rentan Rawan Pangan (%)	8,69	13,04	13,04	17,39	21,75	26,09
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	6,2	5,8	5,5	5,2	5,0	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	88	89	89,5	90	90,5	90,5
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4,0		Indeks Ketahanan Pangan (Skor)	83,5	84	84,5	85	85,5	86
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar asal tumbuhan dan Pangan Siap saji (%)	93	94	95	96	97	98
									PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Inflasi Kota Medan (%)	3.34	3.25	3.20	3.15	3.1	3.1
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	1	2	2	2	2	2



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Pertumbuhan izin usaha tani (%)	2	2	2	2	2	2
	PP	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (%)	2	2	2	2	2	2
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%) (Persen)	<64	<67	<72	<76	<80	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	2	2	2	2	2	2
									PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pertumbuhan Produksi Perikanan (%)	2	2	2	2	2	2
	PP	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan kopera	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi KSP/USP yang terfasilitasi kepemilikan Izin Usaha (Koperasi)	0	52	52	52	52	52
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61,0	62,0	63,0	64,0	65,0	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang aktif (%)	5	10	15	20	25	30
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat (%)	2	4	6	8	10	12
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikasi (IKK) (orang)	140	316	316	316	316	316
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang mandiri (Koperasi)	0	1	1	1	1	1
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah usaha mikro (Pelaku usaha)	575	1385	1385	1385	1385	1385
									PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang (Pelaku usaha)	575	1385	1385	1385	1385	1385



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTJ/SIUP Toko Swalayan (%))	70	75	80	85	90	90
									PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi (%)	0	5	5	5	5	5
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi di Kota Medan (Rupiah)	4.334.020.530.000	4.550.721.560.000	4.778.257.630.000	5.017.170.520.000	5.268.029.040.000	5.531.430.490.000
	PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4,0	4,1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih (%)	14	15	17	18	19	20
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pemenuhan Lowongan pekerjaan (%)	48	50	52	55	58	60
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	5,0	5,5	6,5	7,5	8,1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	0	0	100	0	0	100
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,8	5,0	5,2	5,3	5,5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	4,50	4,73	5,34	5,50	5,57	5,61
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1.689	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Kepatuhan Industri yang Diawasi Terhadap Regulasi (%)	70	72	75	77	79	81
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang terdaftar pada Sistem Informasi Industri Nasional (Persen)	0	15	17	19	21	23
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Peningkatan lembaga hubungan industrial di perusahaan (%)	10	10	10	10	10	10
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5		Persentase perusahaan yang menerapkan syarat-syarat kerja (PP/PKB) (%)	9	10	12	13	14	15
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,2	14,6	15,0	15,3	15,7		Persentase perselisihan /konflik yang diselesaikan (%)	88	90	92	93	94	95
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22,0	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan PDRB Kota Medan dari Sektor Perdagangan (%)	24	24,5	25	25,5	26	26
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Eksport Kota Medan (US \$)	3.153.000	3.468.300	3.815.130	4.196.645	4.589.000	4.589.000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19,0	20,0	20,0	21,0	21,0	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	100	100	100
	PP	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kegiatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Kegiatan)	4	4	4	4	4	4
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18,0		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB (%)	2.74	2.75	2.76	2.78	2.79	2.80
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	243106	250399	262919	276065	289868	304361
										Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB (%)	2.73	2.74	2.77	2.78	2.79	2.80
2	PN	MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING							; Pendidikan; Kesehatan; Sosial; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Kepemudaan dan Olahraga; Perpustakaan; Perdagangan;							
	PP	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7				98	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Pencatatan Sipil : Akte Kelahiran, Akte Perkawinan (%)	76,25	78,25	80,25	85,25	88,25	90
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,10	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan pendaftaran penduduk : KK, KTP, KIA (%)	100	100	100	100	100	100
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2				80	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan (%)	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan pengelolaan profil kependudukan (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase pengendalian penduduk (%)	8.3	11.1	16.6	19.4	27.7	33.3



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (%)	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pembinaan Keluarga Berencana (KB) (%)	70.18	70.68	71.18	71.68	72.18	72.68
	PP	PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL	Proporsi penduduk yang tercapai dalam program jaminan sosial	78,7				98	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyelenggaraan rehabilitasi sosial (%)	0	100	100	100	100	100
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2				80		Persentase Pemahaman Masyarakat Peserta Kegiatan Narkoba (%)	100	100	100	100	100	100
										Jumlah rumah perlindungan sosial yang dibangun (unit)	1	1	1	1	1	1
										Jumlah armada operasional lapangan penertiban PMKS (unit)	0	9	2	2	2	2
										Persentase pembinaan untuk lansia (%)	0	0	0	0	0	0
										Persentase penyediaan sarana dan prasarana rumah singgah (%)	0	100	100	100	100	100
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase peningkatan kualitas penanganan bencana (%)	100	100	100	100	100	1pp
									PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan pemberdayaan sosial (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase penerima beasiswa (%)	0	0	100	100	100	100
	PP	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,0	217,0	205,0	194,0	183,0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (%)	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16,0		Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11,0	10,0	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar (%)	96	97	98	100	100	100
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%)	63,52	66,86	69,83	72,65	74,45	76,43
										Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif (%)	96	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum (%)	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (%)	72	75	78	80	82	85
	PP	PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399,1 388,7 400,4	NA NA NA	NA NA NA	399,7 392,3 406,2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pembinaan perpustakaan (%)	10.81	16.79	21.19	24.56	27.23	29.38
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	34,4 46,6 49	NA NA NA	NA NA NA	35,6 47,4 51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketersediaan Sekolah Kondisi Baik (%)	84.52	85.55	85.87	86.01	86.48	87.13
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase pengembangan kurikulum (%)	0	75.94	76.34	77.90	78.32	79.56
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan (%)	78.56	79.56	80.05	80.69	84.85	85.87
	PP	PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (Skor)	63,93	63,97	64,01	64,05	64,09	64,13
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase capaian indikator pemenuhan hak anak (%)	100	100	100	100	100	100
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	912,116,475	9,127,794,284	9,127,896,233	3 91,33469578	8 91,38627023	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan pengembangan kegiatan masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga (%)	100	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	7,324,481,017	7,350,050,042	2 73,74051922	7,396,592,027	7 74,17747551	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif (%)	100	100	100	100	100	100
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data terpilah (%)	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (%)	10	8	12	13	14	15
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan (%)	12	10	40	42	80	40
	PP	PENGENTASAN KEMISKINAN	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9				40	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyelenggaraan rehabilitasi sosial (%)	0	100	100	100	100	100
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6				50		Persentase Pemahaman Masyarakat Peserta Kegiatan Narkoba (%)	100	100	100	100	100	100
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)					1100000		Jumlah rumah perlindungan sosial yang dibangun (unit)	1	1	1	1	1	1
			Bidang tanah yang didistribusi					7.750.000		Jumlah armada operasional lapangan penertiban PMKS (unit)	0	9	2	2	2	2
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087				56.286.087		Persentase pembinaan untuk lansia (%)	0	0	0	0	0	0
										Persentase penyediaan sarana dan prasarana rumah singgah (%)	0	100	100	100	100	100
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial (%)	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase peningkatan kualitas penanganan bencana (%)	100	100	100	100	100	1pp
									PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan pemberdayaan sosial (%)	100	100	100	100	100	100



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										Persentase penerima beasiswa (%)	0	0	100	100	100	100
	PP	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (buah)	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %	80 %
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University													
			a. Top 200					1								
			b. Top 300					2								
			c. Top 500					3								
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43,0	45,0	47,0	48,0	50,0								
3	PN	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN							Kebudayaan; Perpustakaan;							
	PP	MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA							PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dikelola dan dilestarikan (%)	32.07	32.54	33.02	33.49	33.97	33.97
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase permuseuman yang dikelola (%)	3	5	10	12	15	15
									PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah pengembangan kebudayaan (jumlah)	5	10	12	15	15	20
									PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang terjamah (%)	5	10	12	15	15	20
									PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah (%)	3	5	10	12	15	15
	PP	PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER							PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno (%)	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	PN	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Lingkungan Hidup; Perhubungan; Statistik;							
	PP	INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44		94,63	95	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan ketersediaan infrastruktur pengelolaan persampahan (%)	50	55	60	65	70	75
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8		87	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang terkelola (%)	76	75	74	72	70	70
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase lokasi ruas jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik (%)	75	0	0	0	0	0
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3,05	3,10	3,30	3,60	4,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem jaringan drainase yang terkelola dengan dengan baik (%)	92	95	98	100	100	100
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 11% akses ama)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)								
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0								
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92% penanganan; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan								
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4%, BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1%, BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)								
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4		12,2	15								
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	5,250,189,621	5,518,146,289	5,705,999,842	5,849,863,205	5,849,863,205								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026**

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	PP	INFRASTRUKTUR EKONOMI	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	91	93	95	97	99	100
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)							Persentase pengembangan kapasitas jalan (%)	0.02	5.25	7.43	8.30	9.17	10.04
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)													
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's) KP : Konektivitas Jalan a. Panjang jal													
	PP	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	91	93	95	97	99	100
										Persentase pengembangan kapasitas jalan (%)	0.02	5.25	7.43	8.30	9.17	10.04
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase lokasi ruas jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik (%)	0	76	77	78	79	80
	PP	TRANSFORMASI DIGITAL	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data statistik sektoral yang tersedia secara lengkap dan memadai (%)	100	100	100	100	100	100
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72,6	74,2	79,2	80,7	82,3								
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,5		98,5		100								
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)					75,7								
5	PN	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM							Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Sosial; Lingkungan Hidup;							
	PP	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif (%)	50	60	70	80	90	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55,10	55,20	55,30	55,40	55,50	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (%)	24,9	25	25,1	25,2	25,3	25,4
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks kualitas tutupan lahan (Nilai)	28.26	28.93	29.60	30.27	30.94	31.61
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,60	62,50	63,50	64,50	65,50	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Tingkat kepatuhan usaha dan/atau kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 (%)	50	60	70	80	90	100
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH (%)	50	60	70	80	90	100
									PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)	85	90	90	95	95	100
									PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup (%)	50	60	70	80	90	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase kebijakan/regulasi/strategi pengelolaan persampahan yang tersedia (%)	0	80	80	85	90	100
									PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi RTH publik yang dikelola dengan baik (%)	70	75	80	82	84	87
									PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	100	100	100
	PP	PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0,10	0,10	0,10	0,10		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana (%)	100	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0,34	0,59	0,81	1,00	1,15		Persentase peningkatan kualitas penanganan bencana (%)	100	100	100	100	100	1pp
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanggulangan bencana (%)	100	100	100	100	100	100
6	PN	MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK							Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Sekretariat Daerah; Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; Inspektorat; Kesatuan Bangsa dan Politik;							
	PP	REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA	A KELOLA Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*					85	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kontribusi pemanfaatan barang milik daerah terhadap PAD (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase tterlaksananya Pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan (%)	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD dan P.APBD yang tepat waktu (tepat waktu)	TEPAT WAKTU					
										- (-)	0	0	0	0	0	0
									PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal (%)	100	100	100	100	100	100
										Persentase peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan internal dengan tujuan tertentu (%)	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penyelenggaraan pendampingan dan asistensi (%)	100	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Medan Tahun 2021-2026

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	0	77	79	81	83	85
									PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah sistem informasi kepegawaian daerah yang dimanfaatkan pegawai ASN instansi (Aplikasi)	4	4	4	4	4	4
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Jumlah pegawai ASN instansi yang ditingkatkan kompetensinya (Orang /Kegiatan)	703	828	870	930	930	980
									PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja (Poin)	22	23	24	25	26	27
										Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja (Poin)	15	16	17	18	19	20
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Wilayah (%)	90	92	94	96	98	100
										Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	80	81	82	83	84	85
										Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (%)	90	92	94	96	98	100
									PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)	Cc	B	Bb	Bb	Bb	A
	PP	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,26	0,25	0,24	0,22	0.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Persen)	100	100	100	100	100	100
			Global Terrorism Index					4.24	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100	100
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendirian	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100	100	100



No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026							
		Prioritas Nasional / Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan masyarakat yang sadar dan paham Pancasila dalam mewujudkan Medan Bersih Narkoba (Kelurahan)	20	20	19	18	17	17
									PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Capaian tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Medan sebagai warga negara (%)	50	55	60	70	80	80
									PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Cakupan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam sinergitas Medan Bersih Narkoba (Kelurahan)	20	20	19	18	17	17
									PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan masyarakat yang sadar dan peduli Medan Bersih Narkoba (Kelurahan)	20	20	19	18	17	17
									PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik di Kota Medan yang ditindaklanjuti (%)	70	75	80	80	90	90
									PROGRAM Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Persen)	100	0	0	0	0	0



BAB IX PENUTUP

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, target yang telah ditetapkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari urusan wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan wajib non Pelayanan Dasar, dan urusan pilihan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Medan periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Medan. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap perangkat Daerah. Renstra perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Kota Medan harus konsisten dan Sinergis dengan Dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Renstra yang mengatur Perencanaan Pembangunan Lima Tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di kota Medan yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan, selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026 harus benar benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan.
4. Dalam Pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Medan, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah



- Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan badan Usaha (KPBU), corporate social responsibility (CSR), hibah/ bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan atau sumber sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5. Pasca penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Rencana Strategi (Renstra) baru.
 6. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra /renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 dimungkinkan untuk dilakukan perubahan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan /atau perubahan kebijakan nasional.
 8. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kota Medan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun pemerintahan transisi. Sebagaimana diketahui, masa jabatan Walikota / Wakil Walikota Kota Medan periode 2021-2024 akan berakhir pada tahun 2024, meskipun demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap akan berlaku sesuai periode perencanaan dari tahun 2021-2026. Oleh karena itu bagi Pejabat Daerah yang ditunjuk menjadi Walikota Medan periode 2024-2026 harus tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.